SALINAN

BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan ...

Scanned with CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Kualifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 4 Seri E.);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

dan

BUPATI TANAH DATAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026.

Pasal 1 ...

Scanned with CamScanner

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
11. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

12.Tujuan ....

Scanned with CamScanner

12. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

(1) RPJMD Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : pendahuluan;
b. BAB II : gambaran umum kondisi Daerah;
c. BAB III gambaran keuangan Daerah;
d. BAB IV : permasalahan dan isu strategis Daerah;
e. BAB V : visi, misi, tujuan dan sasaran;
f. BAB VI strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah;
g. BAB VII : kerangka pendanaan pembangunan program perangkat Daerah;
h. BAB VIII : kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
i. BAB IX : Penutup.

(2) Penjabaran ...

Scanned with CamScanner

(2) Penjabaran sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
(2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah;
    b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
    c. terjadi perubahan yang mendasar.
(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku kurang dari 3 (tiga) tahun.
(3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
(4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 6 ...

Scanned with CamScanner

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 24 Agustus 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 24 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

EDI SUSANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR PROVINSI SUMATERA BARAT: 6/47/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR,

VORRY RAHMAD, SH
NIP.19820626 200501 1 008

Scanned with CamScanner

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang memuat kebijakan penyelenggaraan pembangunan perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar untuk jangka waktu lima tahun.

RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD memuat arah dan kebijakan pembangunan yang disertai program yang disertai kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahuun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

cukup jelas

Pasal 2...

Scanned with CamScanner

Pasal 2

cukup jelas

Pasal 3

cukup jelas

Pasal 4

cukup jelas

Pasal 5

cukup jelas

Pasal 6

cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 29

Scanned with CamScanner

DAFTAR ISI

		Hal
DAFTAR ISI		I
DAFTAR TABEL		iii
DAFTAR GAMBAR		viii
DAFTAR GRAFIK		ix
Bab I	**PENDAHULUAN**	**I-1**
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
	1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-3
	1.4. Maksud dan Tujuan	I-5
	1.4.1. Maksud	I-5
	1.4.2. Tujuan	I-5
	1.5. Sistematika Penulisan	I-6
Bab II	**GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**	**II-1**
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
	2.1.1 Letak, Batas dan Luas Wilayah Administrasi	II-1
	2.1.2 Topografi	II-2
	2.1.3 Tutupan Lahan	II-4
	2.1.4 Hidrologi	II-5
	2.1.5 Klimatologi	II-7
	2.1.6 Penggunaan Lahan	II-8
	2.1.7 Rencana Struktur Ruang	II-9
	2.1.8 Rencana Pola Ruang	II-13
	2.1.9 Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Budaya	II-24
	2.1.10 Potensi Pengembangan Wilayah	II-29
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-36
	2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-36
	2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-46
	2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga	II-53
	2.3 Aspek Pelayanan Umum	II-55
	2.3.1 Fokus Urusan Layanan Wajib dan Pilihan	II-57
	2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar	II-71
	2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-85
	2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-89
	2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-89
	2.3.6 Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan	II-92
	2.4 Aspek Daya Saing Daerah	II-93
	2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-93
	2.4.2 Fokus Iklim Berinvestasi	II-93
	2.4.3 Keuangan dan Perbankan	II-94
	2.4.4 Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur	II-95
	2.4.5 Fokus Sumber Daya Manusia	II-95
	2.5 Capaian Tujuan Pembanguan Berkelanjutan	II-96
	2.6 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	II-98
Bab III	**GAMBARAN KEUANGAN DAERAH**	**III-1**
	3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu	III-2
	3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III-36
	3.3. Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026	III-46
	3.4. Kapasitas Rill Keuangan Daerah	III-61
	3.5. Kebijakan Keuangan di Masa Mendatang	III-64
	3.5.1. Pendapatan Asli Daerah	III-64
	3.5.2. Kebijakan Belanja Daerah	III-65
	3.5.3. Kebijakan Pembiayaan	III-67
Bab IV	**PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH**	**IV-1**
	4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
	4.1.1. Permasalahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)	IV-1

	4.1.2. Permasalahan Pembangunan (Aspek Fokus)	IV-5
	4.2 Isu Strategis	IV-11
	4.2.1. Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	IV-11
	4.2.2. Isu Nasional	IV-12
	4.2.3. Isu Strategis Kabupaten Tanah Datar	IV-17
Bab V	**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN**	**IV-1**
	5.1. Visi RPJPD	V-1
	5.2 Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah	V-1
	5.3 RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga	V-2
	5.4 RPJMD Kabupaten Tanah Datar	V-3
	5.4.1 Visi	V-3
	5.4.2 Misi	V-4
	5.5 Tujuan dan Sasaran	V-7
	5.6 Program Unggulan	V-15
Bab VI	**STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH**	**VI-1**
	6.1 Strategi Pembangunan Daerah	VI-2
	6.2 Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan	VI-17
	6.2.1 Wilayah Pengembangan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar	VI 17
	6.2.2 Pengembangan Kawasan Budidaya	VI 17
	6.3 Arah Kebijakan	VI-19
	6.4 Program Pembangunan Daerah	VI-47
Bab VII	**KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH**	VII-1
Bab VIII	**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**	VIII-1
Bab IX	**PENUTUP**	IX-1

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	II-2
Tabel 2.2	Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Perkecamatan di Kabupaten Tanah Datar	II-2
Tabel 2.3	Luas Kelerengan di Kabupaten Tanah Datar	II-3
Tabel 2.4	Luas Tutupan Lahan di Kabupaten Tanah Datar	II-4
Tabel 2.5	Nama Sungai Besar Menurut Lebar dan Panjang Sungai di Kabupaten Tanah Datar	II-6
Tabel 2.6	Luas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tanah Datar	II-7
Tabel 2.7	Penggunaan Lahan di Kabupaten Tanah Datar	II-8
Tabel 2.8	Luas Jenis Tanah di Kabupaten Tanah Datar	II-9
Tabel 2.9	Rencana Struktur Kota-Kota Di Kabupaten Tanah Datar	II-10
Tabel 2.10	Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Tanah Datar	II-14
Tabel 2.11	Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kabupaten Tanah Datar	II-17
Tabel 2.12	Rekapitulasi Kajian Bahaya Banjir Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	II-17
Tabel 2.13	Rekapitulasi Kajian Bahaya Banjir Bandang per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	II-18
Tabel 2.14	Rekapitulasi Kajian Bahaya Cuaca Ekstrim per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	II-19
Tabel 2.15	Rekapitulasi Kajian Bahaya Gempa Bumi per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	II-19
Tabel 2.16	Rekapitulasi Kajian Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	II-20
Tabel 2.17	Rekapitulasi Kajian Bahaya Kekeringan per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	II-21
Tabel 2.18	Rekapitulasi Kajian Bahaya Letusan Gunung Api Marapi per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	II-22
Tabel 2.19	Rekapitulasi Kajian Bahaya Letusan Gunung Api Tandikat per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	II-22
Tabel 2.20	Rekapitulasi Kajian Bahaya Tanah Longsor per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar	II-22
Tabel 2.21	Nama dan Lokasi Benda Cagar Budaya di Kabupaten Tanah Datar	II-23
Tabel 2.22	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Tahun 2016 – 2020	II-35
Tabel 2.23	Penduduk, Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Datar menurut Kecamatan Tahun 2020	II-36
Tabel 2.24	PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020	II-37
Tabel 2.25	PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020	II-38
Tabel 2.26	Distribusi PDRB Atas Harga Berlaku (ADHB Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020)	II-39
Tabel 2.27	PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020	II-40
Tabel 2.28	Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha (persen), 2016 – 2020	II-42

Tabel 2.29	Kondisi Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020	II-46
Tabel 2.30	Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016–2020	II-48
Tabel 2.31	Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020	II-53
Tabel 2.32	Jumlah dan Jenis Grup Kesenian, 2016 – 2020	II-54
Tabel 2.33	Aspek Kebudayaan , 2016-2020	II-54
Tabel 2.34	Aspek Olahraga 2016-2020	II-55
Tabel 2.35	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan, 2016 – 2020	II-57
Tabel 2.36	Persentase Guru yang Sudah Sertifikasi di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020	II-58
Tabel 2.37	Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016–2020	II-59
Tabel 2.38	Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2020	II-61
Tabel 2.39	Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016–2020	II-61
Tabel 2.40	Rasio Medis per 100.000 Penduduk di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2020	II-62
Tabel 2.41	Rasio Paramedis per Satuan Penduduk di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2020	II-63
Tabel 2.42	Perkembangan Kondisi dan Jenis Permukaan Jalan Tahun 2016 – 2020	II-63
Tabel 2.43	Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2020	II-66
Tabel 2.44	Kondisi RLH dan RTLH periode 2016-2020	II-67
Tabel 2.45	Indikator Stabilitas dan Keamanan Lingkungan, 2016-2020	II-68
Tabel 2.46	Tindak Pidana yang ditangani Polres Tanah Datar, 2016 – 2020	II-69
Tabel 2.47	Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), 2016-2020	II-70
Tabel 2.48	Urusan Wajib Non Dasar Ketenagakerjaan, 2016-2020	II-71
Tabel 2.49	Urusan Wajib Non Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016-2020	II-72
Tabel 2.50	Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan	II-73
Tabel 2.51	Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup, 2016-2020	II-74
Tabel 2.52	Indikator Layanan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016-2020	II-75
Tabel 2.53	Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2016-2020	II-76
Tabel 2.54	Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2016-2020	II-76
Tabel 2.55	Aspek Fokus Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berecana, 2016-2020	II-77
Tabel 2.56	Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan, 2016-2020	II-78
Tabel 2.57	Aspek Pelayanan Bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2020	II-79
Tabel 2.58	Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, 2016-2020	II-80
Tabel 2.59	Indikator Layanan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2016-2020	II-80

Tabel 2.60	Indikator Layanan wajib Bidang Penanaman Modal, 2016-2020	II-81
Tabel 2.61	Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga, 2016-2020	II-81
Tabel 2.62	Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung/Sarana Olahraga, 2016 – 2020	II-82
Tabel 2.63	Indikator Layanan Wajib Bidang Statistik, 2016-2020	II-83
Tabel 2.64	Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Kebudayaan, 2016-2020	II-84
Tabel 2.65	Indikator Layanan Wajib Bidang Perpustakaan, 2016-2020	II-84
Tabel 2.66	Indikator Layanan Wajib Bidang Kearsipan, 2016-2020	II-85
Tabel 2.67	Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan, 2016-2020	II-85
Tabel 2.68	Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata, 2016-2020	II-86
Tabel 2.69	Indikator Layanan Pilihan Bidang Pertanian, 2016-2020	II-87
Tabel 2.70	Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan, 2016-2020	II-88
Tabel 2.71	Indikator Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020	II-89
Tabel 2.72	Indikator Sekretariat Dewan, 2016-2020	II-89
Tabel 2.73	Indikator Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan, 2016-2020	II-90
Tabel 2.74	Kinerja Pengelolaan keuangan, 2016-2020	II-91
Tabel 2.75	PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan, 2016-2020	II-92
Tabel 2.76	Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, 2016-2020	II-92
Tabel 2.77	Indikator Pengawasan Tahun, 2019-2020	II-93
Tabel 2.78	Indikator Daya Saing Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, 2016-2020	II-93
Tabel 2.79	Indikator Fokus Iklim Berinvestasi, 2016-2020	II-94
Tabel 2.80	Lembaga Keuangan, Hotel/Penginapan dan Restoran, 2016-2020	II-95
Tabel 2.81	Indikator Fokus Wilayah/Infrastruktur, 2016-2020	II-95
Tabel 2.82	Rasio Kualitas Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Penduduk, 2016-2020	II-96
Tabel 2.83	Rasio Ketergantungan, 2016-2020	II-96
Tabel 2.84	Capaian Indikator TPB	II-97
Tabel 2.85	Target SPM Pendidikan	II-99
Tabel 2.86	Realisasi SPM Pendidikan	II-99
Tabel 2.87	Target SPM Kesehatan	II-100
Tabel 2.88	Realsiasi dan Capaian SPM Kesehatan	II-101
Tabel 2.89	Target Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum	II-106
Tabel 2.90	Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum	II-106
Tabel 2.91	Target Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	II-108
Tabel 2.92	Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat	II-108
Tabel 2.93	Target Indikator SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-109
Tabel 2.94	Realisasi Penerapan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-110
Tabel 2.95	Target SPM Bencana Daerah	II-112
Tabel 2.96	Realisasi Penerapan SPM Bencana daerah	II-113
Tabel 2.97	Target Penerapan SPM Sosial	II-114

Tabel 2.98	Realisasi Penerapan SPM Sosial	II-115
Tabel 2.99	Perhitungan Penyandang Disabilitas yang memperoleh Rehabilitas Sosisal Luar Panti	II-115
Tabel 2.100	Perhitungan Anak Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Luar Panti	II-115
Tabel 2.101	Perhitungan Lanjut Usia Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Luar Panti	II-116
Tabel 2.102	Perhitungan Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Luar Panti	II-116
Tabel 2.103	Perhitungan Korban Bencana Kabupaten yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	II-117
Tabel 2.104	Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	II-118
Tabel 2.105	Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020	II-129
Tabel 3.1	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020	III-2
Tabel 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, Tingkat Capaian Realisasi, Tingkat Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Tahun 2016-2020	III-5
Tabel 3.3	Kontribusi Masing-Masing Komponen Dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2020	III-6
Tabel 3.4	Realisasi Dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2016 – 2020 Berdasarkan Format APBD Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017	III-7
Tabel 3.5	Kontribusi Masing-Masing Komponen Dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2020 Dengan Mengacu Kepada Struktur APBD Pada PP Nomor 12 tahun 2019	III-8
Tabel 3.6	Perbandingan Antara Anggaran Pada APBD Dengan Realisasi PAD, Tingkat Capaian, Tingkat Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi 2016 – 2020	III-9
Tabel 3.7	Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020	III-9
Tabel 3.8	Target dan Realisasi Komponen Pajak Daerah Tahun 2016-2020	III-11
Tabel 3.9	Tingkat Capaian, Proporsi dan Pertumbuhan Komponen Pajak Daerah Tahun 2016-2020	III-12
Tabel 3.10	Target Dan Realisasi Belanja Komponen Retribusi Daerah 2016-2020	III-14
Tabel 3.11	Tingkat Capaian, Proporsi dan Pertumbuhan Komponen Retribusi Daerah Tahun 2016-2020	III-14
Tabel 3.12	Target dan Realisasi Komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2016-2020	III-16
Tabel 3.13	Tingkat Capaian, Proporsi dan Pertumbuhan Komponen Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2016-2020	III-17
Tabel 3.14	Target dan Realisasi Komponen Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2016-2020	III-19
Tabel 3.15	Tingkat Capaian, Proporsi dan Pertumbuhan Komponen Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2016-2020	III-21
Tabel 3.16	Tingkat Capaian, Proporsi dan Pertumbuhan Komponen Dana Perimbangan Daerah Tahun 2016-2020	III-24
Tabel 3.17	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2016-2020	III-26

Tabel 3.18	Target dan Realiasasi Belanjua Daerah, Tingkat Capaian Realiasi, Tingkat Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Tahun 2016-2020	III-28
Tabel 3.19	Kontribusi Komponen Belanja Daerah Tahun 2016-2020	III-28
Tabel 3.20	Realiasi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Selama Tahun 2016-2020	III-30
Tabel 3.21	Realisasi Pembiayaan Dan Rata-Rata Pertumbuhan Selama Tahun 2016-2020	III-32
Tabel 3.22	Neraca Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar Dan Rata-Rata pertumbuhan Masing-Masing Komponen Neraca Tahun 2016-2020	III-34
Tabel 3.23	Perhitungan Rasio Keuangan Tahun 2016-2020	III-36
Tabel 3.24	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020	III-39
Tabel 3.25	Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tanah Datar 2016-2020	III-40
Tabel 3.26	Penutup Defisit Rill Kabupaten Tanah Datar 2016-2020	III-43
Tabel 3.27	Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020	III-45
Tabel 3.28	Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026	III-48
Tabel 3.29	Proyeksi Proporsi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2026	III-49
Tabel 3.30	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026	III-53
Tabel 3.31	Proyeksi Pertumbuhan dan Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026	III-54
Tabel 3.32	Proyeksi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2026	III-57
Tabel 3.33	Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026	III-58
Tabel 3.34	Kapasitas Rill Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026	III-62
Tabel 5.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	V-10
Tabel 6.1	Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026	VI-6
Tabel 6.2	Arah Kebijakan Kabupaten Tanah Datar	VI-20
Tabel 6.3	Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif	VI-48
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar	VII-2
Tabel 7.2	Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tanah Datar	VII-4
Tabel 8.1	Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026	VIII-2
Tabel 8.2	Indikator Kinerja) Daerah sebagai Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 (Permendagri Nomor 18/2020)	VIII-6

DAFTAR GAMBAR

		Hal
Gambar 1.1	Proses Penyusunan RPJMD	I-3
Gambar 1.2	Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/ Daerah	I-4
Gambar 1.3	Hubungan antara RPJMD Kabupaten Tanah Datar dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I-5
Gambar 2.1	Topografi Kabupaten Tanah Datar	II-3
Gambar 2.2	Peta Tutupan Lahan	II-5
Gambar 2.3	Peta Hidrologi Kabupaten Tanah Datar	II-6
Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Kabupaten Tanah Datar	II-8
Gambar 2.5	Peta Jenis Tanah di Kabupaten Tanah Datar	II-9
Gambar 2.6	Peta Sistem Wilayah Perkotaan Kabupaten Tanah Datar	II-13
Gambar 2.7	Peta Kawasan Pertanahan	II-29
Gambar 2.8	Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tanah Datar	II-35
Gambar 2.9	Skema Pelaksanaan Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	II-108
Gambar 3.1	Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah	III-47
Gambar 3.2	Kerangka Pemikiran Proyeksi Belanja Daerah	III-52
Gambar 3.3	Analisa Proyeksi Pembiayaan Daerah	III-55
Gambar 4.1	Empat Pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024	IV-13

DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 2.1	Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Tanah Datar menurut lapangan Usaha, 2016-2020	II-38
Grafik 2.2	Laju Inflasi Tahun 2016–2020	II-41
Grafik 2.3	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat, Nasional dan Tanah Datar Tahun 2016–2020	II-42
Grafik 2.4	PDB dan PDRB Perkapita menurut Harga Berlaku (juta rupiah), 2016–2020	II-43
Grafik 2.5	Indeks Gini, 2016-2020	II-44
Grafik 2.6	Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020	II-44
Grafik 2.7	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan	II-45
Grafik 2.8	Angka Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	II-45
Grafik 2.9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2016–2020	II-47
Grafik 2.10	IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat, 2020	II-48
Grafik 2.11	Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020	II-49
Grafik 2.12	Harapan Lama Sekolah, 2016-2020	II-50
Grafik 2.13	Angka Kematian Bayi Kelahiran Bayi dan Angka Kematian Ibu Kabupaten Tanah datar Tahun 2016-2020	II-51
Grafik 2.14	Persentase Prevalensi Stunting Tahun 2016-2020	II-52
Grafik 2.15	Umur Harapan Hidup Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020	II-52
Grafik 2.16	Perkembangan Jumlah Sekolah di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016–2020	II-59
Grafik 2.17	Perkembangan Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten Tahun 2016– 2020	II-64
Grafik 2.18	Persentase kawasan kumuh 2016-2020	II-68
Grafik 2.19	Rasio Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan, 2016 – 2020	II-77
Grafik 2.20	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin, 2016-2020 Persentase Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Pemerintah	II-88
Grafik 3.1	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020	III-3
Grafik 3.2	Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020	III-5
Grafik 3.3	Rata-rata Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020	III-6
Grafik 3.4	Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2016-2021	III-8
Grafik 3.5	Perbandingan Kontribusi Komponen PAD Tahun 2016-2020	III-10
Grafik 3.6	Perbandingan Komponen Retribusi Daerah Terhadap Total Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2016-2020	III-15
Grafik 3.7	Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Terhadap Total Pendapatan Tahun 2016-2020	III-18
Grafik 3.8	Kontribusi Lain-lain PAD yang Sah Terhadap Total Pendapatan Tahun 2016-2020	III-22

Grafik 3.9	Rata-rata Kontribusi Komponen Belanja Daerah Tahun 2016-2020	III-29
Grafik 3.10	Perbandingan Tidak Langsung dan Belanja Langsung Tahun 2016-2020	III-31
Grafik 3.11	Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Tahun 2022-2026	III-50
Grafik 3.12	Proyeksi Pertumbuhan Belanja Tahun 2022-2026	III-55

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menandai dimulainya babak baru penyelenggaraan tata pemerintahan di Indonesia, yaitu implementasi otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Berlandaskan azas desentralisasi pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat mendelegasikan hampir seluruh kewenangannya kepada pemerintah Kabupaten/Kota kecuali enam bidang urusan yaitu; politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama.

Keberadaan regulasi ini semakin memperkuat peran strategis daerah dalam peranannya untuk pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah. Dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 juga diatur kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara luas, sistematis dan mengedepankan sinergisitas melalui penetapan mekanisme evaluasi yang terstruktur dan berkala.

Perencanaan pembangunan merupakan aspek yang fundamental dalam pembangunan disamping aspek pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi. Perencanaan berkualitas akan membawa keberhasilan pembangunan sebaliknya perencanaan pembangunan yang buruk berpotensi menghadirkan kegagalan (inefisiensi dan inefektifitas) dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan di Indonesia adalah sebuah sistem dimana komponen-komponen yang membentuk kerangka perencanaan pembangunan saling terkait satu sama lain. Perencanan pembangunan daerah misalnya merupakan bagian integral atau satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan yang dilaksanakan di daerah tidak terlepas dari konsep pembangunan nasional oleh karena itu penyusunan program pembangunan daerah wajib mengacu pada rencana pembangunan nasional baik rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah.

Sistem Perencanaan Pembangunan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat penjabaran visi dan misi kepala daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen RPJMD ini disusun mengacu kepada visi dan misi kepala daerah terpilih sebagai salah satu *ingredients* dari “kontrak politik” dengan pemilih pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah secara langsung. RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020.

Penyusunan RPJMD dimulai dari penyusunan rancangan teknokratik, rancangan awal, penyusunan rancangan, penyelenggaraan musrenbang, penyusunan dan penetapan RPJMD. Proses ini berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan sampai akhirnya menjadi dokumen perencanaan daerah.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021–2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi, Kualifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025;

20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012–2032;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2011 – 2031;

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJPN, RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPD Kabupaten Tanah Datar pada periode yang sama. Tujuan pembangunan yang direncanakan disetiap tingkat pemerintahan tersebut merupakan langkah pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan amanat UUD 1945 yaitu : "...melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Pemerintah berperan mencapai tujuan Negara ini sesuai dengan kewenangan dan urusan pemerintahan daerah. Tujuan pembangunan tersebut juga perlu diarahkan untuk dapat memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang disepakati bersama PBB guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan yang terdiri dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang dibagi dalam 4 pilar, meliputi pilar ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola. Rencana pembangunan juga perlu diintegrasikan dengan rencana penganggaran untuk efisiensi pembangunan sehingga program prioritas yang dipilih dapat optimal dalam mencapai tujuan pembangunan.

RPJMD menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berada di lingkup pemerintahan daerah yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Gambar 1.1 memperlihatkan alur penyusunan RPJMD dan keterkaitan dengan dokumen perencanaan daerah lainnya.

Gambar 1.1.
Proses Penyusunan RPJMD

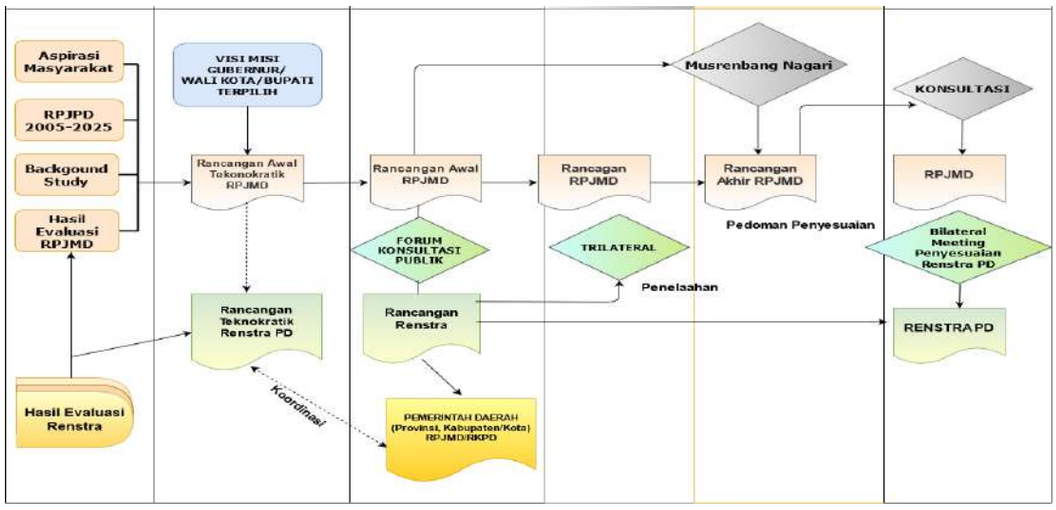

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada saat ini dalam tahapan persiapan penyusunan RPJMD.

Selanjutnya RPJMD akan diselaraskan dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi dengan memperhatikan dan menelaah berbagai dokumen perencanaan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dalam rangka memperkuat dan mendukung upaya-upaya pembangunan yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan sehingga terjadi sinergi yang kuat dalam proses pembangunan yang lebih komprehensif.

Adapun hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya dapat dilihat dari Gambar 1.2 :

Gambar 1.2
Hubungan RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Nasional/Daerah

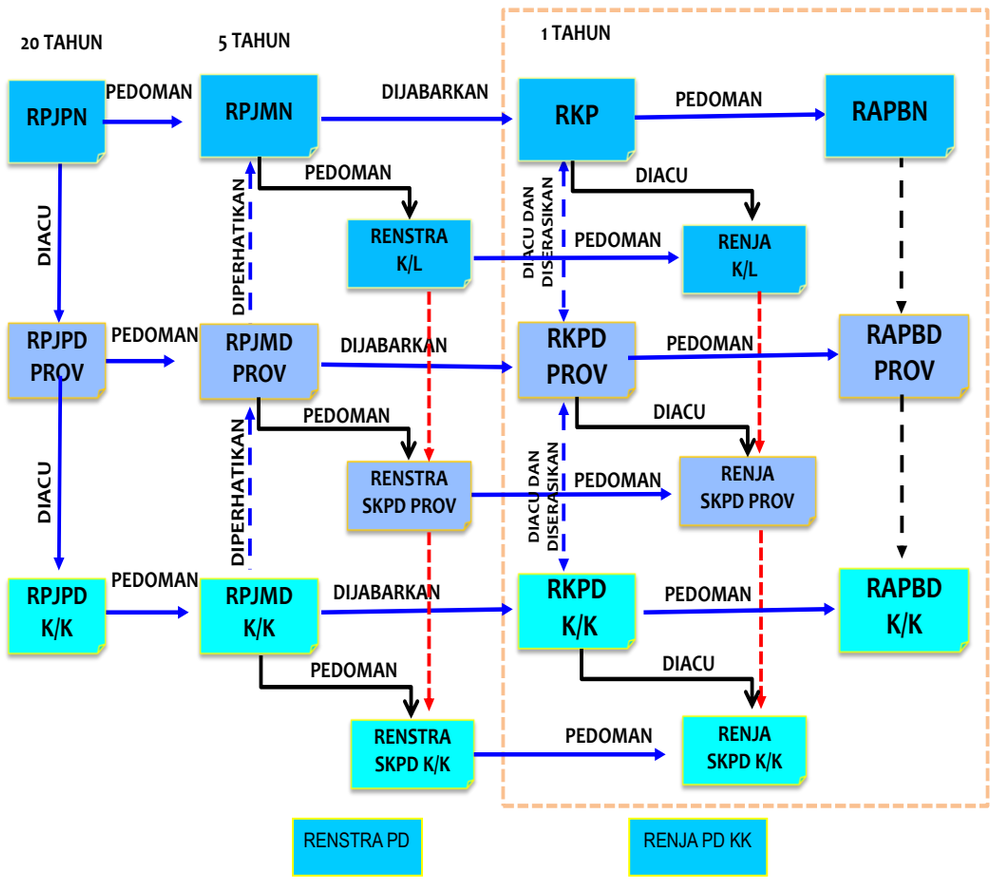

Skema hubungan antara RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 dengan dokumen lainnya dapat dilihat dalam Gambar 1.3 :

Gambar 1.3
Hubungan antara RPJMD Kabupaten Tanah Datar dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

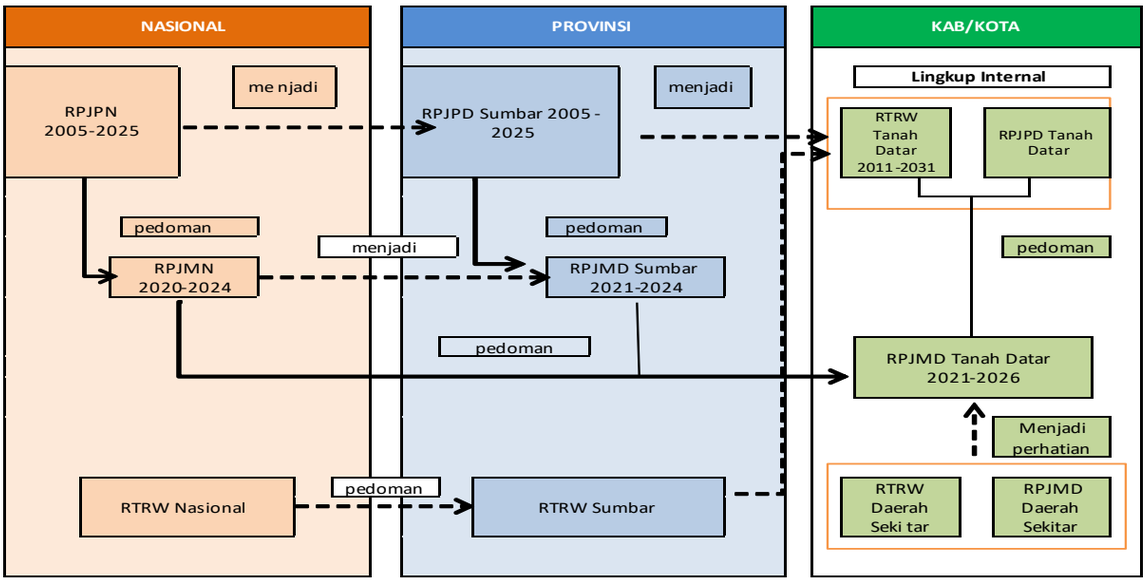

Secara lebih terperinci hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

Pertama, dokumen perencanaan di tingkat nasional baik berupa RPJP Nasional, RPJMN, RTRW merupakan pedoman yang akan digunakan dalam proses penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Tanah Datar. Pada dokumen-dokumen tersebut akan dipilah isu-isu strategis yang berhubungan dengan daerah khususnya Kabupaten Tanah Datar.

Kedua, dokumen ini pun disusun dengan memperhatikan dokumen atau kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait di daerah seperti: RPJPD, dokumen Rencana Tata Ruang dan Wilayah maupun dokumen-dokumen studi sektoral yang pernah dilakukan.

Ketiga, dokumen RPJMD sekitar yang berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar juga diperhatikan dalam rangka membangun sinergi pembangunan antar daerah, maupun dalam rangka pembangunan kawasan.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1 Maksud

RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman pembangunan daerah bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Tanah Datar sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan daerah,

1.4.2 Tujuan

RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2021-2026 ini disusun dengan tujuan :

1. Menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021-2026 yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing perangkat daerah Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025.

2. Sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan 5 (lima) tahun ke depan yang berkelanjutan terhadap pembangunan jangka panjang;
3. Sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan sistematika, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Datar.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini menjelaskan tentang kondisi Kabupaten Tanah Datar secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas diantaranya adalah: (1) Aspek geografi dan demografi, (2) Aspek kesejahteraan masyarakat, (3) Aspek pelayanan umum, (4) Aspek daya saing daerah, (5) Capaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan (6) Penerapan standar pelayanan minimal.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut: (1) Kinerja keuangan masa lalu, (2) Kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, (3) Kerangka pendanaan serta (4) Kapasitas riil keuangan daerah.

Bab IV Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Bab ini memuat berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Bab ini menjelaskan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang disertai dengan tujuan dan sasarannya.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan

Bab ini memuat dan menjelaskan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai program pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar dalam jangka menengah.

Bab VII **Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab VIII **Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Pada Bab ini diuraikan penetapan indikator kinerja daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

Bab IX **Penutup**

Bab ini berisi penjelasan hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RPJMD secara terpadu dan berkelanjutan.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Tanah Datar sebagai **Luhak Nan Tuo** merupakan asal mula orang Minangkabau yang menyebar ke Luhak Agam dan Luhak Limapuluh Kota. Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris karena kurang lebih 70% penduduknya bergerak di sektor pertanian baik pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan maupun perikanan yang semuanya telah berjalan secara turun temurun. Sektor lain yang berkembang pada dasarnya juga berbasis pertanian seperti industri kecil dan industri pengolahan di samping juga sektor pariwisata.

Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam masyarakatnya dikenal sangat kuat memegang teguh ajaran agama dan adat Minangkabau dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini tercermin dari filosofi **"Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah"**. Filosofi inilah yang menjadi landasan kehidupan masyarakat termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Tanah Datar meliputi beberapa aspek yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut :

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Letak dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis, Kabupaten Tanah Datar terletak pada 00°17" - 00°39" Lintang Selatan dan 100°19" - 100°51" Bujur Timur. Berdasarkan letak administrasinya, Kabupaten Tanah Datar mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

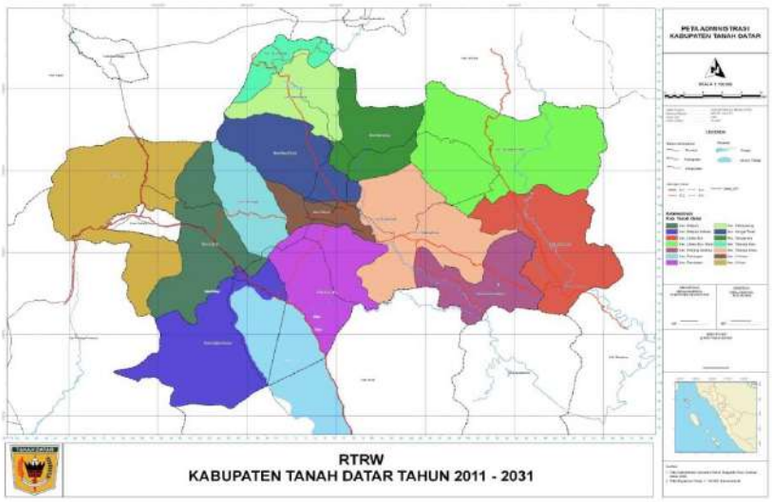

Batas	Kabupaten/Kota
Utara	Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota
Selatan	Kabupaten Solok
Barat	Kabupaten Padang Pariaman
Timur	Kota Sawahlunto dan Kabupaten Sijunjung

Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas wilayah 1.377,17 km^2 atau 137.716,76 ha, atau sekitar 3,26% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat (42.297,30 km^2) dan menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai kabupaten dengan wilayah paling kecil kedua di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Padang Pariaman. Secara administratif Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 14 kecamatan, 75 nagari dan 395 jorong. Kecamatan paling luas adalah Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 19.931,52 Ha atau 14,47% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar sedangkan

kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tanjung Baru dengan luas 2.650 Ha atau 1,91% dari luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Komposisi luas wilayah berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Luas wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

No.	Kecamatan	Luas	
		Ha	%
1	X Koto	14.865,38	10,79
2	Batipuh	10.116,97	7,35
3	Batipuh Selatan	16.676,39	12,11
4	Pariangan	5.829,15	4,23
5	Rambatan	12.939,73	9,40
6	Lima Kaum	3.063,52	2,22
7	Tanjung Emas	12.876,24	9,35
8	Padang Ganting	6.861,97	4,98
9	Lintau Buo	11.067,29	8,04
10	Lintau Buo Utara	19.931,52	14,47
11	Sungayang	6.836,74	4,96
12	Sungai Tarab	8.386,35	6,09
13	Salimpaung	5.635,10	4,09
14	Tanjung Baru	2.630,40	1,91
Jumlah		**137.716,76**	**100,00**

Sumber: Dinas PUPRP Tahun 2020

2.1.2 Topografi

Kondisi Topografi Kabupaten Tanah Datar berada di sekitar kaki Gunung Merapi, Gunung Singgalang dan Gunung Sago serta diperkaya pula dengan 5 sungai. Danau Singkarak yang cukup luas sebagian diantaranya merupakan wilayah Kabupaten Tanah Datar yakni terletak di Kecamatan Batipuh Selatan dan Rambatan.

Tinggi wilayah Kabupaten Tanah Datar dari permukaan laut dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Perkecamatan di Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Klasifikasi (Mdpl)				
		200-800	801-1400	1401-2000	2001-2600	2601-3200
1	X Koto	2.397	9.781	2.166	903	117
2	Batipuh	4.412	4.785	624	306	52
3	Batipuh Selatan	8.613	7.685	921	-	-
4	Pariangan	1.846	3.012	698	244	30
5	Rambatan	1.3591	39	-	-	-
6	Lima Kaum	2.809	255	-	-	-
7	Tanjung Emas	12.592	284	-	-	-
8	Padang Ganting	6.862	-	-	-	-
9	Lintau Buo	11.259	92	-	-	-
10	Lintau Buo Utara	13.112	4.823	1.134	136	-
11	Sungayang	3.924	2.798	115	-	-
12	Sungai Tarab	3.232	3.569	1.001	430	155
13	Salimpaung	11.21	4.028	421	65	
14	Tanjung Baru	1.191	1.352	107	-	-
Total Luas		86.960	42.502	7.187	2.083	354
Persentase		62,52%	30,56%	5,17%	1,50%	0,25%

Sumber: Dinas PUPRP Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tinggi wilayah yang paling besar adalah 200-800 mdpl dengan luas 86.960 Ha atau 62,52% dari total luas keseluruhan Kabupaten Tanah Datar sedangkan tinggi wilayah yang paling kecil adalah 2601-3200 mdpl dengan luas 354 ha atau 0,25% dari total luas keseluruhan Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya Gambar 2.1. menggambarkan topografi Kabupaten Tanah Datar.

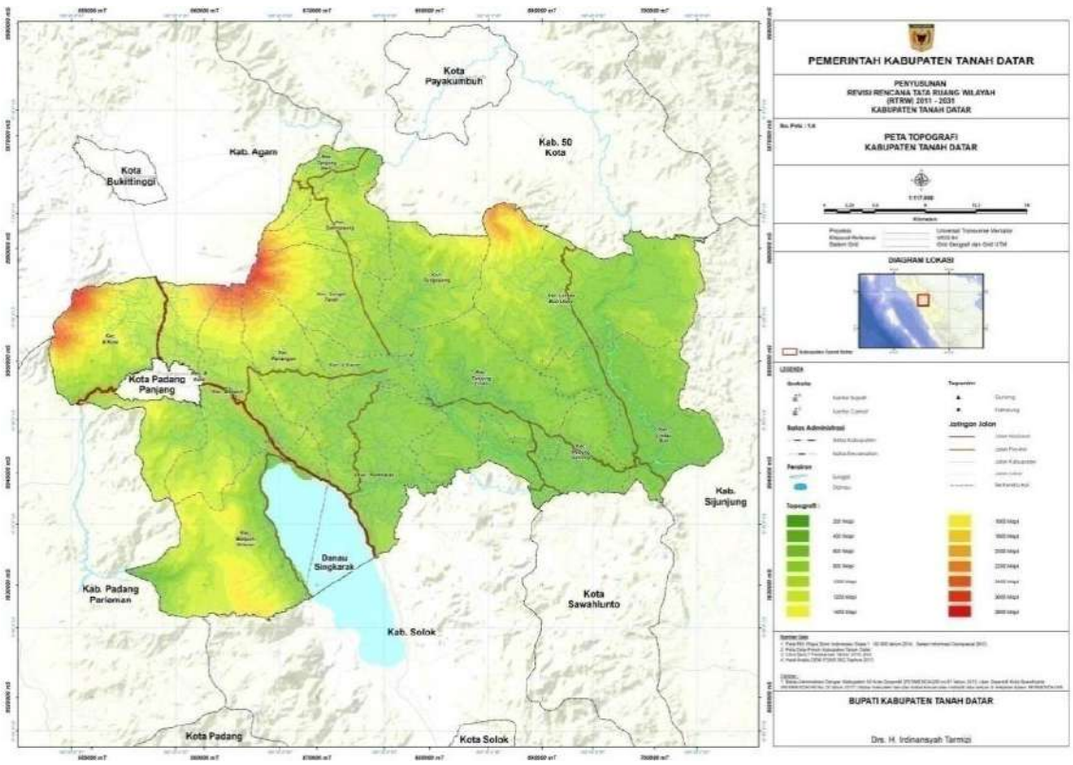

Gambar 2.1 Topografi Kabupaten Tanah Datar

Kabupaten Tanah Datar mempunyai kelerengan yang beragam. Terdapat 7 (tujuh) jenis kelerengan yang tersebar di seluruh Kabupaten Tanah Datar. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3
Luas Kelerengan di Kabupaten Tanah Datar

No	Kelas Lereng	Nilai	Klasifikasi
1	0-3%	3.943,21	Datar
2	3-8%	2.228,69	Landai
3	8-15%	11.188,83	Agak Miring
4	15-30%	23.853,92	Miring
5	30-45%	25.951,31	Agak Curam
6	45-65%	51.165,93	Curam
7	>65%	12.564,99	Sangat Curam
8	Danau	6.819,88	
Total		**137.716,76**	

Sumber: Dinas PUPRP Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa luas kelerengan yang paling besar adalah kelerengan dengan interval 45-65% dengan luas daerah yaitu 51.165 Ha dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tanah Datar sedangkan untuk luas kelerengan paling kecil adalah kelerengan dengan interval 3-8%

dengan luas daerah 2.153 Ha dari total luas keseluruhan luas wilayah Kabupaten Tanah Datar.

2.1.3 Tutupan Lahan

Tutupan lahan di Kabupaten Datar terdiri dari 10 jenis tutupan lahan, dengan luas keseluruhan Tutupan Lahan nya adalah 137.716,76 Ha, lalu dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Luas Tutupan Lahan di Kabupaten Tanah Datar

Kecamatan	Klasifikasi Tutupan Lahan										
	Danau/Situ	Empang	Hutan Rimba	Perkebunan/Kebun	Permukiman dan Tempat Kegiatan	Rawa	Sawah	Semak Belukar	Sungai	Tegalan/ Ladang	Total
X Koto	6		9.292	36	304		2.064	1.681	20	1.960	15.364
Batipuh		2	4.768	1.263	269		2.298	1.183	16	379	10.178
Batipuh Selatan	3.558	2	10.063	1.433	145		579	203	14	1.221	17.218
Pariangan			2.745	424	196		2.263	177		24	5.829
Rambatan	3.277		904	3.605	364		1.988	242	24	3.224	13.630
Lima Kaum			0	779	463		1.691	26	0	105	3.064
Tanjung Emas			6.496	1.967	330		1.814	1.192	51	1.026	12.876
Padang Ganting	7		2.326	1.076	97		1.475	657	55	1.169	6.862
Lintau Buo	6		4.880	2.400	450	36	1.745	1.084	115	634	11.350
Lintau Buo Utara			9.918	3.405	392		2.694	1.874	67	855	19.205
Sungayang	1		4.267	644	178		1.418	309	10	12	6.837
Sungai Tarab		2	2.920	1.140	372		2.713	891		349	8.386
Salimpaung	5		1.630	129	334		1.381	983		1.173	5.635
Tanjung Baru	1		312	243	120		808	402	2	762	2.650
Total	**6.861**	**6**	**60.521**	**18.543**	**4.015**	**36**	**24.932**	**10.903**	**374**	**12.893**	**137.717**

Sumber: Dinas PUPRP Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tutupan lahan yang memiliki daerah paling luas adalah Hutan Rimba dengan luas kawasan yaitu 60.521 Ha dari luas tutupan lahan yang ada di Kabupaten Tanah Datar, sedangkan tutupan lahan yang memiliki luasan paling sedikit adalah daerah Empang dengan luas kawasan 6 Ha dari total luas Tutupan Lahan yang ada di Kabupaten Tanah Datar.

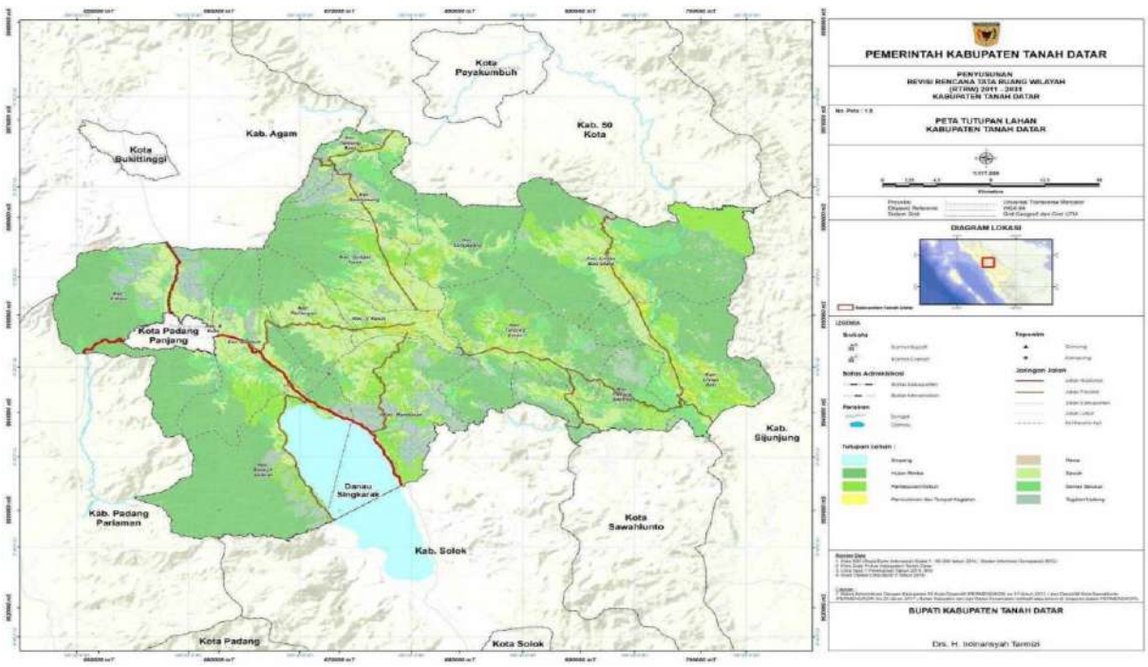

Gambar 2.2 Peta Tutupan Lahan

2.1.4 Hidrologi

Hidrologi merupakan data yang berkaitan dengan kondisi keairan baik air permukaan maupun air tanah yang ada pada suatu wilayah. Kondisi hidrologi suatu kawasan sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, jenis batuan, jenis tanah serta tingkat kelerengan dan kondisi tutupan lahan. Kondisi hidrologi yang ada di Kabupaten Tanah Datar cukup baik dengan pola aliran bersifat dendritik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sumber air baik di Kabupaten Tanah Datar.

2.1.4.1 Air Permukaan

Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan seperti mata air, danau, sungai dan rawa. Potensi air permukaan dipengaruhi oleh kondisi topografi, jenis batuan dan material penyusun tanah, penggunaan lahan, curah hujan dan aktifitas manusia. Potensi air permukaan sebagian besar berasal dari berbagai mata air yang banyak terdapat di kawasan ini mengalir melalui sungai-sungai kecil di sekitar perbukitan dengan pola aliran berbentuk radial serta berbentuk dendritik untuk cabang-cabang sungai besar.

Kabupaten Tanah Datar memiliki 5 (lima) buah sungai besar dan 208 (dua ratus delapan) buah sungai kecil yang tersebar di seluruh kecamatan. Kebanyakan dari air sungai-sungai tersebut bersumber dari lereng-lereng gunung seperti; Gunung Marapi, Gunung Singgalang, Gunung Sago serta Gugusan Bukit Barisan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanah Datar merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalir ke arah timur yaitu DAS Indragiri dengan pola dendritik, namun untuk sungai disekitar Danau Singkarak pola aliran sungai yang terbentuk adalah pola rectangular dengan sungai utama adalah Batang Ombilin dan sebagian mengalir dengan pola dendritik terutama cabang-cabang sungai besar.

Untuk jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.3 berikut:

Gambar 2.3 Peta Hidrologi Kabupaten Tanah Datar

Sungai-sungai yang mengalir di Kabupaten Tanah Datar dapat diklasifikasikan berdasarkan ukurannya yaitu lebar dan panjang sungai. Tabel 2.5. memuat nama-nama sungai berdasarkan lebar dan panjang sungai.

Tabel 2.5
Nama Sungai Besar Menurut Lebar dan Panjang Sungai
Di Kabupaten Tanah Datar

No	Nama Sungai	Wilayah yang Di Aliri	Lebar Sungai (m)	Panjang Sungai (m)
1	Batang Anai	Kecamatan X Koto	8	99
2	Batang Selo	Kecamatan Tanjung Emas	10	59.880
3	Batang Sinamar	Kecamatan Lintau Buo	10	160.399
4	Batang Ombilin	Kecamatan Rambatan	10	25.393
5	Batang Sumpur	Kecamatan Batipuh Selatan	8	1.383

Sumber: Dinas PUPRP Tahun 2020

2.1.4.2 Air Tanah

Air tanah terdiri dari air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umumnya digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur gali. Potensi air tanah dapat diketahui dari kedalaman sumur gali masyarakat dan sifat fisik tanah/batuan dalam kaitannya sebagai pembawa air.

Masyarakat di Kabupaten Tanah Datar sebagian kecil masih menggunakan sumur gali sebagai cadangan persediaan air bersih pada saat air PDAM mengalami gangguan. Masyarakat yang menggunakan sumur gali sebagai sumber air bersih tersebar di Kabupaten Tanah Datar khususnya daerah permukiman.

2.1.4.3 Daerah Aliran Sungai (DAS)

Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar terbagi menjadi dua daerah aliran sungai yaitu DAS Indragiri dan DAS Anai yang membentang di Kabupaten Tanah Datar sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.6
Luas Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Tanah Datar

No.	DAS	Luas	
		Ha	%
1	DAS Anai	15.675,64	11
2	DAS Indragiri	122.041,12	89
Jumlah		**137.716,76**	**100**

Sumber: Dinas PUPRP Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Daerah Aliran Sungai yang berada di Kabupaten Tanah Datar ada dua yaitu DAS Indragiri dan DAS Anai dengan DAS yang paling luas adalah DAS Indragiri dengan luas kawasan 122.235 Ha atau 87,88 % dari total luas aliran sungai sedangkan luas DAS Anai hanya 16.851 Ha atau 12,12% dari total keseluruhan luas DAS di Kabupaten Tanah Datar.

2.1.5 Klimatologi

Kabupaten Tanah Datar mempunyai sebaran curah hujan antara 1.750–4.000 mm per tahun dengan sebaran wilayahnya sebagai berikut (Tabel 2.4):

a. Wilayah dengan curah hujan antara 3.000–4.000 mm per tahun tanpa ada bulan kering meliputi wilayah di sekitar pinggang Gunung Marapi yang meliputi wilayah di Kecamatan X Koto dan Pariangan.
b. Wilayah dengan curah hujan antara 2.500–3.000 mm per tahun dengan bulan kering kurang dari 2 bulan, meliputi wilayah di sekitar Kecamatan Pariangan, Lima Kaum, Lintau Buo, Batipuh dan Batipuh Selatan.
c. Wilayah dengan curah hujan antara 2.000–2.500 mm per tahun dengan bulan kering 4 sampai 6 bulan, meliputi wilayah di sekitar Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Salimpaung, Sungai Tarab, Sungayang dan bagian utara kecamatan Tanjung Emas.
d. Wilayah dengan curah hujan antara 1.750–2.000 mm per tahun, meliputi wilayah di sekitar Kecamatan Batipuh, X Koto dan Rambatan.

Berdasarkan peta agroklimat Provinsi Sumatera Barat (zona iklim menurut Oldeman) Kabupaten Tanah Datar mempunyai beberapa zona agroklimat, yaitu:

a. Wilayah bagian barat mempunyai zona iklim A dan B1 dimana zona iklim A mempunyai bulan basah lebih dari 9 bulan/tahun dan bulan kering kurang dari 2 bulan/tahun sedangkan zona iklim B1 mempunyai bulan basah 7-9 bulan/tahun dan bulan kering kecil 2 bulan/tahun (bulan basah: curah hujan besar dari 200 mm/bulan dan bulan kering: curah hujan kecil dari 100 mm/bulan).

b. Wilayah bagian tengah dan utara mempunyai zona iklim C1 dengan bulan basah 5-6 bulan/tahun dan bulan kering kurang dari 2 bulan /tahun, dan zona iklim D1 dengan bulan basah 3-4 bulan/tahun dengan bulan keringnya kurang 2 bulan/tahun.

c. Wilayah bagian timur dan selatan mempunyai zona iklim D2 dengan bulan basah 3-4 bulan/tahun dengan bulan kering 2-3 bulan /tahun.

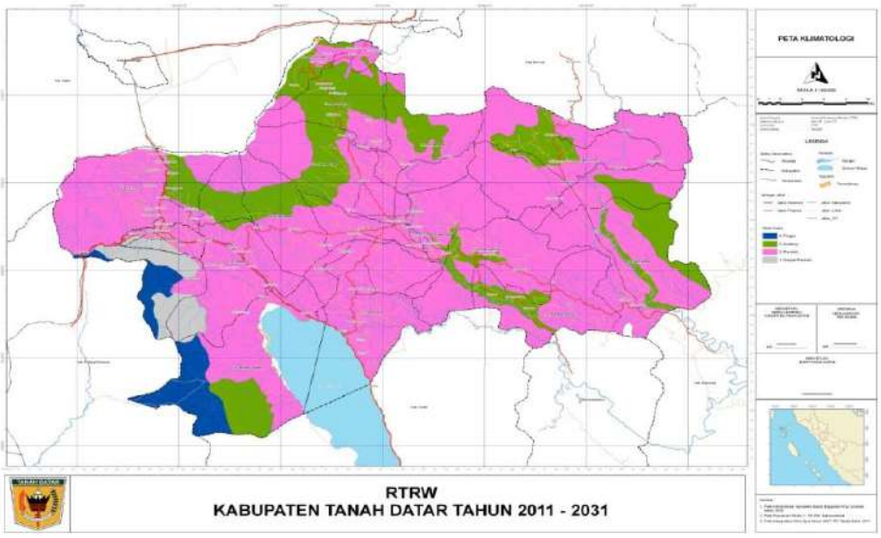

Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Tanah Datar

2.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari Danau/Situ, Empang, Hutan Rimba, Perkebunan/Kebun, Permukiman dan Tempat Kegiatan, Rawa, Sawah, Semak Belukar, Sungai, Tegalan/Ladang data pada tahun 2021, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Pengunaan Lahan di Kabupaten Tanah Datar

No	Penggunaan Lahan	Luas
1	Danau/Situ	6.858,93
2	Empang	6,01
3	Hutan Rimba	60.250,48
4	Perkebunan/Kebun	18.184,55
5	Permukiman dan Tempat Kegiatan	3.989,06
6	Rawa	35,21
7	Sawah	24.849,17
8	Semak Belukar	10.828,36
9	Sungai	366,28
10	Tegalan/Ladang	12.348,69
Total Luas		137.716,76

Sumber : Dinas PUPRP Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa untuk penggunaan lahan di Kabupaten Tanah Datar yang paling luas yaitu Hutan Rimba dengan luas 60.250,48 Ha. Sementara itu penggunaan lahan yang paling sedikit yaitu empang dengan luasan 6.01 Ha.

2.1.6.1 Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di ada di Kabupaten Tanah Datar terdiri dari 5 jenis tanah yaitu Andosol, Gleisol, Kambisol, Mediteran dan Podsolik.

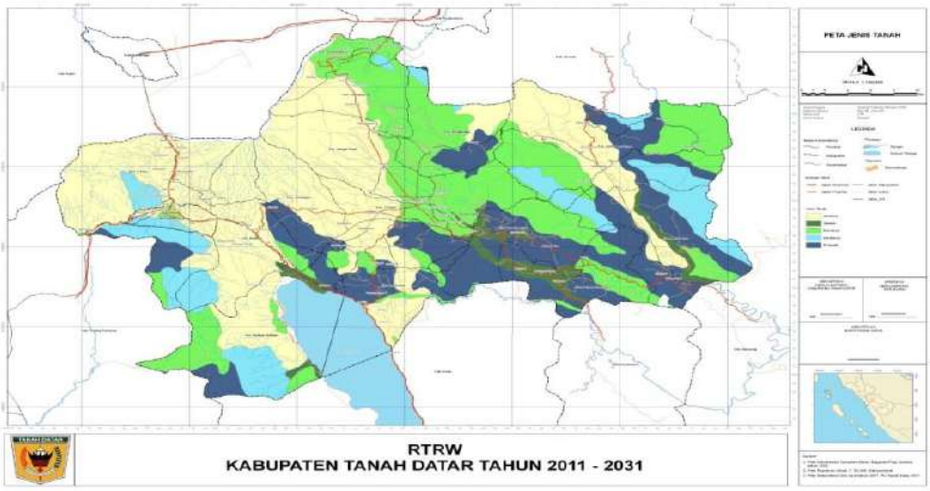

Gambar 2.5 Peta Jenis Tanah di Kabupaten Tanah Datar

Keberagaman jenis tanah sebagaimana diuraikan di atas dapat dijelaskan secara rinci luasnya di masing-masing kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8
Luas Jenis Tanah di Kabupaten Tanah Datar

No	Kecamatan	Klasifikasi Jenis Tanah (ha)						
		Andosol	Danau	Gleisol	Kambisol	Mediteran	Podsolik	Total
1	X Koto	11109,81			228,76	2456,13	1070,67	**14865,38**
2	Batipuh	7748,64		32,52	400,73	1162,87	772,21	**10116,97**
3	Batipuh Selatan	3856,40	3880,24	846,10	2876,71	2482,83	2734,11	**16676,39**
4	Pariangan	4561,69					1267,47	**5829,15**
5	Rambatan	4581,50	2939,64	0,05	1319,00	1316,96	4101,58	**12939,73**
6	V Kaum	2000,67			1023,33		39,52	**3063,52**
7	Tanjung Emas	1282,00			6470,32	93,81	5030,11	**12876,24**
8	Padang Ganting			1150,25	1874,04	27,81	3809,87	**6861,97**
9	Lintau Buo	1448,28		775,60	749,97	3342,54	4750,89	**11067,29**
10	Lintau Buo Utara	6288,64			7780,42	2749,99	3112,47	**19931,52**
11	Sungayang	1142,51			4187,88	62,97	1443,38	**6836,74**
12	Sungai Tarab	6818,59			1567,75			**8386,35**
13	Salimpaung	2386,77			3201,95	46,38		**5635,10**
14	Tanjung Baru	664,94			1842,39	123,08		**2630,40**
Jumlah		**53890,44**	**6819,88**	**2804,53**	**33523,27**	**13865,38**	**28132,28**	**137716,76**

Sumber: Dinas PUPRP Tahun 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, jenis tanah yang memiliki daerah paling luas adalah Andosol (tanah subur yang banyak mengandung mineral) dengan luas jenis tanah yaitu 53.890,44 Ha dari luas keseluruhan Jenis Tanah yang berada di Kabupaten Tanah Datar sedangkan jenis tanah yang memiliki daerah palung kecil adalah gleisol dengan luas daerah yaitu 2.804,53 Ha dari total luas Jenis Tanah di Kabupaten Tanah Datar.

2.1.7 Rencana Struktur Ruang

2.1.7.1 Sistem Perkotaan Wilayah Kabupaten Tanah Datar

Penetapan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan kewenangan kabupaten sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing kawasan. Sistem pusat-pusat permukiman di Kabupaten Tanah Datar ditentukan dengan

pembobotan luas kawasan, jumlah penduduk, kepadatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan yang terdapat pada setiap kecamatan.

— **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Sumatera Barat maka Kota Batusangkar diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Tanah Datar. Wilayah Kota Batusangkar ini menunjang kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat melalui pembangunan sektor-sektor unggulan maka PKL Batusangkar diarahkan sebagai pusat pelayanan utama yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan dan jasa, simpul transportasi utama.

— **Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**

Kabupaten Tanah Datar memiliki 5 PPK (Pusat Pelayanan Kawasan). Pusat pelayanan Kawasan ini berfungsi sebagai 1 pusat yang melayani kegiatan 2 kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

a. Kawasan perkotaan Balai Tangah di Kecamatan Lintau Buo Utara dan Kecamatan Lintau Buo
b. Kawasan perkotaan Tabek Patah di Kecamatan Salimpaung dan Kecamatan Tanjung Baru
c. Kawasan perkotaan Panyalaian di Kecamatan X Koto dan Kecamatan Batipuh
d. Kawasan perkotaan Sumpur di Kecamatan Rambatan dan Kecamatan Batipuh Selatan
e. Kawasan perkotaan Padang Gantiang di Kecamatan Padang Ganting dan Kecamatan Tanjung Emas.

— **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Kabupaten Tanah Datar terdapat di 6 (enam) kecamatan. Pusat-pusat pelayanan lingkungan ini berfungsi sebagai pusat yang melayani kegiatan skala antar nagari.

Hasil identifikasi dan pertimbangan kriteria-kriteria penentuan pusat-pusat kegiatan maka rencana sistem perkotaan di Kabupaten Tanah Datar adalah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Rencana Struktur Kota-Kota Di Kabupaten Tanah Datar

No	Nama	Skala Pelayanan	Peranan dan Fungsi	Wilayah Pelayanan
1	Batusangkar	PKL	1. pusat pemerintahan kabupaten, 2. perdagangan dan jasa skala regional, 3. pelayanan transportasi, 4. industri pengolahan, 5. pusat pendidikan, 6. pusat kesehatan, dan pusat peribadatan	Kabupaten Tanah Datar
2	Balai Tangah	PPK	1. pusat pemerintahan kecamatan, 2. perdagangan dan jasa sub regional,	Kecamatan Lintau Buo Utara

No	Nama	Skala Pelayanan	Peranan dan Fungsi	Wilayah Pelayanan
			3. pusat kesehatan, 4. pusat rekreasi, olahraga dan wisata, 5. pusat peribadatan, 6. pusat pendidikan, 7. pelayanan transportasi, dan 8. Pengembangan Sentra produksi ayam petelur dan pedaging di kawasan Lintau	
3	Tabek Patah	PPK	1. pusat pemerintahan kecamatan, 2. perdagangan dan jasa sub regional, 3. pusat kesehatan, 4. pusat rekreasi, olahraga dan wisata, 5. pusat peribadatan, 6. pusat pendidikan, 7. pelayanan transportasi, dan 8. Pengembangan home industry	Kecamatan Salimpaung
4	Panyalaian	PPK	1. pusat pemerintahan kecamatan, 2. perdagangan dan jasa sub regional, 3. pusat kesehatan, 4. pusat rekreasi, olahraga dan wisata, 5. pusat pendidikan, 6. pusat peribadatan, dan simpul transportasi 7. Pengembangan home industry	Kecamatan X Koto
5	Sumpur	PPK	1. pusat pemerintahan kecamatan, 2. pusat perdagangan dan jasa skala kecamatan, 3. pusat kesehatan, 4. pusat rekreasi, olahraga dan wisata, 5. pusat pendidikan, dan pusat peribadatan 6. Pengembangan home industry	Kecamatan Batipuh Selatan
6	Padang Gantiang	PPK	1. pusat pemerintahan kecamatan, 2. pusat perdagangan dan jasa, 3. pusat kesehatan, 4. pusat rekreasi, olahraga dan wisata, 5. pusat pendidikan, 6. pusat peribadatan dan 7. Pengembangan home industry	Kecamatan Padang Ganting
7	Simabur	PPL	1. pusat pemerintahan kecamatan, 2. pusat perdagangan dan	Kecamatan Pariangan dan Kecamatan

No	Nama	Skala Pelayanan	Peranan dan Fungsi	Wilayah Pelayanan
			jasa, 3. pusat kesehatan, 4. pusat rekreasi, olahraga dan wisata, 5. pusat pendidikan, 6. pusat peribadatan, dan industri pengolahan	Rambatan
8	Kubu Kerambil	PPL	1. pusat pendidikan, 2. pusat kesehatan, 3. pusat peribadatan, 4. pasar lokal, industri kecil dan kerajinan tangan skala beberapa desa	Kecamatan Batipuh
9	Sungayang	PPL	1. pusat pendidikan, 2. pusat kesehatan, 3. pusat peribadatan, 4. pasar lokal, 5. industri kecil dan kerajinan tangan skala beberapa desa	Kecamatan Sungayang
10	Tigo Jangko	PPL	1. pusat pendidikan, 2. pusat kesehatan, 3. pusat peribadatan, 4. pasar lokal, 5. industri kecil dan kerajinan tangan skala beberapa desa	Kecamatan Lintau Buo
11	Koto Tangah	PPL	1. pusat pendidikan, 2. pusat kesehatan, 3. pusat peribadatan, 4. pasar lokal, 5. industri kecil dan kerajinan tangan skala beberapa desa	
12	Tanjung Alam	PPL	1. pusat pendidikan, 2. pusat kesehatan, 3. pusat peribadatan, 4. pasar lokal, 5. industri kecil dan kerajinan tangan skala beberapa desa 6. Pengembangan peternakan	Kecamatan Tanjung Baru

Sumber: Dinas PUPRP Tahun 2020

Rencana ini selanjutnya dapat digambarkan sebagaimana tertera pada Gambar 2.6 di bawah ini.

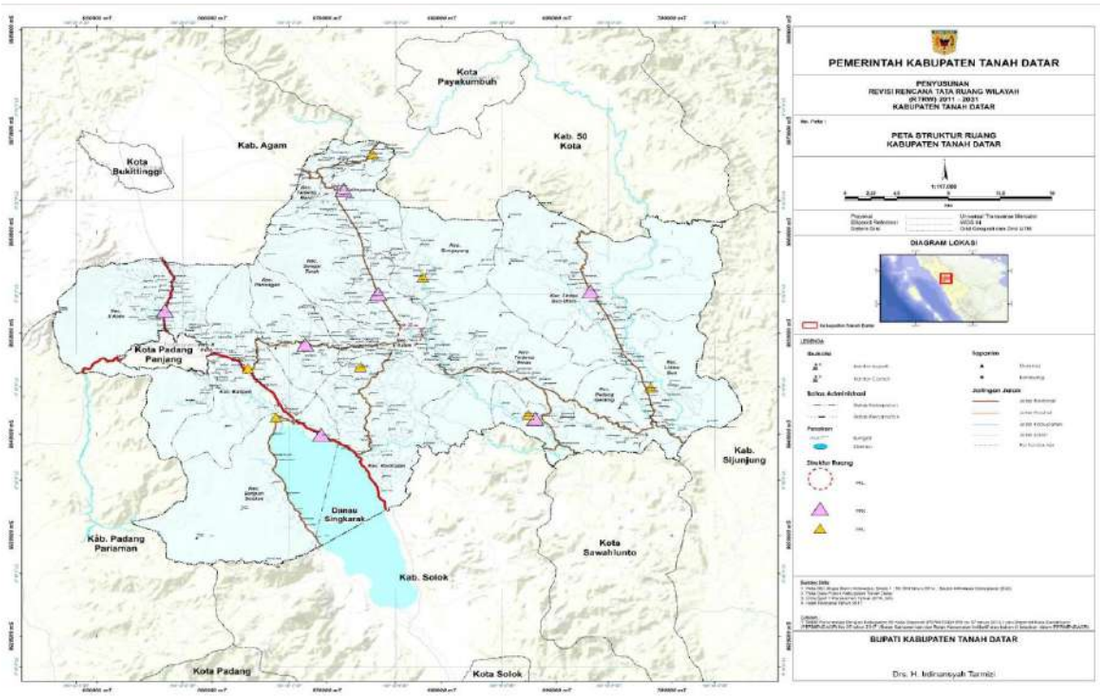

Gambar 2.6 Peta Sistem Wilayah Perkotaan Kabupaten Tanah Datar

2.1.7.2 Rencana Sistem jaringan prasarana

Perwujudan sistem jaringan prasarana meliputi :
- Perwujudan sistem jaringan transportasi;
- Perwujudan sistem jaringan energi;
- Perwujudan sistem jaringan telekomunikasi;
- Perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan
- Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

2.1.8 Rencana Pola Ruang

2.1.8.1 Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung

Rencana pola pemanfaatan ruang wilayah menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah merupakan distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten dan Kota. Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 1 Tahun 2018 ini dijelaskan mengenai fungsi, dasar perumusan dan kriteria dalam menyusun rencana pola ruang wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi:

a. sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kabupaten;
b. mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
c. sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
d. sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan berdasarkan:

a. kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
b. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kabupaten;
c. kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan; dan
d. ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten dirumuskan dengan kriteria:

a. merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;
b. merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWP beserta rencana rincinya;
c. mengakomodasi kebijakan pengembangan kawasan andalan nasional yang berada di wilayah kabupaten bersangkutan;
d. memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
e. mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kabupaten yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

Dalam menentukan arahan pola pemanfaatan ruang wilayah di Kabupaten Tanah Datar, dasar-dasar pertimbangan yang digunakan selain hasil analisis juga dengan tanpa mengindahkan kebijakan-kebijakan yang telah ada dan ditetapkan serta kebijakan lain yang berperan sebagai landasan hukum (peraturan) yang mengatur berbagai aspek-aspek kepentingan yang berkaitan dengan rencana pola pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tanah Datar.

2.1.8.2 Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

Tabel 2.10
Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Tanah Datar

Kecamatan	Klasifikasi Kawasan Hutan (ha)							
	CA	**HL**	**HP**	**HPK**	**KSA/ KPA**	**SM**	**TWA**	**Total**
X Koto	371	1.847	-	-	0	1.493	5.018	8.729
Batipuh	-	517	-	-	0	811	1.366	2.694
Batipuh Selatan	-	3.587	-	-	-	6.198	-	9.785
Pariangan	-	-	-	-	-	-	1.527	1.157
Rambatan	-	-	804	-	-	-	-	804
Lima Kaum*	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Emas	-	2.454	3.765	-	-	-	-	6.219
Padang Ganting	-	739	1.196	28	-	-	-	1.963
Lintau Buo	-	3.791	935	-	-	-	-	4.726
Lintau Buo Utara	-	6.638	-	-	-	2	1.841	8.481
Sungayang	-	298	1.611	-	-	-	174	2.083
Sungai Tarab	-	-	-	-	-	-	2.004	2.004
Salimpaung	-	-	678	-	-	-	322	1.000

Kecamatan	Klasifikasi Kawasan Hutan (ha)							
	CA	**HL**	**HP**	**HPK**	**KSA/ KPA**	**SM**	**TWA**	**Total**
Tanjung Baru	-	-	3	-	-	-	-	3
Jumlah	371	19.871	8.992	28	0	8.504	12.252	50.018

**CA (Cagar Alam) Baringin Sakti di Kecamatan Lima Kaum*
Sumber: Dinas PUPRP Tahun 2020

Ket: CA (Cagar Alam), HL (Hutan Lindung), HP (Hutan Produksi Tetap), HPK (Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi), KSA/KPA (Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam), SM (Suaka Margasatwa), TWA (Taman Wisata Alam).

Berdasarkan Tabel 2.10 dapat diketahui bahwa luas kawasan peruntukkan lindung di Kabupaten Tanah Datar adalah seluas 57.206 Ha atau 41,13% dari total luas wilayah Kabupaten Tanah Datar. Luas kawasan peruntukkan lindung tersebut merupakan wilayah yang berada pada kawasan hutan (Data Sementara).

— **Kawasan Perlindungan Setempat**

Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan-kawasan khusus setempat seperti sungai dan danau.

a) Sempadan Sungai
Kawasan perlindungan setempat yang merupakan sempadan sungai di Kabupaten Tanah Datar tersebar di Kecamatan Batipuh, Batipuh Selatan, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Padang Ganting, Rambatan, Sungayang, Tanjung Baru, Tanjung Emas, V Kaum, dan X Koto dengan total luas sempadan sungai adalah 1.293,80 Ha

b) Sempadan Danau
Wilayah administratif di Kabupaten Tanah Datar pada Danau Singkarak berada di Kecamatan Batipuh Selatah dan Kecamatan Rambatan. Seluruh kawasan sepanjang danau harus ditetapkan sebagai sempadan danau dan berfungsi sebagai kawasan lindung, baik sempadan berupa tutupan vegetasi maupun sempadan danau berupa pasir. Total luas sempadan Danau Singkarak yang berada di Kabupaten Tanah Datar adalah 148,47 Ha.

c) Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal
Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal di Kabupaten Tanah Datar adalah Kawasan Nagari Tuo Pariangan

— **Kawasan Konservasi**

a) Kawasan Suaka Alam (KSA)

Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya. Luas kawasan suaka alam yang direncanakan di Kabupaten Tanah Datar adalah 21.080,57 Ha kawasan suaka alam terdiri dari:

1) Cagar Alam

Kawasan cagar alam yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar mempunyai luas kurang lebih yaitu 21.080,57 Ha yang terdiri dari cagar alam yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui RTRWN dan yang ditetapkan oleh provinsi melalui RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun

2012-2032. Cagar alam yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar sesuai ketetapan dalam Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRWN sebanyak 2 (enam) buah kawasan cagar alam tersebut adalah sebagai berikut:

a. Cagar Alam Lembah Anai di Kecamatan X Koto dengan luas 370,377 Ha
b. Cagar Alam Beringin Sakti di Kecamatan Lima Kaum dengan luas 0,003 Ha

2) Suaka Margasatwa

Suaka Margasatwa yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah Suaka Margasatwa Barisan dengan luas 8.503,10 ha yang berada di Kecmatan Batipuh, Kecamatan Batipuh Selatan dan Kecamatan X Koto.

b) Kawasan Pelestarian Alam

1) Taman Wisata Alam

Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.46/Menlkh/Setjen/Kum.1/5/2016 tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Panas Bumi Pada Kawasan Taman Nasional, Taman Raya dan Taman Wisata Alam. Taman Wisata alam adalah Kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi. Taman wisata Alam (TWA) yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah TWA Mega Mendung, TWA Gunung Marapi, TWA Sago dan TWA Singgalang Tandikek.

– **Kawasan Lindung Geologi**

a. Kawasan Cagar Alam Geologi
   Dari tiga kelompok kawasan cagar alam geologi yaitu kawasan keunikan batuan dan fosil, kawasan keunikan bentang alam dan kawasan keunikan proses geologi, untuk wilayah Kabupaten Tanah Datar yang ditemukan adalah kawasan keunikan bentang alam berupa kawasan *karst* di daerah kubah Batusangkar yang terdapat di Kecamatan Lintau Buo Utara. Kawasan unik dari segi Geologi lainnya berada di Danau Singkarak yang telah telah diusulkan sebagai Kawasan Geopark.

b. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah
   Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah terbagi dua yaitu:
   1. Kawasan Imbuhan Air Tanah
      Kawasan imbuhan air tanah di Kabupaten Tanah Datar terdapat di Kecamatan Lima Kaum dengan luas 6 Ha.
   2. Sempadan Mata Air
      Berdasarkan data yang ada jumlah mata air di Kabupaten Tanah Datar terdapat 20 buah mata air dengan kapasitas yang cukup besar dan masih banyak mata air dengan kapasitas kecil seperti; mata air Sei Tabik, Talago Atar, Bulaan, Bulakan, Badinah, Minang, Gurun, Sampik, Bonta, Bulan Dalam, Sei Marouk dan lain-lain. Keberadaan mata air tersebut saat ini merupakan sumber air yang digunakan untuk kebutuhan bahan baku air bersih yang dikelola oleh PDAM dan Masyarakat.

2.1.8.3 Kawasan Rawan Bencana

Kondisi Kabupaten Tanah Datar yang memiliki bentang alam yang bervariasi seperti; posisinya berada di antara 2 (dua) gunung yang masih aktif yaitu Gunung Marapi dan Gunung Tandikek, morfologi bergelombang, banyak dilalui sungai-sungai besar serta dilalui jalur sesar besar Sumatera (Sesar Semangko) menyebabkan Kabupaten Tanah Datar rentan terhadap bencana.

Daerah-daerah yang rawan gempa di Kabupaten Tanah Datar adalah Kecamatan X Koto bagian timur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kecamatan Batipuh dan Kecamatan Salimpaung.

Besaran potensi luasan bahaya dan kelas bahaya untuk 14 kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Rekapitulasi Kajian Bahaya di Kabupaten Tanah Datar

JENIS BENCANA		BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	Banjir Bandang	11.757,06	Tinggi
2.	Banjir	14.973,47	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim	62.271,04	Sedang
4.	Gempa Bumi	128.636,00	Tinggi
5.	Kebakaran Hutan dan Lahan	84.449,88	Tinggi
6.	Kekeringan	127.803,37	Sedang
7.	Letusan Gunung Api Marapi	12.747,20	Tinggi
8.	Letusan Gunung Api Tandikat	1.413,64	Rendah
9.	Tanah Longsor	68.727,43	Tinggi

Sumber: BPBD Tahun 2020

Adapun hasil kajian bahaya seluruh potensi bencana per kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dipaparkan sebagai berikut:

- **Banjir**

Potensi bahaya banjir dikaji berdasarkan parameter ukur dan sumber data yang telah ditetapkan, seperti daerah rawan banjir, kemiringan lereng dan jarak dari sungai. Luasan bahaya banjir untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Rekapitulasi Kajian Bahaya Banjir
Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

KECAMATAN		BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	Batipuh	443,9	Tinggi
2.	Batipuh selatan	315,63	Tinggi
3.	Lima kaum	1131,8	Rendah
4.	Lintau buo	4308,8	Tinggi
5.	Lintau buo utara	686,7	Tinggi
6.	Padang ganting	886,23	Tinggi
7.	Pariangan	651,96	Tinggi
8.	Rambatan	1894	Tinggi

KECAMATAN		BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
9.	Salimpaung	558,81	Tinggi
10.	Sungai tarab	714,34	Tinggi
11.	Sungayang	879,21	Tinggi
12.	Tanjung baru	304,92	Tinggi
13.	Tanjung emas	1647,5	Tinggi
14.	X koto	549,72	Tinggi

Sumber: BPBD Tahun 2020

Tabel di atas diperoleh berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya banjir. Secara keseluruhan, bahaya banjir memberikan dampak luasan bahaya di Kabupaten Tanah Datar dengan kelas bahaya tinggi.

— **Banjir Bandang**

Potensi bahaya banjir bandang dikaji berdasarkan parameter ukur dan sumber data seperti sungai utama, topografi dan potensi longsor di hulu sungai. Luasan bahaya banjir bandang untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Rekapitulasi Kajian Bahaya Banjir Bandang
Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

KECAMATAN		BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	Batipuh	1025,3	Tinggi
2.	Batipuh selatan	883,71	Tinggi
3.	Lima kaum	166,14	Tinggi
4.	Lintau buo	1643,9	Tinggi
5.	Lintau buo utara	2100,4	Tinggi
6.	Padang ganting	781,29	Tinggi
7.	Pariangan	30,6	Tinggi
8.	Rambatan	763,47	Tinggi
9.	Salimpaung	435,51	Tinggi
10.	Sungai tarab	935,46	Tinggi
11.	Sungayang	819,63	Tinggi
12.	Tanjung baru	249,12	Tinggi
13.	Tanjung emas	900,9	Tinggi
14.	X koto	1021,7	Tinggi

Sumber: BPBD Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas diperoleh berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya banjir bandang. Secara keseluruhan, bahaya banjir bandang memberikan dampak luas bahaya di Kabupaten Tanah Datar dengan kelas bahaya tinggi.

— **Cuaca Ekstrim**

Cuaca ekstrim atau angin puting beliung dengan kecepatan 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan bumi dan akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit). Potensi bahaya cuaca ekstrim dikaji berdasarkan parameter ukur dan sumber data yang telah ditetapkan, seperti keterbukaan lahan, kemiringan lereng dan curah hujan tahunan. Luasan bahaya cuaca ekstrim untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Rekapitulasi Kajian Bahaya Cuaca Ekstrim
Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

KECAMATAN		BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	Batipuh	3737,1	Sedang
2.	Batipuh selatan	2305,8	Sedang
3.	Lima kaum	3044	Sedang
4.	Lintau buo	7011,2	Sedang
5.	Lintau buo utara	8006,1	Sedang
6.	Padang ganting	4656,3	Sedang
7.	Pariangan	3806,1	Sedang
8.	Rambatan	6996,8	Sedang
9.	Salimpaung	3051,9	Sedang
10.	Sungai tarab	3650	Sedang
11.	Sungayang	2844,9	Sedang
12.	Tanjung baru	736,11	Sedang
13.	Tanjung emas	7258,7	Sedang
14.	X koto	5166	Sedang

Sumber: BPBD Tahun 2020

Tabel di atas diperoleh berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya cuaca ekstrim. Secara keseluruhan, bahaya cuaca ekstrim memberikan dampak luas bahaya di Kabupaten Tanah Datar dengan kelas bahaya sedang.

— **Gempa bumi**

Potensi bahaya gempa bumi dikaji berdasarkan parameter ukur dan sumber data yang telah ditetapkan, seperti kelas topografi, intensitas guncangan di batuan dasar dan intensitas guncangan di permukaan. Luasan bahaya gempa bumi untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Rekapitulasi Kajian Bahaya Gempa Bumi
Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

KECAMATAN		BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	Batipuh	9596	Tinggi
2.	Batipuh Selatan	8273	Tinggi

KECAMATAN		BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
3.	Lima Kaum	6565	Tinggi
4.	Lintau Buo	7731	Tinggi
5.	Lintau Buo Utara	20431	Tinggi
6.	Padang Ganting	7831	Tinggi
7.	Pariangan	7643	Tinggi
8.	Rambatan	12915	Tinggi
9.	Salimpaung	6088	Tinggi
10.	Sungai Tarab	7185	Tinggi
11.	Sungayang	6545	Tinggi
12.	Tanjung Baru	2514	Tinggi
13.	Tanjung Emas	11205	Tinggi
14.	X Koto	14114	Tinggi

Sumber: BPBD Tahun 2020

Tabel di atas diperoleh berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya gempa bumi. Secara keseluruhan, bahaya gempa bumi memberikan dampak luas bahaya di Kabupaten Tanah Datar dengan kelas bahaya tinggi.

— **Kebakaran Hutan dan Lahan**

Potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dikaji berdasarkan parameter ukur dan sumber data yang telah ditetapkan, seperti jenis hutan dan lahan, iklim dan jenis tanah. Luasan bahaya kebakaran hutan dan lahan untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.16
Rekapitulasi Kajian Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

KECAMATAN		BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	Batipuh	4638,4	Sedang
2.	Batipuh Selatan	8009,2	Rendah
3.	Lima Kaum	902,61	Sedang
4.	Lintau Buo	7124,4	Sedang
5.	Lintau Buo Utara	11644	Sedang
6.	Padang Ganting	5492,3	Sedang
7.	Pariangan	3408,9	Sedang
8.	Rambatan	7287	Sedang
9.	Salimpaung	4172,6	Tinggi
10.	Sungai Tarab	3616,1	Tinggi
11.	Sungayang	5139,4	Sedang
12.	Tanjung Baru	1548,4	Tinggi
13.	Tanjung Emas	9268,1	Sedang
14.	X Koto	12198	Sedang

Sumber: BPBD Tahun 2020

Tabel di atas diperoleh berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan. Secara keseluruhan, bahaya kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak luas bahaya di Kabupaten Tanah Datar dengan kelas bahaya sedang dan tinggi.

— **Kekeringan**

Potensi bahaya kekeringan dikaji berdasarkan parameter ukur dan sumber data yang telah ditetapkan, seperti kekeringan meteorologi. Luasan bahaya kekeringan untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Rekapitulasi Kajian Bahaya Kekeringan
Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

KECAMATAN		BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	Batipuh	9596	Sedang
2.	Batipuh Selatan	8273	Sedang
3.	Lima Kaum	6565	Sedang
4.	Lintau Buo	7731	Sedang
5.	Lintau Buo Utara	20431	Sedang
6.	Padang Ganting	7831	Sedang
7.	Pariangan	7643	Sedang
8.	Rambatan	12915	Sedang
9.	Salimpaung	5442,3	Rendah
10.	Sungai Tarab	7184,9	Rendah
11.	Sungayang	6365,8	Sedang
12.	Tanjung Baru	2506,5	Sedang
13.	Tanjung Emas	11205	Sedang
14.	X Koto	14114	Sedang

Sumber: BPBD Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya kekeringan. Secara keseluruhan, bahaya kekeringan memberikan dampak luas bahaya di Kabupaten Tanah Datar dengan kelas bahaya rendah dan sedang.

— **Letusan Gunung api**

Potensi bahaya letusan gunung api dikaji berdasarkan parameter ukur dan sumber data yang telah ditetapkan, seperti zona aliran dan zona jatuhan. Kajian bahaya letusan gunung api per kecamatan terhadap Gunung Marapi dan Gunung Tandikat di Kabupaten Tanah Datar secara umum dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 2.18
Rekapitulasi Kajian Bahaya Letusan Gunung Api Marapi
Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

KECAMATAN		BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	Batipuh	2753,8	Tinggi
2.	Lima Kaum	435,06	Rendah
3.	Pariangan	2919,2	Rendah
4.	Rambatan	207,81	Rendah
5.	Salimpaung	959,49	Rendah
6.	Sungai Tarab	2528,7	Rendah
7.	Sungayang	200,79	Rendah
8.	X Koto	2554	Sedang

Sumber: BPBD Tahun 2020

Tabel di atas diperoleh berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya letusan Gunungapi Marapi.

Tabel 2.19
Rekapitulasi Kajian Bahaya Letusan Gunung Api Tandikat
Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

KECAMATAN	BAHAYA	
	LUAS (Ha)	KELAS
1. X Koto	1413,6	Rendah

Sumber: BPBD Tahun 2020

Tabel di atas, kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya letusan Gunung api adalah kecamatan X Koto dengan kelas bahaya rendah.

— **Tanah Longsor**

Potensi bahaya tanah longsor dikaji berdasarkan parameter ukur dan sumber data seperti kemiringan lereng, arah lereng, panjang/bentuk lereng, tipe batuan, jarak dari patahan/sesar aktif, tipe tanah (tekstur tanah), kedalaman tanah (solum) dan curah hujan tahunan. Luasan bahaya tanah longsor untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20
Rekapitulasi Kajian Bahaya Tanah Longsor
Per Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

KECAMATAN		BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1.	Batipuh	4200,3	Sedang
2.	Batipuh Selatan	7880,4	Sedang
3.	Lima Kaum	106,92	Sedang
4.	Lintau Buo	4871,9	Sedang
5.	Lintau Buo Utara	9302,8	Tinggi
6.	Padang Ganting	4151,2	Sedang
7.	Pariangan	3011,5	Sedang

KECAMATAN		BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
8.	Rambatan	4382,6	Sedang
9.	Salimpaung	3301,9	Tinggi
10.	Sungai Tarab	2457,7	Tinggi
11.	Sungayang	4573	Tinggi
12.	Tanjung Baru	1476,9	Sedang
13.	Tanjung Emas	7881,8	Sedang
14.	X Koto	11129	Sedang

Sumber: BPBD Tahun 2020

Tabel di atas diperoleh berdasarkan luasan kecamatan yang memiliki kondisi rentan terhadap bahaya tanah longsor. Secara keseluruhan, bahaya tanah longsor memberikan dampak luas bahaya di Kabupaten Tanah Datar dengan kelas bahaya sedang dan tinggi.

2.1.8.4 Kawasan Cagar Budaya

Sampai tahun 2017 Benda Cagar Budaya/Situs di Kabupaten Tanah Datar yang sudah diinventarisasi oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar berjumlah 72 buah. BCB/Situs tersebut tersebar di 14 Kecamatan di wilayah Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.21
Nama dan Lokasi Benda Cagar Budaya di Kabupaten Tanah Datar

NO.	KECAMATAN	NAMA BCB/SITUS
1.	Batipuh	1. Surau Nagari Lubuk Bauk 2. Megalit Gunung Bungsu 3. Stasiun Kereta Api Sumpur 4. Stasiun Kereta Api Kubu Kerambil
2.	Lima Kaum	1. Prasasti Saruaso II 2. Prasasti Kubu Rajo 3. Medan Bapaneh Dusun Tuo (Batu Batikam) 4. Masjid Raya Lima Kaum 5. Gedung Indo Jolito 6. Benteng Van Der Capellen 7. Medan Bapaneh Koto Baranjak 8. Makam Sultan Muningsyah 9. Rumah Dinas Pegadaian 10. Rumah Dinas PT. Pos 11. Gedung LP Batusangkar 12. Rumah Dinas Wakil Bupati 13. Rumah Dinas DPRD 14. Rumah Dinas Kapolres 15. Rumah Dinas Dandim 16. RSU Tentara 17. Los Pasar Koto Tinggi Atas 18. Rumah Hunian Kampung Sudut 19. Rumah Dt. Bijo 20. Rumah Hunian Batu Balang 21. Rumah Gadang Dt. Bandaro Nan Kuniang
3.	Lintau Buo	1. Makam (Ustano) Rajo Adat Buo 2. Gedung Controleur
4.	Lintau Buo Utara	1. Situs Tapak Stasiun Radio PDRI
5.	Pariangan	1. Prasasti Pariangan 2. Balairung Sari Tabek 3. Makam Panjang Tantejo Gurhano

NO.	KECAMATAN	NAMA BCB/SITUS
		4. Rumah Gadang angku Bandaro Kayo
6.	Padang Ganting	1. Makam Tuan Kadhi 2. Makam Syech Ibrahim
7.	Rambatan	1. Prasasti Rambatan 2. Prasasti Ombilin 3. Rumah Tuo Kampai Nan Panjang 4. Menhir Simawang
8.	Salimpaung	1. Kompleks Makam Makhudum 2. Benteng Jepang Salimpaung I 3. Benteng Jepang Salimpaung II
9.	Sungayang	1. Medan Bapaneh Ateh Lago
10.	Sungai Tarab	1. Makam Tuan Titah 2. Medan Bapaneh Sitangkai 3. Makam Ninik Janggut Hitam 4. Rumah Adat Tiang Panjang 5. Masjid Rao-rao 6. Masjid Saadah 7. Rumah Perjanjian Renville (Colonial) 8. Makam Syeikh Abdurrahman Khalidi
11.	X Koto	1. Kompleks Makam Tuanku Pamansiangan 2. Masjid Tuanku Pamansiangan 3. Makam Haji Miskin 4. Stasiun Pasar Rebo Koto Baru 5. Stasiun Koto Baru
12.	Tanjung Baru	1. Medan Bapaneh Gunung 2. Menhir Koto Laweh
13.	Tanjung Emas	1. Makam (Ustano) Rajo Alam Pagaruyung 2. Prasasti Ponggongan 3. Makam (Ustano) Saruaso 4. Makam Indomo 5. Prasasti Saruaso I 6. Megalit Talago Gunung 7. Kompleks Prasasti Adityawarman 8. Makam Rajo Ibadat 9. Menhir Tambun Tulang 10. Benteng Jepang Ludai 11. Kompleks Makam Tuan Gadih 12. Situs (Tapak) Istana Silinduang Bulan
14.	Batipuh Selatan	1. Kawasan Rumah Gadang Sumpur 2. Stasiun Kereta api Batu Tabal

Sumber : BPCB Sumbar 2020

Terlihat bahwa Kecamatan Lima Kaum dan Tanjung Emas menjadi dua kecamatan dengan Benda Cagar Budaya/Situs terbanyak. Hal ini diduga terkait dengan posisinya sebagai pusat pemerintahan Kerajaan Pagaruyung pada masa lalu.

2.1.9 Rencana Pola Ruang Kawasan Peruntukan Budaya

— Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

a) Kawasan Hutan Produksi

Kawasan hutan produksi di Kabupaten Tanah Datar tersebar di Kecamatan Lintau Buo, Padang Ganting, Rambatan, Salimpaung, Sungayang, Tanjung Baru, dan Tanjung Emas dengan total luas 8.991,78 Ha.

b) Kawasan Hutan Produksi yang dapat di Konversi

Kawasan HPK yang bisa dikonversi adalah kawasan hutan yang dicadangkan untuk digunakan dalam pembangunan diluar kehutanan. Terdapat dua kondisi yang bisa dijadikan patokan untuk menetapkan jenis hutan ini. Pertama, hutan yang memiliki skor kelerengan, erosi dan curah hujan di bawah 124. Kedua, kawasan hutan yang dicadangkan untuk permukiman, transmigrasi, perkebunan dan pertanian di Kabupaten Tanah Datar direncanakan berada di Kecamatan Padang Ganting dengan luas 28,01 Ha.

— **Kawasan Pertanian**

a) Kawasan Tanaman Pangan

Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang di dalamnya terdapat karbohidrat dan protein yang dapat digunakan sebagai sumber energi bagi manusia. Sesuai dengan rencana pola ruang Kabupaten Tanah Datar tahun 2011 – 2031 luas lahan pertanian tanaman pangan adalah 23.143,91 Ha. Kawasan pertanian pangan tersebar di semua kecamatan di Kabupaten Tanah Datar

b) Kawasan Hortikultura

Kabupaten Tanah Datar memiliki komoditi yang potensial untuk dikembangkan pada kawasan pertanian lahan kering/hortikultura adalah jagung di Kecamatan Rambatan, sayuran dataran tinggi di Kecamatan X Koto dan Kecamatan Salimpaung. Rencana Kabupaten Tanah Datar 20 (dua) puluh tahun kedepan kawasan – kawasan tersebut akan direncanakan sebagai kawasan pertanian tanaman berkelanjutan untuk pertanian lahan kering.

Kecamatan Batipuh (Nagari Andaleh), Kecamatan Tanjung Baru (Jorong Gunung Nagari Tanjung Alam Komoditi Tebu dengan luas lebih kurang 14 Ha), Kecamatan Salimpaung (Nagari Tabek Patah dan Lawang Mandahiling lebih kurang 16 Ha), Kecamatan Sungai Tarab (Nagari Kumango, Rao-Rao, Koto Baru, Padang Laweh, Talang Tangah) di luar LP2B ditetapkan sebagai kawasan hortikultura dengan luas kawasan 2.609,99 Ha.

c) Kawasan Pertanian Perkebunan

Rencana pola ruang kawasan pertanian perkebunan di Kabupaten Tanah Datar direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Luas rencana kawasan perkebunan di Kabupaten Tanah Datar yaitu 30.475,05 Ha. Rencana perkebunan ini tersebar Kabupaten Tanah Datar yang terdapat di 13 (tiga belas) kecamatan. Kecamatan Lima Kaum yang secara hirarki berada pada pusat kota tidak memiliki kawasan perkebunan.

d) Kawasan Peternakan

Sesuai dengan potensi dan prospek pengembangan peternakan dari hasil analisis, maka arahan pengembangan kawasan peternakan di Kabupaten Tanah Datar diarahkan sebagai berikut:

a. Pengembangan budidaya ternak besar secara wilayah diarahkan di Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Sungai Tarab, Tanjung Baru dan Kecamatan Salimpaung.

b. Pengembangan budidaya ternak unggas diarahkan di Kecamatan Lima Kaum, Tanjung Emas, Lintau Buo, Lintau Buo Utara, Sungai Tarab, Salimpaung, dan Kecamatan Tanjung Baru.

c. Pengembangan budidaya sapi pedaging di Kecamatan Lintau Buo dan Kecamatan Salimpaung seluas 9 Ha

Luas kawasan peternakan yang direncanakan di Kabupaten Tanah Datar adalah seluas 71,24 Ha.

— **Kawasan Perikanan**

a) Peruntukan Perikanan Tangkap

Potensi perikanan yang terdapat di Danau Singkarak potensial untuk pengembangan kawasan minapolitan. Pada saat ini hasil olahannya ikan bilih cukup populer dan mampu menembus pasaran regional, dimana spesies ikan bilih merupakan jenis ikan spesifik yang hanya hidup di Danau Singkarak. Diharapkan ikan bilih dapat menjadi *icon* minapolitan Guguak Malalo

b) Peruntukan Budidaya Perikanan

Jenis perikanan yang ada dan dapat dikembangkan di Kabupaten Tanah Datar adalah perikanan darat, kawasan potensial untuk budidaya perikanan di Kabupaten Tanah Datar meliputi sungai, telaga, kolam dan danau. Jenis komoditas perikanan yang banyak diusahakan dan menjadi primadona yaitu ikan nila dan ikan mas.

Wilayah-wilayah yang potensial bagi pengembagan budidaya ikan (nila dan mas) diantaranya adalah Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan X Koto, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Sungai Tarab, dan Kecamatan Salimpaung.

Rencana peruntukan perikanan budidaya di Kabupaten Tanah Datar berada di Kecamatan Padang Ganting, Rambatan, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Emas dan Kecamatan Lima kaum seluas 6,46 Ha.

— **Kawasan Pertambangan dan Energi**

a) Kawasan Pertambangan Mineral

Rencana pengembangan kawasan pertambangan mineral di Kabupaten Tanah Datar tersebar di Kecamatan Batipuh Selatan, Lintau Buo, dan Rambatan dengan total luas 364,49 Ha.

b) Kawasan Pertambangan Batubara;

Kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Tanah Datar berada di Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 16,87 Ha

c) Kawasan Minyak dan Gas Bumi

Rencana pemanfaatan kawasan minyak dan gas bumi di Kabupaten Tanah Datar yaitu dengan mengelola satuan Wilayah Pertambangan (WP) yang meliputi Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), dan Wilayah Pertambangan Negara (WPN) dengan pertimbangan perlindungan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.

d) Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik.

Pengembangan pembangkit tenaga listrik di Kabupaten Tanah Datar meliputi:

a. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) Batang Sinamar yang terdapat di Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara, dan pembangkit listrik tenaga surya dikembangkan di Jorong Pamusian Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.
b. Pembangkit listrik tenaga surya dikembangkan di Jorong Pamusian Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara.

Pengembangan jaringan listrik di Kabupaten Tanah Datar direncanakan berada di Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 7,51 Ha dengan kegiatan berupa pembangunan/peningkatan pembangkit tenaga listrik, pemantauan dan pengendalian kawasan pembangkit tenaga listrik dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan kawasan.

— **Kawasan Peruntukan Industri**

Rencana sentra industri kecil komoditi makanan ringan di Kabupaten Tanah Datar tersebar di seluruh kecamatan. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Tanah Datar diharapkan mampu menunjang perkembangan sektor pariwisata. Dengan berkembangnya kawasan agroindustri diharapkan hasil pertanian Kabupaten Tanah Datar dapat diolah terlebih dahulu sebelum dipasarkan, sehingga dapat memberikan nilai tambah *(value added)* yang menguntungkan bagi masyarakat maupun pemerintah setempat. Pembangunan kawasan industri ini perlu ditunjang dengan sistem transportasi yang baik dari daerah-daerah penghasil bahan baku maupun ke daerah pemasaran.

— **Kawasan Pariwisata**

Kabupaten Tanah Datar dengan bentang alam yang indah serta memiliki berbagai objek wisata sejarah dan budaya berpeluang untuk berkembang. Pada saat ini jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar mencapai 134 buah yang dikelompokkan dalam objek wisata sejarah dan budaya, objek wisata alam serta objek wisata buatan. Rencana pengembangan kawasan pariwisata di kabupaten Tanah Datar dipusatkan di Istano Basa Pagaruyung yaitu sebagai pusat pengembangan wisata alam dan budaya minangkabau. Hal ini karena kawasan Istano Basa Pagaruyung merupakan kawasan wisata unggulan utama Kabupaten Tanah Datar yang terintegrasi dalam Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) III koridor Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang. Rencana pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Tanah Datar adalah seluas 98,34 Ha.

a) Peruntukan Pariwisata Budaya

Jumlah dan jenis objek wisata budaya di Kabupaten Tanah Datar terdapat sebanyak 90 jenis objek yang tersebar di seluruh kecamatan. Pada umumnya jenis objek wisata budaya ini adalah berbentuk bangunan seperti makam, mesjid, rumah gadang dll.

b) Peruntukan Pariwisata Alam

Potensi wisata alam di Kabupaten Tanah Datar berjumlah 36 objek yang tersebar di 12 kecamatan

c) Kawasan Wisata Minat Khusus

Untuk jenis wisata minat khusus tersebar di beberapa kecamatan seperti Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Salimpaung, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Pariangan dan Kecamatan Lintau Buo. Jenis wisata minat khusus ini kebanyakan berupa mendaki gunung, bangunan kuno/bersejarah, penelurusan goa, air terjun serta paralayang, kesenian dan olahraga tradisional dan lain-lain.

— **Kawasan Peruntukan Pemukiman**

Rencana pengembangan kawasan permukiman di Kabupaten Tanah Datar dibagi menjadi permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan. Adapun arahan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan seperti diuraikan di bawah ini:

a) Kawasan Perkotaan

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan definisi dan ciri-ciri di atas sesungguhnya di Kabupaten Tanah Datar secara *riil* belum ada yang dapat dikatakan sebagai kawasan perkotaan. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perkotaan saat ini masih harus dikembangkan baik dari segi prasarana perkotaan, tata permukiman maupun kelengkapan fasilitas dan utilitasnya. Adapun kawasan perkotaan yang diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan bagi wilayah di sekitarnya adalah Kota Batusangkar.

Rencana peruntukan permukiman perkotaan direncanakan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Luas rencana peruntukan permukiman perkotaan yang direncanakan adalah 4.568,59 Ha.

b) Peruntukan Permukiman Perdesaan

Peruntukan permukiman perdesaan direncanakan di Kecamatan Batipuh, Kecamatan Batipuh Selatan, Kecamatan Lintau Buo, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kecamatan Padang Ganting, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Rambatan, Kecamatan Salimpaung, Kecamatan Sungai Tarab, Kecamatan Sungayang, Kecamatan Tanjung Emas, Kecamatan Tanjung Baru, Kecamatan Lima Kaum dan Kecamatan X Koto. Luas rencana peruntukan permukiman perdesaan adalah 2.899,24 Ha.

— **Kawasan Pertanahan**

Upaya menjamin pembangunan berkelanjutan dan pemerataan pembangunan diperlukan penataan pertanahan yang efektif dan efisien. Upaya penataan pertanahan secara keseluruhan dilakukan melalui dua pendekatan yang dilaksanakan secara saling melengkapi yaitu pendekatan fisik penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah dan pendekatan aspek hukum penataan atau legalitas penguasaan tanah. Melalui penataan ruang, pemanfaatan sumber daya alam sumber daya alam dapat dilakukan seoptimal mungkin agar tidak terjadi benturan kepentingan. Rencana pemanfaatan terkait pertanahan adalah sebagai berikut:

1. Inventarisasi dan Sertifikasi Tanah Pemerintah Daerah;
2. Penataan Tanah Terlantar;
3. Penyelesaian Konflik Pertanahan; dan
4. Pengadaan Tanah Untuk Pemerintah Daerah.

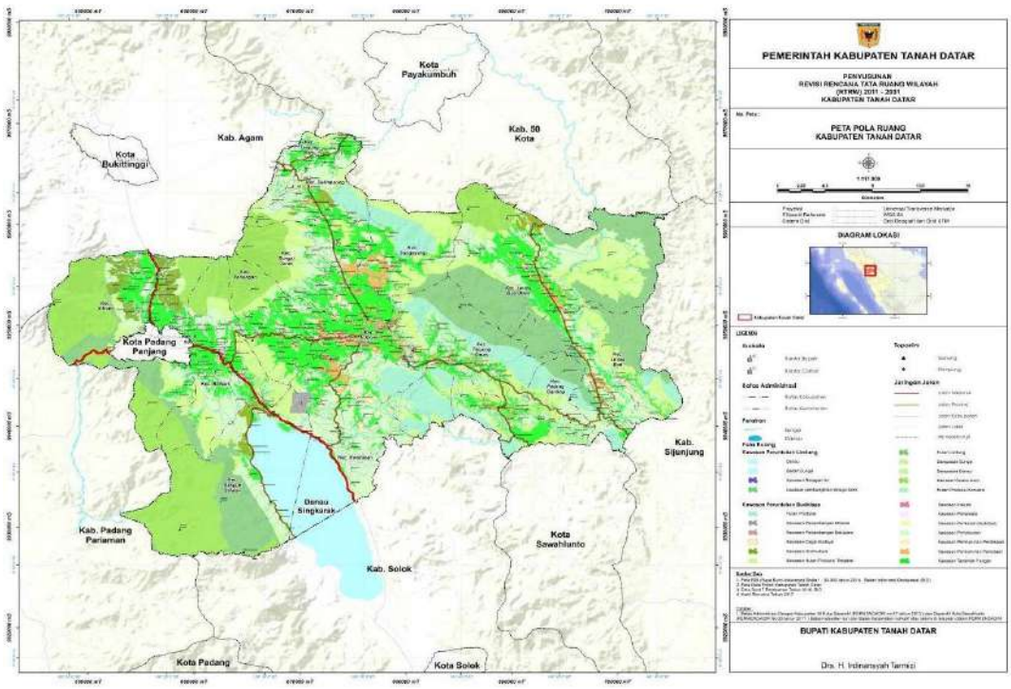

Gambar. 2.7 Peta Kawasan Pertanahan

2.1.10 Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.10.1 Kawasan Strategis Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia. Karena itu untuk Wilayah Sumatera Barat hanya satu kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan strategis dan tidak terdapat di Kabupaten Tanah Datar.

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat tahun 2012 – 2032 ditetapkan 2 (dua) kawasan yaitu:

1. Kawasan Poros Barat-Timur yaitu koridor jalan nasional dari Kota Padang sampai batas Provinsi Riau yang berada di Wilayah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan ini masuk pada kategori kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi.

Kawasan strategis Batusangkar dan sekitarnya di Kabupaten Tanah Datar dikembangkan untuk kawasan strategis dari sudut pandang budaya meliputi Batu Batikam, Batu Basurek, Kuburan Panjang, dan Istano Basa Pagaruyung.

2. Kawasan strategis Danau Singkarak di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar. Kawasan strategis Danau Singkarak sebagai kawasan strategis dari sudut pandang daya dukung lingkungan dan diarahkan untuk kawasan wisata alam.

Kawasan strategis wilayah kabupaten menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota merupakan bagian wilayah kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial budaya dan/atau lingkungan.

— **Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Ekonomi**

Kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten berupa aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki:

1. Potensi ekonomi cepat tumbuh
2. Sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi
3. Potensi ekspor
4. Dukungan jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi
5. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi
6. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan
7. Fungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi
8. Kawasan yang dapat mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal di dalam wilayah kabupaten.

Berdasarkan kriteria tersebut diatas kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi di Kabupaten Tanah Datar adalah Kawasan Danau Singkarak, Kawasan Koto Baru, Kawasan Tabek Patah, Kawasan Andaleh, dan Kawasan Tigo Jangko.

1. Kawasan Danau Singkarak

Danau Singkarak merupakan danau terluas ke-2 di Pulau Sumatera dengan luas 107,8 km² yang membentang diantara dua Kabupaten yaitu Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok dalam 4 Kecamatan dan 13 Nagari. 2 Kecamatan di Tanah Datar adalah Kecamatan Rambatan dan Kecamatan Batipuh Selatan serta 6 Nagari yakni Nagari Padang Laweh Malalo, Guguak Malalo, Sumpur, Batu Taba, Simawang dan III Koto.

Potensi Danau Singkarak tidak hanya panorama alam yang indah, tetapi danau yang dapat diakses dengan mudah dari berbagai daerah ini juga memiliki potensi sumber daya air yang dapat dikembangkan menjadi energi listrik maupun sumber air baku untuk pertanian. Air Danau Singkarak bersumber dari Batang Sumani di Kabupaten Solok dan Batang Sumpur di Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Debit air yang cukup berlimpah dialirkan dari Danau Singkarak melalui terowongan

selanjutnya dimanfaatkan untuk menggerakkan generator PLTA Singkarak yang berada di dekat Lubuk Alung. Untuk limpasan alamiah, air Danau Singkarak mengalir ke batang Ombilin dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku pertanian dan sumber air bersih terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran Batang Ombilin.

Danau yang terletak pada ketinggian 362,5 m dari permukaan laut juga kaya akan perikanan tangkap. Berbagai jenis ikan air tawar hidup di danau ini. Setidaknya saat ini terdapat 19 jenis ikan, seperti ikan asang, piyek, balingka, baung, dan ikan sasau. Juga ada spesies ikan langka yang mungkin hanya satu-satunya di dunia. Spesies ini bernama ikan bilih (*mystacoleucus padangensis*). Saat ini ikan bilih telah diolah oleh masyarakat setempat menjadi ikan kering dan telah dipasarkan hingga ke luar Provinsi Sumatera Barat bahkan telah menembus pasar mancanegara yaitu Malaysia dan Singapura.

Selain potensi yang ada di air Danau Singkarak potensi ekonomi juga ada di daratan sekitar Danau Singkarak. Potensi tersebut adalah potensi pariwisata, potensi ekonomi berupa perdagangan, dan potensi *home industry* (ikan bilih basah dan kering, lamang pisang, dan pensi). Begitu banyaknya potensi yang dimiliki oleh Danau Singkarak, dan itu merupakan sektor unggulan yang dapat menggerakan roda perekonomian yang ada di Kabupaten Tanah Datar, maka kawasan Danau Singkarak dijadikan sebagai kawasan strategis Kabupaten Tanah Datar.

2. Kawasan Koto Baru

Kawasan Koto Baru dan *hinterland*nya merupakan kawasan sentra produksi sayur-sayuran yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Agribisnis Sayuran Organik (KASO) untuk wilayah Sumatera Barat dan sebagai kawasan agropolitan serta kawasan pusat kerajinan. Kawasan Strategis Agropolitanmemiliki nilai strategis untuk dikembangkan sebagai salah satu wilayah percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar, karena didukung aksesibilitas yang baik yaitu berada pada poros Barat-Timur yang dilewati jalan nasional dari Kota Padang sampai batas Provinsi Riau serta kawasan Koto Baru menghasilkan komoditi potensial yaitu sayuran dataran tinggi. Kawasan ini direncanakan sebagai sentra pengembangan kegiatan pertanian (agro), dan merupakan outlet bagi penjualan produk pertanian ke kabupaten sekitarnya ataupun Kabupaten lain di Sumatera Barat.

3. Kawasan Tabek Patah

Kawasan Tabek Patah dan *hinterland*-nya merupakan sentra tanaman tomat dan pisang. Khusus untuk komoditas pisang telah dikembangkan menjadi barang olahan berupa pisang sale dengan sistem home industri. Potensi ini akan dijadikan sebagai nilai tambah untuk pengembangan objek wisata panorama Tabek Patah. Di samping itu dalam rangka menggerakan pertumbuhan ekonomi melalui sektor unggulan dan mempertahankan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional yang ditunjang oleh jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi maka Kawasan Tabek Patah harus dikembangkan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang ekonomi.

4. Kawasan Andaleh

Kawasan Andaleh dijadikan kawasan strategis dari segi ekonomi karena pada kawasan ini terdapat potensi yang tidak dimiliki oleh kawasan lain, yaitu lokasi sebagai sentra tanaman hias. Kondisi cuaca yang cukup dingin

menjadi potensial untuk pengembangan budidaya tanaman bunga. Dari segi pemasaran, bunga-bunga cantik yang tumbuh dan dibiakkan di Andaleh umumnya dipasarkan di Padang Panjang dan di Andaleh sendiri bahkan dengan pengembangan yang lebih terencana akan berpotensi untuk diekspor. Dengan pengelolaan yang baik sektor unggulan ini dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar khususnya Andaleh.

5. Kawasan Tigo Jangko

Kawasan Tigo Jangko merupakan salah satu Kawasan yang memiliki potensi untuk pengembangan tenun. Salah satu upaya untuk pengembangan sentra industri tenun ini adalah dengan melakukan pelatihan-pelatihan ke masyarakat. Jenis pelatihan yang dilakukan antara lain menjahit, teknik pencelupan, pemintalan benang, menenun, menyulam dan merenda songket.

— **Kawasan Strategis Dari Sudut Pandang Sosial Budaya**

Kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya dapat merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, antara lain kawasan yang merupakan:

1. Tempat pelestarian dan pengembangan adat istiadat atau budaya
2. Prioritas peningkatan kualitas sosial dan budaya
3. Aset yang harus dilindungi dan dilestarikan
4. Tempat perlindungan peninggalan budaya
5. Tempat yang memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman budaya; atau
6. Tempat yang memiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial.

Berdasarkan kriteria dan ketentuan tersebut diatas kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya di Kabupaten Tanah Datar adalah Istano Basa Pagaruyung, Kawasan Nagari Tuo Pariangan, Kawasan Pendidikan Bukit Gombak, dan Kawasan Pendidikan Lintau (Nagari Tigo Jangko).

1. Istano Basa Pagaruyung

Istano Basa Pagaruyung adalah salah satu bangunan situs budaya yang terletak di Batusangkar Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. Istana ini merupakan obyek wisata budaya yang terkenal di Sumatera Barat bahkan sampai ke mancanegara. Bangunan Istano Basa didirikan pada tahun 1451 oleh Raja Sutan Rajo Bakilap Alam atau Alif Khalifatullah di atas Bukit Batu Patah. Istano Basa yang berdiri sekarang sebenarnya adalah replika, karena istano basa asli yang terletak di atas Bukit Batu Patah terbakar habis pada sebuah kerusuhan berdarah pada tahun 1804. Istana tersebut kemudian didirikan kembali namun kembali terbakar tahun 1966. Proses pembangunan kembali Istano Basa dilakukan dengan peletakan tonggak tuo (tiang utama) pada 27 Desember 1976 oleh Gubernur Sumatera Barat yaitu Bapak Harun Zain. Bangunan baru ini tidak didirikan di tapak istana lama, tetapi di lokasi baru di sebelah selatannya tepatnya masih dilokasi yang ada sekarang.

Pada tanggal 27 Februari 2007, Istano Basa mengalami kebakaran hebat akibat petir yang menyambar di puncak istana. Akibatnya, bangunan tiga tingkat ini rata dengan tanah. Ikut terbakar juga sebagian dokumen, serta kain-kain hiasan. Diperkirakan hanya sekitar 15 persen barang-barang berharga yang selamat.

Mengingat kawasan Istano Basa Pagaruyung merupakan titik tolak dalam perkembangan sosial budaya masyarakat Minangkabau oleh karena Istano Basa Pagaruyung merupakan asset yang harus dilindungi dan dilestarikan agar dapat memberikan perlindungan terhadap peninggalan budaya. Untuk itu kawasan Istano Basa Pagaruyung dijadikan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya.

2. Kawasan Nagari Tuo Pariangan

Nagari Tuo Pariangan memiliki posisi istimewa di Minangkabau sebagai daerah yang merupakan asal usul lahirnya kebudayaan dan adat di Minangkabau. Di Nagari Pariangan terdapat peninggalan sejarah yang masih terlihat dan terjaga saat ini. Peninggalan tersebut terkait dengan tumbuh dan berkembangnya kebudayaan dan adat Minangkabau seperti tempat sawah pertama di Minangakabau yang dikenal dengan "Sawah Satampang Baniah", Medan Nan Bapaneh yang merupakan susunan batu untuk melakukan sidang, Batu Tungku Tigo Sajarangan, Makam Arsitek Balairung Sari "Tantejo Gurhano" sepanjang ± 25 meter, Prasasti Pariangan yang menandakan bahwa Adityawarman pernah bermukim di nagari ini, dan rumah gadang tuo yang masih banyak terlihat hingga saat ini. Bahkan konon pernah ditemukan tapak candi yang menjadi nama daerah ditempat ini daerah kecil di Pariangan ini dikenal dengan nama "Biaro" atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan "Biara" yang merupakan tempat beribadah agama Budha.

Ada dua hal yang bisa dipelajari dari Nagari Pariangan sebagai kawasan pelestarian cagar budaya

1. Nagari Pariangan sebagai sebuah kawasan lanskap sejarah
   Terkait dengan sejarah atau cerita asal usul nenek moyang Minangkabau yang turun dari Gunung Marapi dan membangun pemukiman/nagari awal di Pariangan. Hal ini direpresentasikan melalui tinggalan fisik seperti Situs Sandi Laweh, Makam Tantejo Gurhano, Makam-makam Keramat, Balai Katiak, Balai Pasujian, Galundi Nan Baselo, Sawah Satampang Baniah, Batu Lantak Tigo, Prasasti Pariangan, Lesung Gadang
2. Nagari Pariangan sebagai sebuah kawasan lanskap budaya
   Terkait dengan Nagari Pariangan sebagai representasi sebuah pemukiman tradisional Minangkabau lengkap dengan komponen pembentuk nagari yang masih utuh. Basasok bajarami (batas wilayah dengan tanda-tanda tertentu), bapandam pakuburan (kuburan), balabuah batapian (jalan dan sarana MCK), barumah batanggo (rumah tempat tinggal), bakorong bakampuang (kelompok pemukiman), basawah baladang (kawasan pertanian), babalai bamusajik (balai adat dan masjid), pakan (pasar) nagari serta galanggang (lapangan terbuka).

Travel Budget, sebuah media pariwisata internasional dunia dari USA pernah menganugerahkan 5 desa terindah di dunia pada akhir tahun 2012, salah satu desa terindah di dunia menurut media tersebut berada di Indonesia yakni Desa (*Nagari*) Pariangan di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Desa ini bersanding dengan Desa Wengen (Swiss), Eze (Prancis), *Niagara on the Lake* (Kanada) serta Cesky Krumlov (Ceko). Paduan harmonisasi alam, masyarakat, sejarah dan kebudayaan yang tumbuh di Nagari Pariangan menjadi alasan atas penghargaan dari *Travel Budget* sebagai salah satu desa terindah di dunia.

3. Kawasan Pendidikan Bukit Gombak

Kawasan Bukit Gombak dahulunya merupakan kawasan pendidikan Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) yang merupakan cikal bakal IKIP Padang yang sekarang telah berubah menjadi Universitas Negeri Padang (UNP) dengan luas kawasan perencanaan 150 Ha. Kawasan yang terletak di jalan provinsi ruas jalan Batusangkar – Guguk Cino saat ini dimanfaatkan sebagai lokasi SMK Pertanian dan SMA Unggul yaitu SMA Negeri 3 Batusangkar. Pengembangan kawasan Bukit Gombak yang diarahkan sebagai kawasan pendidikan bertaraf nasional dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi yang dilengkapi oleh sarana dan prasarana pendidikan yang memadai akan dapat menjadi pendorong dalam peningkatan kualitas sosial budaya.

Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berstandar nasional akan dapat diwujudkan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang handal dan berkualitas serta optimalisasi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Tanah Datar. Oleh karena itu kawasan Bukit Gombak dijadikan sebagai kawasan strategis dari sudut pandang sosial budaya.

— **Kawasan Strategi Dari Sudut Daya Dukung Lingkungan**

Kawasan Cagar Alam Lembah Anai

Kawasan strategis dilihat dari sudut daya dukung lingkungan merupakan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup seperti:

1. Tempat perlindungan keanekaragaman hayati
2. Kawasan lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan
3. Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian
4. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro
5. Kawasan yang menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup
6. Kawasan rawan bencana alam
7. Kawasan yang sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Salah satu ikon pariwisata di Provinsi Sumatera Barat, terletak di pinggir jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi, tepatnya di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, sekitar 38 km dari arah Batusangkar. Kawasan konservasi cagar alam Lembah Anai yang di tetapkan semenjak kolonial Belanda. Cagar Alam Lembah Anai adalah kawasan hutan lindung yang berada di Sumatera Barat yang memiliki hutan tropis yang lebat dengan beraneka jenis flora dan fauna. Keindahan alam serta flora dan fauna yang langka adalah daya tarik dari Lembah Anai, keindahan alam tersebut di antaranya terdapat air terjun dan satu telaga yang airnya berwarna kebiru-biruan.

Air terjun Lembah Anai terletak di pinggir jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Bukittinggi, dua kota yang menjadi sentra bagi tata pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, dan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya yang tepat berada di sisi jalan, membuat air terjun ini

mampu menarik perhatian para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Air terjun ini termasuk ke dalam kawasan konservasi cagar alam Lembah Anai, dimana Cagar Alam Lembah Anai berfungsi sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati maka kawasan ini ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis di Kabupaten Tanah Datar. Pengelolaan Cagar Alam Lembah Anai dan termasuk kawasan TWA (Taman Wisata Alam) Mega Mendung pengelolaannya disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

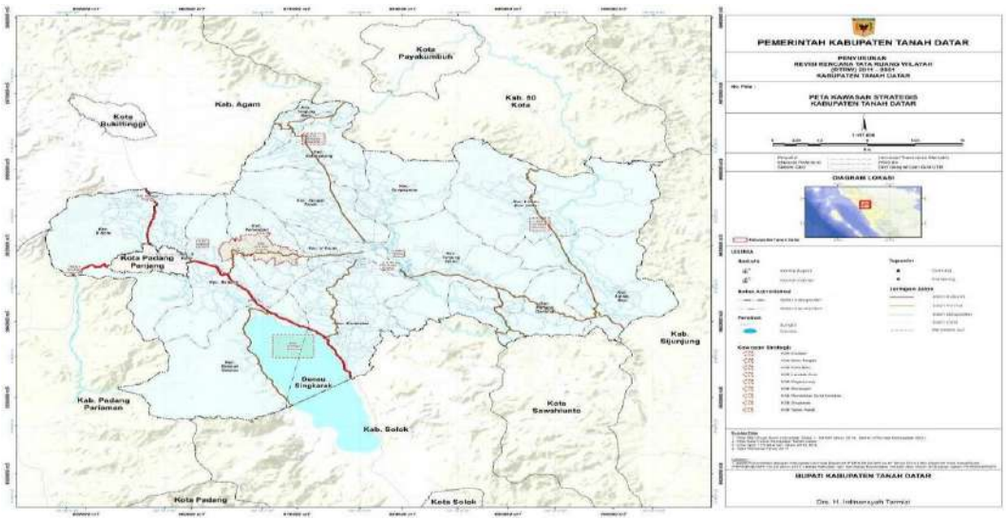

Gambar. 2.8 Peta Kawasan Strategis Kabupaten Tanah Datar

2.1.10.2 Demografi

Demografi merupakan ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia yang cakupannya meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk. Pertumbuhan penduduk yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar merupakan konsekuensi dari tingkat kelahiran dan kematian yang terjadi di masyarakat. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor perpindahan penduduk yang datang (migrasi masuk) maupun perpindahan penduduk ke luar daerah (migrasi keluar). Pada Tahun 2016-2019 pertumbuhan penduduk berkisar antara 0,23-0,25%, perhitungan ini berdasarkan proyeksi jumlah penduduk hasil sensus Tahun 2010. Jumlah penduduk Tahun 2020 merupakan hasil sensus Tahun 2020. Jika dibandingkan proyeksi penduduk Tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk Tahun 2020 sebesar 1,83. Tabel 2.22 menggambarkan laju pertumbuhan penduduk tahun 2016 - 2020:

Tabel 2.22
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk, 2016 – 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Penduduk	345.706	346.578	347.407	348.219	371.704
2	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,25	0,25	0,24	0,23	1,83

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 adalah 270 jiwa/km^2. Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Lima Kaum (1.242 jiwa/km^2) yang merupakan Kawasan Pusat Kegiatan Lokal, selanjutnya diikuti Kecamatan Tanjung Baru (548 jiwa/km^2) sebagai Pusat Pelayanan Lingkungan, sedangkan

kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Batipuh Selatan (67 jiwa/km^2). Kepadatan penduduk Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23
Penduduk, Kepadatan Penduduk Kabupaten Tanah Datar menurut Kecamatan Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas	Jumlah Penduduk		Penduduk	Kepadatan Penduduk per Km^2
		(Km^2)	Laki-laki	Perempuan	(Jiwa)	
1.	X Koto	148,65	23.378	22.851	46.229	311
2.	Batipuh	101,17	15.902	15.981	31.883	315
3.	Batipuh Selatan	166,76	5.592	5.625	11.217	67
4.	Pariangan	58,29	10.338	10.406	20.744	356
5.	Rambatan	129,40	18.746	18.434	37.180	287
6.	Lima Kaum	30,64	19.067	18.994	38.061	1242
7.	Tanjung Emas	128,76	12.467	12.580	25.047	195
8.	Padang Ganting	68,62	7.154	7.445	14.599	213
9.	Lintau Buo	110,67	9.921	9.850	19.771	179
10.	Lintau Buo Utara	199,32	18.858	18.794	37.652	189
11.	Sungayang	68,37	9.297	9.374	18.671	273
12.	Sungai Tarab	83,86	16.470	16.224	32.694	390
13.	Salimpaung	56,35	11.720	11.831	23.551	418
14.	Tanjung Baru	26,30	7.224	7.181	14.405	548
Total		**1377,17**	**186.134**	**185.570**	**371.704**	**270**

Sumber : Data diolah Tahun 2020

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020, jumlah penduduk pada tahun 2020 adalah 371.704 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki 186.134 jiwa dan penduduk perempuan 185.570 jiwa.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanah Datar dapat ditinjau dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial dan fokus seni budaya dan olahraga, dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto

Jika dilihat perkembangan PDRB Kabupaten Tanah Datar selama Tahun 2016-2020 kinerja perekonomian Kabupaten Tanah Datar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. PDRB merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian di seluruh wilayah dalam periode tahun tertentu, yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. PDRB menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan indikator faktor produksi lainnya untuk memberikan nilai tambah yang diperoleh dari seluruh aktifitas perekonomian disuatu daerah. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.24.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB pada tahun 2020 mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 dimana pada tahun 2020 PDRB

ADHB mencapai Rp.13,027 Triliun sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp.10.734 Triliun dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2016-2020 adalah 4,96% pertahun.

Hal ini juga menyebabkan nilai PDRB perkapita ADHB tahun 2020 sebesar Rp. 35.047.620 juga lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar Rp. 31.050.990 dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2016-2020 adalah 3,07% pertahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK pada tahun 2020 juga mengalami kenaikan dibanding tahun 2016 dimana pada tahun 2020 PDRB ADHK mencapai Rp. 9.575.503.020.000 sedangkan pada tahun 2016 sebesar Rp.8.355.071.580.000 dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2016-2020 sebesar 3,47% pertahun. Hal ini menyebabkan nilai PDRB perkapita ADHK tahun 2020 sebesar Rp.25.761.100 juga lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar Rp.24.168.140 dengan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2016-2020 sebesar 1,61% pertahun.

Tabel 2.24
PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
						(%)
PDRB ADHB (juta rupiah)	10.734.514,88	11.428.081,54	12.202.819,78	13.086.687,00	13.027.340,94	4,96
PDRB ADHK (juta rupiah)	8.355.071,58	8.782.098,09	9.224.518,53	9.684.476,43	9.575.503,02	3,47
Jumlah Penduduk (orang)	345.706	346.560	347.407	348.219	371.704	1,83
PDRB Perkapita ADHB (ribu rupiah)	31.050,99	32.975,77	35.125,43	37.581,77	35.047,62	3,07
PDRB Perkapita ADHK (ribu rupiah)	24.168,14	25.340,77	26.552,48	27.811,45	25.761,10	1,61
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,11	5,05	4,98	-1,13	3,8

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

2.2.1.2 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam satu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB didefinisikan sebagai nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki bersifat residen atau non-residen.

Dari tahun ke tahun, nilai tambah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan masih dominan bila dibandingkan dengan nilai tambah sektor lainnya. Tercatat pada tahun 2019 kontribusinya mencapai 3,89 Triliun atau 29,75% dari total PDRB Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor kedua terbesar dalam memberikan sumbangannya terhadap pembentukan nilai PDRB Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.25
PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020

Sektor PDRB	PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,491,284.95	362,536.73	3,741,290.98	3,892,889.05	3,883,066.06
Pertambangan dan Penggalian	377,552.01	393,270.52	420,968.44	456,971.36	442,201.55
Industri Pengolahan	1,270,791.51	1,316,353.94	1,346,547.62	1,374,687.68	1,365,584.52
Pengadaan Listrik dan Gas	2,927.21	3,087.01	3,250.73	3,616.00	3,414.14
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	12,149.52	12,768.50	13,221.62	14,293.10	14,728.92
Konstruksi	1,016,058.87	1,115,145.68	1,241,190.09	1,346,599.29	1,318,062.65
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,379,667.85	1,496,826.09	1,637,927.43	1,765,472.15	1,739,337.91
Transportasi dan Pergudangan	888,984.42	968,054.56	1,065,371.89	1,189,769.21	1,102,256.97
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	74,560.47	82,669.05	92,307.60	103,757.26	92,234.91
Informasi dan Komunikasi	444,681.41	486,098.22	545,809.10	617,667.42	666,402.45
Jasa Keuangan dan Asuransi	279,153.76	287,853.72	304,071.24	325,826.00	332,861.56
Real Estate	177,777.94	187,444.48	200,704.50	217,991.00	219,568.86
Jasa Perusahaan	4,063.33	4,375.49	4,799.41	5,295.37	5,139.97
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	651,538.32	716,624.76	763,097.51	844,306.90	899,747.24
Jasa Pendidikan	336,304.53	371,947.30	418,959.66	476,857.00	500,183.13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138,910.55	151,239.60	169,087.58	189,815.23	207,041.54
Jasa lainnya	188,107.73	207,782.89	234,214.37	260,873.00	235,508.53
PDRB	10,734,514.88	11,428,081.54	12,202,819.78	13,086,687.00	13,027,340.94

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

PDRB ADHB menurut lapangan usaha selalu menunjukkan trend yang positif, selalu meningkat setiap tahun. Perkembangan PDRB ADHB 2016–2020 tampak dalam Grafik 2.1 :

Grafik 2.1
Perkembangan PDRB ADHB Kabupaten Tanah Datar menurut Lapangan Usaha Tahun 2016–2020

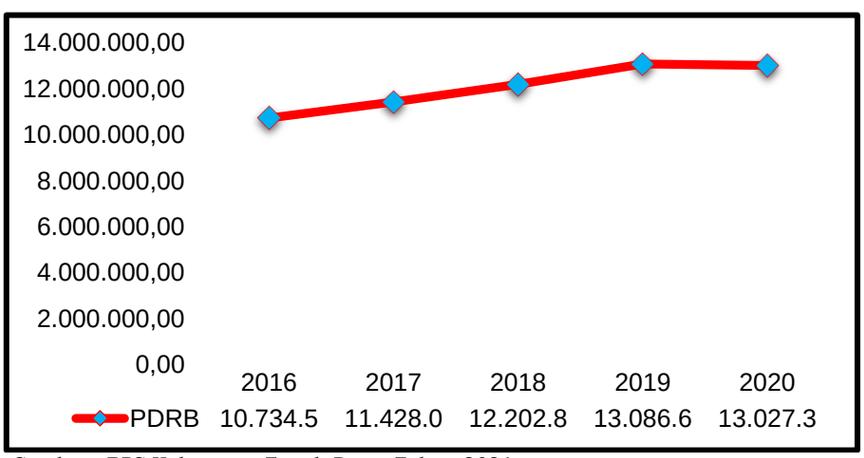

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Angka PDRB sebagaimana tertera pada Garfik 2.1 di atas terdistribusi ke berbagai sektor dan sub sektor perekonomian daerah sebagaimana tertera pada Tabel 2.26 di bawah ini.

Tabel 2.26
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020

Sektor PDRB	PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	32,52	31,73	30,66	29,75	29,81
Pertambangan dan Penggalian	3,52	3,44	3,45	3,49	3,39
Industri Pengolahan	11,84	11,52	11,03	10,50	10,48
Pengadaan Listrik dan Gas	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Konstruksi	9,47	9,76	10,17	10,29	10,12
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,85	13,10	13,42	13,49	13,35
Transportasi dan Pergudangan	8,28	8,47	8,73	9,09	8,46
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,69	0,72	0,76	0,79	0,71
Informasi dan Komunikasi	4,14	4,25	4,47	4,72	5,12
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,60	2,52	2,49	2,49	2,56
Real Estate	1,66	1,64	1,64	1,67	1,69
Jasa Perusahaan	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,07	6,27	6,25	6,45	6,91
Jasa Pendidikan	3,13	3,25	3,43	3,64	3,84
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,29	1,32	1,39	1,45	1,59
Jasa lainnya	1,75	1,82	1,92	1,99	1,81
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Apabila dicermati lebih jauh meskipun mendominasi perekonomian daerah, kontribusi/peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan justru menunjukkan kecenderungan menurun setiap tahunnya selama tahun 2016–2020. Hal yang sama terjadi pada lapangan usaha Industri Pengolahan. Peranan lapangan usaha lainnya cenderung tidak mengalami perubahan (cenderung konstan) walaupun secara umum, apabila dilihat dari nilainya, PDRB Kabupaten Tanah Datar cenderung menunjukkan peningkatan setiap tahun. Hal ini sangat mempengaruhi kepada kondisi laju pertumbuhan ekonomi, artinya dengan dominannya sektor pertanian maka sektor pertanian menjadi penentu pertumbuhan ekonomi di Tanah Datar, ketika sektor ini melambat maka berpengaruh terhadap laju pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan. Perlambatan sektor pertanian ini rentan terpengaruh dengan kondisi alam, serangan hama maupun kebijakan pusat dan lainnya.

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa keterkaitan antar lapangan usaha dan daya dorong terhadap produktivitas

masih lemah. Tingginya produksi pertanian belum diiringi dengan peningkatan industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar masih bergerak di sektor hulu, sehingga belum mampu meningkatkan nilai tambah dan mengakibatkan rendahnya daya saing ekonomi daerah, untuk itu perlu ditetapkan kebijakan yang bisa mengatasi permasalahan tersebut.

Selanjutnya, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB – ADHK) disusun berdasarkan harga dasar pada tahun dasar yang telah ditetapkan dan digunakan untuk mengetahui atau mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga (inflasi). Artinya PDRB ADHK digunakan untuk melihat kenaikan PDRB secara riil baik dalam bentuk sektoral maupun keseluruhan dengan meniadakan faktor inflasi yang mungkin ikut mempengaruhi kenaikan dari angka PDRB. Produk Domestik menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan apabila dikaitkan dengan data mengenai tenaga kerja dan barang modal yang dipakai dalam proses produksi dapat memberikan gambaran tentang tingkat produktifitas dan kapasitas dari masing-masing lapangan usaha tersebut.

Tabel 2.27
PDRB Kabupaten Tanah Datar Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016 – 2020

Sektor PDRB	PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,603,988.07	2,688,954.75	2,767,087.95	2,828,698.86	2,858,358.64
Pertambangan dan Penggalian	243,890.42	251,836.57	266,507.16	282,536.39	271,844.42
Industri Pengolahan	1,051,127.92	1,077,249.02	1,091,254.60	1,105,573.40	1,083,186.86
Pengadaan Listrik dan Gas	1,887.74	1,959.27	2,033.98	2,077.22	1,942.01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	10,002.54	10,361.60	10,620.88	11,141.16	11,474.74
Konstruksi	772,651.28	835,974.36	899,835.22	964,972.88	916,580,10
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,084,685.19	1,162,700.38	1,245,250.81	1,325,291.46	1,321,099,25
Transportasi dan Pergudangan	736,315.87	791,815.68	848,387.86	918,445.62	829,324,75
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	50,871.15	55,616.70	60,443.96	66,057.52	58,200,24
Informasi dan Komunikasi	451,978.65	486,039.78	527,726.76	574,051.99	623,442,51
Jasa Keuangan dan Asuransi	223,925.05	227,500.02	230,739.18	237,861.75	239,196,69
Real Estate	130,989.24	136,122.61	142,237.10	149,943.00	149,978,89
Jasa Perusahaan	3,071.67	3,258.93	3,427.84	3,629.94	3,460,69
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	512,930.72	535,084.70	567,627.82	608,603.83	604,421,29
Jasa Pendidikan	229,433.09	250,059.49	271,266.66	293,603.00	305,649,60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107,466.12	115,287.85	124,312.93	133,085.41	141,308,19
Jasa lainnya	139,856.85	152,276.38	165,757.82	178,903.00	156,034,15
PDRB	8,355,071.58	8,782,098.09	9,224,518.53	9,684,476.43	9,575,503,02

Sumber : BPS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai PDRB ADHK Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan selama tahun 2016-2020, sektor yang memiliki tingkat produktivitas terbanyak yaitu sektor pertanian diikuti

sektor perdagangan dan industri pengolahan. Hendaknya ketika menjadi penopang perekonomian daerah beberapa sektor tersebut harus dimaksimalkan perannya dengan menggenjot pertumbuhannya melalui kebijakan yang mendukung.

2.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi merupakan ukuran yang dapat menggambarkan kecenderungan kenaikan tingkat harga secara terus menerus dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Inflasi dapat ditunjukkan oleh fluktuasi pada Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK merupakan indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK dilakukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat. Perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari harga barang/jasa yang akan mencerminkan daya beli masyarakat.

Penghitungan IHK di Provinsi Sumatera Barat hanya dilakukan pada kota Padang dan Bukittinggi. Dengan demikian, kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Datar secara umum dipengaruhi oleh kondisi perekonomian pada wilayah terdekat.

Berikut adalah perbandingan inflasi Kabupaten Tanah Datar dan Nasional tahun 2016 – 2020 :

Grafik 2.2
Laju Inflasi Tahun 2016–2020

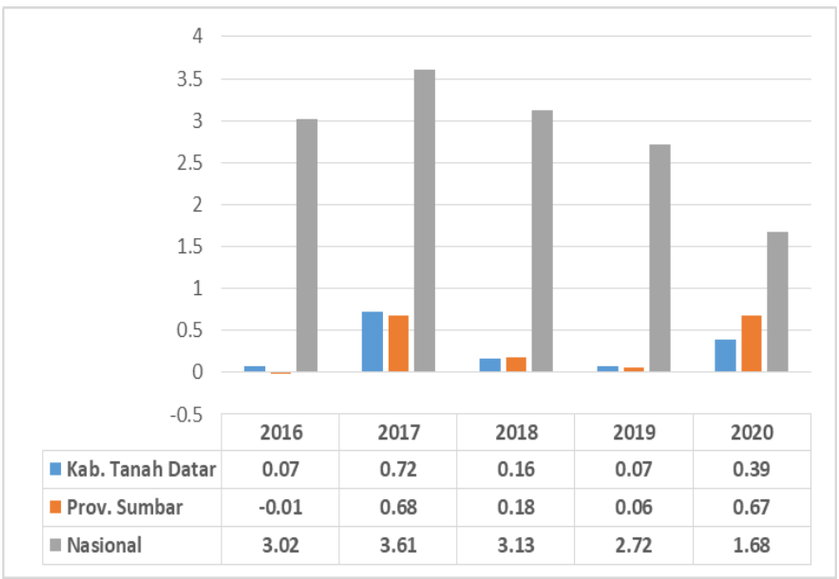

	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Tanah Datar	0.07	0.72	0.16	0.07	0.39
Prov. Sumbar	-0.01	0.68	0.18	0.06	0.67
Nasional	3.02	3.61	3.13	2.72	1.68

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

2.2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Dalam periode tahun 2015–2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar menunjukkan fluktuasi. Secara umum pada periode tahun 2015–2019 terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi, yaitu dari 5,33% pada tahun 2015 menjadi 5,01% pada tahun 2019 yang menandakan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi Kabupaten Tanah Datar, khususnya aktivitas di bidang pertanian yang dari tahun ke tahun masih menjadi kegiatan ekonomi utama masyarakat Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.28
Laju Pertumbuhan Riil PDRB menurut Lapangan Usaha (persen), 2016 – 2020

Sektor PDRB	Laju Pertumbuhan ADHK				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.11	3.26	2.91	2.23	1.05
Pertambangan dan Penggalian	6.66	3.26	5.83	6.01	-3.78
Industri Pengolahan	5.08	2.49	1.30	1.31	-2.02
Pengadaan Listrik dan Gas	10.05	3.79	3.81	2.13	-6.51
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	5.80	3.59	2.50	4.90	2.99
Konstruksi	7.64	8.20	7.64	7.24	-5.01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.92	7.19	7.10	6.43	-0.32
Transportasi dan Pergudangan	8.45	7.54	7.14	8.26	-9.70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.29	9.33	8.68	9.29	-11.89
Informasi dan Komunikasi	9.53	7.54	8.58	8.78	8.60
Jasa Keuangan dan Asuransi	7.16	1.60	1.42	3.09	0.56
Real Estate	4.68	3.92	4.49	5.42	0.02
Jasa Perusahaan	5.81	6.10	5.18	5.90	4.66
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4.77	4.32	6.80	7.22	-0.69
Jasa Pendidikan	8.49	8.99	8.48	8.23	4.10
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.80	7.28	7.83	7.06	6.18
Jasa lainnya	8.87	8.88	8.85	7.93	-12.78
PDRB	5.03	5.11	5.04	4.99	-1.13

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Berikut ini menggambarkan perbandingan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional:

Grafik 2.3
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat, Nasional dan Tanah Datar tahun 2016–2020

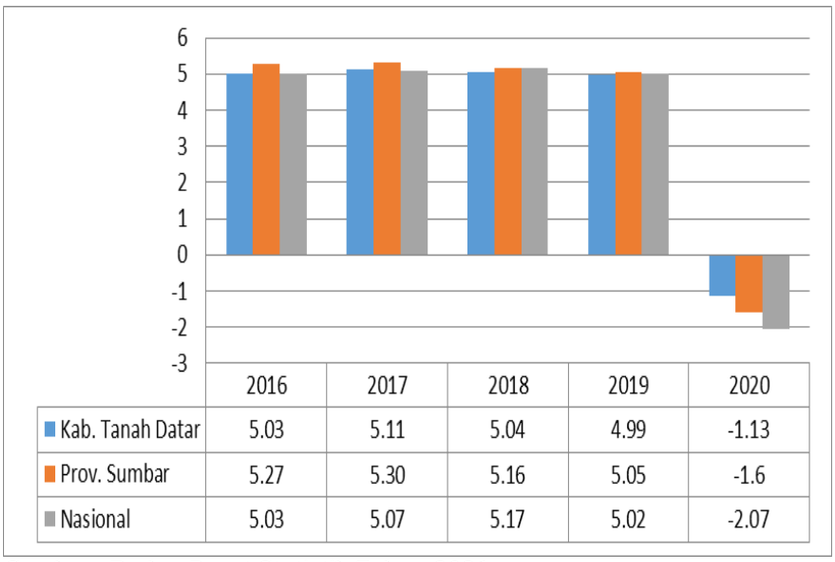

	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Tanah Datar	5.03	5.11	5.04	4.99	-1.13
Prov. Sumbar	5.27	5.30	5.16	5.05	-1.6
Nasional	5.03	5.07	5.17	5.02	-2.07

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Dari tabel diatas capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Datar tahun 2018 dan 2019 berubah, hal ini disebabkan adanya penyesuaian perhitungan laju pertumbuhan ekonomi. Perbaikan sektor-sektor penyumbang PDRB terbesar bagi Kabupaten Tanah Datar sangat mempengaruhi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi.

2.2.1.5 PDRB Perkapita

Pengukuran kinerja ekonomi daerah salah satunya bisa diukur menggunakan nilai PDRB Perkapita. PDRB Perkapita diperoleh dari nilai

PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada akitifitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

Indikator lain yang sering digunakan sebagai tolok ukur kekuatan ekonomi suatu daerah adalah nilai PDRB perkapita. Secara konsepsional PDRB perkapita merupakan hasil bagi antara nilai nominal PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Dengan demikian, PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan dan diterima secara rata-rata oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2020, PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar mencapai 35,05 juta rupiah.

Grafik 2.4
PDB dan PDRB Perkapita menurut Harga Berlaku (juta rupiah), 2016–2020

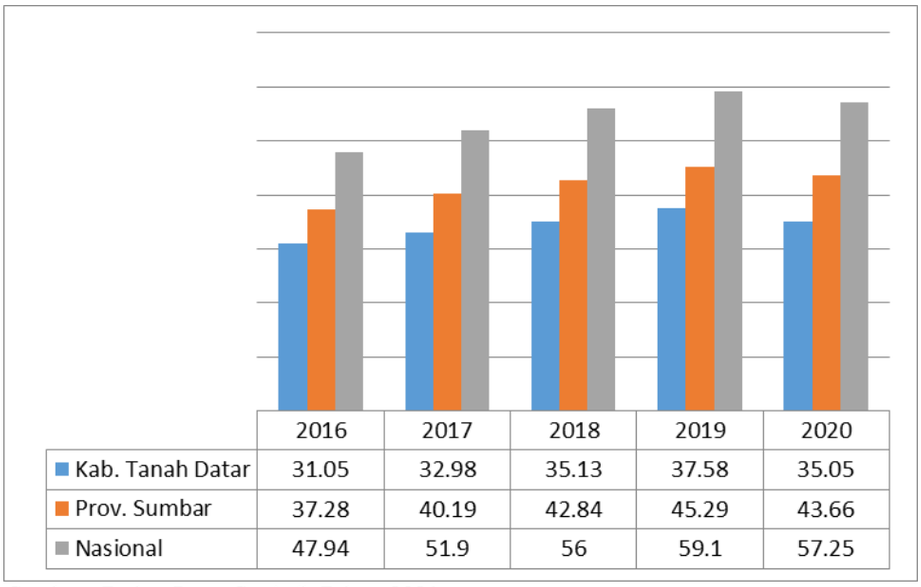

	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Tanah Datar	31.05	32.98	35.13	37.58	35.05
Prov. Sumbar	37.28	40.19	42.84	45.29	43.66
Nasional	47.94	51.9	56	59.1	57.25

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Dari grafik diatas dapat dilihat PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2016-2020 masih dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, untuk itu perlu ditetapkan beberapa terobosan oleh Pemerintah Daerah berupa kebijakan yang akurat agar PDRB Perkapita Kabupaten Tanah Datar dapat melebihi capaian Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dengan memperhatikan sektor-sektor penyumbang bagi PDRB.

2.2.1.6 Indeks Gini

Pemerataan hasil pembangunan sangat erat kaitannya dengan permasalahan kemiskinan. Secara umum, semakin lebar jurang pemisah antara penduduk kaya dengan penduduk miskin, menandakan kemiskinan semakin meluas dan begitu pula sebaliknya. Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemerataaan pendapatan salah satunya adalah Gini Ratio (Indeks Gini), yang membagi kesenjangan/ketimpangan ke dalam kriteria:

a. G < 0,30 berarti ketimpangan rendah
b. 0,30 ≤ G ≤ 0,50 berarti ketimpangan sedang
c. > 0,50 berarti ketimpangan tinggi

Grafik 2.5 menggambarkan Indeks Gini Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2020:

Grafik 2.5
Indeks Gini, 2016 – 2020

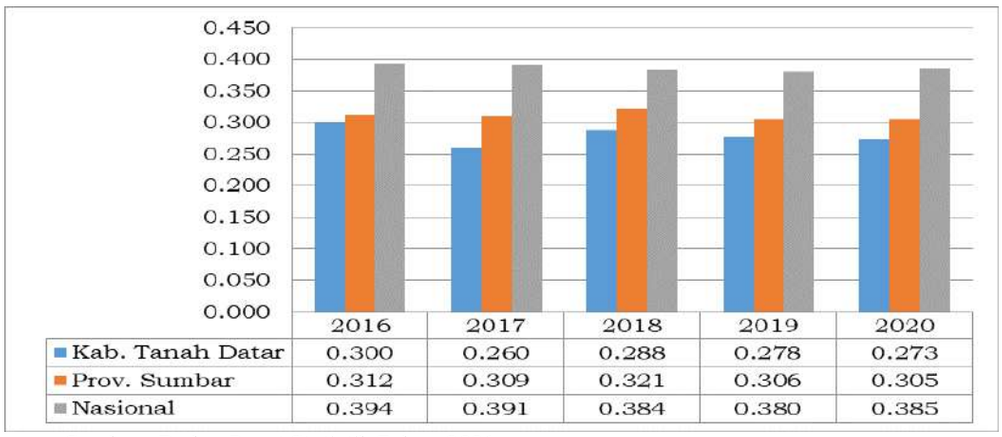

	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Tanah Datar	0.300	0.260	0.288	0.278	0.273
Prov. Sumbar	0.312	0.309	0.321	0.306	0.305
Nasional	0.394	0.391	0.384	0.380	0.385

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Berdasarkan Grafik 2.4, selama tahun 2016 – 2020 Indeks Gini Kabupaten Tanah Datar mengalami fluktuatif dimana terjadi penurunan pada tahun 2018 yaitu 0,288 dari tahun 2017 sebesar 0,278 di tahun 2019 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,278 dan Indeks Gini pada tahun 2020 sebesar 0,273. Hal ini mengindikasikan tingkat ketimpangan pendapatan di kabupaten Tanah Datar masuk dalam kategori rendah, lebih baik dari provinsi dan nasional.

2.2.1.7 Kemiskinan

Pada Tahun 2020, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan Rp 420.049,00) di Kabupaten Tanah Datar mencapai 15.340 orang (4,40 persen), turun sebesar 4.290 orang dibandingkan dengan kondisi Tahun 2016 yang sebesar 19.630 orang (5,68 persen). Persentase Penduduk Miskin Tahun 2020 turun 1,28 persen dari Tahun 2016.

Grafik 2.6
Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020

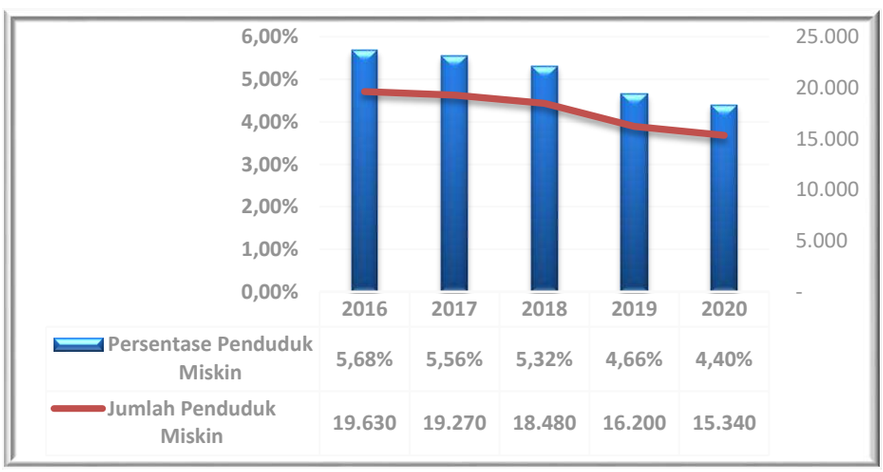

	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penduduk Miskin	5,68%	5,56%	5,32%	4,66%	4,40%
Jumlah Penduduk Miskin	19.630	19.270	18.480	16.200	15.340

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan selama kurun waktu 2016-2020 berfluktuatif. Pada periode 2019-2020, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tidak mengalami perubahan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada Tahun 2020 sebesar 0,42. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) juga tidak mengalami perubahan yaitu sebesar 0,06 pada periode yang sama.

Grafik 2.7
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

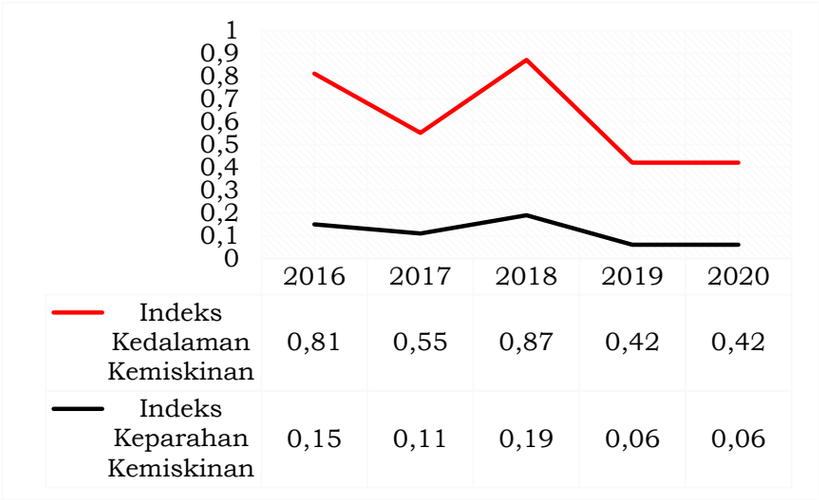

	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kedalaman Kemiskinan	0,81	0,55	0,87	0,42	0,42
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,15	0,11	0,19	0,06	0,06

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, Secara persentase penurunan selama kurun waktu 2016-2020 Kabupaten Tanah Datar lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat tetapi masih dibawah nasional capaiannya. Pada tahun 2016 persentase kemiskinan nasional sebesar 10,7% dan tahun 2020 sebesar 9,78% atau turun sebesar 0,92%, Provinsi Sumatera Barat turun sebesar 0,81% sedangkan Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu yang sama berhasil menurunkan kemiskinan hingga turun sebesar 0,28%.

Grafik 2.8
Angka Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016-2020

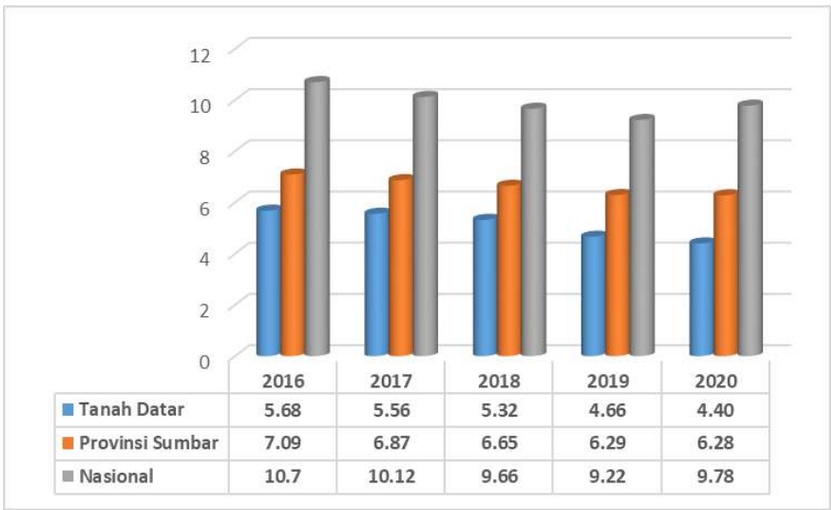

	2016	2017	2018	2019	2020
Tanah Datar	5.68	5.56	5.32	4.66	4.40
Provinsi Sumbar	7.09	6.87	6.65	6.29	6.28
Nasional	10.7	10.12	9.66	9.22	9.78

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Berdasarkan grafik diatas, meskipun angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar lebih rendah dari Nasional dan Provinsi Sumatera Barat namun Pemerintah Daerah masih berupaya untuk menekan angka kemiskinan, meskipun banyak penduduk yang keluar dari kemiskinan tapi masih banyak yang rentan miskin. Penduduk yang sudah keluar dari garis kemiskinan bukan berarti dia akan selamanya keluar dari garis kemiskinan.

Tabel 2.29
Kondisi Kemiskinan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Miskin (ribu jiwa)	19.630	19.270	18.480	16.200	15.340
% Penduduk Miskin	5,68	5,56	5,32	4,66	4,40
Garis Kemiskinan (Rp/kap/bulan)	346.267	361.037	369.833	379.041	420.049
Koefisien Gini	0.3	0.26	0.29	0.28	0.28

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama periode 2016 – 2020, Garis Kemiskinan naik sebesar 7,38% yaitu dari Rp. 346.267,- per kapita per bulan pada tahun 2016 menjadi Rp. 420.049,- per kapita per bulan pada tahun 2020. Angka Koefisien Gini merupakan ukuran kemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan. Angka koefisien Gini terletak antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nol merupakan kemerataan sempurna dan satu menggambarkan ketidakmerataan sempurna. Indeks gini Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 sebesar 0,28 turun sebesar 0,02 dari tahun 2016 yang sebesar 0,3. Dari hasil capaian diatas Kabupaten Tanah Datar dikategorikan tingkat ketimpangan rendah.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

2.2.2.1 Pendidikan

2.2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: pendidikan, kesehatan dan pengeluaran. Kegunaan IPM adalah untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

Angka IPM menjelaskan kesempatan masyarakat untuk mengakses pelayanan, khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-

rata ukur (geometrik) dari indeks harapan hidup (rata-rata usia harapan hidup saat lahir), indeks pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah) dan indeks standar hidup layak.

Selama periode tahun 2016-2020, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tanah Datar menunjukkan trend yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya secara ekonomi (pendapatan), tetapi juga dalam hal pendidikan dan kesehatan. Grafik 2.9 menggambarkan perkembangan IPM Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016–2020 :

Grafik 2.9
Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 2016–2020

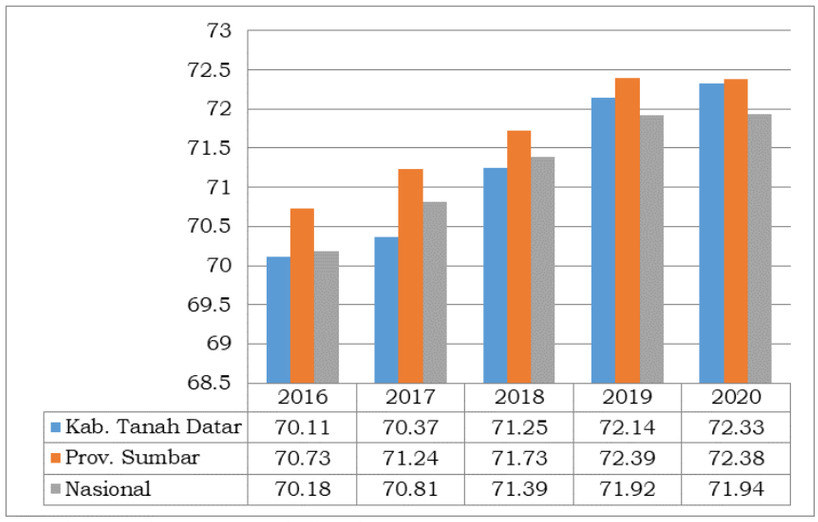

	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Tanah Datar	70.11	70.37	71.25	72.14	72.33
Prov. Sumbar	70.73	71.24	71.73	72.39	72.38
Nasional	70.18	70.81	71.39	71.92	71.94

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Berdasarkan Kategori *Human Development Index Reduction Short Fall,* pertumbuhan IPM dikategorikan sebagai berikut :

1. Sangat lambat jika < 1,3
2. Lambat jika 1,3 – 1,5
3. Menengah jika 1,5 – 1,7
4. Cepat jika > 1,7

Dari grafik 2.9 diatas, secara umum capaian IPM Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016–2020 mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2020 nilai IPM Kabupaten Tanah Datar sebesar 72,33 berada dibawah nilai Provinsi Sumatera Barat 72,38 tetapi masih berada diatas nasional dengan nilai IPM 71,94. Kategori IPM Kabupaten Tanah Datar tergolong pada kategori IPM Tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,78% pertahun. IPM Kabupaten Tanah Datar berada pada posisi 9 tertinggi, apabila dibandingkan dengan capaian IPM kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat, dan berada pada posisi 2 (dua) di bawah Kabupaten Agam (72,37), sebagaimana terlihat pada Grafik 2.10 :

Grafik 2.10
IPM Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat, 2020

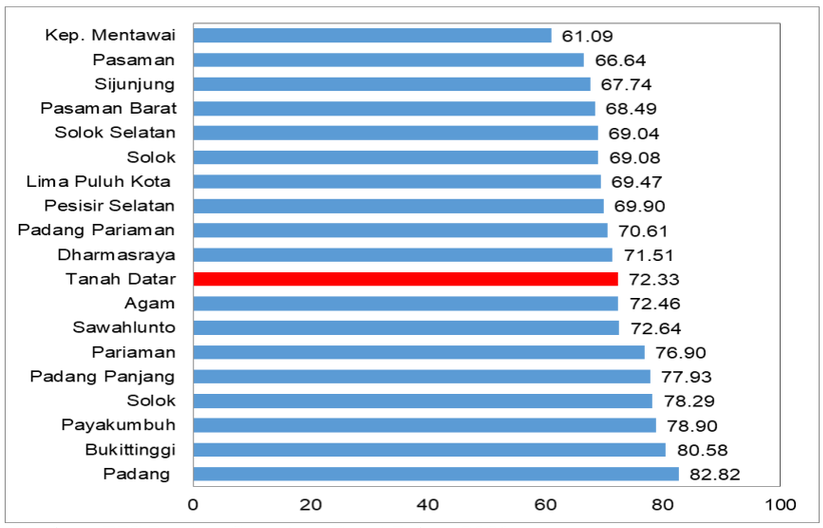

Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

2.2.2.1.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)

Indikator kemajuan pendidikan dapat diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) disetiap jenjang pendidikan. Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan tertentu, berapapun usianya, dengan jumlah penduduk pada jenjang usia yang bersesuaian. APK secara umum menunjukkan tingkat partisipasi penduduk dalam pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu yang bersesuaian usianya dengan jumlah penduduk pada jenjang usia yang bersesuaian.

Tabel 2.30
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016–2020

Jenjang Pendidikan	APK (%)					APM (%)				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	104,28	99,90	100,00	98,18	102,34	92,22	88,26	91,59	88,11	91,20
SMP/MTs	104,08	104,71	99,49	98,15	99,64	82,92	83,49	79,56	78,45	76,28

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.30, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami fluktuasi pada tahun 2016 104,28% tetapi pada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 mengalami penurunan. Ini artinya masih ada anak usia sekolah umur 7-12 tidak bersekolah sedangkan APK pada jenjang SMP/MTs pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan bertujuan mengukur banyaknya usia sekolah yang bersekolah tepat waktu dalam suatu jenjang pendidikan dari setiap 100 penduduk usia sekolah, yaitu SD 7-12 tahun, SLTP 13-15 tahun. Dari data diatas terlihat bahwa, semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat partisipasi sekolah semakin kecil, hal ini di sebabkan oleh keterbatasan ekonomi.

2.2.2.1.3 Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah angka yang menunjukkan rata-rata lama sekolah penduduk yang berusia 25 tahun keatas, mulai dari pendidikan dasar sampai dengan tingkat pendidikan terakhir. Idealnya, angka ini dihitung berdasarkan lamanya seseorang bersekolah sehingga dengan demikian, semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin baik pula tingkat pendidikan seseorang.

Grafik 2.11
Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020

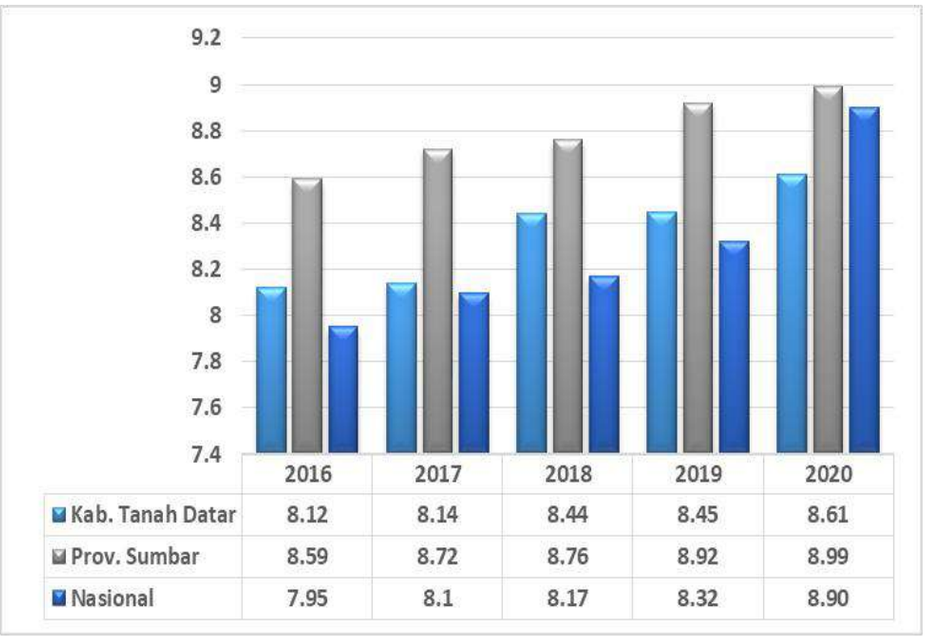

	2016	2017	2018	2019	2020
Kab. Tanah Datar	8.12	8.14	8.44	8.45	8.61
Prov. Sumbar	8.59	8.72	8.76	8.92	8.99
Nasional	7.95	8.1	8.17	8.32	8.90

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Rata-rata lama sekolah pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 8,61 jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 8,45, namun nilai ini masih di bawah angka rata-rata lama sekolah pada tingkat provinsi juga nasional.

2.2.2.1.4 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah secara rata-rata tumbuh sebesar 1,58 persen pertahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah serta adanya ketersediaan fasilitas untuk sekolah pada semua jenjang pendidikan. Berdasarkan Grafik 2.8, selama tahun 2016 – 2020 Harapan Lama Sekolah Kabupaten Tanah Datar mengalami kenaikan. Pada tahun 2020, Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Tanah Datar telah mencapai 14,33 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 tahun ke atas memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga perguruan tinggi atau lulus D2. Kedepan hendaknya harapan lama sekolah ini dapat ditingkatkan hingga penduduk berusia 7 (tujuh) tahun keatas mampu menyelesaikan jenjang perguruan tinggi (S1).

Grafik 2.12
Harapan Lama Sekolah, 2016 – 2020

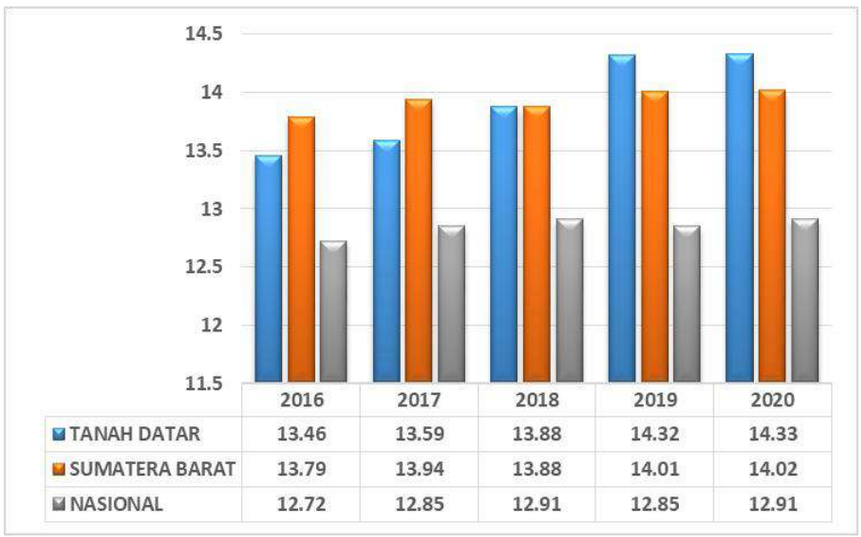

	2016	2017	2018	2019	2020
TANAH DATAR	13.46	13.59	13.88	14.32	14.33
SUMATERA BARAT	13.79	13.94	13.88	14.01	14.02
NASIONAL	12.72	12.85	12.91	12.85	12.91

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

2.2.2.2 Kesehatan

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016-2020 secara umum telah mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, penyuluhan serta peningkatan keterampilan petugas kesehatan melalui asuhan persalinan normal dan juga pemberian bantuan berobat keluarga miskin melalui program dan kegiatan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.

2.2.2.2.1 Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI)

Salah satu indikator dalam penilaian tingkat kesehatan masyarakat adalah Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka kematian bayi adalah angka kematian yang terjadi pada bayi sebelum mencapai usia satu tahun. Angka kematian bayi (umur penduduk dibawah satu tahun) adalah jumlah kematian bayi yang dibandingkan dengan jumlah kelahiran bayi pada tahun tertentu per seribu kelahiran hidup. Angka kematian ibu adalah merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Salah satu faktor tingginya angka kematian ibu di Indonesia adalah disebabkan karena relatif masih rendahnya pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan. Penurunan angka kematian Ibu, bukan saja disebabkan oleh faktor kesehatan, ekonomi, dan cultur tetapi juga ditentukan oleh kecenderungan usia perkawinan.

Angka kematian bayi di Kabupaten Tanah Datar sejak 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kondisi fluktuatif. Pada tahun 2016 angka kematian bayi sebesar 8.1/1000 kelahiran hidup dan meningkat menjadi 11,2/1000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Angka ini masih rendah dari target SDGs (12,3 per 1000 kelahiran hidup) juga masih rendah apabila mengacu pada Kepmenkes No.1202 Tahun 2003 standar Indonesia Sehat yaitu sebesar 40 per 1000 kelahiran hidup. Masih adanya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Tanah Datar sangat dipengaruhi pendapatan perkapita, jumlah anggota keluarga, pengetahuan ibu terhadap bayi dan keadaan gizi keluarga.

Kabupaten Tanah Datar memiliki angka kematian ibu yang cukup tinggi (target SDGs yaitu 70 per 100.000). Pada tahun 2016 AKI di

Kabupaten Tanah Datar adalah sebesar 136.9/100.000 kelahiran hidup dan menurun menjadi menjadi 129.76/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020. Penurunan capaian persentase persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan disebabkan antara lain: Adanya situasi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, masih adanya persalinan di Polindes, kesulitan akses Ibu Bersalin ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang pada umumnya disebabkan oleh faktor geografis, tenaga kesehatan yang tidak berada ditempat, kompetensi tenaga kesehatan yang belum maksimal serta masih adanya persalinan yang dilakukan oleh dukun.

Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) adalah kunjungan bayi pasca kelahiran ke sarana layanan kesehatan untuk mendapatkan layanan dari tenaga medis. Capaian Kunjungan Neonatal akan memberikan pengaruh terhadap peningkatan Angka Kematian Bayi (AKB). Beberapa faktor penghambat capaian Kunjugan Neonatal Pertama (KN1) antara lain adalah: pandemi COVID-19, masih adanya persalinan dengan menggunakan tenaga non kesehatan, masih terdapatnya kesulitan akses ke Pelayanan Kesehatan yang pada umumnya disebabkan akibat kondisi geografis yang sulit, tenaga kesehatan tidak berada ditempat, kompetensi tenaga kesehatan yang belum maksimal serta pelayanan Neonatus yang belum memenuhi sesuai standar. Penurunan yang terjadi disebabkan oleh beberapa hal diantaranya munculnya kesadaran masyarakat untuk berobat ke pustu, puskemas, dan rumah sakit untuk berobat.

Grafik 2.13
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020

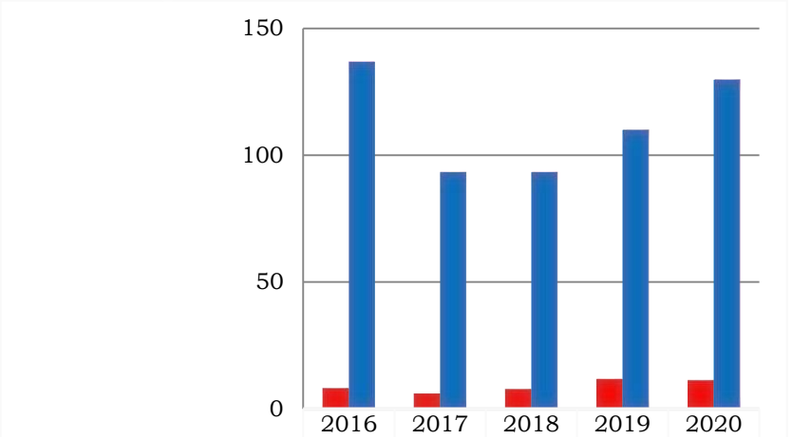

	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi	8,1	6,1	7,7	11,66	11,2
Angka Kematian Ibu Melahirkan	136,9	93,3	93,3	110	129,76

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2021

Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2020 yakni 17,8%, capaian prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita ini lebih rendah jika dibandingkan dengan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Provinsi Sumatera Barat sebesar 27,57% dan prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita Nasional sebesar 27,67%.

Tingkat prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2020 terjadi penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2019 (2019 sebesar 20,9% dan 2020 sebesar 17,8%), setiap tahun kondisi prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek)

pada balita dapat ditekan jumlahnya. Pada tahun 2020 prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita.

Grafik 2.14
Persentase Prevalensi Stunting Tahun 2016-2020

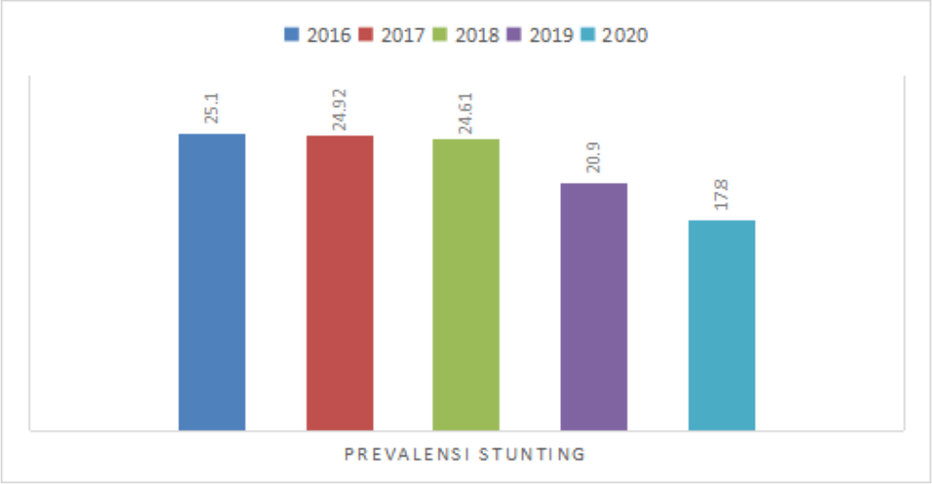

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2020

2.2.2.2.2 Umur Harapan Hidup

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2016 hingga 2020, Kabupaten Tanah Datar telah berhasil meningkatkan Umur Harapan Hidup saat lahir sebesar 1.01 tahun, yaitu dari 68,93 tahun menjadi 69,94 tahun meskipun Umur Harapan Hidup Global menurut *WHO* adalah 72 Tahun. Selama periode tersebut, secara rata-rata Umur Harapan Hidup tumbuh sebesar 0,21 persen per tahun. Kinerja pembangunan kesehatan dapat dilihat pada indikator Umur Harapan Hidup tergambar pada Grafik 2.15 :

Grafik 2.15
Umur Harapan Hidup Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2016 – 2020

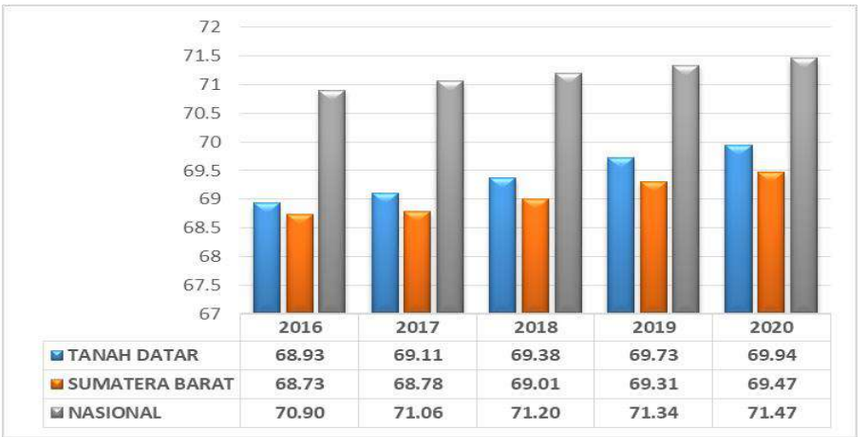

	2016	2017	2018	2019	2020
TANAH DATAR	68.93	69.11	69.38	69.73	69.94
SUMATERA BARAT	68.73	68.78	69.01	69.31	69.47
NASIONAL	70.90	71.06	71.20	71.34	71.47

Sumber : Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa Umur Harapan Hidup Kabupaten Tanah Datar tahun 2020 berada pada 69,94 tahun, terjadi kenaikan setiap tahunnya hal ini menandakan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat.

2.2.2.3 Kesempatan Kerja

Keadaan ketenagakerjaan di Kabupaten Tanah Datar pada periode 2016-2019 menunjukkan kondisi yang cukup baik. Hal itu tergambar dari turunnya tingkat pengangguran dan naiknya jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja juga mengalami peningkatan. Namun, jumlah pengangguran pada tahun 2020 mengalami peningkatan, hal ini dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19. Sementara itu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu dari 66,66% menjadi 69,42%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 mencapai 4,79%, mengalami peningkatan dibandingkan TPT tahun 2016 sebesar 4,02% atau naik sebesar 0,77 %. Hal ini diakibatkan oleh pandemic covid-19 yang memberi dampak meningkatnya jumlah penduduk yang kehilangan pekerjaan.

Tabel 2.31
Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Angkatan Kerja (orang)	164.485	166.245	172.88	174.454	179.341
	- Bekerja (orang)	157.144	160.062	166.215	168.968	170.744
	- Pengangguran (orang)	7.341	6.183	6.665	5.486	8.597
2	TPAK (%)	66,66	66,51	68,90	69,13	69,42
3	TPT (%)	4,02	3,72	4,01	3,20	4,79
4	TKK (%)	95,98	96,28	95,99	96,80	95,21

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Penyerapan tenaga kerja hingga tahun 2020 masih didominasi penduduk bekerja berpendidikan rendah yakni tamat Sekolah Dasar (SD) kebawah sebanyak 61,287 orang atau 35,89%, tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 36,506 orang atau 21,38%, tamat SMA/SMK sebanyak 48,995 orang atau 28,69% dengan total sebanyak 170.744 orang. Sedangkan berpendidikan tinggi hanya sebanyak 23,956 orang atau 14,03% yang terdiri dari 7,046 orang berpendidikan Diploma atau 4,13% dan 16,910 orang atau 9,90% berpendidikan Universitas. Pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas tenaga kerja di Tanah Datar dimana tamat SD kebawah masih mendominasi.

Jika ditelisik lebih dalam, jumlah tenaga kerja tamatan SD didominasi diserap oleh sektor informal pertanian. Cukup banyak penduduk tamat SD berusia lanjut yang bekerja pada sektor pertanian ini, hal ini merupakan tatantangan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam peningkatan kualitas tenaga kerja. Perbaikan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan slaah satunya dengan memanfaatkan peran BLK(Balai Latihan Kerja) dalam rangka penciptaan tenaga kerja yang berdaya saing. Selain itu dibutuhkan koordinasi lintas sektoral dalam rangka perbaikan kualitas tenaga kerja dan peningkatan penyerapan angkatan kerja yang setiap tahun mengalami tren peningkatan jumlah di Kabupaten Tanah Datar.

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

2.2.3.1 Seni Budaya

Pembangunan bidang seni dan budaya sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Pembangunan sektor kebudayaan di Kabupaten Tanah Datar harus terus dilakukan untuk menjaga kultur budaya Tanah Datar yang dihormati dan dijunjung tinggi. Pada tahun 2020,

tercatat sedikitnya terdapat 697 grup kesenian di Kabupaten Tanah Datar. Grup kesenian tersebut merupakan grup kesenian tradisonal yang terdiri dari Randai, Talempong, Pencak Silat, Tari Rakyat, dan Saluang Rabab serta grup kesenian non tradisional yang terdiri dari Band, Drama, Rebana, dan Shalawat Dulang. Perwujudan Tanah Datar yang Berdaya Saing Tinggi diperlukan dengan memulai penguatan pondasi kultur dan budaya melalui grup-grup kesenian daerah. Kabupaten Tanah Datar adalah daerah yang kaya akan seni dan budaya kearifan lokal.

Tabel 2.32
Jumlah dan Jenis Grup Kesenian, 2016 – 2020

No	Grup Kesenian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tradisional	150	150	223	450	497
	- Randai	42	42	43	110	112
	- Talempong	40	40	41	65	70
	- Pencak Silat	7	7	75	150	165
	- Tari Rakyat	22	22	25	75	85
	- Saluang Rabab	39	39	39	50	65
2	Non Tradisional	120	120	123	172	200
	- Band	8	8	9	15	17
	- Rebana	47	47	47	75	85
	- Drama	1	1	3	7	13
	- Salawat Dulang	64	64	64	75	85
	Jumlah	270	270	346	622	697

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Datar Tahun 2021

Terjadi peningkatan jumlah kesenian tradisional dan non tradisional pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya. Dari Tabel diatas terlihat bahwa jumlah grup kesenian di Kabupaten Tanah Datar selama kurun waktu 5 tahun, dimana tabel tersebut menunjukkan peningkatan, pemerintah daerah harus terus berusaha menjaga kelestarian seni dan budaya dengan menjaga eksistensi kelompok seni dan budaya daerah.

Tabel 2.33
Aspek Kebudayaan, 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	n/a	n/a	n/a	10	1
2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	n/a	n/a	n/a	2	2
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	n/a	n/a	n/a	284	284
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	n/a	n/a	n/a	167	167

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanah Datar Tahun 2021

Penyelenggaraan festival seni dan budaya Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang melarang adanya kerumunan.

2.2.3.2 Olah Raga

Jumlah sarana dan prasarana olahraga sebagai penunjang kegiatan pemuda dan olahraga dapat dilihat pada table 2.34:

Tabel 2.34
Aspek Olahraga, 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan pembinaan olahraga	n/a	n/a	n/a	80	50
2.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	n/a	n/a	n/a	60	45
3.	Cakupan pembinaan atlet muda	n/a	n/a	n/a	80	40
4.	Jumlah atlet berprestasi	n/a	n/a	n/a	130	0
5.	Jumlah prestasi olahraga	n/a	n/a	n/a	25	0
6.	Sarana Olahraga	562	562	578	403	567
	-Sepak Bola	101	101	101	106	88
	-Futsal	0	0	0	10	35
	-Bola Volley	209	209	222	169	201
	-Bulutangkis	88	88	88	63	117
	-Sepak Takraw	117	117	117	47	84
	-Tenis Lapangan	5	5	4	3	6
	-Bola Basket	37	37	37	4	32
	-Panjat Tebing	2	2	2	1	1
	-Kolam Renang	3	3	3	0	3

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kab. Tanah Datar Tahun 2021

Dari tabel di atas terlihat jumlah sarana olah raga di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016 sebanyak 562 unit mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 567 unit, terutama sarana futsal, bola volley, bulu tangkis dan sepak takraw. Pelaksanaan turnamen sepak bola antar nagari yang rutin menjadi agenda Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan beberapa turnamen bersifat nonreguler. Hal ini menjadi salah satu pendorong agar jumlah sarana olahraga sepak bola meningkat, disamping minat masyarakat untuk memanfaatkan sarana olahraga dari tahun ke tahun sudah optimal.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

Gambaran kondisi Kabupaten Tanah Datar pada aspek pelayanan umum dijabarkan dalam Fokus Urusan Layanan Wajib dan Pilihan. Pemerintah sebagai aparat pelayanan masyarakat wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat berwujud pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan pelayanan umum dalam segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelayanan yang baik dicerminkan dari tercapainya indikator-indikator pada urusan wajib dan urusan pilihan sebagai bentuk profesionalisme.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (Pasal 409 UU Nomor 23 Tahun 2014) hal ini berdampak pada pembagian urusan pemerintahan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah termasuk bidang kehutanan.

Urusan pemerintahan daerah dibagi menjadi 3 (tiga) urusan yaitu, absolute, pemerintahan umum, dan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Selanjutnya, urusan wajib dibagi menjadi urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar.

Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan meliputi:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
6. Sosial.

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang menyangkut urusan wajib, maka telah dialokasikan pembiayaannya melalui APBD.

Kebijakan Umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap urusan pemerintahan yang dilaksanakan pada satu Tahun Anggaran. Komponen dan kinerja pelayanan yang diharapkan tersebut disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan Kabupaten Tanah Datar.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan beserta anggaran belanja langsung urusan, baik wajib maupun pilihan (tidak termasuk belanja langsung program umum/rutin Perangkat Daerah) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2020, diuraikan berdasarkan pembagian urusan dimana beberapa urusan yang ditangani oleh beberapa Perangkat Daerah.

Program umum/rutin Perangkat Daerah merupakan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan kewenangan Perangkat Daerah, baik urusan wajib ataupun pilihan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang meliputi:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan.

2.3.1 Fokus Urusan Layanan Wajib dan Pilihan

2.3.1.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

2.3.1.1.1 Pendidikan

Kualitas pendidikan masyarakat merupakan faktor penting dalam percepatan pembangunan daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka sumber daya manusia yang dimiliki semakin berkualitas. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka Pemerintah Daerah harus mendorong percepatan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan pendidikan di masyarakat. Hal ini bertujuan agar setiap masyarakat memperoleh kesempatan dan peluang yang sama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahateraan masyarakat.

Dalam rangka menilai dan mengevaluasi kualitas pendidikan, Pemerintah Daerah dapat menggunakan indikator-indikator kinerja pembangunan di bidang pendidikan yang sudah umum digunakan, sehingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja di bidang pendidikan dapat dilaksanakan secara terukur dan terarah.

Tabel 2.35
Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Pendidikan, 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah					
	- SD/MI	79,15	77,98	76,48	79,23	83,16
	- SMP/MTs	52,93	53,81	53,81	53,81	51,34
2.	Rasio guru/murid					
	- SD/MI	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07
	- SMP/MTs	0,12	0,11	0,12	0,12	0,13
3.	Rasio guru/murid per kelas rata-rata					
	- SD/MI	0,037	0,04	0,03	0,03	0,37
	- SMP/MTs	0,12	0,11	0,36	0,19	1,01
4.	Persentase Ruang Kelas dalam kondisi baik					
	- SD/MI	30,80	31,43	29,67	26,67	36,06
	- SMP/MTs	41,21	45,21	43,26	43.26	44,09
5.	Angka Putus Sekolah (%)					
	- SD/MI	0,00	0,06	0,19	0,00	0,09
	- SMP/MTs	0,00	0,15	0,28	0,00	0,26
6.	Angka Kelulusan (%)					
	- SD/MI	100	100	100	100	100
	- SMP/MTs	100	100	100	100	100
7.	Angka melanjutkan sekolah (SD/MI ke SMP/MTs)	103,51	102,44	101,42	100,40	100,18
8.	Angka Melanjutkan Sekolah (SMP/MTs ke SMA/SMK/MA)	87,70	84,33	59,42	100,83	100,97

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Berdasarkan Tabel diatas rasio sekolah per penduduk usia sekolah tingkat SD di Kabupaten Tanah Datar naik dari tahun 2016 yaitu 80 sekolah per 10.000 penduduk usia SD menjadi 84 sekolah per 10.000 penduduk usia SD pada tahun 2020, berbeda halnya dengan jenjang SMP yang mengalami penurunan dari tahun 2016 yaitu 53 sekolah per penduduk usia SMP menjadi 52 sekolah.

Rasio guru per murid di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 jenjang SD capaiannya 1:15 (Standar pelayanan Permendikbud Nomor 15 Tahun 2010 1:32) menunjukkan kondisi ini sudah memadai dan untuk jenjang SMP pada tahun yang sama capaiannya 1:8.

Rasio Guru/Murid per rata-rata kelas pada tahun 2020 yaitu 0,07 untuk jenjang SD dan 0,13 untuk jenjang SMP, artinya untuk jenjang SD per rata-rata kelas untuk 1 orang guru mendidik 15 orang dan untuk jenjang SMP per rata-rata kelas untuk 1 orang guru mendidik 8 orang.

Persentase ruang kelas dalam kondisi baik untuk jenjang SD pada tahun 2020 capaiannya 36,06% dan jenjang SMP pada tahun yang sama capaiannya yaitu 44,09%, dari capaian tersebut perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan oleh pemerintah daerah demi terciptanya kegiatan belajar yang kondusif.

Untuk tahun 2020 Angka Putus Sekolah pada jenjang SD 0,09% dan SMP angka putus sekolah nilainya 0,26%. Selanjutnya, angka kelulusan SD dan SMP pada tahun 2020 mencapai 100% Angka melanjutkan sekolah (SD/MI ke SMP/MTs) dan Angka melanjutkan sekolah (SMP/MTs ke SMA/SMK) capaiannya 100% pada tahun yang sama. Kondisi ini menunjukkan kinerja pada beberapa indikator bidang pendidikan sudah baik.

Tabel 2.36
Persentase Guru yang Sudah Sertifikasi di Kabupaten Tanah Datar, 2016-2020

Guru yang memenuhi kualifikasi S-1/ D-4	2016	2017	2018	2019	2020
SD/MI	91,54	95,23	97,00	94,96	93,58
SMP/MTs	83,06	85,54	98,00	100,00	98,00
Guru Bersertifikasi					
SD/MI	60,51	75,61	59,55	68,34	61,15
SMP/MTs	58,72	62,80	54,66	56,97	56,89

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Guru merupakan salah satu unsur terpenting dalam pendidikan. Baik buruknya kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh standar kualitas guru. Oleh karena itu, guru perlu meningkatkan kompetensinya seperti tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Ada empat kompetensi yang harus dipenuhi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan kompetensi sosial. Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas guru ada melalui peningkatan pendidikan guru dan sertifikasi guru.

Semakin tinggi tingkat pendidikan guru maka semakin baik kualitas sekolah, hingga berujung kepada terwujudnya peserta didik yang berkompeten. Selama periode 2016-2020 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 pada jenjang SD dan SMP semakin baik terlihat dari kenaikan yang terjadi selama periode tersebut. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru bahwa seorang guru harus memiliki ijazah atau kualifikasi akademik S1 atau D4. Untuk menyikapi undang-undang tersebut pemerintah Kabupaten Tanah Datar setiap tahun memprogramkan peningkatan kualitas guru sehingga diharapkan secara bertahap, guru-guru di Kabupaten Tanah Datar telah memiliki kualifikasi pendidikan sarjana.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru, guru sebagai jabatan profesional pada setiap jenjang pendidikan dibuktikan oleh sertifikasi pendidik. Program sertifikasi pendidik dimulai pada tahun 2006 dan setiap tahunnya guru yang memperoleh sertifikat pendidik mengalami fluktuatif. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik

kepada guru. Sertifikat pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi standar profesional guru. Guru profesional merupakan syarat mutlak untuk menciptakan sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Sertifikasi guru di Kabupaten Tanah Datar pada setiap jenjang pendidikan berfluktuasi. Dibandingkan dengan tahun 2016 Guru bersertifikasi pada tahun 2020 mengalami peningkatan yaitu 60.51% pada tahun 2016 menjadi 61,15% untuk tahun 2020 pada jenjang SD sedangkan untuk jenjang SMP penurunan yaitu 58,72% pada tahun 2016 menjadi 56,89% pada tahun 2020. Terkait permasalahan ini di Kabupaten Tanah Datar perlu meningkatkan Guru bersertifikasi pada tiap jenjang pendidikan.

Grafik 2.16
Perkembangan Jumlah Sekolah di Kabupaten Tanah Datar, 2016–2020

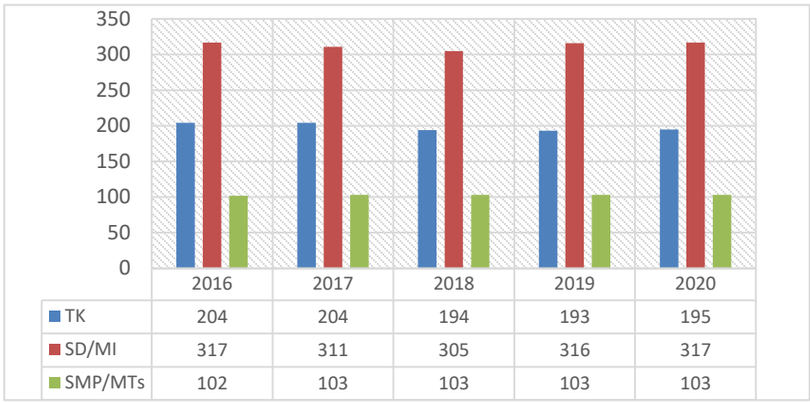

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Dari Grafik 2.16 terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah TK/RA yang terjadi pada tahun 2016 sebesar 204 unit menjadi 195 unit pada tahun 2020. Jumlah SD/MI tidak mengalami perubahan pada tahun 2020 sebesar 317 unit. Sedangkan jumlah SMP/MTs pada tahun 2017-2020 tidak mengalami perubahan.

Selain perkembangan jumlah sekolah, kualitas ruang kelas juga merupakan penunjang keberhasilan pembangunan pendidikan di Kabupaten Tanah Datar. Perkembangan kondisi ruang kelas di Kabupaten Tanah Datar kurun waktu tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.37
Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Tanah Datar, 2016–2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kondisi Ruang Kelas (%)					
	Rusak Ringan:					
	SD/MI	59,74	58,71	58,15	59,15	51,89
	SMP/MTs	46,04	45,65	47,19	47,24	47,24
	Rusak Sedang :					
	SD/MI	4,82	6,45	7,60	7,60	7,11
	SMP/MTs	7,58	6,60	6,52	5,85	6,52
	Rusak Berat:					
	SD/MI	1,44	1,91	4,54	5,64	4,94
	SMP/MTs	1,43	0,88	3,03	3,04	2,41
	Rusak Total					
	SD/MI	1,44	1,49	0,05	0,00	0,00
	SMP/MTs	1,43	1,65	0,00	0,00	0,00
2.	Jumlah perpustakaan Sekolah (%):					
	SD/MI	63,41	68,04	71,84	72,47	72,47
	SMP/MTs	76,47	73,79	75,73	75,73	75,73

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Dari Tabel 2.27 terlihat bahwa pada tahun 2016 kondisi ruang kelas rusak ringan SD/MI adalah 59,74%, pada tahun 2020 menjadi 51,89%, sementara ruang kelas yang rusak berat pada tahun 2016 adalah 1,44% menjadi 4,94% pada tahun 2020. Kondisi ruang kelas rusak ringan SMP/MTs tahun 2016 adalah 46,04% dan menjadi 47,24% pada tahun 2020, sementara ruang kelas SMP/MTs yang rusak berat pada tahun 2016 adalah 1,43% menjadi 2,41% pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan perlu dilakukan perbaikan sarana dan prasarana di bidang pendidikan oleh pemerintah daerah terutama pada jenjang pendidikan dasar.

Minat baca masyarakat Indonesia dinilai masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, UNESCO mencatat pada 2012 indeks minat baca di Indonesia baru mencapai 0,001 artinya dalam 1000 orang hanya ada satu orang yang berkegiatan membaca walaupun mungkin ketidaktertarikan pada kegiatan membaca tidak hanya karena minat baca yang minim tapi juga karena ketersediaan buku yang bisa merangsang mereka untuk membaca memang kurang Oleh karena itu perlu ada upaya-upaya yang serius untuk meningkatkan minat baca yang bisa dimulai dari menumbuhkan kegemaran membaca sejak dini dalam keluarga. Upaya-upaya meningkatkan tingkat minat baca masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama semua pihak. Dalam hal ini pihak yang paling berkompeten adalah pemerintah, pustakawan dan masyarakat. Jumlah perpustakaan pada SD/MI pada tahun 2016 sebesar 63,41% menjadi 72,47% tahun 2020. Kemudian pada jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2016 sebesar 76,47% menjadi 75,73% tahun 2020.

2.3.1.1.2 Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan prioritas pembangunan baik di tingkat pusat atau di tingkat daerah. Derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik dan kehidupan masyarakat yang lebih layak, merupakan faktor penggerak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar telah melakukan upaya untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat dari semua lapisan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang adil, mudah, murah, dan merata.

Sarana Kesehatan adalah salah satu indikator yang menentukan derajat kesehatan masyarakat. Pada bagian ini diuraikan tentang sarana kesehatan yang meliputi Puskesmas beserta jejaringnya dan Rumah Sakit.
Jumlah Puskesmas di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 sebanyak 23 puskesmas. Dari 23 Puskesmas tersebut, 8 puskesmas rawatan dan 15 puskesmas non rawatan. Kabupaten Tanah Datar jumlah rata-rata atau rasio puskesmas per 30.000 jiwa penduduk, adalah 1 per 15.000 penduduk, artinya setiap 15.000 jiwa penduduk Kabupaten Tanah Datar dapat dilayani 1 Puskesmas atau 1 puskesmas sudah dapat melayani 15.000 jiwa penduduk. Untuk jumlah puskesmas pembantu di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 berjumlah 67 pustu. Dengan jumlah puskesmas pembantu sebanyak 67 unit dan puskesmas induk sebanyak 23 unit, maka Rasio puskesmas pembantu terhadap puskesmas di Tanah Datar pada tahun 2020 adalah rata-rata 3 puskesmas, artinya setiap puskesmas rata-rata didukung oleh 3 puskesmas pembantu dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Jumlah Rumah sakit di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2020 sebanyak 4 rumah sakit terdiri dari 1 RSUD dan 3 Rumah sakit swasta, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Tanah Datar untuk pelayanan 1 rumah sakit rata-rata dapat melayani 92.000 penduduk.

Tabel 2.38
Rasio Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dan Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kabupaten Tanah Datar, 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas	23	23	23	23	23
2.	Jumlah Pustu	67	67	67	67	67
3.	Jumlah Rumah Sakit	4	4	4	4	4
4.	Jumlah Penduduk	345.706	346.578	347.407	348.219	371.704
5.	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,066	0,066	0,066	0,066	0,06
6.	Rasio Pustu per satuan penduduk	0,19	0,19	0,19	0,19	0,18
7.	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,012	0,012	0,012	0,011	0,011

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bagaimana perbandingan antara Puskesmas, Pustu dan Rumah Sakit dengan Jumlah penduduk, dari perbandingan diatas dapat dilihat bagaimana sarana kesehatan harus memberikan pelayanan kepada penduduk dengan jumlah yang banyak. Untuk itu sangat diperlukan dukungan fasilitas yang mumpuni guna menyeimbangkan kapasitas pelayanan kesehatan dengan jumlah penduduk yang ada.

Posyandu merupakan wadah komunikasi dalam pelayanan kesehatan masyarakat mulai dari Keluarga Berencana, pelayanan kesehatan dasar serta pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak-anak dengan dukungan pembinaan teknis dari petugas kesehatan. Jumlah Posyandu di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 sebanyak 602 buah dan jumlah balita sebanyak 22.859 jiwa. Dengan demikian rasio Posyandu terhadap Balita adalah 1:38. Hal ini berarti bahwa dari 1 posyandu di Kabupaten Tanah Datar melayani 38 balita. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai kondisi rasio Posyandu di Kabupaten Tanah Datar :

Tabel 2.39
Rasio Posyandu per Satuan Balita di Kabupaten Tanah Datar, 2016–2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Posyandu	600	600	600	600	602
2.	Jumlah Balita	26.143	25.333	30.984	19.545	22.859
3.	Rasio	22,95	23,68	19,36	30,70	26,34

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Dari Tabel 2.39 terlihat bahwa keberadaan Posyandu di Kabupaten Tanah Datar telah memenuhi kebutuhan standar ketersediaan posyandu dengan tingkat penyebaran merata di seluruh kecamatan, nagari dan jorong serta cakupan pelayanannya juga telah memenuhi standar.

Sumber Daya Manusia Kesehatan mempuyai peranan penting dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Data tenaga kesehatan yang disajikan disini terdiri dari tenaga medis (Dokter umum, Dokter Gigi, Dr/Drg Spesialis), perawat dan bidan (termasuk lulusan DIII dan S1), farmasi (Apoteker, Asisten Apoteker), gizi (Lulusan D-I, D-III Gizi (SPAG dan AKZI dan D-IV), teknisi medis (Analis, ATEM dan Penata Rontgen, Penata

Anestesi, Fisioterapi), sanitasi (Lulusan SPPH, APK, dan DIII Kesehatan Lingkungan) dan kesehatan masyarakat (SKM), dan lain-lain.

Tenaga Medis adalah terdiri dari dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran). Rasio Medis per 100.000 penduduk adalah tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. Gambaran rasio untuk masing-masing jenis tenaga kesehatan per 100.000 penduduk dapat dilihat pada dibawah ini:

Tabel 2.40
Rasio Medis per 100.000 Penduduk di Kabupaten Tanah Datar, 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Dokter Umum	30	37	54	73	114
2.	Jumlah Dokter Gigi	20	21	21	23	30
3.	Jumlah Dokter Spesialis	28	34	24	23	33
4.	Jumlah Penduduk	345.706	346.578	347.407	348.219	371.704
5.	Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk	8,68	10,68	15,5	20,96	30,67
6.	Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk	5,79	6,06	6,0	6,61	8,07
7.	Rasio Dokter Spesialis per 100.000 penduduk	8,10	9,81	6,9	6,61	8,88

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa rasio tenaga medis terbesar adalah rasio tenaga dokter umum yaitu sebesar 30 per 100.000 penduduk, dan dokter spesialis 9 per 100.000 penduduk, dan rasio yang paling kecil adalah rasio dokter spesialis gigi yaitu sebesar 9 per 100.000 penduduk. Artinya di Kabupaten Tanah Datar masih mengalami kekurangan dokter sebanyak 10 orang dokter umum, 31 orang dokter spesialis dan 32 orang dokter gigi. Apabila mengacu pada Kepmenkes Nomor 1202/Menkes/SK/VIII/2003 tentang Indikator Indonesia Sehat dan Pedoman Penetapan Indikator Provinsi Sehat dan Kabupaten/Kota Sehat. Rasio dokter dengan jumlah penduduk adalah 1 banding 2.500 orang (40 dokter untuk 100 ribu penduduk).

Tenaga keperawatan adalah tenaga yang terdiri lulusan perawat dan kebidanan: perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan (UU Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan) dan Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari Pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permenkes Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan). Jumlah tenaga keperawatan di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 977 yang terdiri dari perawat sebanyak 515 orang dan bidan 462 orang.

Rasio Perawat per 100.000 penduduk adalah perawat yang memberikan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. Yang termasuk dalam tenaga perawat yaitu perawat, perawat anestesi, dan perawat spesialis dan Rasio Bidan per 100.000 penduduk adalah bidan yang memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan, baik di Puskesmas, Rumah

Sakit, dan sarana pelayanan kesehatan lain di suatu wilayah per 100.000 penduduk. Rasio Tenaga keperawatan dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 2.41
Rasio Paramedis per Satuan Penduduk di Kabupaten Tanah Datar, 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perawat	239	269	268	194	515
2.	Jumlah Bidan	216	317	334	326	462
3.	Jumlah Penduduk	345.706	346.578	347.407	348.219	371.704
4.	Rasio Perawat per 100.000 penduduk	69,13	77,62	77,1	55,71	138,55
5.	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	62,48	91,47	96,1	93,62	124,29

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar 2021

Dari tabel diatas pada tahun 2020 dapat diketahui bahwa rasio tenaga kesehatan terbesar adalah rasio tenaga perawat yaitu sebesar 139 per 100.000 penduduk, 125 orang bidan per 100.000 penduduk. Apabila mengacu pada Kepmenkes No.1202 Tahun 2003 standar Indonesia Sehat, rasio perawat per 100.000 penduduk yaitu 117 dan rasio bidan per 100.000 penduduk yaitu 100 bidan. Untuk itu di Kabupaten Tanah Datar saat ini tenaga kesehatan sudah melebihi standar Indonesia sehat.

2.3.1.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Fokus pelayanan wajib dasar urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan pelayanan yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan. Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja dan target. Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.

Jalan merupakan salah satu elemen perhubungan yang dominan digunakan dan dimanfaatkan oleh penduduk, keberadaan jalan memiliki peranan penting dalam pembangunan suatu daerah dimana fungsinya sebagai penghubung dan memberikan akses dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan pada sektor-sektor prioritas seperti pertanian, industri, pariwisata, pendidikan dan kesehatan. Fokus pelayanan jalan antara lain sebagai berikut :

a) Aksesibilitas, tersedianya jalan yang menghubungkan pusat–pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten.
b) Mobilitas, tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.
c) Keselamatan, tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.

Tabel 2.42
Perkembangan Kondisi dan Jenis Permukaan Jalan, 2016 – 2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
	Kondisi Jalan	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	642,3	42,73	862,95	57,40	850,95	56,61	1.150,48	76,53	1.152,57	76,67
2.	Rusak	860,92	57,27	640,57	42,60	652,27		352,74	23,47	350,65	23,33
	Jenis Permukaan Jalan	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Aspal	835,42	55,58	829,49	55,18	854,49	56,84	867,43	57,70	867,83	57,73

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
2.	Kerikil/ Batu /Beton	265,60	17,67	316,79	21,07	415,85	27,66	428,05	28,48	427,65	28,45
3.	Tanah	402,20	26,76	356,94	23,75	232,88	15,49	207,74	13,82	207,74	13,82

Sumber: Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Pada tahun 2016, panjang jalan aspal adalah 835,42 km, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 867,83 Km. Demikian juga halnya dengan jalan kondisi baik, dimana pada tahun 2016 adalah 642,3 km dan meningkat menjadi 1.155,88 Km pada tahun 2020.

Secara keseluruhan panjang jalan yang ada di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 adalah 1.503,22 Km. Pada tabel 2.32 dapat dilihat perkembangan kondisi jalan kabupaten dan jenis permukaan jalan dari tahun 2016 sampai dengan 2020.

Masih tingginya persentase jalan kabupaten yang rusak sebesar 32,23% pada tahun 2020, salah satu penyebabnya adalah kondisi geografis Kabupaten Tanah Datar yang berada diatas jalur patahan semangko, sehingga sering terjadi pergeseran-pergeseran pada permukaan bumi yang mengakibatkan rusaknya infrastruktur jalan. Selain itu kondisi Momen Sumbu Tekan (MST) jalan yang tidak seragam dan juga sering dijadikan sebagai jalan alternatif oleh kendaraan pengangkut barang antar Provinsi yang bertonase tinggi serta melebihi daya dukung Jalan Kabupaten.

Pembangunan irigasi bertujuan untuk menjamin ketersediaan air dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi hasil pertanian. Saat ini jumlah Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Tanah Datar adalah sebanyak 635 DI kewenangan Kabupaten, 1 (satu) DI kewenangan Pemerintah Pusat yaitu Irigasi Batang Sinamar, 11 (sebelas) DI kewenangan Pemerintah Provinsi yaitu Irigasi Batang Selo dan Galo Gandang serta 9 (sembilan) DI lintas Kabupaten dan Kota. Perkembangan kondisi daerah irgasi Kabupaten tahun 2016 – 2020, dapat dilihat pada Grafik 2.17:

Grafik 2.17
Perkembangan Kondisi Daerah Irigasi Kabupaten, 2016 – 2020

Sumber: Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Dari Grafik 2.17 dapat dilihat perkembangan kondisi daerah irigasi Kabupaten Tanah Datar mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi pada tahun 2020 DI berkondisi baik berkurang menjadi 356 irigasi atau 56,06 %, sementara tahun 2019 adalah 428 daerah irigasi atau 67,40 %.

Berkurangnya DI dengan kondisi baik ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain kejadian bencana alam di Kabupaten Tanah datar yang menyebabkan rusaknya irigasi dan belum maksimalnya dana yang

digunakan untuk rehabilitasi irigasi akibat refocussing anggaran yang digunakan untuk penanggulangan pandemic Covid-19.

Tujuan penataan ruang di Kabupaten Tanah Datar adalah terwujudnya ruang wilayah kabupaten yang serasi, selaras dan seimbang antara lingkungan alam dan lingkungan binaan melalui pengaturan, pengendalian serta pemanfaatan struktur dan pola ruang wilayah kabupaten yang berbasis pertanian dan pariwisata serta mempertimbangkan mitigasi bencana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar tahun 2011-2031 yang sedang direvisi. Pada revisi ini, Mitigasi Bencana adalah salah satu aspek yang mendapatkan penekanan untuk mencapai tujuan dari RTRW Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2041.

Berdasarkan rencana struktur ruang, dengan mengacu pada RTRWN dan RTRW Provinsi Sumatera Barat maka Kota Batusangkar diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) di Kabupaten Tanah Datar. Disamping Kota Batusangkar sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) juga terdapat Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PPK terdiri dari 5 (lima) wilayah yakni Balai Tangah, Padang Ganting, Tabek Patah, Panyalaian dan Sumpur. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) bermakna 1 (satu) pusat pelayanan melayani 2 (dua) kecamatan. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) terdiri dari 6 (enam) wilayah yaitu Kubu Kerambil, Simabur, Sungayang, Koto Tangah, Tigo Jangko dan Tanjung Alam. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) bermakna 1 (satu) pusat pelayanan melayani 1 (satu) kecamatan.

Kebijakan dalam Pengembangan Struktur Ruang berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Tanah Datar 2011-2031 adalah :

1. Penetapan dan pengembangan pusat-pusat kegiatan dalam kerangka tata ruang wilayah kabupaten untuk menunjang pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan administrasi masyarakat.
2. Pengembangan jaringan prasarana wilayah kabupaten sebagai pembentuk struktur ruang wilayah kabupaten yang mengintegrasikan seluruh wilayah dalam memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan terutama pusat-pusat kegiatan perkotaan.
3. Peningkatan kesejahteraan dan keadilan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan sektor pertanian dan sektor pariwisata sesuai daya dukung lingkungan.

Kebijakan dalam Pengembangan Pola Ruang berdasarkan Revisi RTRW Kabupaten Tanah Datar 2011-2031 adalah:

1. Pola Ruang Kawasan Lindung

   a) Pemeliharaan kawasan lindung yang berkelanjutan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Datar Pemantapan dan pengendalian kawasan lindung.
   b) Pencegahan kerusakan lingkungan hidup yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan.

2. Pola Ruang Kawasan Budidaya

   Peningkatan pemanfaatan kawasan budidaya sesuai daya tampung dan dukung lingkungan untuk mewujudkan keterpaduan setiap kegiatan budidaya dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi berbasis pertanian dan pariwisata.

Penetapan kawasan strategis Kabuapaten Tanah Datar dalam rangka peningkatan perkembangan sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Pada Revisi RTRW terdapat penambahan Kawasan Strategis Sudut Pandang Ekonomi di Kawasan Tigo Jangko dan Kawasan Strategis Dari sudut pandang sosial budaya di Kawasan Nagari Tuo Pariangan.

Dalam implementasi pemanfaatan ruang, perijinan pemanfaatan ruang merupakan salah satu bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang bertujuan agar pemanfaatan ruang dapat berjalan sesuai dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Perizinan merupakan kebijakan operasional pemanfaatan ruang yang berkaitan dengan penetapan lokasi, kualitas ruang dan tata bangunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.

Capaian kinerja penataan ruang dapat dilihat dari indikator sebagai berikut:

1) Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan per Satuan Luas Wilayah Perkotaan
   Ruang terbuka hijau merupakan area mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Adapun kriteria ruang terbuka hijau kota adalah sebagai berikut:

   a. Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 m²
   b. Merupakan suatu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur
   c. Terdapat komunitas tumbuhan.

Tabel 2.43
Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan per Satuan Luas Wilayah di Kabupaten Tanah Datar, 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Luas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (Ha)	4.232,75	4.232,75	4.232,75	933,00	2.909,55
2	Luas wilayah perkotaan (Ha)	13.100	13.100	13.100	3.362	9.698,51
3	Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	32,30	32,31	30,91	27,75	30,00

Sumber : Dinas Perkim LH Tahun 2021

Luas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan tahun 2019 mengalami penurunan jika dibandingkan pada tahun 2018. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 mempedomani luas RTH pada rencana kota administratif Batusangkar, sedangkan pada tahun 2019 mempedomani Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Batusangkar dan luas RTH tahun 2020 mengalami peningkatan kembali karena mempedomani revisi RTRW Kabupaten Tanah Datar 2011-2031.

Luas RTH hanya dihitung dari RTH perkotaan. Rasio perhitungannya didasarkan pada luas RTH perkotaan dibagi luas seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Tanah Datar. Selama periode tahun 2019-2020 rasio ruang terbuka hijau di Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan, terlihat pada tahun 2016 rasio RTH perkotaan terhadap luas wilayah perkotaan yaitu 32,31% terjadi penurunan pada tahun 2020 menjadi 30%.

2.3.1.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Sedangkan Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011.

- Rasio rumah layak huni

Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni (penjelasan pasal 24 huruf a UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Tabel 2.44
Kondisi RLH dan RTLH, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rasio rumah layak huni	0,14	0,17	0,26	0,26	0,26
Jumlah Rumah tidak layak huni	5.040	5.013	4.126	1.408	768
Rasio permukiman layak huni	0,14	0,17	0,26	0,92	0,93

Sumber : Dinas Perkim LH Tanah Datar 2021

Kondisi rasio rumah layak huni di Kabupaten Tanah Datar selama periode 2016-2020 mengalami kenaikan diikuti dengan penurunan jumlah rumah tidak layak huni. Jumlah rumah tidak layak huni pada tahun 2016 sebanyak 5.040 unit dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 768 unit. Meskipun berhasil diturunkan akan tetapi hal ini tetap menjadi prioritas daerah dalam rangka mengentaskan rumah yang tidak layak huni. Rasio rumah layak huni dihitung berdasarkan rumus :

$$\frac{Jumlah\ Rumah\ Layak\ Huni}{Jumlah\ Penduduk}$$

Untuk meningkatkan kualitas perumahan, telah dilaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah antara lain melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBD Kabupaten Tanah Datar.

- Persentase kawasan kumuh

Daerah kumuh yang dimaksud adalah daerah atau kawasan tempat tinggal (hunian) yang dihuni sekelompok orang yang menempati bangunan sementara, tidak ada akses air yang aman untuk diminum, tidak ada fasilitas sanitasi yang memadai, dan kondisi lingkungan yang tidak memadai.

Grafik 2.18
Persentase Kawasan Kumuh, 2016-2020

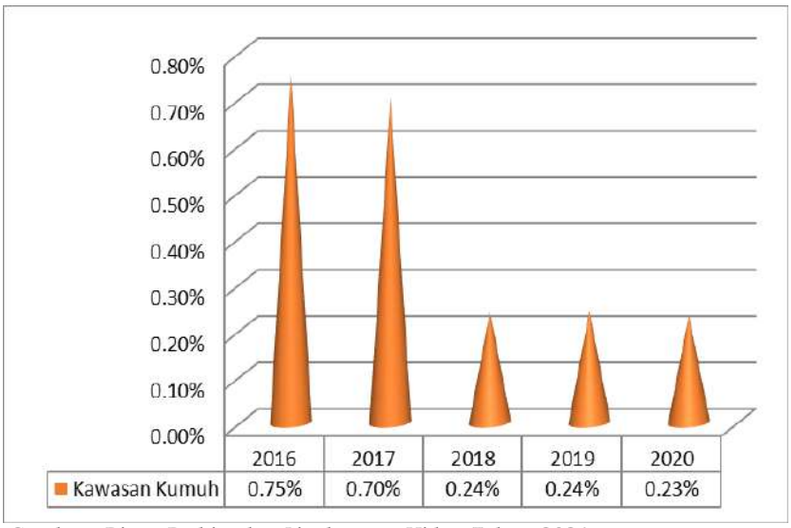

Sumber : Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup Tahun 2021

Persentase kawasan kumuh di Tanah Datar masih dikategorikan rendah, karena pada tahun 2020 berada pada posisi 0,23%. Berdasarkan target nasional untuk permukiman kumuh adalah nol persen untuk itu diharapkan pemerintah daerah terus dapat menekan dan mengontrol jumlah kawasan kumuh di Kabupaten Tanah Datar.

2.3.1.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terus melakukan upaya untuk menjaga stabilitas ketertiban dan kemanaan lingkungan, termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya untuk mencegah terjadinya konflik horizontal di masyarakat dan kerawanan politik. Data terkait dengan pembangunan di bidang trantibum dan linmas tergambar dalam Tabel 2.45 :

Tabel 2.45
Indikator Stabilitas dan Keamanan Lingkungan, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,15	1,15	1,15	1,01	0,96
2.	Persentase Penegakan Perda	0	71	71	86	71
3.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	5	3	2	35	24
4.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%)	20	60	80	80	80
5.	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	11,09	11,09	11,09	31,59	31.59
6.	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	4	4	4	1.050	1.125
7.	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	n/a	n/a	n/a	77,10	91,04
8.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan)	100	100	100	100	100

Sumber : Satpol PP Tahun 2021

Kapasitas pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan tergambar dari rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk dan jumlah Linmas per 10.000 penduduk. Sampai dengan tahun 2020, rasio jumlah Pol – PP masih sangat rendah, yaitu 1 per 10.000

penduduk; rasio jumlah Linmas mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebanyak 11,09, menjadi 31,59 per 10.000 penduduk pada tahun 2020.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten mencapai 100% karena dari 4 Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang ada sudah berfungsi dengan baik. Sehingga, response time rate-nya juga baru mencapai 18 menit. Kegiatan pembinaan terhadap LSM Ormas dan OKP juga dilakukan setiap tahun dan kondisi tahun 2020 sudah mencapai 24. Selanjutnya, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, ketentraman, keindahan) pada tahun 2020 mencapai 100%.

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menanggulangi kriminalitas. Tingginya angka kriminalitas disebabkan oleh berkurangnya pemahaman agama, akhlak, budi pekerti, dan tatanan kehidupan (adat dan budaya) serta terjadinya pergeseran nilai di tengah masyarakat.

Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kasus kriminal oleh aparat penegak hukum (Kepolisian/Kejaksaan). Angka kriminalitas yang ditangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama satu tahun.

Tabel 2.46
Tindak Pidana yang ditangani Polres Tanah Datar, 2016 – 2020

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pencurian dengan pemberatan	151	50	40	64	16
2	Pencurian dengan kekerasan	18	3	5	8	10
3	Curanmor	73	39	23	59	29
4	Pencurian biasa	64	28	22	37	23
5	Penipuan	37	27	34	19	4
6	Percobaan curas	0	0	0	8	0
7	Ancam dengan senjata tajam	0	0	0	0	0
8	Perampasan/pemerasan	1	1	1	2	7
9	Membawa BBM subsidi tanpa surat	0	0	0	2	0
10	Pembunuhan	1	1	0	2	3
11	Penganiayaan berat/ pengeroyokan	0	10	8	7	15
12	Penganiayaan biasa	62	33	36	55	51
13	Penganiayaan ringan	37	23	35	23	10
14	Penggelapan	30	6	6	17	24
15	Pemalsuan surat	2	3	6	1	0
16	Perjudian	12	9	15	5	5
17	Pemerkosaan	2	1	1	0	0
18	Perbuatan cabul	32	21	31	38	26
19	Poligami/Kawin liar	2	0	0	2	0
20	Kebakaran	15	67	57	83	67
21	Pengancaman	0	1	0	3	5
22	Penyerobotan tanah	8	7	1	0	1
23	Kekerasan di depan umum	0	0	0	1	0
24	Pengrusakan	21	3	12	4	12
25	Narkoba (orang)	41	28	48	64	89
26	Pertambangan tanpa izin (PETI)	0	0	0	0	0
27	Percobaan perkosaan	0	0	0	0	2
28	Perkosaan di bawah umur	0	0	1	0	0
29	Membuat perasaan tidak senang	16	12	11	10	0
30	Lainnya				41	73

No	Jenis Kasus	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
31	Korupsi	0	0	2	2	1
32	Bunuh Diri	5	6	0	1	0
	Jumlah	625	373	393	558	472
	Rasio Angka Kriminalitas	19,60	8,96	9,25	13,9	9,44

Sumber : Kesbangpol Tahun 2021

Beberapa kejadian yang menonjol pada tahun 2020 adalah narkoba sebanyak 89 kejadian meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kasus kriminlitas seperti pengancaman, penyerobotan tanah, pengrusakan, percobaan pemerkosaan dan lainnya cenderung meningkat, sehingga perlu diupayakan kesepakatan antara pemerintah nagari dengan aparat penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) dalam upaya penekanan angka kriminalitas.

2.3.1.1.6 Sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Tabel 2.47
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PPKS					
	a. Anak Balita Terlantar	0	4	5	5	5
	b. Anak Terlantar	231	126	126	57	41
	c.Anak Nakal (anak yang berhadapan dengan hukum)	22	72	76	50	34
	d. Wanita rawan sosial ekonomi	2.346	2.346	2.200	1.000	1.000
	e. Korban tindak kekerasan	1	2	4	4	4
	f. Lanjut usia terlantar	3.752	3.756	3.035	3.035	3.035
	g. Orang dengan kecacatan	1.335	1.335	1.610	1.610	1.187
	h. Gelandangan, pengemis, pemulung	18	16	33	33	24
	i. Bekas warga binaan LP	47	47	47	47	47
	j. Korban penyalahgunaan Napza	11	11	63	63	63
2.	Jumlah keluarga yang tinggal di rumah tidak layak huni (KK)	3.302	2.653	855	155	0
3.	Keluarga Fakir Miskin (KK)	128.925	128.925	128.925	128.925	132.000
4.	Keluarga Rentan	46	46	232	232	232
5.	Klien penyakit jiwa yang sedang dipasung	7	8	7	7	7
6.	Eks. Penyakit Kusta	17	0	0	0	0
7.	HIV/AIDS	16	0	0	0	0
8.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	100	100	100	100	100
9.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100
10.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	37,84	18.53	21	21	16

Sumber : Dinas Sosial dan PPPA Tahun 2021

Kondisi 2020 kondisi PPKS di Kabupaten Tanah Datar berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan masih harus menjadi perhatian pemerintah daerah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang menyatakan bahwa penyelenggara PPKS harus menjadi prioritas daerah.

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Tenaga Kerja

Perkembangan ekonomi suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Angkatan kerja adalah penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Beberapa permasalahan dalam ketenagakerjaan yang ditemui masyarakat antara lain terkait dengan tingginya tingkat pengangguran, penyediaan lapangan kerja yang terbatas,serta produktivitas tenaga kerja yang rendah. Penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu barometer keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang.

Tabel 2.48
Urusan Wajib Non Dasar Ketenagakerjaan, 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	8	15	14	11	13
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	8	14	14	45,5	10
3.	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	5,12	6,95	14,69	20,5	0,091
4.	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	2.221	2.634	3.109	3.618	4.351
5.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0	80	192	288	112
6.	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100	100	100	100	100
7.	Rasio lulusan S1/S2/S3 (*)	372	449	355	378	349

Sumber : Dinas PMPTSP Naker Tahun 2021

Dari tabel 2.39 dapat dilihat bahwa masih terdapat peningkatan kasus sengketa pengusaha-pekerja sebanyak 13 kasus pada tahun 2020 dan kasus yang dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama pada tahun 2020 adalah sebanyak 10 kasus.

Tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan D1/D2/D3 sampai dengan S1, S2 dan S3. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Tanah Datar selama periode 2016-2020 mengalami kenaikan. Pada Tahun 2020 rasio lulusan S1/S2/S3 sebanyak 349 per 10.000 penduduk mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 378 per 10.000 penduduk.

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan pengarusutamaan gender, Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan perlindungan anak melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Tabel 2.49
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah*	66,59	67,8	68,81	69,2	69,84
2.	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	5,71	5,71	5,71	8,57	8,57
3.	Rasio KDRT	0,0064	0,08	0,0068	0,009	0,006
4.	Partisipasi angkatan kerja perempuan**	53,51	52,57	58,39	57,54	58,20
5.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100
6.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100
7.	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100
8.	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	50	50	50	65	42,5
9.	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100
10.	Indeks Pembangunan Gender	n/a	98,51	97,58	97,55	97,57

Sumber : Dinas Sosial dan PPPA Tahun 2021
(*)BKPSDM Tahun 2021
(**)Badan Pusat Statistik Tahun 2021

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Pekerja perempuan di lembaga pemerintahan dapat dikelompokkan berdasarkan jumlah dan persentase perempuan yang menempati posisi Eselon II–IV. Dari tabel diatas persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya dan pada tahun 2020 sebesar 69,84%. Rasio KDRT yang ditangani di Kabupaten Tanah Datar yaitu sebesar 0,006 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,0064.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhitungkan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tanah Datar dalam kurun waktu 2017-2019 mengalami penurunan. Terakhir Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019 berada diangka 97,55 sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2020 adalah 97,57.

2.3.2.3 Pangan

Ketahanan pangan secara umum sangat terkait dengan ketersediaan pangan, yaitu kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Secara umum, berdasarkan Tabel 2.41 ketersediaan pangan utama di Kabupaten Tanah Datar telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini tampak dari persentase ketersediaan pangan utama yang lebih dari 100%, artinya terdapat surplus ketersediaan pangan utama.

Tabel 2.50
Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan pangan utama	194,220	260,697	279,284	284,239	168,111
2.	Ketersediaan energi dan protein per kapita					
	-Energi	5.354	5.334	6.263	6.591	6.610
	-Protein	136,4	158	162	170	174
3.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	60	78	78	47	18

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2021

Kabupaten Tanah Datar telah mampu surplus ketersediaan pangan, namun jika dilihat selama periode 2016-2020 kondisinya berfluktuatif. Pada tahun 2016 persentase ketersediaan pangan utama yaitu 194,220 dan pada kondisi tahun 2019 meningkat menjadi 284,239 lalu mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 168,111 akibat pandemic covid-19.

2.3.2.4 Pertanahan

Pertanahan erat kaitannya dengan kepemilikan surat atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut serta terkait dengan status tanah ulayat, sehingga permasalahan tanah cenderung menghambat masuknya investasi dari luar yang menginginkan kepastian lahan sebelum berinvestasi. Dalam rangka rangka mewujudkan legalitas pertanahan, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan seluruh asset tanah dalam bentuk penerbitan sertifikat tanah.

Sedangkan kewenangan dalam menerbitkan sertifikat atau bukti kepemilikan atas tanah dengan alasan kapasitas dan kemampuannya yang terbatas merupakan kewenangan pusat sehingga upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah yakni dengan mengupayakan pembebasan lahan baik dalam mendukung investasi maupun pembangunan infrastruktur.

Sampai tahun 2020, aset tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yang telah diterbitkan sertifikatnya berjumlah 392 buah dari target 1319 buah. Sedangkan sertifikat aset Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sebanyak 927 buah, akan ditindaklanjuti sampai akhir tahun RPJMD.

2.3.2.5 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup sebagai tempat kelangsungan makhluk hidup yang di dalamnya terdapat air, tanah dan udara yang harus selalu dijaga kondisinya agar selalu bersih dan layak, serta berada pada ambang batas

minimal pencemaran sehingga tidak berpengaruh buruk pada kesehatan masyarakat. Secara umum, kondisi pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanah Datar tergambar dalam Tabel 2.51:

Tabel 2.51
Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase penanganan Sampah	15,00	37,01	50,93	56,81	56,81
2.	Persentase sampah yang terangkut (%)	65,00	24,52	35,09	36,07	36,07
3.	Persentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air	26,42	32,25	38,10	43,80	46,67
4.	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal/UKL-UPL	20,00	25,00	50,00	60,00	65,00
5.	Penegakan hukum lingkungan	87,50	100	100	100	100
6.	Hasil pengukuran indeks kualitas air	89,29	81,94	82,50	97,50	77,5
7.	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	87,61	94,11	86,90	87,80	89,83
8.	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	53,15	53,15	53,24	56	53,23
9.	Persentase cakupan area pelayanan	15,00	18,97	20,19	24,00	28,00
10.	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	71,00	69,00	73,00	74,00	74,00
11.	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	n/a	12,06	15,06	19,48	19,48

Sumber : Dinas Perkim LH Tahun 2021

Secara umum pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup di Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020 sudah mengalami peningkatan terutama di bidang persampahan. Hal ini terlihat pada tabel di atas dengan meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana persampahan. Disamping bidang persampahan, pengelolaan kualitas lingkungan juga menjadi prioritas, ini terlihat dari penerbitan rekomendasi izin pengelolaan lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Perkim dan Lingkungan Hidup.

Indeks kualitas udara adalah ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara. Indeks ini biasa digunakan oleh badan pemerintah untuk memperlihatkan seberapa buruk kualitas udara di suatu daerah. Dari tabel 2.51 dapat dilihat bahwa indeks kualitas udara di Tanah Datar pada tahun 2020 nilainya 89,83 dimana berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5.131/PPKL/SET/REN.O/5/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Penyampaian Acuan Target Indeks Lingkungan Kabupaten/Kota Indeks Kualitas Udara ditargetkan 85,38 sehingga capaiannya sudah melebihi target.

Indeks kualitas air adalah metode sederhana yang digunakan sebagai bagian dari survei kualitas air secara umum dengan menggunakan sekelompok parameter. Dari tabel 2.51 dapat dilihat bahwa indeks kualitas air Tanah Datar pada tahun 2020 nilainya 77,5 dimana berdasarkan KepmenLH Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air sehingga capaiannya termasuk kedalam klasifikasi memenuhi baku mutu.

Penghitungan IKTL dilakukan dengan membandingkan luas hutan dengan luas wilayah administratif. Indeks kualitas tutupan lahan Kabupaten Tanah Datar capaiannya pada tahun 2020 sebesar 53,23 dimana berdasarkan Surat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5.131/PPKL/SET/REN.O/5/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Penyampaian

Acuan Target Indeks Lingkungan Kabupaten/Kota Indeks Kualitas Tutupan Lahan ditargetkan 51,72 sehingga capaiannya sudah melebihi target.

2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Sedangkan Pencatatan sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, pada register akta yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar pembuatan kutipan atau salinan akta.

Tabel 2.52
Indikator Layanan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	94,89	95,34	94,57	98,61	95,13
2.	Rasio bayi berakte kelahiran	72,15	77,66	87,53	93,62	94,29
3.	Rasio pasangan berakte nikah (%)	28,16	33,82	42,93	52,30	59,6
4.	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	94,89	95,34	94,57	98,61	95,13
5.	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	73,15	38,56	77,47	81,35	94,43
6.	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
7.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk mencapai 95,13% pada tahun 2020 sedangkan rasio bayi berakte kelahiran telah mencapai 94,29% dimana kondisi ini capaiannya sudah sangat baik dan selalu mengalami peningkatan tiap tahun.

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi. Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Desa/nagari, sebagai wilayah administrasi terendah secara mandiri telah dijadikan subyek pembangunan. Tujuannya mengurangi kesenjangan pembangunan perdesaan dan perkotaan yang cenderung bias perkotaan (urban bias). Selain itu, mendekatkan pelayanan pemerintahan di tingkat desa/nagari, supaya menjadi solusi bagi perubahan sosial ekonomi desa/nagari. Desa/nagari sebagai subyek pembangunan, diharapkan mampu mendekatkan pelayanan terhadap warga melalui pembangunan

infrastruktur dan pemberdayaan. Mulai dari menggerakkan perekonomian, membangun sarana pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana energi, transportasi, dan komunikasi, serta sarana lain yang dibutuhkan.

Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat desa diupayakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraaan masyarakat. Upaya yang dilaksanakan meliputi pembinaan lembaga pemberdayaan masyarakat, pembinaan PKK, LSM, dan Posyandu. Selama kurun waktu 5 tahun, jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) mengalami peningkatan. Hal ini dapat diartikan bahwa keaktifan masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam pembangunan daerah terus menunjukkan peningkatan. Kondisi pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.53
Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib
Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	90	90	90	90	90
2.	Jumlah kelompok binaan PKK	14	14	14	14	14
3.	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100
4.	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKB Tahun 2021

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. LPMD mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Di setiap desa telah dibentuk LPMD dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa.

LPMD mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Di setiap desa telah dibentuk LPMD dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa. Adapun jumlah LPMD di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 yaitu sebanyak 90 buah. Pada setiap tahunnya LPMD dibina oleh kecamatan dan kabupaten baik melalui program desa binaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan Perangkat Daerah terkait maupun program lainnya.

2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Salah satu indikator keberhasilan keluarga berencana adalah penurunan rata-rata jumlah anak per keluarga. Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Tabel 2.54
Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-Rata Jumlah Anak dalam Keluarga	2,62	2,68	2,58	2,46	2,42

Sumber : Dinas PMDPPKB, 2021

Jika dilihat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rata-rata jumlah anak dalam keluarga cenderung menurun dari 2,62 pada tahun 2016 menjadi 2,42 pada tahun 2020. Hal ini disebabkan keberhasilan Program Keluarga Berencana yang melibatkan semua unsur.

Indikator selanjutnya, yaitu Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa pada tahun 2020 capaiannya 7,5 meningkat dari tahun 2018 dimana capaiannya yaitu 0,08. Kondisi Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa selama periode 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.19
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan, 2016-2020

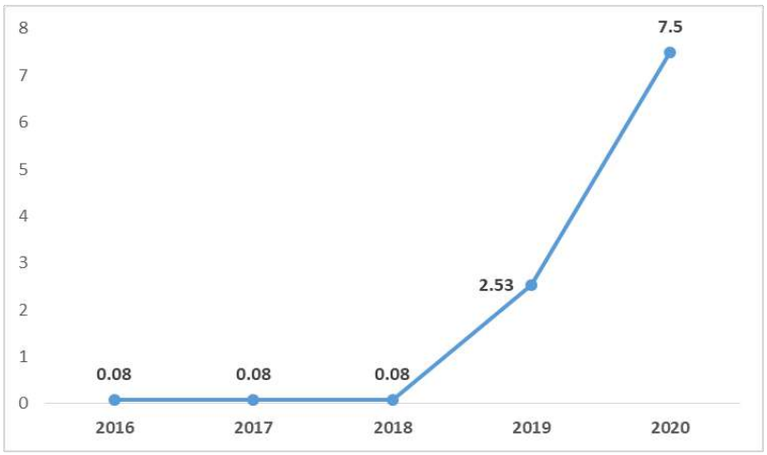

Sumber : Dinas PMDPPKB Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat kondisi rasio petugas pembantu Pembina KB Desa setiap desa kondisinya semakin membaik. Selanjutnya aspek fokus pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.55
Aspek Fokus Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	13,2	14,27	11,72	11,35	14,63
2.	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	27,78	28,29	24,77	28,54	35,29
3.	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	71,56	73,87	72,93	80,04	70,64
4.	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	76,71	79,77	85,43	82,43	81,58
5.	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	75,29	76,58	80,84	78,1	77,08
6.	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	84,01	83,09	77,93	81,93	77,73
7.	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100
8.	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang kabupaten/kota	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas PMDPPKB Tahun 2021

2.3.2.9 Perhubungan

Pelayanan Urusan Perhubungan belum optimal karena sistem transportasi barang dan orang belum terkoneksi dengan pasar sebagai pusat aktivitas ekonomi. Berdasarkan data sarana dan prasarana penunjang bidang perhubungan seperti rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, *traffic light* dan *warning light* tahun 2016-2020.

Tabel 2.56
Indikator Pembangunan Bidang Perhubungan, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah arus penumpang angkutan umum (orang)	332.635	340.813	339.415	363.500	175.500
2.	Angkutan darat	6.069	6.069	6.192	7.057	7.057
3.	Kepemilikan KIR angkutan umum (unit)	375	516	490	365	365
4.	Lama pengujian kelayakan angkutan umum/KIR (menit)	30	30	30	25	30
5.	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum (rupiah):					
	- Bus	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	- Mobil Penumpang	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
6.	Pemasangan Rambu-rambu (unit)	86	68	117	0	0
7.	Rasio Izin Trayek	0,0465	0,0252	0,0249	0,0574	0,0129
8.	Izin Trayek Perkotaan	17	18	9	50	5
9.	Izin Trayek Perdesaan	80	96	74	150	43
10.	Jumlah Terminal Bis	3	3	3	2	2

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2021

Capaian kinerja urusan perhubungan meliputi masalah peningkatan kualitas lalu lintas, kelancaran arus barang dan penumpang. Dari data pada Tabel diatas dapat diperhatikan bahwa perkembangan jumlah arus penumpang angkutan umum di Kabupaten Tanah Datar selama kurun waktu 2016-2019 mengalami kenaikan, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan. Kondisi pandemi *covid 19* melanda Indonesia termasuk di Kabupaten Tanah datar pada Tahun 2020 ikut memberi dampak terhadap penununurunan jumlah arus penumpang umum karena adanya berbagai kebijakan yang membatasi arus pergerakan masyarakat, termasuk semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan.

Untuk Indikator kepemilikan KIR angkutan umum pada tahun 2020 sebanyak 365. Dari data pada tabel diatas juga dapat diperhatikan bahwa untuk pemasangan rambu-rambu tidak dilaksanakan pada Tahun 2020. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya keterbatasan serta *refocussing* anggaran dampak pandemi Covid-19 sehingga pemasangan rambu-rambu baru belum bisa dilaksanakan.

Izin trayek merupakan izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek sebagaimana tergambar dalam Tael diatas izin trayek diberikan dalam 3 jenis yakni izin trayek yang bersifat insidentil, surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Datar (izin trayek angkutan) serta perpanjangan izin trayek

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah izin trayek di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 yang mencapai sebanyak 48 izin, mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan Tahun 2019 yaitu sebanyak 200 izin trayek.

Dari Tabel 2.56 dapat dilihat bahwa di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2018 terdapat 3 (tiga) terminal bis yang melayani Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP). Pada Tahun 2020 menjadi 2 (dua) terminal karena pengelolaan Terminal Piliang yang merupakan Terminal Tipe B diambil alih oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Perkembangan pelayanan umum bidang perhubungan selama periode 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.57:

Tabel 2.57
Aspek Pelayanan Bidang Perhubungan di Kabupaten Tanah Datar, 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah rambu lalu lintas terpasang	86	194	311	298	288
2.	Lokasi Traffic Light	6	6	6	6	6
3.	Jumlah Warning Light	3	3	2	14	14
4.	Jumlah marka tersedia (m^2)	1.701	752	815	790	700

Sumber : Dinas Perhubungan Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah rambu-rambu lalu lintas terpasang selama kondisi 2016-2020, pada tahun 2016 sebanyak 86 dan meningkat pada tahun 2020 menjadi 288. Untuk periode tahun 2016-2020 *traffic light* berada pada 6 lokasi dan *warning light* sebanyak 14 unit. Ketersediaan marka jalan ini cenderung menurun dalam 5 tahun terakhir. Jumlah marka jalan yang tersedia di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 seluas 700 m^2 , penurunan ini disebabkan salah satunya karena adanya pekerjaan pengaspalan jalan dan tidak dilaksanakan pengadaan marka jalan pada 2 tahun terakhir.

2.3.2.10 Komunikasi dan Informatika

Perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat cepat telah mendorong kemudahan akses informasi dan komunikasi, bahkan hingga ke daerah yang dulunya tidak terjangkau sekalipun. Hal ini tampak dari perkembangan jumlah jaringan komunikasi (tower penyedia jasa komunikasi seluler) yang terus meningkat setiap tahun. Rasio warnet cenderung mengalami stagnan dalam 5 tahun terkahir. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya kemudahan akses dan biaya paket data seluler sehingga pengguna cenderung menggunakan fasilitas internet dari smartphone ataupun internet pribadi dirumah. Sementara warnet, masih punya segmen pasar tersendiri, khususnya masyarakat yang memerlukan akses internet dengan biaya terjangkau khusunya didaerah sekitar kawasan kampus. Perkembangan pembangunan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada Tabel 2.58:

Tabel 2.58
Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib
Bidang Komunikasi dan Informatika, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah jaringan komunikasi (tower)	108	118	133	130	141
2.	Rasio warnet terhadap penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3.	Jumlah surat kabar nasional/local	18	18	50	2	31
4.	Jumlah penyiaran radio/TV local	7	7	7	1	2
5.	Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6.	Pameran/Expo	1	1	5	1	0
7.	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	n/a	14	14	43	42
8.	Cakupan layanan telekomunikasi	n/a	n/a	n/a	70	71
9.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	n/a	n/a	n/a	81,86	82
10.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	n/a	n/a	n/a	36,12	40

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

Dari tabel 2.59 dapat dilihat bahwa jumlah jaringan komunikasi (tower) di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 sebanyak 141 tower. Proporsi rumah tangga dengan akses internet mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 36,12 dan menjadi 40 pada tahun 2020.

2.3.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Koperasi dan UMKM mempunyai peranan penting dalam menunjang perekonomian masyarakat, dalam bentuk penyerapan tenaga kerja serta membuka lapangan usaha baru. Upaya peningkatan UMKM dilakukan melalui pembinaan SDM pengelola dan penambahan modal usaha, serta mempromosikan produk-produk UMKM. Perkembangan koperasi dan UMKM selama tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.60:

Tabel 2.59
Indikator Layanan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase koperasi aktif	89,91	89,91	91,52	50,90	51,11
2.	Usaha Mikro dan Kecil	2.351	2.351	42.415	42.602	46,223

Sumber : Dinas Koperindag, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena kurangnya kegiatan untuk memonitoring koperasi dan bantuan dari koperasi pusat, baik manajemen maupun bantuan fisik. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah berupaya untuk meningkatkan koperasi dengan memberikan penghargaan untuk koperasi yang berprestasi, hal ini akan meningkatkan semangat anggota koperasi dan masyarakat untuk ikut serta dalam koperasi, terlihat dari persentase koperasi aktif pada tahun 2020 yang

mencapai 51,11%. Adanya perubahan kriteria koperasi aktif dari Kementerian Koperasi UKM ikut mempengaruhi capaian kinerja Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Tanah Datar.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang : kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, kebijakan atau program kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan usaha mikro merupakan kewenangan pemerintah kabupaten. Berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan lebih memberdayakan koperasi dan usaha mikro sebagai motor penggerak perekonomian Kabupaten Tanah Datar.

2.3.2.12 Penanaman Modal

Dengan adanya turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yaitu Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, diharapkan bisa memberikan peluang bagi daerah untuk lebih meningkatkan realisasi investasi agar berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.60
Indikator Layanan Wajib Bidang Penanaman Modal, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Investasi didaerah	123	53	75	82	111
2.	Jumlah nilai realisasi Investasi	90.700.515.730	115.315.287.567	139.144.363.377	107.905.121.713	126.753.345.000
3.	Kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi	n/a	24.614.771.837	23.829.075.810	(31.239.241.664)	18.848.223.287

Sumber : Dinas Penanaman Modal PTSP Naker, 2021

Berdasarkan grafik di atas, jumlah nilai investasi di Kabupaten Tanah Datar pada Tahun 2020 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2019. Hal ini merupakan pertanda bahwasanya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam peningkatan realisasi investasi mulai menunjukkan hasil. Namun masih dibutuhkan upaya maksimal dalam rangka peningkatan investasi yang meliputi inventarisasi peluang investasi, penyiapan dokumen pendukung potensi investasi, promosi peluang investasi. Kesiapan dan keterbukaan masyarakat dalam menerima investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Tanah Datar merupakan faktor penentu lainnya yang secara signifikan berdampak pada tingkat realisasi di Kabupaten Tanah Datar.

2.3.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan aset pembangunan yang harus mendapat perhatian dari pemerintah. Salah satu bentuk perhatian yang telah diberikan oleh pemerintah selama ini adalah fasilitasi kegiatan kepemudaan dan olahraga. Tabel 2.61 menggambarkan kondisi pembangunan bidang kepemudaan dan olahraga:

Tabel 2.61
Indikator Layanan Urusan Pemerintahan Wajib
Bidang Kepemudaan dan Olahraga, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah organisasi pemuda	176	283	357	271	271
2.	Jumlah organisasi olahraga	30	30	32	36	34

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah kegiatan kepemudaan	9	11	7	7	4
4.	Jumlah kegiatan olahraga	9	9	12	20	3
5.	Gelanggang /balai remaja (selain milik swasta)	75	75	75	75	75
7.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	0	58	64	94	30
8.	Persentase wirausaha muda	n/a	n/a	n/a	n/a	18,9
9.	Cakupan pembinaan olahraga	n/a	n/a	n/a	80	50
10.	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	n/a	n/a	n/a	60	45
11	Jumlah atlet berprestasi	n/a	n/a	n/a	130	0
12	Jumlah prestasi olahraga	n/a	n/a	n/a	25	0
13.	Cakupan pembinaan atlet muda	n/a	n/a	n/a	80	40

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2021

Berdasarkan data di atas, perkembangan jumlah organisasi pemuda tidak begitu signifikan, bahkan pada tahun 2019 dan 2020 menurun jumlahnya, sedangkan jumlah atlet berprestasi serta Persentase organisasi pemuda yang aktif juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 94 dan tahun 2020 menjadi 30.

Jumlah prestasi olahraga Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2019, hal ini disebabkan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak adanya pelaksanaan event-event olahraga.

Perhatian pemerintah dalam bidang olahraga dapat diukur diantaranya dari perkembangan jumlah gedung/sarana olahraga. Disamping itu, tinggi rendahnya aktivitas olahraga dapat diukur dari jumlah klub olahraga yang aktif. Tabel 2.62 menggambarkan perkembangan jumlah gedung/sarana olahraga dan jumlah klub olahraga dalam kurun waktu tahun 2016–2020.

Tabel 2.62
Perkembangan Jumlah Klub dan Gedung/Sarana Olahraga, 2016 – 2020

No	Sarana Olahraga	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sepak Bola	101	101	101	106	88
2.	Futsal	-	-	-	10	35
3.	Bola Volley	209	209	222	169	201
4.	Bulutangkis	88	88	88	63	117
5.	Sepak Takraw	117	117	117	47	84
6.	Tenis Lapangan	5	5	4	3	6
7.	Bola basket	37	37	37	4	32
8.	Panjat Tebing	2	2	2	1	1
9.	Kolam Renang	3	3	3	-	3
	Jumlah	562	562	574	403	567

Sumber : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun, 2021

Dari tabel di atas terlihat jumlah sarana olah raga di Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 terutama sarana olahraga sepak bola, penurunan dikarenakan sarana prasarana olah raga mengacu kepada standar nasional sehingga beberapa sarana prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Pelaksanaan turnamen sepak bola antar nagari yang rutin menjadi agenda Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan beberapa turnamen bersifat nonreguler. Hal ini menjadi salah satu pendorong agar jumlah sarana olahraga sepak bola meningkat.

2.3.2.14 Statistik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa perencanaan pembangunan

harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenannya, ketersediaan data statistik menjadi salah satu tolok ukur kualitas perencanaan pembangunan dan berperan sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah menyediakan publikasi statistik, di antaranya adalah publikasi Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka dan PDRB Kabupaten Tanah Datar. Di samping itu, pemerintah kabupaten juga menerbitkan Profil Daerah dalam 2 tahun sekali.

Tabel 2.63
Indikator Layanan Wajib Bidang Statistik, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Buku ”Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Buku ”PDRB Kabupaten Tanah Datar”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Sistem Data dan Statistik yang Terintegrasi	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada

Sumber : BPS Tanah Datar Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk Buku Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka sudah ada dan yang mengeluarkannya dari Badan Pusat Statistik berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, begitu juga halnya dengan buku PDRB. Untuk indikator tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi pada tahun 2019 belum ada di Kabupaten Tanah Datar. Akan tetapi di tahun 2020 Tanah Datar sudah bekerjasama dengan Provinsi Sumatera Barat dalam menggunakan aplikasi data yang terintegrasi yaitu *edatabase.tanahdatar.go.id.*

2.3.2.15 Persandian

Persandian adalah Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Point 12. Berdasarkan Perda kabupaten tanah Datar Nomor 9 tahun 2019 tentang SOTK, persandian berada di Dinas Kominfo Kabupaten Tanah Datar Bidang Statistik dan Persandian, Kepala seksi Persandian.

Definisi persandian menurut Perka Lemsaneg Nomor 7 Tahun 2017 adalah kegiatan dibidang pengamanan data-infomasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis, dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.

Urusan Persandian saat ini dalam pengamanannya terhadap informasi publik, tidak berfokus pada informasi rahasia, layanan yang diberikan persandian tidak hanya pada kerahasiaan, namun juga keutuhan, keotentikan, keteraksesan, ketersediaan dan penyangkalan atas informasi dan yang terpenting adalah pelaksanaan keamanan informasi secara menyeluruh.

Penyelenggaraan dan pelaksanaan persandian untuk pengamanan informasi di pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Badan Cyber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 sesuai dengan pasal 4 (1) yang terdiri dari :

a. Penyusunan kebijakan pengamanan informasi
b. Pengelolaan sumber daya kemanan informasi
c. Pengamanan sistem elektronik dan pengamanan informasi elektronik
d. Penyediaan layanan kemanan informasi

Tahun 2020 pelaksanaan persandian untuk keamanan informasi di Kabupaten Tanah Datar telah diterbitkan sertifikat elektronik sebanyak 81

orang yang terdiri dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Kepala Dinas, Camat dan Kasubag.

2.3.2.16 Kebudayaan

Sebagai daerah yang dikenal sebagai asal usul orang minang, Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi yang sangat besar di bidang budaya. Sampai dengan tahun 2015, upaya pemerintah untuk melestarikan budaya lokal ditandai dengan banyaknya festival seni budaya yang diselenggarakan, baik skala kecil maupun skala yang cukup besar, baik yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat maupun pemerintah. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan Pacu Jawi yang telah menjadi agenda rutin daerah dan dilaksanakan beberapa kali dalam satu tahun. Kinerja pemerintah dalam pelestarian seni dan budaya lokal tergambar dalam Tabel 2.65 :

Tabel 2.64
Indikator Fokus Layanan Urusan Wajib Bidang Kebudayaan, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	33	51	51	10	1
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	67	67	67	76	87

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Tanah Datar mengalami penurunan pada Tahun 2020. Dari tahun 2019 sebanyak 10 festival turun menjadi 1 festival ditahun 2020. Hal ini disebabkan karena terjadinya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak terlaksananya festival seni dan budaya di Kabupaten Tanah Datar.

2.3.2.17 Perpustakaan

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia karena keberadaannya disamping sebagai sumber informasi dan pengetahuan, juga menjadi salah satu alat untuk mengukur minat baca masyarakat. Guna menunjang hal tersebut, pemerintah setiap tahun selalu berupa untuk meningkatkan kualitas perpustakaan, baik melalui penambahan koleksi wisata, maupun peningkatan pelayanan lainnya, seperti layanan perpustakaan keliling. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke perpustakaan. Tabel 2.65 menggambarkan perkembangan pengelolaan perpustakaan daerah:

Tabel 2.65
Indikator Layanan Wajib Bidang Perpustakaan, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perpustakaan daerah (unit)	1	1	1	1	1
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	6.340	4.322	4.002	4.368	4.873
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul buku)	13.483	14.304	15.168	15.553	16.121
4.	Rasio perpustakaan per satuan penduduk	0,9	0,12	0,14	0,15	0,14
5.	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	1	1

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah perpustakaan daerah selama periode 2016-2020 yaitu sebanyak 1 perpustakaan. Indikator jumlah pengunjung perpustakaan per tahun juga mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebanyak 4.368 dan tahun 2020 menjadi 4.873 orang. Selanjutnya, indikator koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul buku) semakin bertambah. Pada tahun 2019 sebanyak 15.553 buku dan terus meningkat pada tahun 2020 menjadi 16.121 buku, dengan rasio perpustakaan per satuan penduduk pada tahun 2020 sebesar 0,14.

2.3.2.18 Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan terutama untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan kearsipan, di antaranya melalui bimbingan teknis dan pembinaan pengelolaan arsip secara baku. Dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan telah diupayakan peningkatan kapasitas arsip hasil-hasil pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat pada Tabel 2.66 :

Tabel 2.66
Indikator Layanan Wajib Bidang Kearsipan, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengelola arsip secara baku	123	123	123	123	123
2.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	94,87	97,43	97,43	97,43	97,43
3.	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	0	2	4	2	3

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator pengelola arsip secara baku di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2016-2020 tidak mengalami perubahan. Indikator persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 94,87 menjadi 97,43 pada tahun 2020. Selanjutnya, untuk indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan jumlahnya ada 3 orang pada tahun 2020, tentunya kondisi ini harus lebih ditingkatkan agar tercipta pengelolaan arsip yang baik di Kabupaten Tanah Datar.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Perkembangan pembangunan bidang perikanan selama kurun waktu tahun 2016–2020 dapat dilihat pada tabel 2.71. Produksi perikanan mengalami peningkatan yang signifikan, dari 7.385,50 ton pada tahun 2016, meningkat menjadi 12.209,29 ton pada tahun 2020.

Tabel 2.67
Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi perikanan (ton)	7.385,50	9.261,06	11.384,13	11.543,38	12.209,29
2.	Konsumsi ikan (kg)	35	32	33,87	36,10	37,61
3.	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	35	35	35	54	40
4.	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	1.860,7	2.083,09	2.098,16	2.189,6	2.650,28

Sumber : Dinas Pangan dan Perikanan Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2016-2020 terjadi kenaikan produksi perikanan dan diikuti oleh konsumsi ikan. Cakupan bina kelompok nelayan di tahun 2020 nilainya 40% dan mengalami penurunan nilainya jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 54%. Melihat hal diatas dapat disimpulkan bahwa sektor perikanan masih bisa dianggap sebagai sumber pendapatan ekonomi masyarakat ditengah pandemi covid-19.

2.3.3.2 Pariwisata

Perkembangan pariwisata masih sangat tergantung pada keberadaan Istano Basa Pagaruyung, yang sampai saat ini masih belum tergantikan posisinya sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Tanah Datar, bahkan di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian. Bukan berarti pengembangan pariwisata hanya difokuskan pada Istano Basa Pagaruyung. Event-event budaya dan tradisi lokal yang telah rutin dilaksanakan juga turut membantu meningkatkan kunjungan wisata di Kabupaten Tanah Datar. Salah satunya adalah event Pacu Jawi yang banyak menarik minat wisatawan asing untuk berkunjung.

Permasalahan pokok dalam bidang pairiwisata adalah pengelolaan objek wisata belum dikelola secara optimal baik oleh pemerintah, swasta maupun oleh masyarakat. Pariwisata diharapkan merupakan salah satu sektor penting dalam menunjang perekonomian masyarakat Kabupaten Tanah Datar untuk lima tahun mendatang. Tujuan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai destinasi pariwisata yang unggul berbasis agama, budaya dan sumber daya alam.

Kekuatan yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar disektor pariwisata adalah banyaknya destinasi-destinasi wisata alam, wisata kuliner dan wisata budaya dan yang semakin ramai dikunjungi wisatawan. Pada Tabel 2.68 menggambarkan perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Tanah Datar.

Tabel 2.68
Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Pariwisata, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kunjungan wisata (orang)	1.189.173	1.276.879	1.331.290	1.218.576	845.780
	- Jumlah wisatawan asing	142.424	53,152	62.926	42.489	9.602
	- Jumlah wisatawan domestik	1.046.749	1.223.727	1.268.364	1.176.087	836.178
2.	PAD sektor Pariwisata (000)	3.497.059	4.092.915	6.440.715	5.804.760	2.638.475

Sumber: Dinas Pariwisatan Pemuda dan Olahraga Tahun 2020

Berdasarkan Tabel 2.68, terjadi penurunan kunjungan wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik, pada tahun 2019 dari tahun 2018. Pada tahun 2018 jumlah kunjungan wisatawan yaitu 1.331.290 dan menurun di tahun 2019 menjadi 1.218.576. Penurunan tersebut berdampak kepada Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata yaitu pada tahun 2018 sebanyak Rp.6.440.715.000 dan menurun pada tahun 2019 menjadi Rp.5.804.760.000 Kondisi ini disebabkan karena biasanya puncak kunjungan terbanyak ke Kabupaten Tanah Datar adalah pada saat hari besar keagamaan (Hari Raya Idul Fitri) serta hari libur tahun baru masehi. Pada tahun 2019 masa liburan lebaran idul fitri 1440 H lalu sangat pendek sehingga banyak dari perantau yang memilih tidak pulang ke kampung halaman, ini juga diperkuat dengan kenaikan tiket pesawat yang tinggi

sehingga menurunkan minat untuk berwisata bagi wisatawan serta faktor lainnya seperti bencana alam yang terjadi. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan adalah dibangunnya sarana dan prasarana pendukung baik yang berasal dari APBD maupun DAK fisik dan nonfisik.

Untuk tahun 2020 sektor kepariwisataan juga mengalami penurunan yang sangat signifikan baik dari jumlah kunjungan wisatawan maupun dari segi penerimaan PAD sektor pariwisata. Hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 sehingga destinasi wisata yang ada di Kabupaten Tanah Datar tutup sementara, dan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memulihkan sektor pariwisata khususnya destinasi wisata adalah dengan penerapan protokol kesehatan bagi wisatawan yang mengunjungi destinasi wisata di Kabupaten Tanah Datar.

2.3.3.3 Pertanian

Produktivitas padi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir secara umum menunjukkan peningkatan, dari 5,31 ton/ha pada tahun 2015 menjadi 5,70 ton/ha pada tahun 2019, melihat trendnya hasil produksi padi mengalami peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi melihat rata-rata kenaikan pertahun, progress peningkatannya tidak terlalu signifikan dan belum menunjukkan hasil produksi yang maksimal walaupun telah ada upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan produksi padi yaitu penerapan teknologi padi salibu yang bertujuan meningkatkan indeks panen padi dlam satu tahun dari 100% (1 kali panen dalam setahun) menjadi 200% (2 kali panen dalam setahun). Perkembangan indikator pertanian dalam kurun waktu 6 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.69:

Tabel 2.69
Indikator Layanan Pilihan Bidang Pertanian, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produktivitas padi (ton/ha)	5,19	5,61	5,21	5,70	5,70
2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%) *	32,52	31,55	30,61	29,75	29,81
3.	Cakupan bina kelompok petani (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pertanian Tahun 2021
(*) BPS Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produktivitas padi (ton/ha) nilainya bergerak stagnan di angka 5,70 ton/ha pada tahun 2019 dan tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian belum memberikan kontribusi yang membanggakan bagi PDRB Kabupaten Tanah Datar yang nilainya di 29,81% pada tahun 2020 dan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya nilainya cenderung mengalami penurunan walaupun tidak signifikan, sehingga untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB perlu peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah komoditi pertanian yang bernilai tinggi di Kabupaten Tanah Datar.

Untuk indikator cakupan bina kelompok petani pada tahun 2020 sebesar 100% sudah maksimal sehingga dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian walaupun hasil produksi belum mencapai hasil yang diharapkan, akan tetapi masih merupakan ujung tombak perekonomian ditengah pandemi covid-19.

2.3.3.4 Perdagangan

Urusan perdagangan dapat dilihat dari kontribusi sektor Perdagangan (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) terhadap PDRB berfluktuasi terlihat pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 12,85% dan pada tahun 2017, 2018, 2019 meningkat menjadi 13,49%.

Tabel 2.70
Indikator Layanan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor Perdagangan (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) terhadap PDRB	12,85	13,10	13,42	13,49	13,35
2.	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	360	191	292	514	300

Sumber : BPS /Koperindag Tahun 2020

Pada tahun 2020 terjadi penurunan Kontribusi sektor Perdagangan (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) terhadap PDRB. Hal ini disebabkan oleh pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi covid-19. Digitalisasi ekonomi merupakan langkah adaptasi yang perlu segera dilakukan agar sektor perdagangan memberikan kontribusi tinggi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.3.3.5 Perindustrian

Industri yang berkembang di Kabupaten Tanah Datar masih didominasi oleh industri kecil menengah (IKM). Cakupan Bina Kelompok Pengrajin di Kabupaten Tanah Datar menunjukkan tren yang naik pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat terlihat pada Grafik 2.20 :

Grafik 2.20
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin, 2016-2020

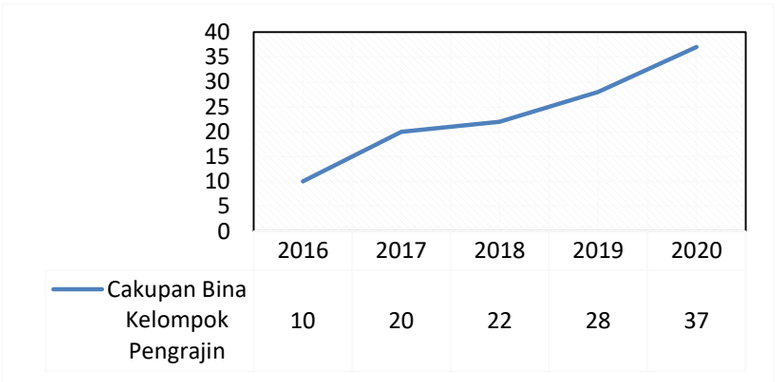

Sumber: Dinas Koperindag Tahun 2021

Peningkatan Cakupan bina kelompok pengrajin merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk memajukan industry kecil menengah dengan upaya yang dilakukan antara lain : Peningkatan SDM melalui bimtek dan pelatihan, Fasilitasi pengembangan kemampuan teknologi industri, fasilitasi pengembangan standarisasi produk dan pengembangan pasar. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan sektor industri di Kabupaten Tanah Datar yaitu belum adanya keterkaitan antara hulu dan hilir, dan keterkaitan antar sektor misalnya antara sektor pertanian dan industri pengolahan, hal ini berdampak pada masih rendahnya nilai tambah produk yang dihasilkan.

2.3.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

2.3.4.1 Sekretariat Daerah

Tabel 2.71
Indikator Sekretariat Daerah Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Meningkatnya Koordinasi dalam pembinaan kehidupan beragama	0	6	14	14	14
2.	Meningkatnya Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan masalah kesejahteraan social	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan reformasi birokrasi	CC	B	B	BB	BB
4.	Meningkatnya Koordinasi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali	3 Kali

Dari tabel diatas dapat dilihat kegiatan koordinasi dalam pembinaan kehidupan beragama terjadi kenaikan. Sedangkan koordinasi penanggulangan kemiskinan capaiannya sudah 100%, pada kegiatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan reformasi birokrasi terjadi kenaikan dan kegiatan Koordinasi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dapat terlaksana, kesemuanya itu merupakan target yang ditetapkan pada RPJMD perubahan 2017-2021.

2.3.4.1.1 Sekretariat DPRD

Indikator pada sekretariat dewan dapat dilihat pada Tabel 2.72 dibawah ini.

Tabel 2.72
Indikator Sekretariat Dewan, 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alatalat kelengkapan DPRD	Ada	ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersusun dan terintegrasinya programprogram kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD maupun dokumen RKPD	Ada	ada	ada	ada	ada
3.	Terintegrasi programprogram kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan perda dan fungsi anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	ada	ada	Ada	Ada	Ada

Sumber :Sekretariat DPRD, Tahun 2021

2.3.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Pelayanan umum yang dilaksanakan oleh pemerintah belum optimal diantaranya disebabkan oleh keterbatasan pemerintah daerah dalam membentuk Perangkat Kerja Daerah (PKD) dan masih terbatasnya sumber daya aparatur yang berkualitas, kinerja birokrasi dan kualitas sarana prasarana yang belum memadai, dan belum optimalnya koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan

mengakibatkan belum terwujud sepenuhnya *good governance* (tata kelola yang baik) dan tata pemerintahan yang bersih, santun dan melayani.

Untuk peningkatan kualitas SDM aparatur perlu diupayakan pendidikan dan pelatihan struktural maupun fungsional di lingkungan pemerintah kabupaten maupun nagari. Disamping itu, dalam rangka peningkatan kinerja birokrasi dilakukan dengan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten kepada kecamatan dan pelayanan keliling, seperti pelayanan perizinan, administrasi kependudukan, dan pelayanan lainnya serta peningkatan sarana prasarana pemerintahan.

Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pembangunan pemerintahan perlu ditingkatkan koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi dalam rangka mewujudkan *good and clean governance*.

2.3.5.1 Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 tahun. Ketersediaan masing-masing dokumen tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.73 :

Tabel 2.73
Indikator Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100
5.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100	100	100	100	100
6.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW *	n/a	n/a	n/a	33,3	64

Sumber : Baperlitbang, 2021
(*) Dinas PUPRP, 2021

Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tanah Datar telah mengadopsi prinsip perencanaan partisipatif yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif. Namun demikian, konsep perencanaan pembangunan partisipatif yang berbasis budaya Minangkabau dan berwawasan lingkungan dalam pelaksanaannya masih belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum semua lapisan masyarakat berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan (Musrenbang).

2.3.5.2 Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya

segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan keuangan daerah tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2021. Keuangan daerah merupakan salah satu faktor yang sangat strategis untuk mencapai/mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, disamping faktor sumber daya manusia serta sarana dan prasarana.

Kinerja pengelolaan keuangan daerah dapat dilihat dari indikator Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah dan persentase peningkatan PAD, sebagaimana tergambar dalam Tabel 2.74:

Tabel 2.74
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	Persentase Peningkatan PAD (%)	6,16	8,66	(10,33)	11,97	2,62
3.	Penetapan APBD (tepat waktu/tidak tepat waktu)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu
4.	Persentase SILPA	5,77	6,48	5,71	4,61	6,41
5.	Persentase belanja pendidikan (20%)	40,67	36,98	36,47	33,88	40,81
6.	Persentase belanja kesehatan (10%)	19,07	22,41	21,49	24,64	30,14
7.	Perbandingan antara belanja langsung dengan APBD	29,90	35,63	34,04	36,47	29,83
8.	Perbandingan antara belanja tidak langsung dengan APBD	60,03	55,09	55,38	54,72	62,67
9.	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0,17	0,18	0,31	0,22	0,21

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2021

Secara umum pada urusan keuangan jika dilihat dari indikator yang ada pada tabel di atas maka kinerja keuangan sudah semakin baik.

2.3.5.3 Kepegawaian

Selama kurun waktu tahun 2016 – 2020, jumlah PNS menunjukkan kecenderungan menurun. Hal ini tidak terlepas dari kebijakan moratorium penerimaan PNS yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Penerimaan pegawai baru sangat dibatasi hanya untuk bidang tertentu, seperti kesehatan dan pendidikan.

Pada tahun 2019, jumlah PNS mencapai 5.680 orang, dengan komposisi 69,24% adalah PNS perempuan dan sisanya 30,76% adalah PNS laki-laki. Dari sisi tingkat pendidikan, terbanyak adalah PNS dengan pendidikan D-4/S-1, yaitu 61,5%; sementara jumlah PNS dengan pendidikan S-2 baru mencapai 3,12% dan belum ada PNS dengan pendidikan S-3. PNS dengan pendidikan SLTA atau di bawahnya mencapai 13,77%. Tabel 2.74 menggambarkan jumlah PNS berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan.

Tabel 2.75
PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan, 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah PNS	6.154	5.989	5.688	5.680	5.365
	a. Laki-laki	2.056	1.928	1.774	1.747	1.618
	b. Perempuan	4.098	4.061	3.914	3.933	3.747
2.	Tingkat pendidikan PNS					
	a. SD	64	60	52	42	34
	b. SMP	97	88	79	59	51
	c. SMA	959	871	789	681	585
	d. D-1/D-2	913	818	694	449	352
	e. D-3	757	789	754	779	755
	f. D-4/S-1	3.222	3.209	3.151	3.493	3.405
	g. S-2	142	154	169	177	182
	h. S-3	-	-	-	-	-

Sumber : BKPSDM, 2021

2.3.1.5.4 Pendidikan dan Pelatihan

Untuk indikator pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76
Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	n/a	10	10	5	140
2.	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	n/a	12	12	0,7	30
3.	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	n/a	17.57	40,28	33,70	28
4.	Jumlah jabatan pimpinan tinggi	21	27	29	26	29
5.	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	4.132	3.950	3.892	3.636	3.610

Sumber : BKPSDM, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan jika dilihat pada tahun 2019 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 140. Selanjutnya, pada indikator persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal juga mengalami peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Pada tahun 2019 persentasenya 0,7% dan meningkat di tahun 2020 persentasenya 30%.

2.3.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

2.3.6.1 Pengawasan

Untuk urusan bidang pengawasan di Kabupaten Tanah Datar indikator kinerjanya dapat dilihat pada persentase tindak lanjut temuan, persentase pelanggaran pegawai dan jumlah temuan BPK.

Tabel 2.77
Indikator pengawasan Tahun, 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase tindak lanjut temuan	91,61	88,92	85,94	88,52	91,6
2.	Persentase pelanggaran pegawai	0	0	0,01	0,14	0
3.	Jumlah temuan BPK	26	40	44	293	25

Sumber : Inspektorat,2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase tindak lanjut temuan di Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 mencapai 91,6%, lebih tinggi dari tahun 2019 yaitu 88,52%. Kondisi ini tentunya perlu komitmen bersama dalam menanggapi temuan untuk dapat ditindaklanjuti sehingga persentase tindak lanjut temuan dapat semakin meningkat.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.4 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari pendapatan masyarakatnya, yang dapat diukur dari tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga. Peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga salah satunya dipengaruhi oleh membaiknya ekonomi dan perubahan perilaku ekonomi masyarakat. Tabel 2.78 menggambarkan kemampuan ekonomi daerah :

Tabel 2.78
Indikator Daya Saing Daerah Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran konsumsi rumah tangga (dalam juta)	6,070,115.72	6,519,128.86	7,074,095.89	7,684,756.66	7,522,366.00
2	Persentase Pengeluaran konsumsi Rumah Tangga terhadap PDRB	56,55	57,04	57,96	58,68	57,74

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase pengeluaran konsumsi rumah tangga selama periode tahun 2016-2020 berfluktuatif. Pada tahun 2016 nilainya 56,55% dan meningkat pada tahun 2019 menjadi 58,68%.

2.4.5 Fokus Iklim Berinvestasi

Tinggi rendahnya minat pelaku usaha untuk menanamkan investasi tergantung di antaranya kepada tingkat keamanan dan ketertiban, kemudahan pengurusan perizinan, tersedianya infrastruktur pendukung, jumlah dan macam pajak yang harus dipenuhi, dan regulasi yang mendukung iklim usaha. Tabel 2.79 menggambarkan indikator yang terkait dengan iklim investasi di Kabupaten Tanah Datar:

Tabel 2.79
Indikator Fokus Iklim Berinvestasi, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kasus criminal	676	327	340	386	383
	Angka kriminalitas	19,60	8,96	9,25	13,9	13,59
2.	Lama proses perijinan:					
	SIUP	3	3	3	3	3
	TDP	3	3	3	3	3
	IUI	3	3	3	3	3
	TDUH	4	3	3	3	3
	IMB	7	5	5	5	5
	HO	10	5	-	-	-
3.	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	57	57	57	57	-
4.	Jumlah Perda/Perbup yang mendukung iklim usaha (terkait perizinan)	-	-	-	-	1

Sumber: Data diolah

Rasa aman merupakan variabel yang sangat luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah jumlah kasus kriminal dan angka kriminalitas. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa kondisi masyarakat menjadi semakin tidak aman.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kasus kriminal pada tahun 2016 menjadi 676 kasus. Selanjutnya ditahun 2017 jumlah kasus kriminal sempat menurun dari tahun 2016 menjadi 327 kasus akan tetapi kembali meningkat di tahun 2018 menjadi 340 kasus. Kondisi terakhir yaitu tahun 2019 dan 2020 meningkat menjadi 386 dan 383 kasus. Kenaikan ini diikuti dengan kenaikan angka kriminalitas dan kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah daerah untuk mengurangi kasus kriminal di Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah daerah harus memberikan rasa aman agar dapat menarik investor masuk ke daerah.

Upaya untuk memenuhi dan menciptakan rasa aman pada masyarakat merupakan langkah strategis yang turut memengaruhi keberhasilan pembangunan nasional. Terciptanya dan terpenuhinya keamanan pada masyarakat akan membangun suasana yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk aktivitas ekonomi. Kondisi ini pada skala makro akan menciptakan stabilitas nasional yang merupakan salah satu prasyarat bagi tercapainya pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

2.4.3 Keuangan dan Perbankan

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian.

Tabel 2.80
Lembaga Keuangan, Hotel/Penginapan dan Restoran

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Bank Nasional (tidak Termasuk cabang)	3	3	3	3	3
2.	Jumlah Bank Lokal (BPR)	21	21	21	21	21
3.	Jumlah dan jenis restoran	40	40	40	40	34
4.	Jumlah penginapan/hotel	12	12	13	31	33

Sumber : BPS (data diolah)

2.4.4 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Aspek ini diukur dengan menggunakan 2 indikator utama yaitu jalan dan irigasi yang diuraikan lagi menjadi beberapa sub indikator sebagaimana ditampilkan dalan Tabel 2.81.

Tabel 2.81
Indikator Fokus Wilayah/ Infrastruktur, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
	Jalan					
1.	Perkembangan Kondisi Jalan					
	Baik	642,3	862,95	850,95	1150,48	1152,57
	Rusak	860,92	640,57	652,27	352,74	350,65
2.	Proporsi Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	0,33	0,57	0,69	0,67	0,77
3.	Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik (>40 km/jam)	42,72	57,41	56,61	76,53	76,77
	Irigasi					
1.	Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik	59,84	63,88	64,72	67,40	56,06
2.	Jumlah Irigasi dalam Kondisi Baik (DI)	380	411	411	428	356
3.	Jumlah Irigasi dalam Kondisi Rusak (DI)	255	233	224	207	279
4.	Rasio Jaringan Irigasi	n/a	n/a	n/a	128	108,25
	Tata Ruang					
1.	Ketaatan Terhadap RTRW	n/a	n/a	n/a	33,3	64
2.	Luas Wilayah Produktif					
	Perhubungan					
1.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	n/a	n/a	n/a	n/a	2,16
2.	Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Kendaraan Umum	n/a	n/a	n/a	350.000	345.500

Sumber : Dinas PUPRP Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021

Minat pelaku usaha untuk menanamkan investasi di suatu daerah salah satunya tergantung kepada tersedianya infrastruktur pendukung yang mendukung iklim usaha. Tabel 2.86 menggambarkan indikator yang terkait dengan fasilitas wilayah dan infratsruktur di Kabupaten Tanah Datar. Salah satu indikator tersebut adalah perkembangan kondisi jalan jika dilihat nilainya kondisi jalan yang baik semakin meningkat tiap tahunnya dan sebesar 1155,88 pada tahun 2020. Proporsi panjang jalan dengan kondisi baik dibandingkan dengan panjang seluruh jalan kabupaten, sedangkan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam) dihitung berdasarkan panjang jalan dengan kondisi baik dibandingkan dengan panjang seluruh jalan kabupaten dikali 100 persen.

2.4.5 Fokus Sumberdaya Manusia

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan

penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan D1/D2/D3 sampai dengan S1, S2 dan S3.

Tabel 2.82
Rasio Kualitas Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Penduduk, 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Lulusan DI/DII/DIII	3.225	5.799	5.515	6.999	7.046
2.	Jumlah Lulusan DIV/S1/S2/S3	15.539	12.289	13.116	18.765	16.910
3.	Rasio Lulusan D1/D2/D3	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02
4.	Rasio Lulusan S1/S2/S3	0,045	0,035	0,038	0,054	0,045

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2020 bahwa rasio Lulusan S1/S2/S3 sebanyak 0,045 lebih banyak dari Rasio Lulusan D1/D2/D3 yaitu 0,02.

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 2.88:

Tabel 2.83
Rasio Ketergantungan, 2016 – 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk usia < 15 tahun	97.935	97.365	96.786	96.141	82.810
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	28.798	29.435	30.219	31.155	34.495
3.	Jumlah Penduduk usia tdk produktif (1) & (2)	126.733	126.800	127.005	127.296	117.304
4.	Jumlah Penduduk usia 15-64 tahun	164.485	166.209	172.880	220.923	254.299
5.	Rasio ketergantungan	77%	76%	73%	58%	46%

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Dari Tabel 2.83 dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Tanah Datar cukup tinggi yang berarti beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi masih cukup tinggi. Namun angka rasio ketergantungan cenderung menurun dari tahun 2016 sebesar 77% menjadi 46% pada tahun 2020.

2.5 Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) di Indonesia mengembangkan indikator TPB sebanyak 319 indikator dari 94 target/sasaran global dan 17 goals. Dari 319 indikator TPB Indonesia 21 indikator bersifat khusus untuk daerah tertentu dan 298 indikator bersifat umum, sehingga setiap daerah memiliki jumlah indikator yang berbeda sesuai dengan kewenangan dan kondisi wilayahnya. Indikator-indikator TPB dibagi dalam 4 (empat) kewenangan, meliputi:

1. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat : 308
2. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi : 235
3. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten : 220
4. Jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota : 222

Beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah:

1. Wewenang;
2. Kekhususan indikator;
3. Kondisi geografis; dan
4. Ketentuan indikator RPJMD.

Selain itu, beberapa faktor yang menentukan jumlah indikator TPB yang menjadi kewajiban daerah adalah daerah khusus yang meliputi indikator, kondisi geografis, dan ketentuan indikator berdasarkan RPJMD.

Kabupaten Tanah Datar telah melakukan penilaian dan analisis capaian indikator TPB yang terbagi dalam 4 (empat) kategori:

1. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
2. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
3. Indikator Target TPB yang Belum Memiliki Data (NA)
4. Indikator Target TPB yang Bukan Kewenangan Kabupaten (BK)

Indikator capaian target diperoleh berdasarkan capaian masing-masing indikator pilar TPB. Adapun masing-masing pencapaian pada tiap pilar dapat dijelaskan tabel di bawah ini:

Tabel 2.84
Capaian Indikator TPB

No	Nama TPB	Jumlah Indikator	Evaluasi Capaian			
			SS	SB	NA	BK
TPB 1	Tanpa Kemiskinan	23	9	7	7	1
TPB 2	Tanpa Kelaparan	11	4	2	5	0
TPB 3	Kehidupan sehat dan sejahtera	34	24	6	4	0
TPB 4	Pendidikan berkualitas	13	8	3	2	0
TPB 5	Kesetaraan gender	14	5	4	5	0
TPB 6	Air bersih dan sanitasi layak	16	5	11	0	2
TPB 7	Menjamin akses energy	2	0	0	2	0
TPB 8	Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak	19	2	8	9	0
TPB 9	Infrastruktur,industri dan inovasi	10	4	2	4	3
TPB 10	Mengurangi kesenjangan	7	3	1	3	4
TPB 11	Kota dan pemukiman berkelanjutan	9	6	3	0	4
TPB 12	Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan	4	2	2	0	1
TPB 13	Penanganan perubahan iklim	2	2	0	0	0
TPB 14	Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim	0	0	0	0	0
TPB 15	Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat	4	0	3	1	0
TPB 16	Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh	21	10	5	6	0
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan	15	4	5	6	1
Total		**204**	**88**	**62**	**54**	**16**
Persentase		**100,00%**	**40,00%**	**28,18%**	**24,55%**	**7,27%**

Capaian tersebut dapat dijelaskan antara lain:

a. Indikator Target TPB yang Sudah dilaksanakan dan mencapai target (SS).

Secara keseluruhan, indikator yang masuk pada kategori ini sebanyak 88 indikator atau bila dipersentasekan menjadi 40% dari 220 indikator yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Capaian tertinggi terdapat pada tujuan ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera sebanyak 24 indikator pencapaian, sedangkan pada tujuan lainnya yang mencapai target hanya berkisar pada 2 hingga 10 target saja. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa pencapaian target pada tujuan kehidupan sehat dan sejahtera telah dilaksanakan dengan baik.

b. Indikator target TPB yang sudah dilaksanakan namun belum mencapai target (SB)
   Secara keseluruhan yang termasuk pada kategori ini hanya 62 indikator dengan persentase capaian sebesar 28,18%. Indikator terbanyak pada kategori ini berada pada tujuan air bersih dan sanitasi layak yang mencapai 11 indikator.
c. Indikator target TPB yang belum memiliki data (NA)
   Indikator pada kategori ini tidak dapat mendukung penjelasan capaiannya. Namun secara keseluruhan, indikator yang tidak memiliki data berada pada tujuan pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak, yaitu sebanyak 9 indikator.
d. Indikator target TPB yang Bukan Kewenangan Kabupaten (BK)
   Indikator pada kategori ini setelah di analisa dan dilakukan verifikasi data merupakan TPB kewenangan dari provinsi atau pusat sehingga data capaiannya tidak dapat disediakan. Secara keseluruhan, indikator yang bukan kewenangan kabupaten berjumlah 16 indikator atau sebesar 7,27% dari total keseluruhan indikator. Secara umum, indikator yang bukan kewenangan kabupaten ini berada pada tujuan 10 yaitu mengurangi kesenjangan dan tujuan 11 yaitu kota dan pemukiman berkelanjutan.

2.6 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

2.6.1 Bidang Urusan Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan meliputi :

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM Pendidikan untuk kabupaten/kota terdiri dari :

a. Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Pendidikan Dasar;
c. Pendidikan Kesetaraan.

Adapun penerima pelayanan dasar SPM pada pendidikan anak usia dini peserta didik yang berusia 5 sampai 6 tahun, pendidikan dasar adalah peserta didik yang berusia 7 sampai 15 tahun dan pendidikan kesetaraan peserta didik yang berusia 7 sampai dengan 18 tahun.

Target Pencapaian SPM Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, ditetapkan target dan indikator penerima layanan standar pelayanan minimal bidang pendidikan untuk kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 2.85
Target SPM Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Batas waktu capaian
1.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun
2.	Pendidikan dasar	Jumlah warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	Setiap tahun
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Setiap tahun

Realisasi Penerapan SPM Daerah

Penerapan Standar Pelayanan Mininal ini dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan.

Tabel 2.86
Realisasi SPM Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	11.051	6.022	54,49%
2.	Pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	57.387	53.898	93,92%
3.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.784	767	27.55%

Jika diperhatikan secara angka-angka realisasi capaian SPM bidang pendidikan tahun 2020, maka semua indikator SPM belum mencapai angka yang ditetapkan secara nasional yaitu 100%. Secara rinci pencapaian target SPM bidang pendidikan adalah sebagai berikut :

a. Capaian Target SPM Pendidikan Anak Usia Dini.

   Indikator pelayanan SPM pendidikan anak usia dini pada saat ini sudah 54,49% dari 11.051 jumlah warga negara 5-6 tahun 6.022 pada usia yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. karena lembaga pendidikan anak usia dini sudah terdapat pada hampir setiap jorong dan pemerintah juga sudah mencanangkan gerakan wajib Paud atau pra SD selama 1 tahun, sedangkan kesadaran Orang Tua anak usia 5-

6 tahun masih rendah. Sehingga jumlah warga negara 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD masih rendah.

b. Capaian target SPM Pendidikan Dasar

Capaian SPM pendidikan dasar pada tahun 2020 adalah 93,92%. Dari 57.387 jumlah penduduk usia 7 – 15 tahun 53.898 yang berpartisipasi pada jenjang SD/MI, dan SMP/MTs dan ada yang melanjutkan pendidikan diluar Kabupaten Tanah Datar terutama daerah perbatasan dengan kota/kabupaten lain.

c. Capaian target SPM Pendidikan Kesetaraan

Indikator pelayanan SPM Kesetaraan capaiannya yaitu masih pada angka 27,55% dari 2.784 jumlah warga negara usia 7-18 tahun 767 jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

2.6.2 Urusan Bidang Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pendidikan meliputi :

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan sebagai berikut:

a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
d. Pelayanan Kesehatan Balita
e. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
f. Pelaynan Kesehatan pada Usia Produktif
g. Pelayanan Kesehatan pada UsiaLanjut
h. Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hypertensi
i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
j. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
k. Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB
l. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV

Target Pencapaian SPM Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.87
Target SPM Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu Nasional
1	Pelayanan Kesehatan Dasar	1.Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal Sesuai Standar	100%	Setiap Tahun
		2.Persentase Ibu bersalin mendapatkan	100%	Setiap

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian	Batas Waktu Nasional
		Pelayanan persalinan sesuai Standar		Tahun
		3. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	Setiap Tahun
		4. Persentase Usia Bawah Lima Tahun (Balita) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	Setiap Tahun
		5. Persentase Siswa Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	Setiap Tahun
		6. Persentase Usia 15-59 tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	Setiap Tahun
		7. Persentase Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	100%	Setiap Tahun
		8. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
		9. Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
		10. Persentase dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Setiap Tahun
		11. Persentase terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pemeriksaan Tuberkulosis Sesuai Standar	100%	Setiap Tahun
		12. Persentase Terduga HIV dan AIDS Mendapatkan Pemeriksaan HIV-AIDS Sesuai Standar	100%	Setiap Tahun

Realisasi Penerapan SPM Daerah

Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Kesehatan Kabupaten Tanah Datar tahun 2020 adalah sebagai tabel berikut :

Tabel 2.83
Realisasi dan Capaian SPM Kesehatan

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 difasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta	5.602	4.167	74,38 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan	4.333	4.333	100 %
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar	4.637	3.972	85,66 %
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita 0 – 59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan belita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	19.789	9.344	47,22 %
5	Pelayanan Kesehatan Pada	Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang			

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Usia Pendidikan Dasar	mendapatkan pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar	7.312	0	0 %
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	221.356	34.752	31,12%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun	36.752	22.248	64,02%
8	Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hypertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	80.126	17.731	21,62%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita diabetes Militus	Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	3.296	2.162	65.59%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (Odgj) Berat	Jumlah ODGJ berat di kab/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	731	355	48,56%
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	937	246	26,25%
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun	5.606	2.579	46.04%

Adapun capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2020 dari yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, diuraikan sebagai berikut:

a. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.
   Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan pada tahun 2020 sebesar 74,38% (4.167 ibu hamil K4 dari 5.602 ibu hamil) sedangkan target pada tahun 2020 adalah 100% belum mencapai target. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 adalah 95,88%, maka terjadi penurunan dari tahun 2019 Jika dibandingkan dengan anggaran yang tersedia tidak memadai karena terjadinya pergeseran dana belanja akibat pandemic Covid-19, namun dikatakan pencapaian indikator tersebut tidak maksimal dan perlu ditingkatkan.

b. Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.
   Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar, didapat dari perhitungan persentase jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan dibagi dengan semua ibu bersalin di suatu wilayah pada

kurun waktu satu tahun. Persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 100% (4.333 ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan sesuai standar dari 4.333 ibu bersalin.

c. Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.
   Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, dihitung dari jumlah bayi baru lahir usia 0 – 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dibagi dengan jumlah seluruh bayi yang lahir di suatu wilayah pada kurun waktu satu tahun. Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 85,66% (3.972 bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dari 4.637 bayi yang lahir).

d. Persentase usia dibawah lima tahun (balita) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
   Persentase usia dibawah lima tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, dihitung dari jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalan kurun satu tahun dibagi jumlah balita 0-59 bulan yang ada diwilayah kerja dalam kurun waktu yang sama. Persentase usia dibawah lima tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2019 sebesar 84,92% (19.412 balita mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dari 22.859 balita).

e. Persentase siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
   Persentase siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, diperoleh dari perhitungan persentase jumlah siswa pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dibagi dengan jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang ada diwilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun ajaran. Persentase siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 0% (0 siswa satuan pendidikan dasar mendapatkan skrinning kesehatan sesuai standar dari 7.312 semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan kelas 7 yang ada)

f. Persentase usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
   Persentase usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, didapat dari perhitungan jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Persentase usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 31,12% (68.894 pengunjung usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar dari 221.356 warga negara usia 15–59 tahun yang ada)

g. Persentase usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
   Persentase usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar, didapat dari Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun.

Persentase usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 64.02 % (22.248 usia 36.752 penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada).

h. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
   Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, didapatkan dari jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kabupaten dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 21,62% (17.321 penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 80.126 jumlah estimasi penderita hipertensi).

i. Cakupan Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
   Persentase penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, didapatkan dari jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama. Persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 65,59% (2.162 penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 3.296 jumlah penyandang DM).

j. Persentase dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.
   Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar didapatkan dari jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Persentase dengan gangguan jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 48,56% (355 ODGJ berat psikotik yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari 731 ODGJ berat psikotik yang ada).

k. Persentase penderita Tuberkulosis mendapatkan pemeriksaan Tuberkulosis sesuai standar.
   Persentase penderita Tuberkulosis mendapatkan pemeriksaan Tuberkulosis sesuai standar, didapatkan dari Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama. Persentase penderita Tuberkulosis mendapatkan pemeriksaan Tuberkulosis sesuai standar pada tahun 2020 sebesar 26,25% (937 orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dari 246 orang dengan TB yang ada).

l. Persentase Terduga HIV dan AIDS mendapatkan Pemeriksaan HIV-AIDS Sesuai Standar.
   Persentase terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan HIV-AIDS sesuai standar, didapat dari jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun

waktu satu tahun dibagi jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada disatu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama. Persentase Terduga HIV dan AIDS mendapatkan pemeriksaan HIV-AIDS Sesuai Standar pada tahun 2020 sebesar 46,04% (2.579 peserta orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar dari 5.602 orang berisiko terinfeksi HIV yang ada).

2.6.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Berdasarkan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum meliputi :

Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal, jenis pelayanan dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum adalah :

a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota dengan formula sebagai berikut :

$$\text{SPM Kabupaten/Kota} = \frac{\text{Rumah Tangga Terlayani}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

Pembilang : jumlah kumulatif masyarakat rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.

Penyebut : jumlah total proyeksi rumah tangga diseluruh kabupaten/kota tersebut.

b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.

Indikator Pencapaian Sub Bidang Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Target Pencapaian SPM Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum tahun 2019, mengacu pada target RPJMD dan Renstra Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Tanah datar Tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.84
Target Penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target (%)	Batas Waktu Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Persentase warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari hari	100%	Setiap Tahun
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap Tahun

Realisasi Penerapan SPM Daerah

Target SPM Bidang Pekerjaan Umum yang dapat direalisasikan pada Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.85
Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan	Indikator Capaian	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari Hari	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman.	114.524	112.524	98,27%
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai;	100	75,14	75,14%

1. Dari 114.524 jumlah rumah tangga, sebanyak 112.524 rumah tangga sudah mendapatkan akses air minum yang aman 98,27%, akan tetapi baru 82.720 rumah tangga atau 72,23% yang sudah mendapatkan layanan penyediaan air minum dengan akses berkelanjutan.
2. Dari 374.025 jiwa penduduk, sebanyak 281.042 jiwa atau 75,14% sudah terlayani sistem air limbah yang memadai.

2.6.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat meliputi :

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM perumahan rakyat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

   Pada pelayanan dasar ini merupakan rencana jumlah unit rumah rusak akibat bencana yang akan direhabilitasi, dibangun kembali, dan/atau direlokasi serta rencana jumlah rumah tangga yang mendapatkan

bantuan akses rumah sewa layak huni sesuai rencana dalam dokumen Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan perhitungan capaian:

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Unit Rumah Korban Bencana Yang Ditangani pada Tahun N}}{\text{Jumlah Total Rencana Unit Rumah Korban Bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Pembilang

  Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n

- Penyebut

  Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n

b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program

pelayanan dasar Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota

Adapun cara Perhitungan Capaian SPM Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah tangga penerima fasilitasi penggantian Hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan + Rumah tangga penerima subsidi uang sewa + Rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni}}{\text{Jumlah total rumah tangga terkena relokasi Program Pemerintah Daerah yang memenuhi Kriteria penerima layanan Rencana unit rumah korban bencana}} \times 100\%$$

Keterangan

a. Pembilang

   Jumlah total penerima pelayanan:

   - Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan
   - Subsidi Uang Sewa (khusus Kabupaten/Kota)
   - Penyediaan Rumah Layak Huni

b. Penyebut

   Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi yang memenuhi kriteria penerima pelayanan

c. Penerapan SPM
   Untuk melaksanakan penerapan pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana terdiri dari tahapan sebagai berikut:

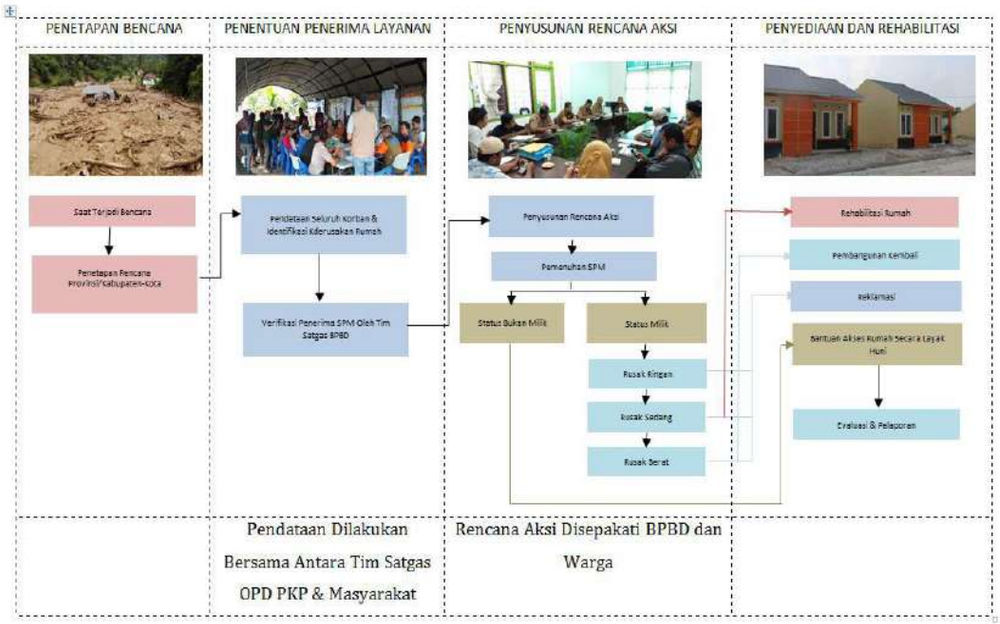

Gambar 2.9
Skema Pelaksanaan Pelayanan Dasar Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana

Target Pencapaian SPM Daerah

Target pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2019 sebagaimana berikut:

Tabel 2.86
Target Capaian SPM bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian (%)
1.	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%
2.	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	100%

Realisasi Penerapan SPM Daerah

Realisasi dan capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.87
Realisasi SPM bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah warga Negara Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni	7	7	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
2.	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	-	-	100%

2.6.5 Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat meliputi :

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai berikut:

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Target Pencapaian SPM Daerah

Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran dapat dilihat dalam tabel indikator serta nilai SPM sebagai berikut :

Tabel 2.88
Target Indikator SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target	Batas Waktu
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang mendapatkan layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	100%	Setiap Tahun

Realisasi Penerapan SPM Daerah

Realisasi terhadap penerapan dan pencapaian SPM sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.89
Realisasi Penerapan SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Layanan	Indikator	Sub Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada	Pelayanan Pengobatan	0	0	100%
			Pelayanan Kerugian Materi	0	0	100%
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Kebakaran	Layanan Respon Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit	67	61	91,04%
			Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran	67	67	100%
			Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia operasi darurat non kebakaran	6	6	100%
			Layanan Pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran	0	0	0%
			Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran	67	67	100%

Dari tabel diatas dapat diterangkan bahwa :

a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Standar teknis Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah ketentuan terkait mutu pelayanan oleh Pemerintah Daerah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar layanan sub Urusan ketentraman dan ketertiban yang berhak di peroleh oleh setiap warga Negara Indonesia yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dari 371 kegiatan penegakan Perda dan Perkada kelapangan tidak ada warga negara yang terdampak gangguan trantibum seperti :

- Pelayanan kerugian materil
- Pelayanan pengobatan

Jadi penerapan dan capaian SPM Sub Urusan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah 100%.

b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran diterangkan dengan beberapa Sub urusan sebagai berikut :

- Layanan Respon Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit
  Dari 67 Kejadian Kebakaran yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar 61 diantaranya telah memenuhi layanan Respon Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit, penerapan dan capaian SPM Layanan Respon Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit adalah 91,04%. Seharusnya Sub Urusan tersebut bisa capaian dan penerapannya bisa 100% kalau jumlah posko Pemadam Kebakaran di Kabupaten Tanah Datar sebanyak 5 Posko.

- Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran
  Dari 67 Kejadian Kebakaran yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar seluruh kejadian tersebut dapat dipadamkan dan dikendalikan, penerapan dan capaian SPM Layanan Pelaksanaan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran adalah 100%

- Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia operasi darurat non kebakaran
  Dari 6 laporan pengaduan masyarakat, telah dilakukan Penyelamatan dan Evakuasi antara lain 4 evakuasi sarang Tawon dan 2 Evakuasi Ular. Penerapan dan capaian SPM Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia operasi darurat non kebakaran adalah 100%.

- Layanan Pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran
  Pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran di Kabupaten Tanah Datar belum terbentuk atau ditetapkan melalui Keputusan Bupati Tanah Datar. Penerapan dan capaian SPM Layanan Pemberdayaan masyarakat/ relawan kebakaran adalah 0%.

- Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran
  Dari 67 Kejadian Kebakaran yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar seluruh kejadian tersebut telah dilakukan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran. Penerapan dan capaian SPM Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran adalah 100%.

2.6.6 Bidang Urusan Bencana Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah meliputi :

Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar sub urusan bencana menurut Permendagri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota meliputi :

a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
   Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana paling sedikit memuat :
   - Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)

- Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana.

b. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana setidaknya memuat :
- Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)
- Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)
- Pelatihan pencegahan dan mitigasi
- Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana
- Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

c. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana paling sedikit memuat:
- Respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas
- Respon cepat darurat bencana
- Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana
- Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana
- Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana

Target Pencapaian SPM Daerah

Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.90
Target SPM Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			
	a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	Persentase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/ legal	100%	5 tahun
	b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	Persentase (%) jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	Setiap Tahun
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	Persetase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/ legal	100%	Setiap Tahun
	b. Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	Persetase (%) penyelesaian dokumen sampai dinyatakan sah/ legal	100%	Setiap Tahun
	c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	Persentase (%) jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	100%	Setiap Tahun
	d. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yag ikut pelatihan	100%	Setiap Tahun
	e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	Persentase (%) jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdal ops penanggulangan bencana dan	100%	Setiap Tahun

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
		Indikator	Target	
	Terhadap Bencana	sarana prasarana penanggulangan bencana		
	f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	100%	Setiap Tahun
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	a. Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	100%	Setiap Tahun
	b. Respon Cepat Darurat Bencana	Persentase (%) kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	Setiap Tahun
	c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Persentase (%) jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	Setiap Tahun
	d. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase (%) jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	100%	Setiap Tahun

Realisasi Penerapan SPM Daerah

Realisasi pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub urusan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.91
Realisasi Penerapan SPM Bencana Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Terget	Realisasi	Capaian (%)
1.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana			
	a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB)	1 Dokumen	1 Dokumen (belum diperdakan)	90%
	b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	218.701 Orang	121.481 Orang	55,54%
2.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	a. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	1 Dokumen	1 Dokumen (belum diperdakan)	90%
	b. Pembuatan Rencana Kontijensi (Renkon)	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	c. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi	150 Orang	50 Orang	33,33%
	d. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	200 Orang	0 Orang	0%
	e. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	66 Kejadian	66 Kejadian	100%
	f. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	68 Orang	68 Orang	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar dan Sub Kegiatan	Terget	Realisasi	Capaian (%)
3.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	a. Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit/wabah zoonosis prioritas	0 Kejadian	0 Kejadian	100%
	b. Respon Cepat Darurat Bencana	20 Jam	20 Jam	100%
	c. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	39 Orang	39 Orang	100%
	d. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Nihil	Nihil	100%

2.6.7 Bidang Urusan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyelenggarakan Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial meliputi:

Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/ Kota adapun jenis SPM Bidang Sosial sebagai berikut :

a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang penyandang disabilitas terlantar luar panti
b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar luar panti
c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar luar panti
d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis luar panti
e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten

Target Pencapaian SPM Daerah

Terget penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel dibwah ini :

Tabel 2.92
Target Penerapan SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang penyandang disabilitas terlantar luar panti	100 %	Setiap tahun
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar luar panti	100 %	Setiap tahun
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar luar panti	100 %	Setiap tahun
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis uar panti	100 %	Setiap tahun
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	100 %	Setiap tahun

Realisasi Penerapan SPM Daerah

Realisasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial dapat dilihat pada tabel dibwah ini :

Tabel 2.93
Realisasi Penerapan SPM Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Capaian	% Capaian
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang penyandang disabilitas terlantar luar panti	Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	1067 Orang	237 Orang	22,21%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar luar panti	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	41 orang	41 Orang	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar luar panti	Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	3035 orang	277 orang	9,12 %
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis uar panti	Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial luar panti	18 Orang	10 Orang	55,00%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten	Persentase korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	213 orang	213 orang	100%

Perhitungan Capaian SPM Bidang Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah Kabupaten / Kota sebagai berikut:

a. Persentase penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti 2020.

   Perhitungan penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.94
Perhitungan Penyandang Disabilitas yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Luar Panti

Uraian	Jumlah yang harus dibantu	Target yang memperoleh rehabilitasi	Capaian/ Realisasi	Jenis Bantuan/ rehabilitasi	Jumlah	Sumber
Penyandang disabilitas terlantar luar panti	1067 orang	1067 (100%)	237 (22,21%)	1. ASPD (Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas)	96 orang	APBN
				2. Bansos	141 orang	APBD
Jumlah				237 orang		(22,21 %)

b. Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti Tahun 2020.

   Perhitungan anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.95
Perhitungan Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Luar Panti

Uraian	Jumlah yang harus dibantu	Target yang memperoleh rehabilitasi	Capaian/ Realisasi	Jenis Bantuan/ rehabilitasi	Jumlah	Sumber
Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti	41 orang	41 orang (100 %)	41 (32,89%)	1. Pelatihan keterampilan di PSBR Harapan Padang Panjang (perempuan)	15 orang	APBN
				2. Pelatihan keterampilan di	6 org	APBD

Uraian	Jumlah yang harus dibantu	Target yang memperoleh rehabilitasi	Capaian/ Realisasi	Jenis Bantuan/ rehabilitasi	Jumlah	Sumber
				PSBR Budi Mulia Lubuk Alung (laki laki)		
				3. Pelatihan keterampilan di PSBR Rumbai Pekan Baru (laki laki dan perempuan)	- org	APBD
				4. Penyaluran ke Panti Asuhan	14 org	APBD
				5. Pengangkatan Anak	2 org	-
Jumlah				41 orang		100%

c. Persentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti Tahun 2020.
Perhitungan lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial luar panti Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.96
Perhitungan Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Luar Panti

Uraian	Jumlah yang harus dibantu	Target yang memperoleh rehabilitasi	Capaian/ Realisasi	Jenis Bantuan/ rehabilitasi	Jumlah	Sumber
lanjut usia terlantar luar panti	3035 orang	100 %	9,12 % (277 orang)	1. Bansos	277 orang	APBD
Jumlah					277 orang	16,21%

d. Persentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial luar panti tahun 2020.
Perhitungan gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial luar panti tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.97
Perhitungan Gelandangan Dan Pengemis Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Luar Panti

Uraian	Jumlah	Jumlah yang harus dibantu 1 tahun	Target yang memperoleh rehabilitasi	Capaia/ Realisasi	Jenis Bantuan/ rehabilitasi	Jumlah
Gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial luar panti	18 0rang	18 orang	18 orang	10 orang (55%)	Pembinaan	10 orang
Jumlah					10 orang	

Ctt. Berdasarkan Pendataan, Tahun 2020 tidak ada Gelandangan dan pengemis di Kab. Tanah Datar.

e. Persentase korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial

Perhitungan korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.98
Perhitungan Korban Bencana Kabupaten Yang Memperoleh Perlindungan Dan Jaminan Sosial

Uraian	Jumlah yang harus dibantu	Target yang memperoleh rehabilitasi	Capaian/ Realisasi	Jenis Bantuan/ rehabilitasi	Jumlah	Sumber
korban bencana Kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	213 orang	213 orang (100 %)	213 orang (100%)	Kebutuhan Pokok, peralatan dapur, famili kid, foodware dll	213 orang	APBD/ APBN
Jumlah					213 orang	100%

2.7 Capaian Indikator Pembangunan

Menurut pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar harus berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Tabel 2.99
Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1	**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**							
1.1	Pertumbuhan PDRB (%)	5,03	5,11	5,04	4,99	-1,13	6,03	**Belum tercapai**
1.2	Laju inflasi	0,07	0,72	0,16	0,07	0,39	3,2	**Tercapai**
1.3	PDRB perkapita menurut lapangan usaha (	8.355.071,58	8.782.098,09	9.224.518,53	9.684.476,43	9.575.503,02	39.520.000,00	**Belum tercapai**
1.4	Indeks Gini	0,300	0,260	0,288	0,278	0,273	0,3	**Melampaui**
1.5	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	94,32	94,44	94,68	95,34	95,60	95,00	**Melampaui**
1.6	Indeks Pembangunan Manusia	70,11	70,37	71,25	72,14	72,33	71,02	**Melampaui**
1.7	Angka Melek Huruf (%)	100	99,59	99,36	99,82	99,67	99	**Melampaui**
1.8	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,12	8,14	8,44	8,45	8,61	8,33	**Melampaui**
1.9	Angka/Usia harapan hidup (Tahun)	68,93	69,11	69,38	69,73	69,94	69,3	**Melampaui**
1.10	Prevalensi balita gizi kurang (%)	n/a	n/a	n/a	8,9	4,9	<5	**Melampaui**
1.11	Angka partisipasi angkatan kerja	157,144	160,062	166,215	168,968	170,44	157,144	**Melampaui**
1.12	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	66,66	66,51	68,90	69,13	69,42	66,66	**Melampaui**
1.13	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4,02	3,72	4,01	3,20	4,79	4,21	**Belum tercapai**
1.14	Rasio penduduk yang bekerja (%)	95,98	96,28	95,99	96,80	95,21	95,21	**Sesuai**
1.15	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	**Sesuai**
1.16	Pencapaian skor pola pangan harapan	n/a	n/a	n/a	n/a	80	82	**Belum tercapai**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.17	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	32,52	31,73	30,66	29,75	29,81	31,60	**Belum tercapai**
1.18	Kontribusi sektor Perdagangan (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) terhadap PDRB (%)	12,85	13,10	13,42	13,49	13,35	12,22	**Melampaui**
1.19	Kontribusi sektor Industri (industri pengolahan) terhadap PDRB (%)	11,84	11,52	11,03	10,50	10,48	13,75	**Belum tercapai**
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	Pelayanan Urusan Wajib							
	Pelayanan Dasar							
1	Pendidikan							
1.1	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%)	35,65	42,07	59,20	79,92	82,66	80,16	**Melampaui**
1.2	Angka Partisipasi Kasar (%)							
	1). SD/MI	104,28	99,90	100,00	98,18	102,34	105,75	**belum tercapai**
	2). SMP/MTs	104,08	104,71	99,49	98,15	99,64	103,57	**belum tercapai**
1.3	Angka partisipasi murni (APM) (%)							
	1). APM SD/MI	92,22	88,26	91,59	88,11	93,78	91,77	**Melampaui**
	2). APM SMP/MTs	82,92	83,49	79,56	78,45	76,64	81,89	**belum tercapai**
1.4	Angka Putus Sekolah (%)							
	1). Angka Putus Sekolah SD/MI	0,09	0,06	0,19	0,12	0,09	0,03	**belum tercapai**
	2). Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,19	0,15	0,28	0,21	0,39	0,04	**belum tercapai**
1.5	Angka Kelulusan (AL) (%)							
	1). Angka Kelulusan SD/MI	100	100	100	100	100	100	**Sesuai**
	2). Angka Kelulusan SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	**Sesuai**
1.6	Angka Melanjutkan (AM) (%)							
	1). Angka Melanjutkan Sekolah (SD/MI ke SMP/MTs)	103,51	102,44	101,42	100,40	100,18	105,39	**belum tercapai**
	2). Angka Melanjutkan Sekolah (SMP/MTs	87,70	84,33	59,42	100,83	100,97	95,03	**Melampaui**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
	ke SMA/SMK/MA)							
1.7	Fasilitas Pendidikan (%)							
	1). Gedung SD/MI kondisi baik	30,80	31,43	29,67	26,67	37,05	65,21	**belum tercapai**
	2). Gedung SMP/MTs kondisi baik	41,21	45,21	43,26	43,26	51,49	69,73	**belum tercapai**
1.8	Rasio Guru/Murid							
	1). SD/MI	0,08	0,07	0,08	0,07	0,07	0,03	**Melampaui**
	2). SMP/MTs	0,12	0,11	0,12	0,12	0,13	0,21	**belum tercapai**
1.9	Persentase siswa SMA/SMK/MA yang diterima di Perguruan Tinggi	0	0	0	54.00*	54.00*	58,70	**belum tercapai**
2	Kesehatan							
2.1	Rasio Puskesmas, Pustu, Rumah sakit per satuan penduduk	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	2,7	**belum tercapai**
2.2	Rasio Posyandu per Satuan Balita	22,95	23,68	19,36	30,70	26,34	17,54	**melampaui**
2.3	Rasio Dokter Umum per 100.000 Penduduk	8,68	10,68	15,54	20,96	30,67	15,57	**melampaui**
2.4	Rasio Dokter Gigi per 100.000 penduduk	5,79	6,06	6,04	6,61	8,07	5,94	**melampaui**
2.5	Rasio Perawat per 100.000 penduduk	69,13	77,62	77,14	55,71	138,55	180,00	**belum tercapai**
2.6	Rasio Bidan per 100.000 penduduk	62,48	91,47	96,14	93,62	124,29	120,00	**melampaui**
2.7	Angka Kematian bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	8,1	6,1	7,7	11,6	11,2	0,5	**Melampaui**
2.8	Angka kelangsungan hidup bayi	984,00	990,00	992,25	988,30	988,8	988,1	**Melampaui**
2.9	Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup	0,31	0,24	0,25	0,54	16,0	12,7	**Belum Tercapai**
2.10	Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani (%)	73,93	66,87	73,8	100,00	100,00	87,00	**Melampaui**
2.11	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan (%)	71,78	71,75	72,3	100,00	100,00	88,00	**melampaui**
2.12	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	76,46	73,42	76,3	77,50	55,20	100,00	**belum tercapai**
2.13	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan (%)	100	100	100	100,00	100,00	100,00	**sesuai**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
2.14	Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA (%)	100	100	100	100,00	100,00	100,00	**sesuai**
2.15	Tingkat prevalensi tuberkulosis per 100.000 penduduk	160	467	467	364	67,35	94,47	**belum tercapai**
2.16	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	18,22	18,22	18,22	18,22	63,00	100,00	**belum tercapai**
2.17	Cakupan kunjungan bayi (%)	71,13	69,55	71,9	95,02	52,72	100,00	**belum tercapai**
2.18	Cakupan puskesmas (%)	164	164	164	164	164	100	**melampaui**
2.19	Cakupan pembantu puskesmas (%)	89,33	89,33	89,33	89,33	89,33	100	**belum tercapai**
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (%)	32,30	32,31	30,91	27,75	30	39,31	**belum tercapai**
3.2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,33	0,57	0,68	0,67	0,77	0,66	**melampaui**
3.3	Panjang jalan dilalui roda 4 (km/jumlah penduduk)	n/a	n/a	n/a	0,0035	0,0035	0,0043	**belum tercapai**
3.4	Persentase rumah tinggal bersanitasi	n/a	n/a	n/a	87	90	100	**belum tercapai**
3.5	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	14,54	88,68	**belum tercapai**
3.6	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	5,19	3,27	3,52	3,50	3,10	4,42	**belum tercapai**
4	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
4.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	n/a	n/a	n/a	n/a	14	75	**belum tercapai**
4.2	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	n/a	n/a	n/a	77,1	91,04	100	**belum tercapai**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
4.3	Persentase Penegakan PERDA	n/a	71	71	86	71	75	**belum tercapai**
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
5.1	Jumlah rumah tidak layak huni	5.040	5.013	4.126	1.408	768	623	**melampaui**
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar							
1	Tenaga Kerja							
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	66,59	67,8	68,81	69,2	69,84	72,08	**belum tercapai**
2.2	Rasio KDRT	0,0064	0,08	0,0068	0,009	0,006	0,76	**belum tercapai**
2.3	Partisipasi angkatan kerja perempuan	53,51	52,57	58,39	57,54	58,20	97,86	**belum tercapai**
2.4	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100	**sesuai**
2.5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100	100	100	100	100	100	**sesuai**
2.6	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100	100	**sesuai**
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100	100	100	100	100	100	**sesuai**
3	Pangan							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
3.1	Persentase Ketersediaan pangan utama	508,88	681,34	728,18	739,37	464,48	331	**melampaui**
3.2	Ketersediaan energi dan protein per kapita							
3.2.1	- Energi	5.354	5.334	6.263	6.591	661	2.400	**melampaui**
3.2.2	- Protein	136,4	158	162	170	174	63	**melampaui**
3.3	Pengawasan dan pembinaan keamanan Pangan	60	78	78	47	18	18	**Sesuai**
4	Lingkungan Hidup							
4.1	Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk	0	0,0051	0,0057	0,0066	0,0069	0,0051	**melampaui**
4.2	Persentase jumlah sampah yang Tertangani	15	37,01	50,93	56,81	56,81	35	**melampaui**
5	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
5.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk (%)	94,89	95,34	94,57	98,61	95,13	100	**belum tercapai**
5.2	Persentase penduduk berusia 0-18 bulan yang memiliki akta kelahiran	72,15	77,66	87,53	93,62	94,29	87,5	**melampaui**
5.3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	**sesuai**
5.4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	sudah	**sesuai**
6	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
6.1	Rata- rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	90	90	90	90	90	15	**Melampaui**
6.2	Jumlah kelompok binaan PKK	14	14	14	14	14	14	**Sesuai**
6.3	Persentase PKK aktif	100	100	100	100	100	90	**Melampaui**
6.4	Persentase Posyandu aktif	100	100	100	100	100	100	**Sesuai**
6.5	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,62	2,68	2,58	2,46	2,42	2,2	**Melampaui**
6.6	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100	100	100	100	100	100	**Sesuai**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
6.7	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di gudang kabupaten/kota	100	100	100	100	100	100	**Sesuai**
6.8	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi di Faskes	100	100	100	100	100	100	**Sesuai**
7	Perhubungan							
7.1	Rasio izin trayek	0,0465	0,0252	0,0249	0,0574	0,0129	0,0465	**belum tercapai**
7.2	Jumlah uji kir angkutan umum	6.765	6.154	6.505	6.407	5.966	6.495	**melampaui**
7.3	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	3	3	3	2	3	3	**sesuai**
7.4	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	n/a	n/a	n/a	24	24	24	**sesuai**
7.5	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	n/a	n/a	n/a	350.000	175.500	444.219	**belum tercapai**
7.6	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	n/a	n/a	n/a	72.000	30.131	45.490	**belum tercapai**
8	Komunikasi dan Informatika							
8.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan	n/a	n/a	n/a	43	42	42	**Sesuai**
8.2	Cakupan layanan telekomunikasi	n/a	n/a	n/a	70	71	71	**Sesuai**
8.3	Jumlah jaringan komunikasi (tower)	108	118	133	130	141	141	**Sesuai**
8.4	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	n/a	n/a	n/a	81,86	82	82	**Sesuai**
8.5	Proporsi rumah tangga dengan akses Internet	n/a	n/a	n/a	36,12	40	40	**Sesuai**
8.6	Rasio warnet terhadap penduduk	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	**Sesuai**
9	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
9.1	Persentase koperasi aktif	89,91	89,91	91,52	50,9	51,11	50	**melampaui**
9.2	Perusahaan Mikro	70	70	70	35	20	14	**belum tercapai**
10	Penanaman Modal							

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
10.1	Jumlah Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	123	53	75	82	111	68	**melampaui**
10.2	Jumlah nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	n/a	n/a	n/a	107.905.121	126.753.345	112.300.000.000	**belum tercapai**
10.3	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar rupiah)	n/a	n/a	n/a	23.268.859.500	18.848.224	112.300.000.000	**belum tercapai**
12	Statistik							
12.1	Buku ”Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	**sesuai**
12.2	Buku ”PDRB Kabupaten Tanah Datar”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	**sesuai**
13	Persandian							
13.1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	**sesuai**
14	Kebudayaan							
14.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	n/a	n/a	n/a	10	1	10	**belum tercapai**
14.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	n/a	n/a	n/a	2	2	90	**belum tercapai**
15	Perpustakaan							
15.1	Jumlah perpustakaan daerah (unit)	1	1	1	1	1	1	**sesuai**
15.2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	634	4.322	4.002	4.368	4.873	8.760	**belum tercapai**
15.3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul buku)	13.483	14.304	15.168	15.553	40.659	1.155	**melampaui**
16	Kearsipan							
16.1	Persentase SKPD yang telah menerapkan Arsip secara baku	94,87	97,43	97,43	97,43	97,43	100	**belum tercapai**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
17	Pelayanan Urusan Pilihan							
1	Pertanian							
1.1	Produktivitas padi (ton/ha)	5,19	5,61	5,21	5,70	5,70	5,98	**belum tercapai**
1.2	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB (%)	32,52	31,55	30,61	29,75	29,81	31,60	**belum tercapai**
1.3	Cakupan bina kelompok petani (%)	100	100	100	100	100	100	**sesuai**
2	Kelautan dan Perikanan							
2.1	Produksi perikanan (ton)	7.385,50	9.261,06	11.384,13	11.543,38	12.209,29	5.100,00	**melampaui**
2.2	Konsumsi ikan (kg)	35	32	33,87	36,10	37,61	47,9	**belum tercapai**
2.3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	35	35	35	54	40	39	**melampaui**
2.4	Produksi perikanan kelompok nelayan (ton)	1.860,7	2.083,09	2.098,16	2.189,6	2.650,28	2.085,30	**melampaui**
3	Pariwisata							
3.1	Kunjungan wisata	1.189.173	1.276.879	1.331.290	1.218.576	845.780	1.100.000	**belum tercapai**
3.2	- Jumlah wisatawan asing	142.424	53.152	62.926	42.489	9.602	128.932	**belum tercapai**
3.3	- Jumlah wisatawan domestik	1.046.749	1.223.727	1.268.364	1.176.087	836.178	971.068	**belum tercapai**
4	Energi dan Sumber Daya Mineral							
4.1	Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik	91,48	91,48	92,94	93,30	93,39	93,5	**belum tercapai**
5	Perdagangan							
5.1	Kontribusi sektor Perdagangan (perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor) terhadap PDRB	12,85	13,10	13,42	13,49	13,35	12,22	**melampaui**
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha Informal	360	191	292	514	300	434	**belum tercapai**
6	Perindustrian							
6.1	Kontribusi sektor Industri (industri pengolahan) terhadap PDRB	11,84	11,52	11,03	10,50	10,48	13,75	**belum tercapai**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
6.2	Cakupan bina kelompok pengrajin	10	20	22	28	37	12	**melampaui**
7	Penunjang Urusan							
1	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	**sesuai**
1.2	Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	**sesuai**
1.3	Dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	ada	**sesuai**
2	Keuangan							
2.1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	**Sesuai**
2.2	Persentase Peningkatan PAD	6,16	8,66	(10,33)	11,97	2,62	13,63	**belum tercapai**
2.3	Penetapan APBD (tepat waktu/tidak tepat waktu)	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	tepat waktu	**Sesuai**
2.4	Jumlah program pada APBD	172	172	176	174	171	171	**Sesuai**
3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**							
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	n/a	10	10	5	140	140	Sesuai
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	n/a	12	12	0,7	30	30	Sesuai
3.3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	n/a	17,57	40,28	33,70	28	30	Belum tercapai
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi	21	27	29	26	29	29	Sesuai
3.5	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	4,132	3,95	3,892	3,636	3,610	3610	Sesuai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
4	**Penelitian dan Pengembangan**							
4.1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan	0	0	0	100	100	100	Sesuai
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	0	0	0	100	100	100	Sesuai
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi Daerah	0	100	100	100	100	100	Sesuai
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	0	0	0	38,74	34,23	34,23	Sesuai
5	Indikator pengawasan							
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	91,61	88,92	85,94	88,52	91,6	100	belum tercapai
5.2	Persentase pelanggaran pegawai	0	0	0,01	0,14	0	0	sesuai
5.3	Jumlah temuan BPK	26	40	44	293	25	50	belum tercapai
6	Sekretariat Dewan							
6.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota (Isi 1: ada dan 0:tidak ada)	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai
6.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Ada	Ada	ada	Ada	ada	Ada	Sesuai

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TAHUN					Standar	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
		2016	2017	2018	2019	2020		
6.3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Penganggaran Sekretariat DPRD (Isi 1: ada dan 0:tidak ada)	ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Sesuai

Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.100
Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020

Indikator	Target Capaian Akhir Periode RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			STATUS CAPAIAN TAHUN 2020	KETERANGAN
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Indikator																		
Laju Pertumbuhan Ekonomi	6.15	5.55	5.03	90.63%	5.67	5.11	90.12%	5.79	5.05	87.22%	5.91	4.98	84.26%	6.03	-1.13	-18.74%	C ≤ 50%	Sangat Rendah
PDRB per Kapita (Rp.Juta)	41.69	30.82	31.05	100.75%	32.99	32.98	99.97%	35.17	35.13	99.89%	37.34	37.58	100.64%	39.52	37.34	94.48%	76% ≤ C ≤ 90%	Tinggi
Laju Inflasi	2.6	2.24	3.93	57.00%	2.42	2.45	98.78%	2.72	2.99	90.97%	2.96	1.33	222.56%	3.2	0.39	820.51 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Gini Ratio	0.3	0.3	0.300	100.00%	0.3	0.262	114.50%	0.3	0.288	104.17%	0.3	0.278	107.91%	0.3	0.273	109.89 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Angka Kemiskinan	5	5.66	5.68	99.65%	5.5	5.56	98.92%	5.34	5.32	100.38%	5.18	4.66	111.16%	5.02	4.40	114.09 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Indeks Pembangunan Manusia	71.42	69.42	70.11	100.99%	69.82	70.37	100.79%	70.22	71.25	101.47%	70.62	72.14	102.15%	71.02	72.33	101.84 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Angka Harapan Hidup	69.5	68.9	68.93	100.04%	69	69.11	100.16%	69.10	69.38	100.41%	69.25	69.73	100.69%	69.35	69.94	100.85 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8.38	8.03	8.12	101.12%	8.13	8.14	100.12%	8.18	8.44	103.18%	8.28	8.45	102.05%	8.33	8.61	103.36 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.81	4.41	4.02	91.16%	3.96	3.72	93.94%	3.69	4.01	92.02%	3.4	3.2	94.12%	2.81	4.79	58.66%	66% ≤ C ≤ 75%	Sedang

Indikator	Target Capaian Akhir Periode RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			STATUS CAPAIAN TAHUN 2020	KETERANGAN
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Misi 1	**Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya**																	
Persentase peningkatan zakat yang terhimpun pada BAZ Kab. Tanah Datar	25%	5%	5.5%	110%	4%	8%	200%	4%	3%	75%	4%	6.7%	168%	4%	10.50%	262.50 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Jumlah masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan	14	1	1	100%	1	1	100%	14	14	100%	14	14	100%	14	15	107.14 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Jumlah Hafizh Alqur'an	2250	1000	1000	100%	1250	2000	160%	1500	3000	200%	1750	4000	228.57%	2000	5000	250%	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Persentase LPA (TPA, TPSA, MDTA) yang telah terakreditasi A	30%	0%	0%	0%	6%	17.89 %	298.17%	6%	17.89 %	298.17%	6%	17.89 %	298.17%	6%	17.89%	298.17 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Persentase nagari dengan kategori baik dalam penerapan adat dan budaya pada kehidupan bermasyarakat	80%	55%	40%	72.73%	60%	64%	106.67%	65%	81.33 %	125.12%	70%	86.67 %	123.81%	75%				
Misi 2	**Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas, berkarakter dan sejahtera berdasarkan falsafah ABS-SBK**																	
Angka Partisipasi Murni:																		
SD/MI	91.99	90.89	92.22	101.46%	91.11	88.26	96.87%	91.33	91.59	100.28%	91.55	88.11	96.24%	91.77	87.82	95.70%	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
SMP/ MTs	81.93	81.73	82.92	101.46%	81.77	83.49	102.10%	81.81	79.56	97.25%	81.85	78.45	95.85%	81.89	77.95	95.19%	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Angka rata-rata lama sekolah (tahun)	8.38	8.03	8.12	101.12%	8.13	8.14	100.12%	8.18	8.44	103.18%	8.28	8.45	102.05%	8.33	8.61	103.36 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Persentase penduduk melek huruf diatas 15 tahun	99.06%	98.76%	100.00 %	101.26%	98.82%	99.59 %	100.78%	98.88%	99.36 %	100.49%	98.94%	99.82 %	100.89%	99.00%	99.67%	100.68 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Indeks integritas siswa	90%	78%	78.02%	100.03%	81%	80%	98.77%	84%	84.55 %	100.65%	87%	0%	0%	90%	0%	0%		
Angka kematian	301	321	136.9	234.48%	316	93.30	338.69%	311	93.30	333.33%	306	110	278.18%	301	129.8	231.90	91% ≤ C ≤	Sangat

Indikator	Target Capaian Akhir Periode RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			STATUS CAPAIAN TAHUN 2020	KETERANGAN
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup																%	100%	Tinggi
Angka kematian bayi (AKB) per 1000 KH	11.17	14.44	8.1	178.27%	13.77	6.1	225.74%	13.03	7.7	169.22%	12.38	11.66	106.17%	11.76	11.2	105.00 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Persentase balita gizi buruk	<0.2%	<0.2%	0.08	250.00%	<0.2%	0.11	181.82%	<0.2%	0.11	181.82%	<0.2%	0.14	142.86%	<0,2%	0.08	250.00 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Persentase kepesertaan masyarakat pada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan	100%	66.80%	67%	100.30%	76.28%	74.57 %	97.76%	85.60%	78.00 %	91.12%	95.00%	80.18 %	84.40%	100%	80.22%	80.22%	76% ≤ C ≤ 90%	Tinggi
Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2.1	2.7	2.62	103.05%	2.7	2.68	100.75%	2.5	2.58	96.90%	2.4	2.46	97.56%	2.2	2.42	90.91%	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Indeks pembangunan gender	98.89%	98.56%	98.58%	100.02%	98.63%	98.51 %	99.88%	98.70%	97.58 %	98.87%	98.77%	97.55 %	98.76%	98.79%	97.57%	98.77%	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Rasio KDRT	0,0066	0.0078	0.0064	121.88%	0.0076	0.08	9.50%	0.0074	0.0068	108.82%	0.0072	0.009	80.00%	0.007	0.006	116.67 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Persentase peningkatan swadaya masyarakat dalam pembangunan	55%	30%	34%	113.33%	35%	81%	231.43%	40%	75%	187.50%	45%	78%	173.33%	50%				
Persentase organisasi kepemudaan (OKP) yang aktif	44%	34%	0%	0.00%	34%	58%	170.59%	36%	64%	177.78%	38%	94%	247.37%	40%	30%	75.00%	66% ≤ C ≤ 75%	Sedang
Persentase penduduk miskin	5.00%	5.66%	5.68%	99.65%	5.50%	5.56%	98.92%	5.34%	5.32%	100.38%	5.18%	4.66%	111.16%	5.02%	4.40%	114.09 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Persentase penurunan penyandang masalah kesejahteraan sosial	9%	14%	13%	92.86%	13%	10%	76.92%	12%	14%	116.67%	11%	0.52%	4.73%	10%	0.35%	3.50%	C ≤ 50%	Sangat Rendah
Misi 3	**Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional**																	
Angka Kriminalitas	14.90	17.97	19.60	91.68%	17	8.96	189.73%	16.44	9.8	167.76%	15.80	13.9	113.67%	15.30	9.44	162.08 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Persentase	100%	14.29%	14.47%	101.26%	14.29%	18.88	132.12%	14.29%	-	-272.15%	14.29%	39.43	275.93%	14.29%	-	-91.95%	C ≤ 50%	Sangat

Indikator	Target Capaian Akhir Periode RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			STATUS CAPAIAN TAHUN 2020	KETERANGAN
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
penurunan pelanggaran perda						%			38.89 %			%			13.14%			Rendah
Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	WTP				
Peringkat hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP)	A	B	CC	92.05%	BB	B	85.71%	BB	B	89.91%	BB	B	91.80%	A				
Penerapan e-government yang terintergrasi	18	0	0	-	5	3	60%	10	6	60%	14	11	78.57%	16	16	100%	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Tingkat prestasi kinerja LPPD (skor)	3.978	3.1478	3.2628	103.65%	3.1978	3.0587	95.65%	3.2478	3.3052	101.77%	3.2978	3.3157	100.53%	3.478				
Persentase peningkatan PAD	19.96%	5%	6.160%	123.20%	9%	8.66%	96.22%	17%	-10.33 %	-60.76%	18%	11.97 %	66.50%	19%	2.62%	13.79%	66% ≤ C ≤ 75%	Sedang
Misi 4	**Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan**																	
Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	69.46%	52.83%	32.70%	61.90%	56.16%	57.41 %	102.23%	59.49%	68.97 %	115.94%	62.81%	67.30 %	107.15%	66.14%	67.76%	102.45 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Persentase ketersediaan prasarana lalu lintas	66.25%	56.88%	60.20%	105.84%	58.75%	58.75 %	100%	60.63%	60.63 %	100%	62.50%	62.50 %	100%	64.38%	64.12%	99.60%	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Persentase ketersediaan jembatan dalam kondisi baik	81.48%	35.19%	50.34%	143.05%	44.44%	44.52 %	100.18%	53.70%	54.79 %	102.03%	59.07%	59.93 %	101.46%	72.22%	83.79%	116.02 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Persentase Irigasi dalam kondisi baik	80%	53.54%	45%	84.05%	62.04%	65.00 %	104.77%	66.54%	64%	96.18%	71.04%	67.40 %	94.88%	75.54%	56.06%	74.21%	66% ≤ C ≤ 75%	Sedang
Persentase pelayanan air bersih	100%	82.36%	70.90%	86.09%	88.24%	75.02 %	85.02%	94.12%	77.33 %	82.16%	100%	76.99 %	76.99%	100%	98.27%	98.27%	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Persentase penurunan jumlah kawasan kumuh	80%	96.67%	n/a	n/a	93.34%	93.33 %	99.99%	90%	92%	102.22%	86.68%	-	-	83.35%	95.21%	114.23 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi

Indikator	Target Capaian Akhir Periode RPJMD	2016			2017			2018			2019			2020			STATUS CAPAIAN TAHUN 2020	KETERANGAN
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
Persentase kesesuaian pola pemanfaatan ruang	70%	55%	53%	96.36%	58%	55%	94.83%	61%	58%	95.08%	64%	70%	109.38%	67%	49.24%	73.49%	66% ≤ C ≤ 75%	Sedang
IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	74%	70.67%	n/a	n/a	71.34%	74%	103.73%	72.01%	74%	102.76%	72.68%	78.04 %	107.38%	73.35%	77.19%	105.24 %	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Persentase dampak bencana yang ditangani dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91% ≤ C ≤ 100%	Sangat Tinggi
Persentase Nagari siaga bencana	15.63%	6.25%	6.28%	100.48%	6.25%	29.33 %	469.28%	6.25%	6.25%	100.00%	9.38%	12.50 %	133.26%	12.50%				
Misi 5	**Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan pemanfaatan pemanfaatan sumber daya daerah**																	
PDRB Per kapita (dalam juta Rp.)	41.69	30.82	31.05	100.75%	32.99	32.97	99.94%	35.17	35.12	99.86%	37.34	37.58	100.64%	39.52	35.05	88.69%	76% ≤ C ≤ 90%	Tinggi
Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi	6.15	5.55	5.03	90.63%	5.67	5.11	90.12%	5.79	5.05	87.22%	5.91	4.98	84.26%	6.03	-1.13	-18.74%	C ≤ 50%	Sangat Rendah
Persentase pengangguran terbuka	2.81	4.41	4.02	109.70%	3.96	3.72	106.45%	3.69	4.01	92.02%	3.40	3.2	106.25%	2.81	4.79	58.66%	66% ≤ C ≤ 75%	Sedang
Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan (orang)	1,150,000	1,005,000	1,189,173	118.33%	1,025,000	1,276,879	124.57%	1,050,000	1,331,290	126.79%	1,075,000	1,218,576	113.36%	1,100,000	845,780	76.89%	76% ≤ C ≤ 90%	Tinggi
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (Rp)	10,000,000,000	3,497,059,000	3,497,059,000	100%	3,884,404,000	4,092,915,500	105.37%	4,270,085,000	6,440,715,000	150.83%	6,750,000,000	5,804,760,000	86.00%	7,500,000,000	2,638,475,000	35.18%	C ≤ 50%	Sangat Rendah

BAB III
GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merupakan semua hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik pemerintah Kabupaten Tanah Datar sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah harus dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Analisis gambaran keuangan daerah pada bab ini dimaksud untuk menghasilkan gambaran tentang kinerja dan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Pada bab ini analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi APBD dan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tanah Datar selama lima tahun sebelumnya.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah lima tahun sebelumnya mengacu kepada peraturan pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merinci APBD terdiri dari komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pembiayaan meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan PP Nomor 58 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Terkait penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 walaupun terjadi perubahan signifikan terkait dengan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah dan masih berlakunya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta tata cara perubahan rencana pembangunan daerah maka analisis kinerja keuangan daerah akan disajikan mengacu kepada Permendagri Nomormor 13 Tahun 2006 untuk kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dan PP Nomor 12 Tahun 2019 terkait kerangka pendanaan proyeksi APBD beserta kebijakan pengelolaan keuangan daerah selama peiode 2021-2026.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 sangat dipengaruhi oleh dampak ekonomi akibat kebijakan pemerintah dalam mencegah terjadinya penyebaran wabah covid-19. Pandemi covid-19 yang terjadi tahun 2020 berdampak besar tehadap pelaksanaan APBD, tidak hanya penyesuaian jumlah dana alokasi umum, tetapi juga kebijakan *refocusing* belanja daerah. Turunnya penerimaan daerah yang bersumber dari dana transfer pusat dan turunnya pendapatan asli daerah juga mempengaruhi belanja yang akan dianggarkan selama lima tahun kedepan.

Pada bab ini juga disajikan gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam lima tahun terakhir dan kerangka pendanaan proyeksi APBD beserta kebijakan pengelolaan keuangan daerah selama periode RPJMD tahun 2021-2026.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis terhadap kinerja keuangan periode sebelumnya merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang khususnya dalam memproyeksikan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya dapat diketahui rata-rata pertumbuhan dan kontribusi komponen pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan indikator menganalisis kemampuan keuangan daerah yang diukur melalui kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Hal ini juga terkait dengan kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam membiayai pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Tanah Datar periode tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan (Rp)	PAD (Rp)	DOFD (%)	Pertumbuhan DOFD (%)
2016	1.188.763.795.260	118.971.143.694	10,01	2,86
2017	1.224.559.427.710	129.271.309.575	10,56	5,48
2018	1.230.335.931.943	115.914.187.915	9,42	(10,75)
2019	1.339.707.228.548	129.785.828.002	9,69	2,83
2020	1.194.818.538.888	122.247.542.343	10,23	5,61
Rata-rata			**9,98**	**1,21**

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Dari tabel 3.1 tampak bahwa DOFD Kabupaten Tanah Datar periode 2016-2020 rata-rata sebesar 9,98%. Secara keseluruhan DOFD Kabupaten Tanah Datar menunjukkan *trend* peningkatan kecuali untuk tahun 2018 dengan rata-rata pertumbuhan 1,21%. Penurunan pendapatan yang signifikan terjadi pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Target dan realisasi deviden dari Bank Nagari mengalami penurunan pada tahun 2018 sehingga menyebabkan penurunan target dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pada Lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan pada penerimaan pendapatan BLUD. Pendapatan BLUD mengalami penurunan dari angka 67.759.853.027 pada tahun 2017 menjadi 57.541.346.255 pada tahun 2018. Perkembangan DOFD Kabupaten Tanah Datar periode 2016-2020 dapat dilihat pada grafik 3.1 berikut ini :

Grafik 3.1
Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2016-2020

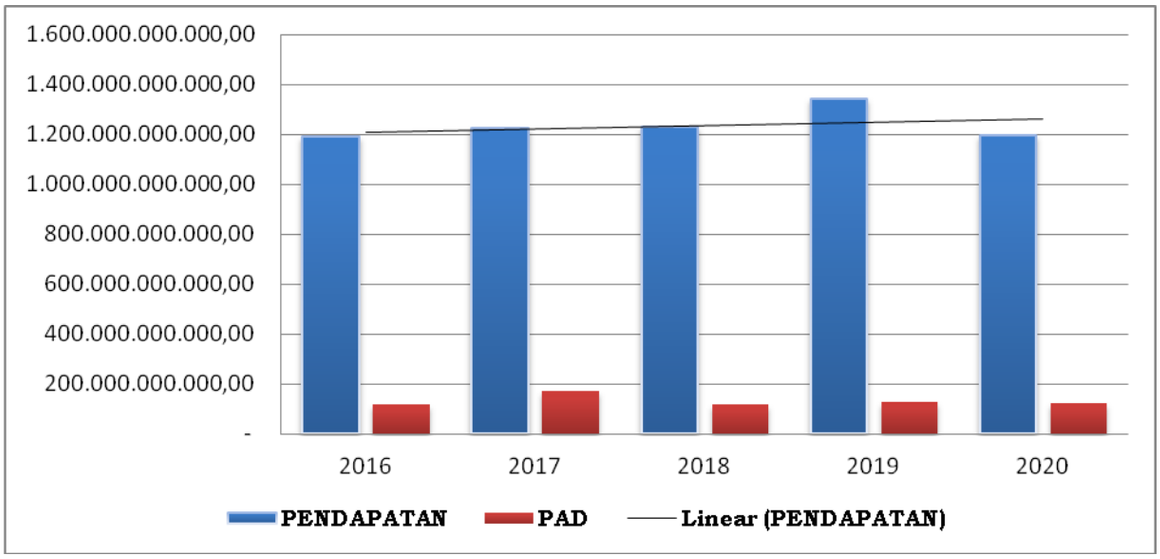

Melihat perkembangan nilai DOFD Kabupaten Tanah Datar periode 2016-2020 yang berfluktuatif dengan tingkat kemandirian yang belum tinggi namun menunjukkan trend positif dalam aspek kemandirian. Hal ini menunjukkan sedang terjadinya perkembangan ekonomi yang membaik. Tingkat kemandirian yang masih rendah tersebut merupakan hal yang wajar khususnya bagi daerah yang sedang berkembang dan membutuhkan banyak dana untuk membiayai pembangunan daerah. Namun demikian tantangan terbesar Kabupaten Tanah Datar kedepan adalah bagaimana meningkatkan DOFD Kabupaten Tanah Datar agar lebih mandiri dalam membiayai pembangunan daerah.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Komponen APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih daerah pada periode anggaran. Sedangkan pembiayaan daerah adaalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

3.1.1.1 Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
   a. Pendapatan Pajak Daerah;
   b. Pendapatan Retribusi Daerah;
   c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

2. Dana Perimbangan, terdiri dari:
   a. Bagi Hasil pajak dan bukan pajak
   b. Dana Alokasi Umum (DAU)
   c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari:
   a. Pendapatan Hibah;
   b. Dana Darurat; dan
   c. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya
   d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus
   e. Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan daerah lainnya

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Pendapatan Daerah terdiri dari

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari :
   a. Pendapatan Pajak Daerah;
   b. Pendapatan Retribusi Daerah;
   c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan transfer, meliputi :
   1) Pendapatan Transfer pemerintah pusat, terdiri atas :
      a. Dana Transfer Umum, terdiri dari :
         1. Bagi Hasil Pajak
         2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
         3. Dana Alokasi Umum
      b. Dana transfer khusus, terdiri dari:
         1. Dana Alokasi Khusus Fisik
         2. Dana Alokasi khusus non fisik
      c. Dana Insentif Daerah
      d. Dana Desa
   2) Pendapatan Transfer antar daerah, terdiri atas :
      a) Pendapatan dana hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah provinsi
      b) Bantuan keuangan dari pemerintah provinsi
      c) Bantuan keuangan dari pemerintah lainnya
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi :
   1) Pendapatan Hibah;
   2) Dana Darurat; dan
   3) Lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar selama lima tahun terakhir yakni tahun 2016-2020 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat kecuali tahun 2020 yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Dengan rata-rata pertumbuhan pertahun 0,95% atau meningkat dari Rp.1.188.763.795.259 pada tahun 2016 menjadi Rp.1.339.707.228.547 pada tahun 2019 dan sebesar Rp.1.194.818.538.888 tahun 2020.

Dari segi capaian realisasi pendapatan terhadap target rata-rata selama tahun 2016-2020 mencapai 96,31%. Berikut disajikan pada tabel 3.2 realisasi capaian pendapatan daerah dan tingkat pertumbuhan dan anggaran selama tahun 2016-2020.

Tabel 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah, Tingkat Capaian Realisasi, Tingkat Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi
Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat capaian (%)	Pertumbuhan anggaran (%)	Pertumbuhan realisasi (%)
2016	1.241.491.032.825	1.188.763.795.259	95,75	8,94	3,20
2017	1.263.434.519.543	1.224.559.427.709	96,92	1,77	3,01
2018	1.297.477.371.741	1.230.335.931.942	94,83	2,69	0,47
2019	1.401.730.903.970	1.339.707.228.547	95,58	8,04	8,89
2020	1.213.102.819.688	1.194.818.538.888	98,49	(13,46)	(10,82)
Rata-rata	**1.283.447.329.553**	**1.235.636.984.469**	**96,31**	**1,60**	**0,95**

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Grafik 3.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2016 - 2020

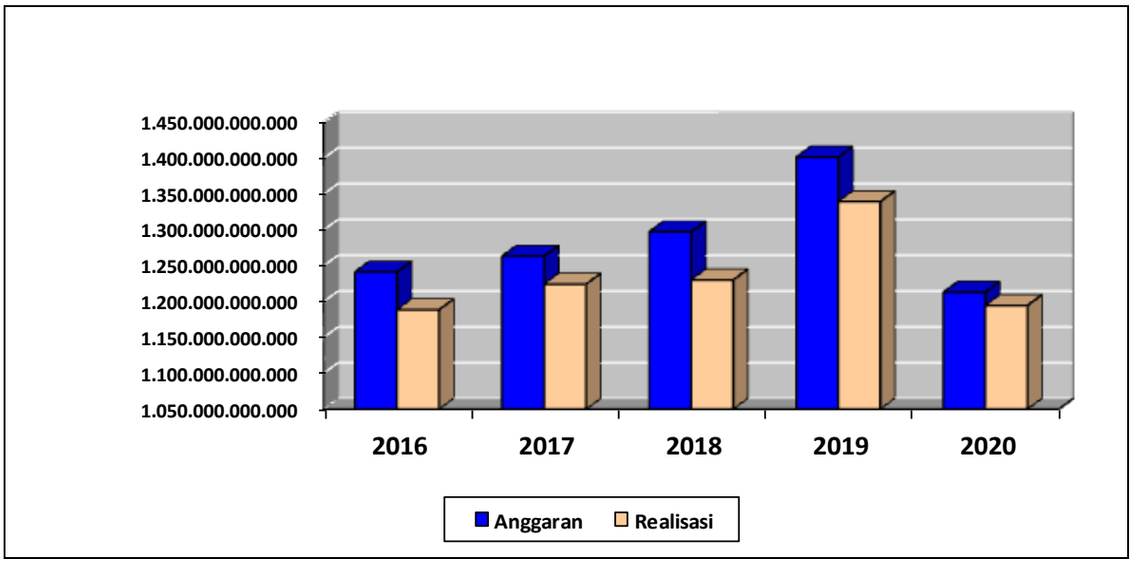

Dari grafik 3.2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2016-2020 tidak ada target yang tercapai 100%. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan regulasi dan kebijakan baik itu untuk PAD, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah. Pada tahun 2017 dan 2018 target pendapatan belum bisa tercapai karena adanya perubahan dalam penerimaan dana perimbangan. Pada tahun 2018 dan 2019 pendapatan dari retribusi daerah tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena adanya perubahan regulasi terhadap beberapa objek retribusi. Pada tahun 2020 target tidak tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan, hal ini merupakan efek dari pandemi covid 2019. Adanya pengurangan dana perimbangan yang ditransfer oleh pemerintah pusat menjadi penyebab utama tidak tercapainya realisasi sebesar target yang telah ditetapkan. Kalau dilihat dari grafik dapat disimpulkan pendapatan daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya baik itu dari segi target maupun realisasinya kecuali di tahun 2020 dengan kondisi pandemi.

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan daerah bahwa realisasi pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020 didominasi oleh dana perimbangan dengan porsi

rata-rata 76,20% lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 13,82 % dan pendapatan asli daerah sebesar 9,98%. Walaupun kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terus meningkat namun masih menunjukkan struktur pendapatan daerah yang masih belum kokoh karena tingkat ketergantungan terhadap dana perimbangan yang sangat tinggi. Berikut disajikan kontribusi masing-masing komponen dalam pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020 pada Tabel 3.3 dan grafik 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3
Kontribusi Masing-Masing Komponen Dalam Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020

Uraian	Kontribusi Terhadap Pendapatan Daerah (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
PAD	10,01	10,56	9,42	9,69	10,23	**9,98**
Dana Perimbangan	81,05	75,86	76,80	73,49	73,80	**76,20**
Lain-lain pendapatan sah	8,94	13,58	13,78	16,83	15,97	**13,82**

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Grafik 3.3
Rata-rata Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

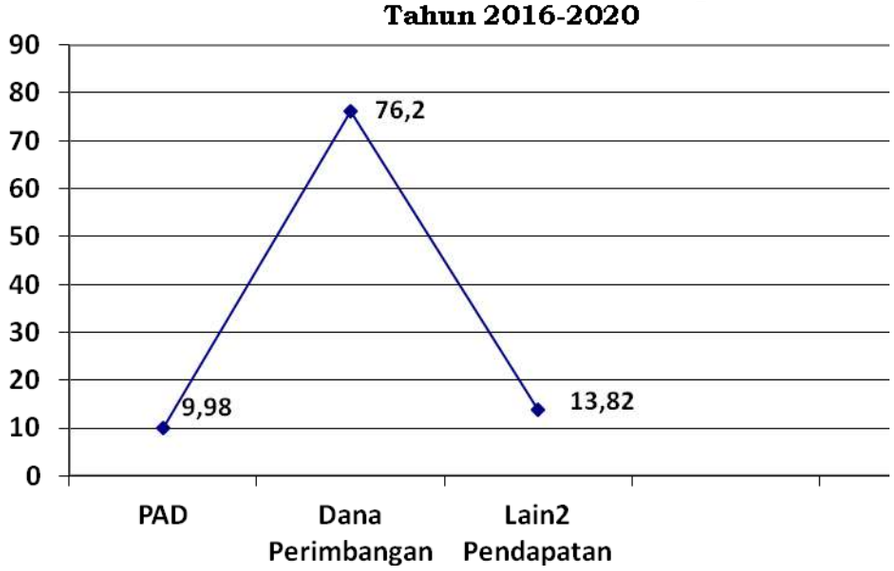

Berikut realisasi penerimaan pendapatan daerah serta rata-rata pertumbuhan selama tahun 2016-2020 yang disajikan pada tabel 3.4

Tabel 3.4
Realisasi dan Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertum buhan (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
PENDAPATAN	**1.188.763.795.259,84**	**1.224.559.427.709,56**	**1.230.335.931.942,65**	**1.339.707.228.547,89**	**1.194.818.538.888,03**	**0,95**
Pendapatan Asli Daerah	**118.971.143.693,84**	**129.271.309.574,56**	**115.914.187.914,65**	**129.785.828.001,89**	**122.247.542.343,03**	**2,12**
Pajak daerah	11.771.072.376,00	16.523.394.357,98	19.847.312.238,18	19.578.257.337,68	17.810.752.982,90	**11,65**
Retribusi daerah	8.035.472.905,00	6.867.932.810,00	9.163.333.284,00	8.608.497.985,00	5.498.289.935,50	**-5,93**
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	22.072.440.727,00	23.511.196.941,00	17.853.818.926,00	18.674.162.380,00	19.307.769.675,00	**-1,20**
Lain-lain PAD yang sah	77.092.157.685,84	82.368.785.465,58	69.049.723.466,47	82.924.910.299,21	79.630.679.749,63	**2,98**
Dana Perimbangan	**963.487.573.519,00**	**928.980.499.474,00**	**944.906.738.207,00**	**984.486.247.225,00**	**881.629.390.625,00**	**3,51**
Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	15.670.214.545,00	16.512.932.135,00	12.236.968.913,00	9.856.446.059,00	14.078.424.431,00	**2,19**
Dana alokasi umum	707.992.904.000,00	695.555.745.000,00	695.555.745.000,00	720.168.239.000,00	646.914.341.000,00	**-0,45**
Dana alokasi khusus	239.824.454.974,00	216.911.822.339,00	237.114.024.294,00	254.461.562.166,00	220.636.625.194,00	**35,19**
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	**106.305.078.047,00**	**166.307.618.661,00**	**169.515.005.821,00**	**225.435.153.321,00**	**190.941.605.920,00**	**2,98**
Hibah	7.523.369.551,00	47.832.561.835,00	44.661.064.504,00	52.769.780.655,00	46.494.381.214,00	**96,19**
Dana darurat						
Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya **)	39.489.871.496,00	42.275.284.826,00	42.304.646.317,00	49.189.965.666,00	43.229.071.193,00	**4,14**
Dana penyesuaian dan otonomi khusus***)	53.999.837.000,00	69.969.772.000,00	82.549.295.000,00	109.815.407.000,00	101.218.153.513,00	**-0,34**
Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	5.292.000.000,00	6.230.000.000,00	-	13.660.000.000,00	-	**-25,21**

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Ditinjau dari kontribusi setiap komponen pembentuk pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020 didominasi oleh pendapatan transfer dengan porsi rata-rata 86,82 % disusul oleh pendapatan asli daerah sebesar 9,98 % dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 3,20 %. Berikut disajikan pada tabel 3.5 kontribusi masing-masing komponen dalam pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020.

Tabel 3.5
Kontribusi Masing-Masing Komponen Dalam Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020

Uraian	Kontribusi Terhadap Pendapatan Daerah (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Pendapatan Asli Daerah	10,01	10,56	9,42	9,69	10,23	**9,98**
Pendapatan transfer	89,36	85,54	86,95	86,37	85,89	**86,82**
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,63	3,90	3,63	3,94	3,88	**3,20**

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Grafik 3.4
Perbandingan Realisasi Pendapatan Daerah
Tahun 2016-2021

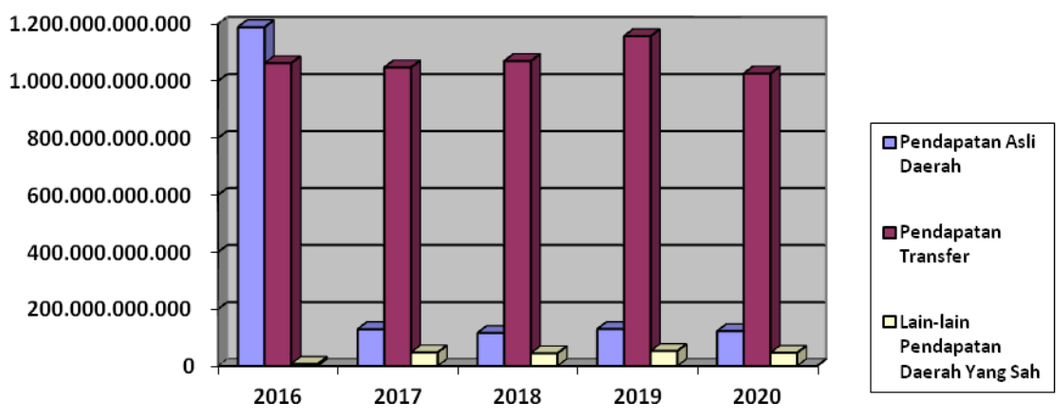

Perkembangan realisasi pendapatan daerah untuk masing-masing komponen dijelaskan sebagai berikut.

1. **Pendapatan Asli Daerah**

   PAD mengalami pertumbuhan rata-rata selama tahun 2016-2020 sebesar 2,12% dan besar kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 9,98%. Tingkat realisasi PAD terhadap target yang ditetapkan dalam APBD selama lima tahun terakhir secara rata-rata mencapai 91,28%. Diperlukan peningkatan ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap pendapatan daerah. Yang dimaksud ekstensifikasi dalam hal ini adalah menargetkan peningkatan jumlah wajib pajak dan menghasilkan tambahan wajib pajak yang dapat turut berpartisipasi dalam membayarkan pajak sehingga terjadi peningkatan jumlah PAD Kabupaten Tanah Datar. Sementara itu yang dimaksud intensifikasi adalah meningkatkan penerimaan pajak dari data yang sudah dimiliki pemerintah daerah. Data yang sudah dimiliki terkait wajib pajak tersebut

kemudian didalami dan diselidiki untuk memperoleh temuan potensi kewajiban pajak yang dimiliki oleh wajib pajak. Disini pekerjaannya dilakukan dengan cara menggali dan mengulik apa-apa saja celah yang mungkin dapat menambah pembayaran wajib pajak dari sejumlah besar wajib pajak yang terdata.

Berikut disajikan dalam tabel 3.6 perbandingan antara anggaran pada APBD dengan realisasi PAD, tingkat capaian, tingkat pertumbuhan anggaran dan tingkat pertumbuhan realisasi tahun 2016-2020.

Tabel 3.6
Perbandingan Antara Anggaran Pada APBD Dengan Realisasi PAD, Tingkat Capaian, Tingkat Pertumbuhan Anggaran Dan Tingkat Pertumbuhan Realiasi Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	117.484.614.929,00	118.971.143.693,00	101,27	12,24	6,16
2017	166.564.096.212,00	129.271.309.574,00	77,61	41,78	8,66
2018	129.247.470.151,00	115.914.187.914,00	89,68	(22,40)	(10,33)
2019	146.786.503.810,00	129.785.828.001,00	88,42	13,57	11,97
2020	122.967.860.890,00	122.247.542.343,00	99,40	(16,23)	(5,82)
Rata-rata	**136.610.109.198,00**	**123.238.002.305,00**	**91,28**	**5,79**	**2,12**

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Ketergantungan keuangan yang masih tinggi terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam membiayai pembangunan daerah, menuntut pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk meningkatkan PAD melalui penggalian potensi sumber-sumber PAD sehingga diharapkan ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat dan provinsi tidak terlalu tinggi.

Ditinjau dari komponen pendapatan asli daerah, lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan komponen terbesar terhadap PAD yakni rata-rata sebesar 63,43% disusul oleh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 16,47%, kemudian pajak daerah sebesar 13,89% dan terendah adalah retribusi daerah sebesar 6,22%. berikut disajikan pada tabel 3.7 kontribusi komponen pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020.

Tabel 3.7
Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020

Uraian	Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
Pajak Daerah	9,89	12,78	17,12	15,09	14,56	13,89
Retribusi Daerah	6,75	5,31	7,91	6,63	4,50	6,22
Hasil Pengelolaan Kekayaan	18,55	18,19	15,40	14,39	15,80	16,47
Lain2 PAD	64,80	63,72	59,57	63,89	65,15	63,43

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Grafik 3.5
Perbandingan Kontribusi Komponen PAD
Tahun 2016-2020

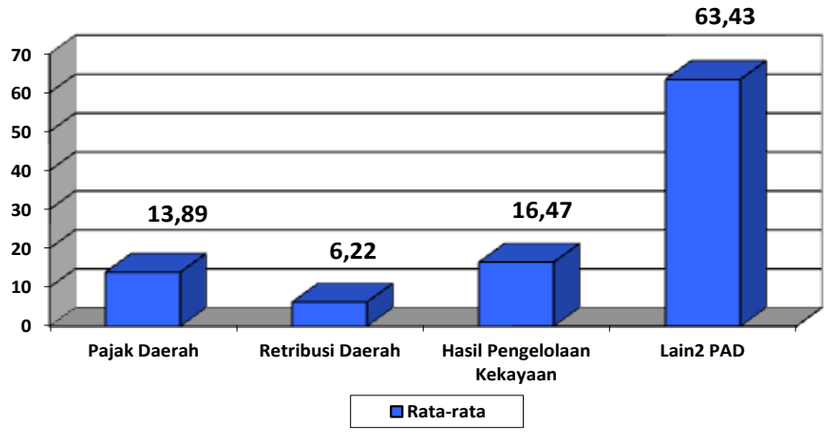

Pajak penerangan jalan memberikan kontribusi terbesar terhadap pajak daerah selama tahun 2016-2020 dengan rata-rata kontribusi sebesar 57,56%. Meningkatnya jumlah pelanggan PT PLN (Persero) dan konsumsi listrik masyarakat salah satu faktor penyebab meningkatnya penerimaan pajak daerah dari sektor ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan ekonomi di Kabupaten Tanah Datar. Selain itu juga terjadi peningkatan penerimaan dari pajak hotel dan restoran yang dipengaruhi oleh dengan beroperasionalnya hotel Emersia Batusangkar dan hotel lainnya di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini juga mengindikasikan Kabupaten Tanah Datar sebagai salah satu daerah tujuan pariwisata dan MICE di Sumatera Barat. Kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 12,33% dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah rata-rata sebesar 2,90%. Berikut diuraikan kontribusi komponen pajak daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Komponen Pajak Daerah
Tahun 2016-2020

JENIS PAJAK	TAHUN									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pajak Hotel	192,794,784	125,327,667	215,000,000	144,140,955.00	822,409,600	875,872,638.00	907,772,470.06	998,146,566.00	412,400,000	538,862,287.71
Pajak Restoran	1,458,442,902	1,712,568,862	2,100,000,000	1,893,073,221.00	2,300,000,000	2,509,897,570.00	3,000,000,000.00	2,748,868,443.00	1,281,721,873	1,611,834,459.00
Pajak Hiburan	18,900,000	9,943,500	14,000,000	300,000.00	25,000,000	19,745,000.00	16,660,000.00	5,717,000.00	2,415,000	2,415,000.00
Pajak Reklame	159,491,890	164,182,294	159,492,000	144,602,906.00	161,492,000	152,229,339.00	163,470,503.64	119,304,621.00	122,200,000	135,580,863.00
Pajak Penerangan Jalan	6,500,000,000	6,710,326,411	7,591,991,710	9,605,990,317.00	10,500,000,000	10,900,599,942.00	12,300,000,000.00	11,272,037,575.00	14,393,600,000	10,705,326,141.00
Pajak Air Bawah Tanah	158,714,458	148,669,666	158,715,000	61,387,060.00	158,715,000	-	188,870,900.00	9,167,809.00	10,000,000	6,097,301.00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	902,712,500	805,988,113	902,713,000	894,640,169.98	1,002,713,000	1,185,577,283.18	1,396,023,174.26	831,401,963.68	415,636,000	454,268,262.19
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2,233,005,068	1,216,515,563	2,233,000,000	1,897,680,879.00	2,233,000,000	1,926,940,741.00	2,400,000,000.00	1,829,997,710.00	1,800,000,000	2,111,125,564.00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	750,000,000	877,550,300	1,250,000,000	1,881,578,850.00	2,000,000,000	2,276,228,725.00	2,142,000,000.00	1,763,615,650.00	1,700,000,000	2,245,243,105.00

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Tabel 3.9
Tingkat Capaian, Proporsi dan Pertumbuhan Komponen Pajak Daerah Tahun 2016-2020

Jenis Pajak	Tahun														
	2016			2017			2018			2019			2020		
	Capaian	Proporsi	Pertum buhan	Capaian	Proporsi	Pertum buhan	Capaian	Proporsi	Pertum buhan	Capaian	Proporsi	Pertum buhan	Capaian	Proporsi	Pertum buhan
Pajak Hotel	65.01	1.06	-10.59	67.04	0.87	15.01	67.04	0.87	15.01	109.96	5.10	13.96	130.66	3.03	-46.01
Pajak Restoran	117.42	14.55	26.07	90.15	11.46	10.54	90.15	11.46	10.54	91.63	14.04	9.52	125.76	8.95	-41.36
Pajak Hiburan	52.61	0.08	71.44	2.14	0.00	-96.98	2.14	0.00	-96.98	34.32	0.03	-71.05	100.00	0.15	-57.76
Pajak Reklame	102.94	1.39	26.07	90.66	0.88	-11.93	90.66	0.88	-11.93	72.98	0.61	-21.63	110.95	0.76	13.64
Pajak Penerangan Jalan	103.24	57.01	4.79	126.53	58.14	43.15	126.53	58.14	43.15	91.64	57.57	3.41	74.38	60.17	-5.03
Pajak Air Bawah Tanah	93.67	1.26	-0.83	38.68	0.37	-58.71	38.68	0.37	-58.71	4.85	0.05	0.00	60.97	0.03	-33.49
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	89.29	6.85	30.27	99.11	5.41	11.00	99.11	5.41	11.00	59.56	4.25	-29.87	109.29	2.55	-45.36
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	54.48	10.33	0.19	84.98	11.48	55.99	84.98	11.48	55.99	76.25	9.35	-5.03	117.28	11.87	15.36
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	117.01	7.46	3.02	150.53	11.39	114.41	150.53	11.39	114.41	82.33	9.01	-22.52	132.07	12.62	27.31

Sumber : BKD Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Retribusi daerah terdiri atas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa usaha berkontribusi terbesar terhadap retribusi daerah selama tahun 2016-2020 dengan rata-rata sebesar 70,69%, dan disusul oleh retribusi jasa umum sebesar 22,85% dan retribusi perizinan tertentu sebesar 6,46%. Penerimaan retribusi tempat rekreasi dan olahraga merupakan penerimaan retribusi terbesar terhadap retribusi jasa usaha. Hal ini mempertegas bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Tanah Datar.

Berikut diuraikan kontribusi komponen retribusi daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020 pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Target dan Realisasi Komponen Retribusi Daerah
Tahun 2016-2020

Jenis Retribusi	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Retribusi Jasa Umum	3,055,175,200	2,677,161,270	1,606,190,000	1,281,201,493	1,889,185,600	1,360,901,290	2,146,311,500	1,635,330,282	1,211,570,000	1,562,907,180
Retribusi Jasa Usaha	4,415,443,800	4,711,403,590	5,079,520,000	5,132,613,795	7,625,357,240	7,390,538,766	10,118,052,600	6,636,244,820	3,200,273,563	3,426,813,235
Retribusi Perizinan Tertentu	539,000,000	646,908,045	451,753,092	454,117,522	401,700,000	411,893,228	432,750,000	336,922,883	393,128,983	508,569,521

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Tabel 3.11
Tingkat Capaian, Proporsi dan Pertumbuhan Komponen Retribusi Daerah Tahun 2016-2020

Jenis Retribusi	Tahun														
	2016			2017			2018			2019			2020		
	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan
Retribusi Jasa Umum	87.63	33.32	-17.89	79.77	18.65	(52.14)	72.04	14.85	6.22	76.19	18.99	20.17	129.00	28.42	-4.43
Retribusi Jasa Usaha	106.70	58.63	21.70	101.05	74.73	8.94	96.92	80.65	43.99	65.59	77.09	-10.21	107.08	62.33	-48.36
Retribusi Perizinan Tertentu	120.02	8.05	-55.29	100.52	6.61	(29.80)	102.54	4.5	-9.30	77.86	3.91	-18.20	129.36	9.25	50.95

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Perbandingan kontribusi retribusi daerah terhadap total pendapatan retribusi daerah tahun 2016-2020 terlihat pada grafik 3.6 berikut:

Grafik 3.6
Perbandingan Komponen Retribusi Daerah terhadap Total Pendapatan Retribusi Daerah 2016-2020

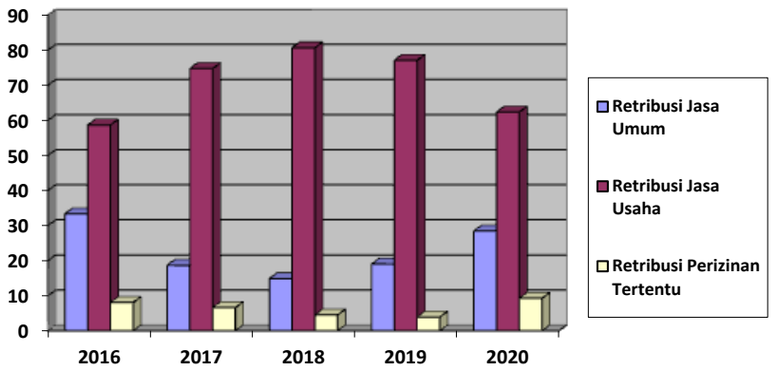

Tabel 3.12
Target dan Realisasi Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Tahun 2016-2020

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	22,068,050,765	22,018,050,765	23,477,682,645	23,477,682,645	17,976,573,282	17,829,573,282	18,726,714,473	18,642,624,473	19,498,494,867	19,265,775,017
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	52,958,062	54,389,962	33,514,296	33,514,296	24,245,644	24,245,644	-	31,537,907	30,557,616	41,994,658

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Tabel 3.13
Tingkat Capaian, Proporsi dan Pertumbuhan Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2016-2020

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun														
	2016			2017			2018			2019			2020		
	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	99.77	99.75	3.75	100	99.86	6.63	99.18	99.86	- 24.06	99.55	99.83	4.56	98.81	99.78	3.34
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	102.70	0.23	- 39.36	100	0.14	- 38.38	100.00	0.13	- 27.66	0.00	0.16	30.08	137.43	0.21	33.16

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2016-2020 bersumber dari dividen atas investasi penyertaan modal pada BUMD. Dividen terbesar bersumber dari Bank Nagari Sumatera Barat. Kontribusi tertinggi hasil pengelolaan kekayaan terhadap pendapatan daerah berada di tahun 2016 sebesar 18,55 dan terendah ditahun 2019 sebesar 14,39%.

Grafik 3.7
Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan Terhadap Total Pendapatan Tahun 2016-2020

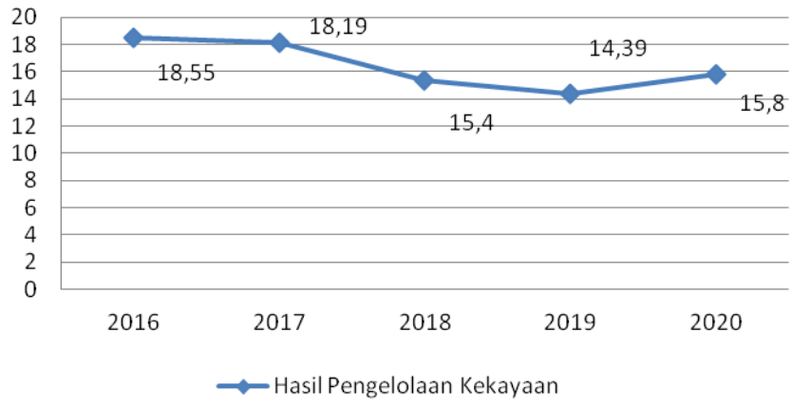

Tabel 3.14
Target dan Realisasi Komponen Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2016-2020

Lain-lain PAD yang Sah	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	5,000,000.00	24,600,000.00	23,087,500.00	119,955,000.00	49,187,150.00	53,687,150.00	5,500,000,000.00	2,941,298,054.00	-	90,740,000.00
Penerimaan Jasa Giro	5,870,750,000.00	6,447,067,689.00	5,870,750,000.00	5,600,178,151.00	5,800,000,000.00	3,319,162,376.00	6,000,000,000.00	8,366,860,406.00	1,500,000,000.00	3,183,521,278.00
Penerimaan Bunga Deposito	6,187,500,000.00	7,079,861,261.00	4,500,000,000.00	5,801,198,817.00	5,500,000,000.00	5,657,696,934.00	1,352,015,202.00	1,692,300,317.07	3,500,000,000.00	3,397,045,489.00

Lain-lain PAD yang Sah	Tahun									
	2016		2017		2018		2019		2020	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Penerimaan Lain-lain	-	2,468,761,350.84	-	3,071,104,670.58	-	12,997,000.00	-	6,000,000.00	-	1,816,765,767.63
Pendapatan BLUD	48,000,000,000.00	47,905,752,885.00	65,595,422,062.00	67,776,348,827.00	-	2,464,833,751.47	-	837,987,592.14	73,495,862,988.00	71,142,607,215.00
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	14,911,675,500.00	13,166,114,500.00	-	-	70,777,891,635.00	57,541,346,255.00	79,995,862,988.00	69,080,463,930.00	-	-

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Tabel 3.15
Tingkat Capaian, Proporsi dan Pertumbuhan Komponen Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2016-2020

Lain-lain PAD yang Sah	Tahun														
	2016			2017			2018			2019			2020		
	Capaian	Proporsi	Pertum buhan	Capaian	Proporsi	Pertum buhan	Capaian	Proporsi	Pertum buhan	Capaian	Proporsi	Pertum buhan	Capaian	Proporsi	Pertum buhan
Hasil Penjualan Aset Daerah yang tidak dipisahkan	492.00	0.03	(84.69)	519.57	0.15	387.62	109.15	0.08	(55.24)	53.48	3.55	(17.18)	-	0.11	-
Penerimaan Jasa Giro	109.82	8.36	(5.36)	95.39	6.80	(13.14)	57.23	4.81	(40.73)	139.45	10.09	(99.90)	212.23	4.00	8.24
Penerimaan Bunga Deposito	114.42	9.18	16.78	128.92	7.04	(18.06)	102.87	8.19	(2.47)	125.17	2.04		97.06	4.27	(59.40)
Penerimaan Lain-lain	-	3.20	190.51	-	3.73	24.40	-	0.02		-	0.01	(53.84)	-	2.28	116.80
Pendapatan BLUD	99.80	62.14	7.67	103.32	82.28	41.48	-	3.57	(19.74)	-	1.01	(66.00)	96.80	89.34	2.99
Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	88.29	17.08	1.81	-	-		81.30	83.33	(15.10)	86.36	83.30	20.05	-	-	-

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan komponen terbesar dalam PAD selama tahun 2016-2020. Kontribusi tertinggi Lain-lain PAD yang sah terhadap total pendapatan terjadi di tahun 2020 sebesar 65,15% dan terendah di tahun 2018 sebesar 59,57%. Penerimaan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD M. Ali Hanafiah merupakan penyumbang terbesar terhadap lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

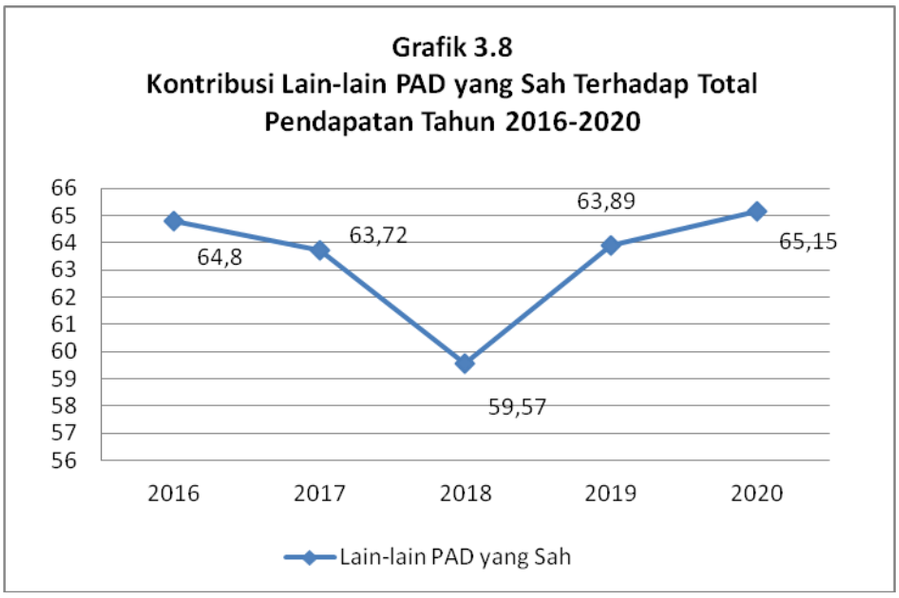

Permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan PAD selama periode 2016 – 2020 antara lain adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan Internal, antara lain:
   1) Belum optimalnya pengelolaan pajak dan retribusi daerah
   2) Tarif pajak dan retribusi daerah yang kurang update
   3) Organisasi pengelola pendapatan yang belum disusun berdasarkan fungsi
   4) SDM Perpajakan yang belum menjawab kebutuhan organisasi (tenaga penilaian, pemeriksaan, penagihan)
   5) Kurangnya pengawasan terhadap pajak dan retribusi daerah
   6) Rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah
   7) Lemahnya penegakan hukum di bidang pajak dan retribusi daerah
   8) Belum optimalnya kinerja BUMD dan Perusahaan Daerah dalam menghasilkan laba

b. Permasalahan Eksternal, antara lain:
   1) Kondisi ekonomi yang menurun akibat kebijakan Pemerintah dalam pencegahan COVID-19
   2) Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah
   3) Terbatasnya Sumber Daya Alam (SDA)
   4) Kurangnya investasi

Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah:
1) Mengintensifkan pemungutan pajak daerah dengan menggunakan billing sistem
2) Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak daerah tentang aturan daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah

3) Bekerja sama dengan Forkompimda dalam pengawasan pajak dan retribusi daerah
4) Bekerja sama dengan Bank Nagari dalam Digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, seperti : smart tax, e-retribusi pasar, e-tiketing, e-parkir, dsb.
5) Memberikan teguran dan peringatan kepada wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak daerah
6) Penyesuian tarif retribusi daerah antara lain:
   a. Tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga
   b. Tarif retribusi penjualan usaha produksi daerah
   c. Tarif retribusi rumah potong hewan
   d. Tarif retribusi parkir di tepi jalan umum

2. Pendapatan transfer

Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer dari pemerintah pusat, pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya, pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya dan bantuan keuangan. Berikut diuraikan masing-masing sumber pendapatan tersebut.

Table 3.16
Tingkat Capaian, Proporsi dan Pertumbuhan Komponen Dana Perimbangan Daerah Tahun 2016-2020

DANA PERIMBANGAN															
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak						DAU					DAK				
Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan	Target	Realisasi	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan	Target	Realisasi	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan
2016	15,431,802,000	15,670,214,545	101.54	1.63	8.10	707,992,904,000	707,992,904,000	100.00	73.48	6.12	292,657,394,400	239,824,454,974	81.95	24.89	182.15
2017	16,576,338,000	16,512,932,135	99.62	1.78	5.38	695,555,745,000	695,555,745,000	100.00	74.87	(1.76)	260,386,591,000	216,911,822,339	83.30	23.35	(9.55)
2018	17,241,588,622	12,236,968,913	70.97	1.30	(25.89)	695,555,745,000	695,555,745,000	100.00	73.61	-	273,243,829,000	237,114,024,294	86.78	25.09	9.31

DANA PERIMBANGAN															
Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak						DAU					DAK				
Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan	Target	Realisasi	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan	Target	Realisasi	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan
2019	13,447,464,865	9,856,446,059	73.30	1.00	(19.45)	720,002,635,000	720,168,239,000	100.02	73.15	3.54	292,759,650,000	254,461,562,166	86.92	25.85	7.32
2020	18,622,638,590	14,078,424,431	75.60	1.60	42.83	651,739,765,000	646,914,341,000	99.26	73.38	(10.17)	225,724,515,000	220,636,625,194	97.75	25.03	(13.29)

a. Pendapatan transfer dari pemerintah pusat.
Pendapatan transfer dari pemerintah pusat terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.
Dana transfer umum memberikan kontribusi terbesar terhadap total pendapatan transfer dari pemerintah pusat yakni sebesar 75,16 %, dengan komponen terbesar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi Umum mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan selama tahun 2016 sampai dengan 2020 dengan rata-rata pertumbuhan (0,45%). Pada tahun 2016 besarnya nilai DAU sebesar Rp.707.992.904.000, pada tahun 2017 dan 2018 turun menjadi Rp.695.555.745.000 yang disebabkan karena pengalihan urusan pendidikan menengah (SMA/SMK) ke Provinsi Sumatera Barat, dan meningkat menjadi Rp.720.168.239.000 pada tahun 2019 serta turun menjadi Rp.646.914.341.000 pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat akibat pandemi *Covid-19*.
Dana bagi hasil pajak juga mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan selama tahun 2016-2020. Pada tahun 2016 Rp.14.942.271.450 dan pada tahun 2020 sebesar Rp.12.092.290.129 dengan tingkat pertumbuhan rata-rata selama 5 tahun 2,82% sedangkan untuk dana bagi hasil bukan pajak selama tahun 2016-2020 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 13,43% yakni pada tahun 2016 sebesar Rp.727.943.095 dan pada tahun 2020 menjadi Rp.1.986.134.302.
Sedangkan untuk dana alokasi khusus mengalami pertumbuhan yang signifikan yakni rata-rata selama 5 tahun sebesar 35,19%.

Tabel 3.17
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2016-2021

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	Proporsi	Pertumbuhan
2015	594,199,000.00	594,199,000.00	100.00		
2016	740,234,000.00	748,499,981.00	101.12	0.08	25.97
2017	961,911,000.00	947,413,772.00	98.49	0.10	26.57
2018	996,710,571.00	995,806,000.00	99.91	0.11	5.11
2019	1,055,120,000.00	1,056,024,908.00	100.09	0.11	6.05
2020	444,732,732.00	402,986,048.00	90.61	0.05	(61.84)

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau merupakan salah satu penyumbang Dana Perimbangan bagi Kabupaten Tanah Datar dari sektor Bagi Hasil Pajak. Dana ini diperoleh karena Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang mempunyai lahan perkebunan tembakau. Angka proporsi, capaian dan tingkat pertumbuhan penerimaan daerah dari Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau ini dapat kita lihat pada tabel 3.17 di atas.

b. Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya
Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya berupa dana penyesuaian yaitu DID dan Dana Desa. Realisasi dana penyesuaian mengalami fluktuasi sesuai dengan regulasi yang ada, dengan tingkat pertumbuhan (0,34%) pertahun.

c. Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya
Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya berupa bagi hasil

pajak dari provinsi. Pendapatan yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi mengalami pertumbuhan rata-rata selama 5 tahun sebesar 4,14% atau dari Rp.39.489.871.496 pada tahun 2016 menjadi Rp.43.229.071.193 pada tahun 2020.

d. Bantuan Keuangan
Bantuan Keuangan merupakan sumber pendapatan yang berasal dari bantuan dari pemerintah daerah Provinsi. Bantuan keuangan ini tidak terealisasi setiap tahun sesuai dengan regulasi dari pemerintah provinsi. Dari rentang tahun 2016 sampai tahun 2020 hanya terealisasi pada tahun 2016 sebesar 5.292.000.000 dan pada tahun 2017 Rp.6.230.000.000 serta pada tahun 2019 sebesar Rp.13.660.000.000

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Tanah Datar hanya bersumber dari pendapatan hibah. Pendapatan hibah yang diterima oleh Kabupaten Tanah Datar mengalami fluktuasi selama 5 tahun yakni pada tahun 2016 sebesar Rp.7.523.369.551 dan pada tahun 2020 meningkat sebesar Rp.46.494.381.214

3.1.1.2 Kinerja Belanja Daerah

Analisis belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan daerah Kabupaten Tanah Datar selama periode 2016-2020 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan belanja daerah periode 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah. Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dalam periode tahun anggaran dan tidak diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah daerah.

Selama tahun 2016-2020 pengklasifikasian belanja daerah dilakukan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan relevan dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari komponen belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga sedangkan belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Selama tahun 2016 sampai tahun 2020 realisasi belanja daerah mengalami fluktuasi yakni dari sebesar Rp.1,2 Triliun pada tahun 2016 menjadi Rp.1,3 Triliun pada tahun 2019 dan turun menjadi Rp.1,1 Triliun pada tahun 2020 dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah sebesar 1,78%. tingkat realisasi penyerapan anggaran belanja daerah selama 2016-2020 rata-rata sebesar 90,95%. Berikut disajikan pada tabel 3.10 Target dan Realisasi Belanja Daerah, tingkat capaian realisasi, tingkat pertumbuhan anggaran dan tingkat pertumbuhan realisasi Tahun 2016-2020.

Tabel 3.18
Target dan Realisasi Belanja Daerah, Tingkat Capaian Realisasi, Tingkat Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi
Tahun 2016-2020

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2016	1.382.337.804.767	1.249.495.598.573	90,39	11,30	12,95
2017	1.343.555.539.744	1.218.833.756.257	90,72	(2,81)	(2,45)
2018	1.384.315.819.022	1.238.097.675.117	89,44	3,03	1,58
2019	1.480.639.328.078	1.350.362.869.491	91,20	6,96	9,07
2020	1.274.683.513.001	1.185.202.602.008	92,98	(13,91)	(12,23)
Rata-rata	**1.373.106.400.922**	**1.248.398.500.289**	**90,95**	**0,91**	**1,78**

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Ditinjau dari kontribusi komponen pembentuk belanja daerah tahun 2016-2020 bahwa belanja tidak langsung memiliki rata-rata sebesar 63,60% sedangkan belanja langsung sebesar 36,40%. Berikut disajikan pada tabel 3.11 kontribusi komponen belanja daerah Tahun 2016-2020.

Tabel 3.19
Kontribusi Komponen Belanja Daerah 2016-2020

Uraian	Kontribusi Komponen Belanja Daerah (%)					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata
Belanja Tidak Langsung	**66,75**	**60,72**	**61,93**	**60,00**	**68,62**	**63,60**
Belanja Pegawai	80,27	76,02	72,00	73,46	70,57	74,46
Belanja Hibah	2,48	1,23	1,71	1,21	6,89	2,71
Belanja Bantuan Sosial	0,04	0,20	0,39	0,40	0,47	0,30
Belanja Bagi Hasil Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	0,28	0,32	0,50	0,41	0,33	0,37
Belanja Bantuan Keuangan	16,91	22,15	25,38	24,52	16,59	21,11
Belanja Tidak Terduga	0,01	0,07	0,03	0,00	5,15	1,05
Belanja Langsung	**33,25**	**39,28**	**38,07**	**40,00**	**31,38**	**36,40**
Belanja Pegawai	9,19	9,03	2,82	0,93	0,58	4,51
Belanja Barang Jasa	45,60	49,63	62,15	61,51	70,44	57,87
Belanja Modal	45,20	41,34	35,03	37,56	28,98	37,62

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Dari Tabel 3.11 terlihat bahwa pada belanja tidak langsung kontribusi belanja terbesar bersumber dari belanja pegawai yakni dengan rata-rata sebesar 74,46% dan diikuti oleh belanja bantuan keuangan sebesar 21,11% Sedangkan pada belanja langsung kontribusi belanja terbesar bersumber dari belanja barang dan jasa dengan rata-rata sebesar 57,87% dan diikuti oleh belanja modal sebesar 37,62%

Grafik 3.9
Rata-rata Kontribusi Komponen Belanja Daerah
Tahun 2016-2020

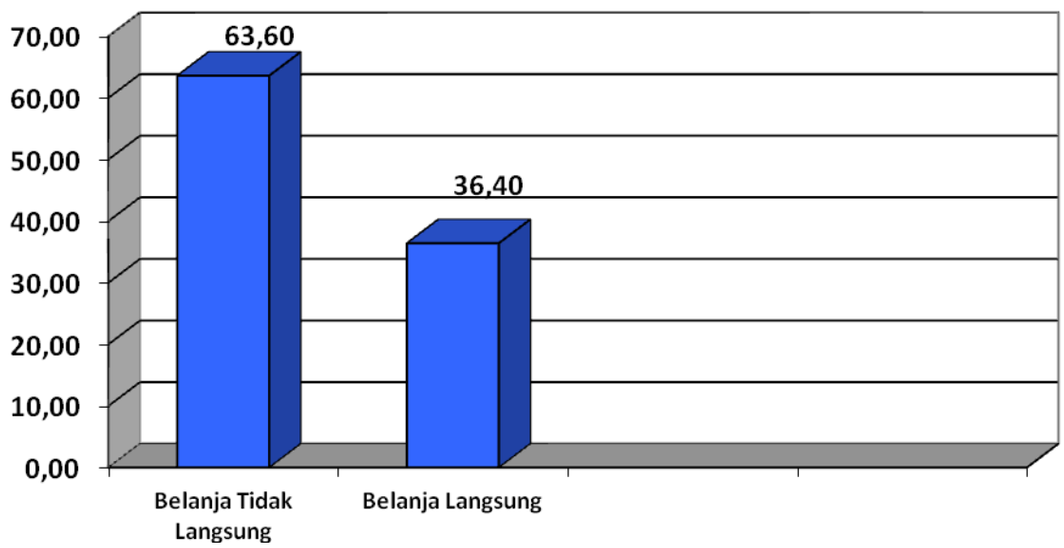

Berikut realisasi belanja daerah Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2016-2020 :

Tabel 3.20
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar selama tahun 2016-2020

Uraian	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar (Rp)					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
BELANJA	**1.249.495.598.573,46**	**1.218.833.756.256,58**	**1.238.097.675.117,05**	**1.350.362.869.491,00**	**1.185.202.602.007,80**	**1.78**
BELANJA TIDAK LANGSUNG	**834.076.978.837,00**	**740.119.692.011,00**	**766.755.173.192,00**	**810.242.584.984,50**	**802.995.244.810,80**	**1.53**
Belanja Pegawai	669.537.549.656,00	562.662.727.329,00	552.046.588.562,00	595.213.853.313,00	573.312.919.377,80	-2.34
Belanja Hibah	20.722.093.062,00	9.116.873.547,00	13.106.843.862,00	9.810.355.584,00	46.402.017.546,00	63,59
Belanja Bantuan Sosial	354.960.000,00	1.501.710.000,00	2.953.940.934,00	3.214.312.919,00	3.812.780.661,00	136,80
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	2.305.317.427,00	2.402.244.672,00	3.849.212.467,00	3.303.704.972,00	2.682.057.655,00	4.79
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	141.048.475.660,00	163.936.466.280,00	194.591.524.960,00	198.663.358.196,50	134.896.883.634,00	20.98
Belanja Tidak Terduga	108.583.032,00	499.670.183,00	207.062.407,00	37.000.000,00	41.888.585.937,00	22,816.59
BELANJA LANGSUNG	**415.418.619.736,46**	**478.714.064.245,58**	**471.342.501.925,05**	**540.120.284.506,50**	**382.207.357.197,00**	**3.45**
Belanja Pegawai	38.189.247.553,00	43.221.378.828,00	13.280.653.607,00	5.003.016.034,00	3.677.320.145,00	-31,19
Belanja Barang dan Jasa	189.444.500.627,00	237.575.694.886,35	292.927.106.639,25	332.231.884.288,00	270.744.280.786,00	10.81
Belanja Modal	187.784.871.556,46	197.916.990.531,23	165.134.741.678,80	202.885.384.184,50	107.785.756.266,00	0.37

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Perbandingan Kontribusi Masing-Masing Komponen Belanja Daerah 2016-2020 disajikan pada grafik berikut

Grafik 3.10
Perbandingan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun 2016-2020

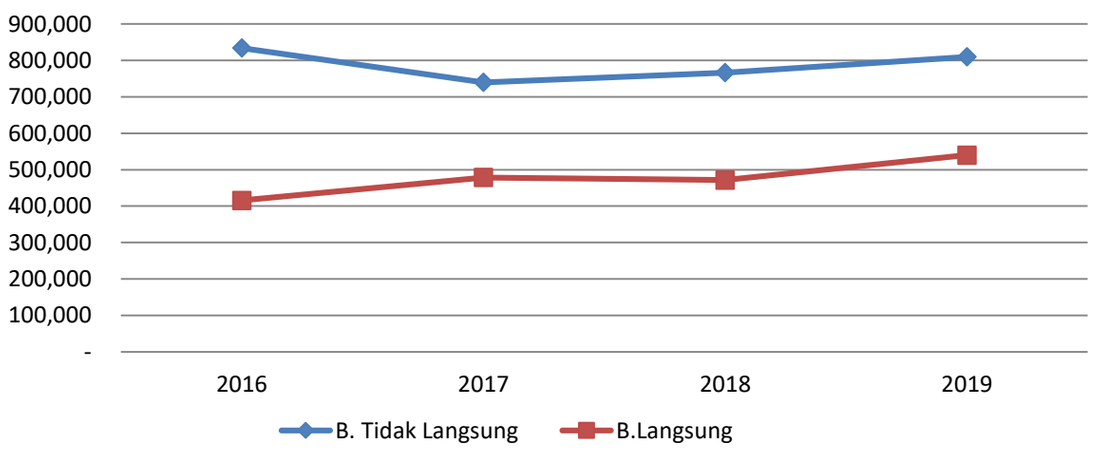

3.1.1.3 Kinerja Pembiayaan Daerah

Analisis terhadap pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran kebijakan pembiayaan daerah pada tahun 2016-2021 terhadap surplus atau defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dan dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan netto dimaksud untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah. Kebijakan yang dibuat dalam penganggaran adalah kebijakan anggaran berimbang. Hal ini berarti semua SiLPA tahun sebelumnya direncanakan untuk digunakan untuk mendanai pembangunan pada tahun berikutnya. SiLPA juga menunjukkan adanya upaya efisiensi oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan terdiri dari SiLPA dan penerimaan hutang daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan bersumber dari penyertaan modal pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Berikut disajikan pada Tabel 3.13 realisasi pembiayaan dan rata-rata pertumbuhan selama tahun 2016-2020

Tabel 3.21
Realisasi Pembiayaan Dan Rata-Rata Pertumbuhan Selama Tahun 2016-2020

Uraian	Realisasi Pembiayaan dan Rata-Rata Pertumbuhan					
	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
PENDAPATAN	**1.188.763.795.260**	**1.224.559.427.710**	**1.230.335.931.943**	**1.339.707.228.548**	**1.194.818.538.888**	**0,95**
BELANJA	**1.249.495.598.573**	**1.218.833.756.257**	**1.238.097.675.117**	**1.350.362.869.491**	**1.185.202.602.008**	**1,78**
SURPLUS / (DEFISIT)	**(60.731.803.314)**	**5.725.671.453**	**(7.761.743.174)**	**(10.655.640.943)**	**9.615.936.880**	**(145,88)**
PEMBIAYAAN NETTO	**140.852.823.515**	**81.292.775.828**	**86.870.167.281**	**78.913.054.107**	**61.010.252.092**	**(5,74)**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN NETTO	**148.059.776.941**	**81.292.775.828**	**87.015.167.281**	**79.108.424.107**	**67.510.252.092**	**(7,36)**
Penggunaan SiLPA	148.053.726.941	81.281.575.828	87.015.167.281	79.108.424.107	67.510.252.092	(7,36)
Penerimaan Piutang Daerah	6.050.000	11.200.000	-	-	-	5,50
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**7.206.953.426**	**-**	**145.000.000**	**195.370.000**	**6.500.000.000**	**640,83**
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.206.953.426	-	145.000.000	195.370.000	6.500.000.000	640,83
PEMBIAYAAN NETTO	**140.852.823.515**	**81.292.775.828**	**86.870.167.281**	**78.913.054.107**	**61.010.252.092**	**(5,74)**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**80.121.020.201**	**87.018.447.281**	**79.108.424.107**	**68.257.413.164**	**70.626.188.972**	**(11,15)**

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Dari Tabel terlihat bahwa pada tahun 2016, 2018 dan 2019 pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalami defisit anggaran namun defisit tersebut masih dapat ditutupi oleh pembiayaan neto yang ada, sedangkan pada tahun 2017 dan 2020 realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalami surplus anggaran.

3.1.2 Analisis Neraca Daerah

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Setiap elemen utama neraca kemudian dijabarkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2016-2020 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.22
Neraca pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Rata-Rata Pertumbuhan Masing-Masing Komponen Neraca
Tahun 2016-2020 (dalam Rupiah)

Uraian	Neraca pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan rata-rata pertumbuhan (Rp)						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Aset							
Aset lancar	188,334,009,393.60	142,602,478,236.04	143,572,718,113.70	151,265,607,878.01	138,180,251,575.18	127,489,620,225.39	(6.93)
Investasi jangka panjang	141,891,762,086.34	130,611,553,053.68	129,888,005,532.37	133,527,052,217.39	137,724,864,618.04	144,318,997,739.53	0.45
Aset tetap	834,727,981,747.26	847,988,541,598.66	930,977,849,901.89	953,569,805,691.46	1,029,862,302,725.38	1,014,627,851,930.31	4.06
Aset lainnya	15,405,536,921.98	105,031,491,602.56	16,869,594,524.70	15,668,868,897.40	12,894,834,050.23	12,646,258,581.63	94.22
Jumlah aset	1,180,359,290,149.18	1,226,234,064,490.94	1,221,308,168,072.66	1,254,031,334,684.26	1,318,662,252,968.83	1,299,082,728,476.86	1.97
Kewajiban							
Kewajiban jangka pendek	5,737,892,298.00	10,332,825,032.00	17,900,041,117.43	23,648,331,227.33	21,112,214,648.24	27,064,056,024.86	40.58
Kewajiban jangka panjang	-	-	-	-	-	-	
Jumlah kewajiban	5,737,892,298.00	10,332,825,032.00	17,900,041,117.43	23,648,331,227.33	21,112,214,648.24	27,064,056,024.86	40.58
Ekuitas							
Ekuitas	1,174,621,397,851.18	1,215,901,239,458.94	1,203,408,126,955.23	1,230,383,003,456.93	1,297,550,038,320.59	1,272,018,672,452.00	1.64
Jumlah kewajiban dan ekuitas	1,180,359,290,149.18	1,226,234,064,490.94	1,221,308,168,072.66	1,254,031,334,684.26	1,318,662,252,968.83	1,299,082,728,476.86	1.97

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh Pemerintah Daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset daerah dikelompokkan menjadi (1) Aset Lancar, (2) Investasi Jangka Panjang, (3) Aset Tetap, (4) Dana Cadangan dan (5) Aset lainnya. Bila dilihat dari komponen aset, aset lancar mengalami kenaikan rata-rata sebesar (6,93)%. Aset Tetap mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4,06%. Investasi Jangka panjang mengalami pertumbuhan rata-rata 0,45 % dan Aset Lainnya mengalami pertumbuhan 94,22%.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah. Komponen kewajiban adalah kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dalam rentang waktu tahun 2016 s.d. 2020 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Tanah Datar berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 8,107%, Pendapatan Diterima Dimuka mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 168,25%, utang beban mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 28,30%, Utang Belanja mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar (4,43)% dan Utang Jangka Pendek Lainnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 4.429%. Sementara itu secara rata-rata kewajiban Pemerintah Daerah mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 40,58% setiap tahunnya.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Secara persentase, ekuitas tumbuh sebesar 1,64% pertahunnya. Ini menunjukkan bahwa nilai kekayaan bersih Pemerintah Daerah mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Selain dari perkembangan pertumbuhan Neraca sebagaimana tersebut juga dapat diperoleh informasi berkenaan rasio lancar, rasio quick, rasio total hutang terhadap aset dan rasio hutang terhadap modal selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun anggaran 2020. Rasio Lancar merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban jangka pendek. Meskipun pemerintah daerah telah membuat anggaran kas, namun pemerintah perlu ditunjang dengan analisis liquiditas. Berdasarkan perhitungan nilai rasio lancar berdasarkan Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Datar pada periode 2016 s.d 2020 cukup rendah sehingga terungkap bahwa rata-rata kemampuan pemerintah kabupaten Tanah Datar menutupi kewajiban jangka pendeknya hanya sebesar 7,89%.

Selanjutnya untuk melihat lebih akuratnya kemampuan pemerintah daerah dalam menutupi kewajiban jangka pendek dapat juga dilakukan dengan Rasio quick. Perbedaan mendasar antara rasio lancar dengan rasio quick adalah pada rasio quick telah dikurangi dengan persediaan. Berdasarkan perhitungan dan analisis terhadap rasio quick terhadap Neraca Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, kemampuan keuangan pemerintah kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan aset lancar dikurangi dengan persediaan dalam menutupi kewajiban jangka pendek dinilai cukup rendah.

Rasio selanjutnya yang dilakukan adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah kabupaten Tanah Datar dengan menggunakan asset untuk menutupi seluruh kewajiban baik jangka pendek maupun

jangka panjang yang dikenal dengan rasio solvabilitas Berdasarkan perhitungan yang dilakukan atas Neraca Kabupaten Tanah Datar tahun anggaran 2016 s.d 2020 terlihat bahwa rasio solvabilitas Kabupaten Tanah Datar terlihat relatif sangat rendah. Hal ini salah satunya karena sepanjang periode tersebut pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak memiliki kewajiban jangka panjang sehingga nilai asset kabupaten semua dipergunakan hanya untuk menutupi hutang jangka pendek yang relatif cukup kecil.

Rasio terakhir adalah rasio utang terhadap modal yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembayaran utang atau kewajibannya. Rasio ini sangat penting bagi pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman daerah dan bagi kreditor selaku yang akan memberikan pinjaman kepada Pemerintah Daerah. Salah satu rasio utang yang dilakukan adalah jumlah kewajiban dibandingkan dengan jumlah ekuitas pemerintah daerah. Berdasarkan perhitungan dan analisis atas Neraca Kabupaten Tanah Datar terhadap rasio utang tersebut terlihat Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempunyai utang atau kewajiban yang sangat kecil jika dibandingkan dengan ekuitas atau kekayaan Pemerintah Daerah.

Untuk semua jenis rasio yang telah diuraikan tersebut diatas dapat kita lihat hasil perhitungannya padal 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.23
Perhitungan Rasio Keuangan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Perhitungan Rasio Keuangan (%)					
		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata
1.	Rasio Lancar	13.80	8.02	6.40	6.55	4.71	7,89
2.	Rasio Quick	9.29	5.56	4.28	3.99	3.18	5,26
3.	Rasio Total Hutang Terhadap Aset *(laverage ratio)*	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0,02
4.	Rasio Hutang Terhadap Modal	0.01	0.01	0.02	0.02	0.02	0,02

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Kebijakan Pendapatan Daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran;
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan/atau dikurangi dengan bagi hasil;
3. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan daerah disesuaikan dengan kewenangannya, struktur pendapatan daerah dan asal sumber penerimaannya dapat dibagi berdasarkan 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan hasil penerimaan dari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam rangka membiayai urusan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :
   a) Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan. Dengan ekstensifikasi dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif tapi belum terdaftar, memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan secara intensifikasi dilakukan dengan cara melakukan pembenahan manajemen data penerimaan terkait PAD, melakukan evaluasi dan revisi peraturan terkait pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan;
   b) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, SKPD Penghasil, Kecamatan serta Nagari;
   c) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
   d) Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah;
   e) Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah yang berpotensi menghasilkan PAD;
   f) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia terkait pengelolaan pendapatan asli daerah.
2. Pendapatan Transfer merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan transfer dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Daerah lainnya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari Pendapatan Transfer adalah sebagai berikut:
   a) Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), dan PPh Pasal 21;
   b) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam pendapatan transfer;
   c) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam pelaksanaan pendapatan transfer.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari pendapatan hibah, dana darurat, lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan dengan secara efektif, efisien dan ekonomis;
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
4. Pemenuhan belanja pegawai dan mengantisipasi kenaikan gaji PNS;
5. Mengalokasikan anggaran secara proporsional untuk pemenuhan prioritas pembangunan yang tersebar pada urusan wajib dan urusan pilihan;
6. Pemecahan terhadap masalah mendesak antara lain penanganan bencana alam dan bencana sosial;
7. Mempercepat capaian target-target program dan kegiatan yang merupakan agenda nasional.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah : Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal BUMD.
2. Penyertaan modal untuk penguatan struktur permodalan Perusahaan Daerah PDAM yang bersumber dari pemanfaatan laba bersih dalam rangka penambahan, peningkatan, perluasan sarana, prasarana serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.

Kebijakan pengelolaan keuangan di masa lalu diarahkan pada upaya meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan Keuangan Daerah

pada bantuan Pemerintah Pusat. Hal ini dapat terlihat dari data yang ditampilkan pada bagian kinerja keuangan masa lalu di atas, dimana dalam kurun waktu lima tahun terakhir, terjadi peningkatan proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Terkait dengan kebijakan terkait dengan pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tanah Datar, berikut disajikan dalam tabel 3.16 proporsi belanja aparatur terhadap total belanja daerah.

Tabel 3.24
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur	Total Pengeluaran (Belanja +Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase
		(a)	(b)	(a)/(b)x100%
1	2016	737.820.045.502,00	1.256.702.551.999,46	58,71
2	2017	659.535.085.065,00	1.218.833.756.256,58	54,11
3	2018	629.874.981.059,00	1.238.242.675.117,05	50,87
4	2019	671.170.572.259,00	1.350.558.239.491,00	49,70
5	2020	616.409.189.487,00	1.191.702.602.007,80	51,73

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Berikut realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020.

Tabel 3.25
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
A	**Belanja Tidak Langsung**	**656.120.327.821,00**	**558.726.785.886,00**	**540.892.292.071,00**	**584.311.273.159,00**	**557.562.167.152,00**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	605.703.911.401,00	508.293.891.088,00	486.727.813.959,00	571.246.002.512,00	484.080.487.658,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan	47.287.882.415,00	43.027.840.398,00	42.541.726.511,00	-	62.334.592.515,00
3	Belanja Penerimaan Anggota dan Pimpinan DPRD serta Operasional KDH/WKDH	2.262.400.570,00	5.450.035.950,00	10.393.350.800,00	12.796.214.856,00	10.402.894.312,00
4	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	866.133.435,00	1.955.018.450,00	1.229.400.801,00	269.055.791,00	744.192.667,00
B	**Belanja Langsung**	**81.675.402.589,00**	**78.167.527.475,00**	**76.884.922.961,00**	**73.924.292.511,00**	**54.815.117.173,00**
1	Belanja Honorarium PNS	16.201.543.322,00	10.811.069.750,00	7.961.497.500,00	1.376.176.000,00	2.244.325.000,00
2	Belanja Uang Lembur	2.448.781.900,00	2.158.194.150,00	2.350.762.760,00	2.654.083.000,00	2.167.314.700,00
3	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	18.000.000,00	35.325.000,00	183.225.000,00	550.624.970,00	39.000.000,00
4	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	385.116.305,00	2.801.675.800,00	2.821.176.698,00	4.787.528.500,00	244.952.000,00
5	Belanja premi asuransi kesehatan	13.417.221.835,00	10.037.006.443,00	11.154.296.491,00	10.906.480.154,00	14.973.979.610,00
6	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	527.920.000,00	531.832.750,00	492.489.482,00	541.077.500,00	416.836.000,00
7	Belanja Perjalanan Dinas	48.676.819.227,00	51.792.423.582,00	51.921.475.030,00	53.108.322.387,00	34.728.709.863,00

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
8	Belanja Modal(Kantor,Mobil Dinas,Meubelair,Peralatan dan Perlengkapan dll)	24.315.092,00	22.640.771.704,00	12.097.766.027,00	12.935.006.589,00	4.031.905.162,00
		737.820.045.502,00	**659.535.085.065,00**	**629.874.981.059,00**	**671.170.572.259,00**	**616.409.189.487,00**

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Dari tabel belanja pemenuhan kebutuhan aparatur diatas, belanja terbesar adalah komponen belanja atas gaji dan tunjangan pegawai dan yang terendah adalah belanja beasiswa pendidikan PNS. Proposi belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan aparatur masih tinggi di Kabupaten Tanah Datar yakni tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 58,71% dan terendah pada tahun 2019 sebesar 49,70%. Masih besarnya porsi belanja dalam rangka pemenuhan kebutuhan belanja, maka diperlukan upaya-upaya kebijakan dalam meningkatkan efisiensi belanja dengan senantiasa memperhatikan keefektifan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah.

Terkait dengan defisit riil pada tahun 2016-2020, dilakukan analisis untuk memberikan gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Berikut disajikan terkait dengan penutup defisit riil Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020

Tabel 3.26
Penutup Defisit Riil Kabupaten Tanah Datar 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.188.763.795.259,84	1.224.559.427.709,56	1.230.335.931.942,65	1.339.707.228.547,89	1.194.818.538.888,03
	dikurangi realisasi					
2.	Belanja Daerah	1.249.495.598.573,46	1.218.833.756.256,58	1.238.097.675.117,05	1.350.362.869.491,00	1.185.202.602.007,80
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.206.953.426,00	-	145.000.000,00	195.370.000,00	6.500.000.000,00
A.	Defisit Riil	(67.938.756.739,62)	5.725.671.452,98	(7.906.743.174,40)	(10.851.010.943,11)	3.115.936.880,23
	ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	148.053.726.940,85	81.281.575.828,23	87.015.167.281,21	79.108.424.106,81	67.510.252.092,70
5	Pencairan Dana Cadangan	-				
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan	-				
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	-				
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-				
9	Penerimaan Piutang Daerah	6.050.000,00	11.200.000,00	-	-	-
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	148.059.776.940,85	81.292.775.828,23	87.015.167.281,21	79.108.424.106,81	67.510.252.092,70
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan	80.121.020.201,23	87.018.447.281,21	79.108.424.106,81	68.257.413.163,70	70.626.188.972,93

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Pada tahun 2017 dan 2020 Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengalami surplus. Defisit terjadi pada tahun 2016, 2018, 2019. Dari tabel diatas terlihat bahwa defisit riil Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ditutup dari dana yang bersumber dari SiLPA. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) merupakan komponen utama dan terbesar dalam menutup defisit anggaran serta jumlah terbesar dibanding sumber pembiayaan lainnya. Analisa SiLPA dilakukan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD periode sebelumnya yang lebih rasional dan terukur.

Berikut disajikan dalam tabel gambaran masa lalu terkait dengan komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tahun 2016-2020.

Tabel 3.27
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA	Rp	% dari SILPA
1	Jumlah SILPA	80,121,020,201.23		87,018,447,281.21		79,108,424,106.81		68,257,413,163.70		70.626.188.972,93	
2	Pelampauan penerimaan PAD	80,121,020,201.23		86,047,518,466.21		79,108,424,106.81		68,257,413,163.70		70.626.188.972,93	
3	Pelampuan penerimaan dana perimbangan					-		-			
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah					-		-			
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya			970,928,815.00		-		-			
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan					-		-			
7	Kegiatan Lanjutan					-		-			

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar (data diolah)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) adalah selisih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan nol, artinya bahwa penerimaan pembiayaan harus dapat menutup defisit anggaran yang terjadi. Jika terdapat saldo SILPA positif ini dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk menunjang program- program pembangunan di daerah.

3.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026

Dalam menetapkan perencanaan program pembangunan daerah sertai dengan adanya kerangka pendanaan. Kerangka pendanaan atau proyeksi merupakan kemampuan penerimaan daerah baik dari sisi pendapatan daerah maupun dari penerimaan pembiayaan daerah serta proyeksi pengeluaran daerah. Proyeksi merupakan pagu indikatif yang dalam pelaksanaannya kedepan akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan pendekatan yang sebenarnya. Adapun proyeksi tersebut diatas dengan melakukan analisis dari pertumbuhan realisasi APBD 5 (lima) tahun sebelumnya. Mengingat Proyeksi dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi sehingga proyeksi penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah sudah memperhitungkan untuk proyeksi sampai pada perubahan APBD. Selain itu juga berpengaruh terhadap Pemilihan Langsung Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2020 yang pelantikannya dilaksanakan pada bulan Februari tahun 2021.

Dalam melakukan proyeksi pendapatan dan Belanja Daerah postur APBD terutama pada struktur Belanja Daerah sangat berbeda dibandingkan dengan postur APBD pada masa lalu. Postur APBD yang digunakan dalam melakukan Proyeksi APBD telah menggunakan struktur APBD sesuai yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan dari sisi Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak terduga serta Belanja Transfer.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah dapat dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat memengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah. antara lain:

a. Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu;
b. Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain);
c. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
d. Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

Atau jika digambarkan dalam memproyeksi pendapatan daerah dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3.1
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah

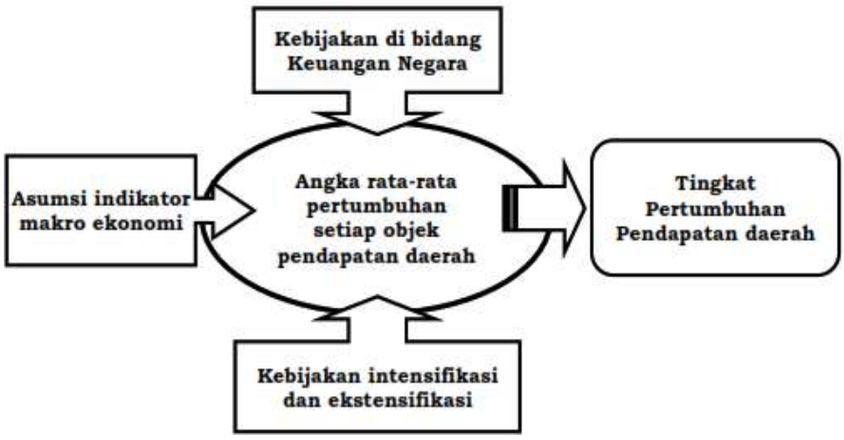

Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sumber yakni pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir tahun 2016 hingga 2020, kemudian proyeksi menggunakan data dasar keuangan APBD Tahun 2021 serta identifikasi potensi pajak dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar tidak terpaut jauh dengan pendanaan indikatif tahun yang terdekat, proyeksi pendapatan daerah secara keseluruhan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.28
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar 2021-2026

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	**PENDAPATAN**	**1,300,353,565,000.00**	**1,338,137,457,000.00**	**1,390,215,212,000.00**	**1,444,580,699,000.00**	**1,501,358,808,000.00**	**1,560,683,384,000.00**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**130,569,004,768.00**	**127,124,405,000.00**	**136,510,592,000.00**	**146,668,703,000.00**	**157,668,922,000.00**	**169,588,329,000.00**
1.1.1.	Pajak daerah	20,344,177,000.00	20,344,177,000.00	22,714,274,000.00	25,360,487,000.00	28,314,984,000.00	31,613,680,000.00
1.1.2.	Retribusi daerah	8,980,807,860.00	9,878,889,000.00	10,866,778,000.00	11,953,456,000.00	13,148,802,000.00	14,463,682,000.00
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	22,086,877,920.00	13,295,566,000.00	14,625,123,000.00	16,087,635,000.00	17,696,399,000.00	19,466,039,000.00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	79,157,141,988.00	83,605,773,000.00	88,304,417,000.00	93,267,125,000.00	98,508,737,000.00	104,044,928,000.40
1.2.	**PENDAPATAN TRANSER**	**1,124,603,860,158.00**	**1,164,358,631,000.00**	**1,205,520,436,000.00**	**1,248,139,143,000.00**	**1,292,266,390,000.00**	**1,337,955,671,000.00**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,079,972,799,000.00	1,117,879,844,000.00	1,157,117,427,000.00	1,197,732,249,000.00	1,239,772,651,000.00	1,283,288,671,000.00
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	44,631,061,158.00	46,478,787,000.00	48,403,009,000.00	50,406,894,000.00	52,493,739,000.00	54,666,980,000.00
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**45,180,700,000.00**	**46,654,421,000.00**	**48,184,184,000.00**	**49,772,853,000.00**	**51,423,496,000.00**	53,115,404,000.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	1,690,000,000.00	1,859,000,000.00	2,044,900,000.00	2,249,390,000.00	2,474,329,000.00	2,721,762,000.00
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	43,490,700,000.00	44,795,421,000.00	46,139,284,000.00	47,523,463,000.00	48,949,167,000.00	50,417,642,000.00

Sumber : (data diolah)

Tabel 3.29
Proyeksi Proporsi dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2026

No	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Proporsi	Pertumbuhan	Proporsi	Pertumbuhan	Proporsi	Pertumbuhan	Proporsi	Pertumbuhan	Proporsi	Pertumbuhan	Proporsi	Pertumbuhan
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1	**PENDAPATAN**		**8,85**		**2,91**		**3,89**		**3,91**		**3,93**		**3,95**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**10,04**	**6,82**	**9,50**	**(2,64)**	**9,82**	**7,38**	**10,15**	**7,44**	**10,50**	**7,50**	**10,87**	**7,56**
1.1.1	Pajak daerah	**15,58**	14,35	**16,00**	-	16,64	11,65	17,29	11,65	17,96	11,65	18,64	11,65
1.1.2	Retribusi daerah	**6,88**	63,34	**7,77**	10,00	7,96	10,00	8,15	10,00	8,34	10,00	8,53	10,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	**16,92**	14,39	**10,46**	(39,80)	10,71	10,00	10,97	10,00	11,22	10,00	11,48	10,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	**60,62**	(0,59)	**65,77**	5,62	64,69	5,62	63,59	5,62	62,48	5,62	61,35	5,62
1.2.	**PENDAPATAN TRANSER**	**86,48**	9,60	**87,01**	3,54	**86,71**	**3,54**	**86,40**	**3,54**	**86,07**	**3,54**	**85,73**	**3,54**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**96,03**	9,88	**96,01**	3,51	95,98	3,51	95,96	3,51	95,94	3,51	95,91	3,51
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	**3,97**	3,24	**3,99**	4,14	4,02	4,14	4,04	4,14	4,06	4,14	4,09	4,14
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**3,49**	**3,26**	**3,49**	**3,26**	**3,47**	**3,28**	**3,45**	**3,30**	**3,43**	**3,32**	**3,40**	**3,34**
1.3.1	Pendapatan Hibah	**3,74**	(96,35)	**3,98**	10,00	4,24	10,00	4,52	10,00	4,81	10,00	5,12	10,00
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	**96,26**	-	**96,02**	3,00	95,76	3,00	95,48	3,00	95,19	3,00	94,88	3,00

Sumber : (data diolah)

Dari tabel diatas terlihat bahwa total pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 direncanakan terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2022 ditargetkan jumlah pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp.1.338.137.457.000,- dan pada tahun berikutnya diproyeksikan naik rata-rata sebesar 3,72% dengan memperhatikan potensi penerimaan pendapatan daerah. Pada tahun 2026 ditargetkan pendapatan daerah Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp.1.560.683.384.000,- atau naik 17% dibanding tahun 2022. Berikut perbandingan proyeksi pertumbuhan pendapatan tahun 2021-2026 yang disajikan pada grafik 3.11 berikut ini:

Grafik 3.11
proyeksi pertumbuhan pendapatan tahun 2021-2026

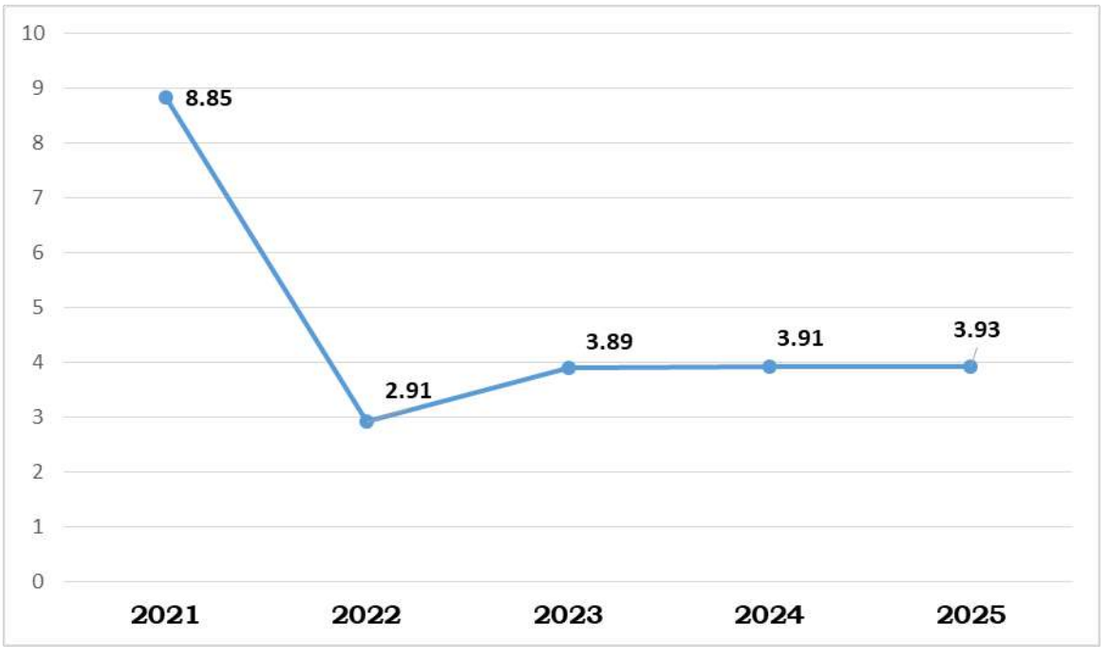

Berikut analisis proyeksi dan kontribusi/proporsi masing-masing komponen Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2021-2026 direncanakan bersumber dari 4 (empat) sumber PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah, disajikan proyeksi PAD Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 sebagaimana terlihat pada tabel 3.20.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2022-2026 ditargetkan mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan persentase berfluktuatif dengan memperhatikan potensi sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar. Ditargetkan pada tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar berhasil mencapai angka sebesar Rp.127.124.405.000,-. Proyeksi PAD pada tahun 2022 tidak terlepas dari kondisi pada tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 pandemi covid-19 diasumsikan masih terjadi di Kabupaten Tanah Datar dengan kecenderungan pandemi covid-19 sudah bisa dikendalikan sehingga pada tahun 2022 program pemulihan ekonomi daerah sudah terlaksana dengan maksimal. Pada tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp.169.588.329.000,- atau naik sebesar 33,40% dibanding tahun 2022. Rata-rata kenaikan PAD sebesar 4,92%. Porsi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata sebesar 1,66%. Hal ini menunjukkan

komitmen Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kemandirian keuangannya.

Jika ditinjau dari proporsi sumber PAD, Sektor Lain-lain PAD dan Pajak daerah masih menjadi andalan utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam penerimaan PAD tahun 2021-2026. Proporsi Lain-lain PAD terhadap total PAD rata-rata per tahun sebesar 63,57%, disusul oleh Pajak Daerah rata-rata sebesar 17,31%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan 10,97% dan terakhir Retribusi daerah berkontribusi rata-rata sebesar 8,15%.

b. Pendapatan Transfer

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya dan Bantuan Keuangan. Pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Transfer pada tahun 2021-2026 diproyeksikan meningkat setiap tahunnya seiring dengan semakin meningkatkan perekonomian daerah dan nasional serta perkiraan kenaikan kesejahteraan bagi pegawai.

Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat masih memiliki kontribusi terbesar sebagai sumber pendapatan. Walaupun secara nilai besarnya pendapatan transfer mengalami kenaikan, namun secara proporsi ditargetkan turun setiap tahunnya dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian keuangan kabupaten Tanah Datar.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari pendapatan hibah dan dana darurat. Lain-lain pendapatan daerah juga diproyeksikan meningkat setiap tahunnnya. Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp.46.654.421.000,- dan pada tahun 2026 naik sebesar Rp. 53.115.404.000,- atau rata-rata per tahun naik sebesar 3,90%. Pertumbuhan terbesar nantinya diharapkan bersumber dari pendapatan hibah.

3.3.2 Proyeksi Belanja Daerah

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 belanja daerah terdiri atas Belanja Operasi, Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Dalam memproyeksikan belanja daerah diperhatikan asumsi indikator makro ekonomi, tingkat pertumbuhan pengeluran wajib dan mengikat serta prioritas utama, kebijakan pemerintah Kabupaten Tanah Datar terkait belanja dan kebijakan pembiayaan. Kerangka pemikiran tersebut dalam analisis proyeksi belanja daerah disajikan dalam gambar berikut ini.

Gambar 3.2
Kerangka Pemikiran Proyeksi Belanja Daerah

Dalam melakukan proyeksi belanja daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026, dilakukan perhitungan terlebih dahulu terhadap belanja dan pengeluaran pembiayaan yang bersifat wajib dan mengikat.

Dari sisi Belanja Daerah di proyeksi berdasarkan pertimbangan realisasi masa lalu dan diselaraskan dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah. Sehingga diharapkan seiring dengan pemulihan ekonomi nasional Belanja daerah pada tahun 2021 s.d tahun 2026 akan tumbuh rata-rata 3,55%. Sehingga bila pada tahun anggaran 2021 jumlah Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 1.348.802.297.000 maka pada tahun 2026 di prediksi telah mencapai Rp. 1.605.485.382.000.

Kelompok Belanja operasi diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata 0,38%. Bila pada tahun anggaran 2021 jumlah belanja operasi adalah sebesar Rp. 1.076.210.254.000 maka pada tahun anggaran 2026 diperkirakan jumlah belanja operasi adalah sebesar Rp. 1.109.458.953.000. Pertumbuhan atas Belanja Operasi salah satunya adalah untuk menganggarkan pengeluaran yang sifatnya wajib dan mengikat. Selain itu dalam kurun waktu tersebut di proyeksikan akan ada penambahan Aparatur Sipil Negara berupa Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Belanja Modal yang merupakan sebagai mandatory spending untuk pembangunan infrastruktur juga mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 20,09%. Pada tahun anggaran 2021 anggaran belanja modal adalah sebesar Rp.170.030.885.000 dan pada tahun anggaran 2026 diprediksi menjadi sebesar Rp. 379.207.877.000. Belanja Modal terbesar dialokasikan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan. Ini diperlukan dalam rangka perbaikan jalan-jalan yang rusak, perbaikan irigasi yang ada di Kabupaten Tanah Datar

Untuk belanja Tidak Terduga diprediksi tidak mengalami pertumbuhan hal ini mempertimbangkan realisasi belanja tidak terduga periode sebelumnya. Pada tahun anggaran 2021 sampai tahun anggaran 2016 belanja tak terduga direncanakan sebesar Rp. 10.000.000.

Selanjutnya Belanja transfer mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 2,25%. Pada tahun anggaran 2021 Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp.93.105.187.000 dan diperkirakan pada tahun anggaran 2026 menjadi Rp.106.818.552.000. Untuk pertumbuhan Belanja Transfer seiring dengan proyeksi peningkatan pendapatan daerah dari transfer maupun dari Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang harus dibagihasilkan kepada Pemerintah Nagari. Berikut Tabel Proyeksi Belanja Daerah Kabupeten Tanah Datar Tahun 2021-2026.

Tabel 3.30
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026

No	Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)
2	**BELANJA**	**1,348,802,297,000.00**	**1,381,265,911,000.00**	**1,435,133,410,000.00**	**1,491,951,106,000.00**	**1,550,527,618,000.00**	**1,605.485.382,000.00**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1,076,210,254,000.00**	**1,039,714,357,000.00**	**1,056,556,041,000.00**	**1,073,781,211,000.00**	**1,091,408,705,000.00**	1,109,458,953,000.00
2.1.1	Belanja Pegawai	656,827,524,000.00	666,679,937,000.00	676,680,136,000.00	686,830,338,000.00	697,132,793,000.00	707,589,785,000.00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400,211,157,000.00	353,463,268,570.00	358,765,218,000.00	364,146,696,000.00	369,608,896,000.00	375,153,029,000.00
2.1.3	Belanja Hibah	13,995,783,000.00	15,395,361,000.00	16,934,897,000.00	18,628,387,000.00	20,491,226,000.00	22,540,349,000.00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5,175,790,000.00	4,175,790,000.00	4,175,790,000.00	4,175,790,000.00	4,175,790,000.00	4,175,790,000.00
2.2	**BELANJA MODAL**	**170,030,885,000.00**	**238,574,320,000.00**	**272,805,056,000.00**	**309,478,532,000.00**	**347,377,281,000.00**	**379,207,877,000.00**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	835,845,000.00	1,779,598,000.00	3,788,942,000.00	8,067,036,000.00	17,175,526,000.00	36,568,412,000.00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27,860,108,090.00	29,810,316,000.00	31,897,038,000.00	34,129,831,000.00	36,518,919,000.00	39,075,243,000.00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73,281,855,215.00	78,521,508,000.00	84,135,796,000.00	90,151,505,000.00	96,597,338,000.00	103,504,048,000.00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	64,965,322,088.00	125,066,368,000.00	149,247,097,000.00	173,020,359,000.00	192,564,717,000.00	195,087,315,000.70
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,087,754,700.00	3,396,530,000.00	3,736,183,000.00	4,109,801,000.00	4,520,781,100.00	4,972,859,000.00
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**9,455,971,000.00**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**
3	**BELANJA TRANSFER**	**93,105,187,000.00**	**92,977,234,000.00**	**95,772,313,000.00**	**98,691,363,000.00**	**101,741,632,000.00**	**106,818,552,000.00**
3.1	Belanja Bagi Hasil	3,521,254,000.00	3,635,437,000.00	3,996,619,000.00	4,396,342,000.00	4,838,856,000.00	5,070,637,000.00
3.2	Belanja Bantuan Keuangan	89,583,933,000.00	89,341,797,000.00	91,775,694,000.00	94,295,021,000.00	96,902,776,000.00	101,747,914,000.00
	Surplus (defisit)	**(48,448,732,000.00)**	**(43,128,454,000.00)**	**(44,918,198,000.00)**	**(47,370,407,000.00)**	**(49,168,810,000.00)**	**(44,801,998,000.50)**

Sumber : (data diolah)

Tabel 3.31
Proyeksi Pertumbuhan dan Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
		Proporsi	Pertumbuhan	Proporsi	Pertumbuhan	Proporsi	Pertumbuhan	Proporsi	Pertumbuhan	Proporsi	Pertumbuhan	Proporsi	Pertumbuhan
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
2	**BELANJA**		**13,80**		**2,41**		**3,90**		**3,96**		**3,93**		**3,54**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**79,79**	19,85	**75,27**	(3,39)	**73,62**	**1,62**	**71,97**	**1,63**	**70,39**	1,64	**69,10**	**1,65**
2.1.1	Belanja Pegawai	61,03	14,02	64,12	1,50	64,05	1,50	63,96	1,50	63,87	1,50	63,78	1,50
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	37,19	52,75	34,00	(11,68)	33,96	1,50	33,91	1,50	33,87	1,50	33,81	1,50
2.1.3	Belanja Hibah	1,30	(75,04)	1,48	10,00	1,60	10,00	1,73	10,00	1,88	10,00	2,03	10,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	0,48	35,75	0,40	(19,32)	0,40	-	0,39	-	0,38	-	0,38	-
2.2	**BELANJA MODAL**	**12,61**	**57,75**	**17,27**	**40,31**	**19,01**	**14,35**	**20,74**	**13,44**	**22,40**	**12,25**	**23,62**	**9,16**
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**0,70**	**(77,43)**	**0,72**	**5,75**	**0,70**	**-**	**0,67**	**-**	**0,64**	-	**0,62**	**-**
3	**BELANJA TRANSFER**	**6,90**	**(32,33)**	**6,73**	**(0,14)**	**6,67**	**3,01**	**6,61**	**3,05**	**6,56**	**3,09**	**6,65**	**4,99**
3.1	Belanja Bagi Hasil	3,78	31,29	3,91	3,24	4,17	9,94	4,45	10,00	4,76	10,07	4,75	4,79
3.2	Belanja Bantuan Keuangan	96,22	(33,59)	96,09	(0,27)	95,83	2,72	95,55	2,75	95,24	2,77	95,25	5,00

Sumber : (data diolah)

Grafik 3.12
Proyeksi Pertumbuhan Belanja
Tahun 2022-2026

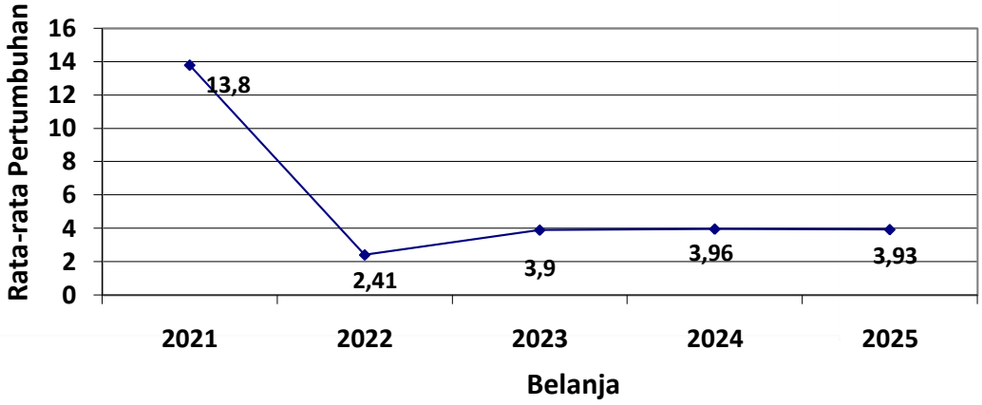

3.3.3 Proyeksi Defisit dan Pembiayaan

Analisis atas proyeksi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sisa lebih riil perhitungan anggaran (SILPA). Analisis ini dilakukan berdasarkan data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya SILPA dimasa mendatang. Adapun data dan informasi yang dapat mempengaruhi besarnya SILPA di masa mendatang digambarkan sebagai berikut.

Gambar III.3.3
Analisa Proyeksi Pembiayaan Daerah

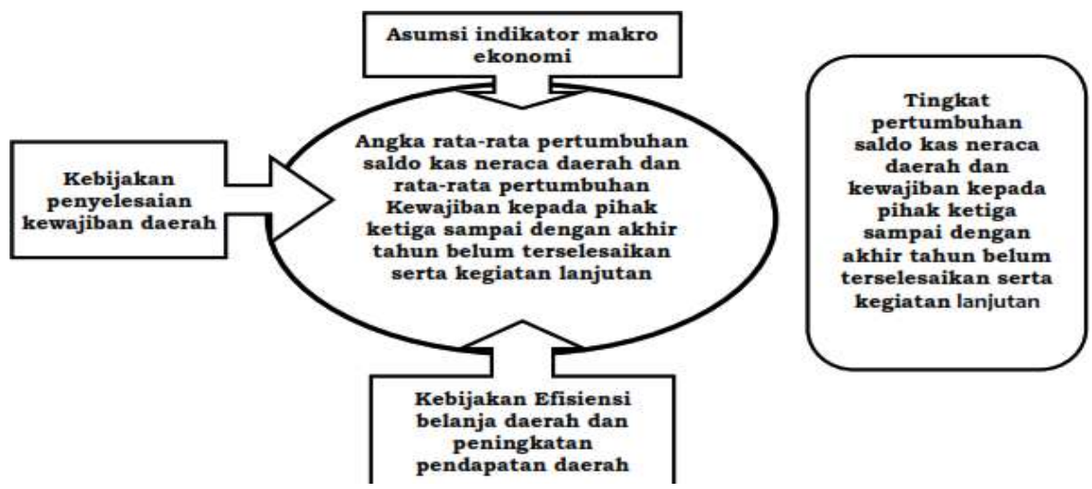

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan

dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pada proyeksi tahun 2021-2026 anggaran diproyeksikan defisit yakni pendapatan daerah lebih kecil dari belanja daerah. Defisit yang terjadi ditutupi bersumber dari SiLPA tahun berkenaan. Selain itu dalam pembiayaan juga dilakukan penyertaan modal untuk perusahaan daerah ataupun rencana investasi penyertaan modal lainnya. Berikut disajikan proyeksi defisit dan pembiayaan Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026.

Tabel 3.32
Proyeksi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022-2026

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**48,448,732,000.00**	**53,128,454,000.00**	**54,918,198,000.00**	**57,370,407,000.00**	**59,168,810,000.00**	**60,436,447,000.00**
3.1.1	Penggunaan SiLPA	48,448,732,000.00	53,128,454,000.00	54,918,198,000.00	57,370,407,000.00	59,168,810,000.00	60,436,447,000.00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
31.3.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-			-	-	
3.2	**PENGELUARAN PEM BIAYAAN**	**-**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
3.2.3	Pembayaran pokok Utang				-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	**48,448,732,000.00**	**43,128,454,000.00**	**44,918,198,000.00**	**47,370,407,000.00**	**49,168,810,000.00**	**50,436,447,000.00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : (data diolah)

Tabel 3.33
Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2021-2026

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	**PENDAPATAN**	**1.300.353.565.000,00**	**1.338.137.457.000,00**	**1.390.215.212.000,00**	**1.444.580.699.000,00**	**1.501.358.808.000,00**	**1.560.683.384.000,00**
1.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**130.569.004.768,00**	**127.124.405.000,00**	**136.510.592.000,00**	**146.668.703.000,00**	**157.668.922.000,00**	**169.588.329.000,00**
1.1.1.	Pajak daerah	20.344.177.000,00	20.344.177.000,00	22.714.274.000,00	25.360.487.000,00	28.314.984.000,00	31.613.680.000,00
1.1.2.	Retribusi daerah	8.980.807.860,00	9.878.889.000,00	10.866.778.000,00	11.953.456.000,00	13.148.802.000,00	14.463.682.000,00
1.1.3.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	22.086.877.920,00	13.295.566.000,00	14.625.123.000,00	16.087.635.000,00	17.696.399.000,00	19.466.039.000,00
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	79.157.141.988,00	83.605.773.000,00	88.304.417.000,00	93.267.125.000,00	98.508.737.000,00	104.044.928.000,00
1.2.	**PENDAPATAN TRANSER**	**1.124.603.860.158,00**	**1.164.358.631.000,00**	**1.205.520.436.000,00**	**1.248.139.143.000,00**	**1.292.266.390.000,00**	**1.337.955.651.000,00**
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.079.972.799.000,00	1.117.879.844.000,00	1.157.117.427.000,00	1.197.732.249.000,00	1.239.772.651.000,00	1.283.288.671.000,00
1.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah-Lainnya	44.631.061.158,00	46.478.787.000,00	48.403.009.000,00	50.406.894.000,00	52.493.739.000,00	54.666.980.000,00
1.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**45.180.700.000,00**	**46.654.421.000,00**	**48.184.184.000,00**	**49.772.853.000,00**	**51.423.496.000,00**	**53.139.404.000,00**
1.3.1	Pendapatan Hibah	1.690.000.000,00	1.859.000.000,00	2.044.900.000,00	2.249.390.000,00	2.474.329.000,00	2.721.762.000,00
1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan	43.490.700.000,00	44.795.421.000,00	46.139.284.000,00	47.523.463.000,00	48.949.167.000,00	50.417.642.000,00
2	**BELANJA**	**1.348.802.297.000,00**	**1.381.265.911.000,00**	**1.435.133.410.000,00**	**1.491.951.106.000,00**	**1.550.527.618.000,00**	**1.605.485.382.000,00**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1.076.210.254.000,00**	**1.039.714.357.000,00**	**1.056.556.041.000,00**	**1.073.781.211.000,00**	**1.091.408.705.000,00**	**1.109.458.953.000,00**

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.1.1	Belanja Pegawai	656.827.524.000,00	666.679.937.000,00	676.680.136.000,00	686.830.338.000,00	697.132.793.000,00	707.589.785.000,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400.211.157.000,00	353.463.268.570,00	358.765.218.000,00	364.146.696.000,00	369.608.896.000,00	375.153.029.000,00
2.1.3	Belanja Hibah	13.995.783.000,00	15.395.361.000,00	16.934.897.000,00	18.628.387.000,00	20.491.226.000,00	22.540.349.000,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5.175.790.000,00	4.175.790.000,00	4.175.790.000,00	4.175.790.000,00	4.175.790.000,00	4.175.790.000,00
2.2	**BELANJA MODAL**	**170.030.885.000,00**	**238.574.320.000,00**	**272.805.056.000,00**	**309.478.532.000,00**	**347.377.281.000,00**	**379.207.877.000,00**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	835.845.000,00	1.779.598.000,00	3.788.942.000,00	8.067.036.000,00	17.175.526.000,00	36.568.412.000,00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.860.108.090,00	29.810.316.000,00	31.897.038.000,00	34.129.831.000,00	36.518.919.000,00	39.075.243.000,00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73.281.855.215,00	78.521.508.000,00	84.135.796.000,00	90.151.505.000,00	96.597.338.000,00	103.504.048.000,00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	64.965.322.088,00	125.066.368.000,00	149.247.097.000,00	173.020.359.000,00	192.564.717.000,00	195.087.315.000,00
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.087.754.700,00	3.396.530.000,00	3.736.183.000,00	4.109.801.000,00	4.520.781.100,00	4.972.859.000,00
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**9.455.971.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
					-	-	
3	**BELANJA TRANSFER**	**93.105.187.000,00**	**92.977.234.000,00**	**95.772.313.000,00**	**98.691.363.000,00**	**101.741.632.000,00**	**106.818.552.000,00**
3.1	Belanja Bagi Hasil	3.521.254.000,00	3.635.437.000,00	3.996.619.000,00	4.396.342.000,00	4.838.856.000,00	5.070.637.000,00
3.2	Belanja Bantuan Keuangan	89.583.933.000,00	89.341.797.000,00	91.775.694.000,00	94.295.021.000,00	96.902.776.000,00	101.747.915.000,00
	Surplus (defisit)	(48.448.732.000,00)	(43.128.454.000,00)	(44.918.198.000,00)	(47.370.407.000,00)	(49.168.810.000,00)	(44.801.998.000,00)
3	**PEMBIAYAAN**						
3.1	**PENERIMAAN**	**48.448.732.000,00**	**53.128.454.000,00**	**54.918.198.000,00**	**57.370.407.000,00**	**59.168.810.000,00**	**60.436.447.000,00**

No.	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
	PEMBIAYAAN						
3.1.1	Penggunaan SiLPA	48.448.732.000,00	53.128.454.000,00	54.918.198.000,00	57.370.407.000,00	59.168.810.000,00	60.436.447.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
31.3.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-			-	-	
3.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**-**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**	**10.000.000.000,00**
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				-	-	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok Utang				-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	**48.448.732.000,00**	**43.128.454.000,00**	**44.918.198.000,00**	**47.370.407.000,00**	**49.168.810.000,00**	**50.436.447.000,00**
					-	-	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Sumber : (data diolah)

3.4 Kapasitas Riil Keuangan Daerah

Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Dengan hal ini proyeksi kapasitas riil keuangan daerah dilakukan dengan total penerimaan (proyeksi) dikurangi dengan belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan. Sementara yang termasuk pengeluaran pembiayaan yang bersifat mengikat adalah dalam rangka pembayaran pokok pinjaman. Mengingat Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak mempunyai hutang, sehingga dalam pengukuran kapasitas rill, pendapatan daerah ditambah dengan penerimaan pembiayaan daerah dikurangi dengan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta yang menjadi prioritas utama. Kapasitas riil Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel 3.26

Pada tabel 3.26 terlihat bahwa pada tahun anggaran 2021-2026 belanja wajib dan mengikat serta prioritas utama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun untuk pengeluaran pembiayaan diproyeksikan tetap. Untuk kapasitas rill mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun kedepan, hal ini akan lebih memberikan peluang yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah.

Tabel 3.34
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026

NO	URAIAN		PROYEKSI				
		Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Pendapatan	1,300,353,565,000.00	1,338,137,457,000.00	1,390,215,212,000.00	1,444,580,699,000.00	1,501,358,808,000.00	1,560,683.384.000,00
2	Pencairan dana cadangan (sesuai perda)		-	-	-	-	-
3	Sisa lebih riil Perhitungan Anggaran	48,448,732,000	53,128,454,000.00	54,918,198,000.00	57,370,407,000.00	59,168,810,000.00	60,436.447,000.00
	Total Penerimaan	**1,348,802,297,000.00**	**1,391,265,911,000.00**	**1,445,133,410,000.00**	**1,501,951,106,000.00**	**1,560,527,618,000.00**	**1,621,119.831.000.00**
	Dikurangi						
4	Belanja wajib dan mengikat serta yang menjadi prioritas utama	849,741,052,764.00	870,512,998,226.38	892,416,109,463.94	915,023,239,179.89	938,365,034,059.88	962,474,116,497.88
5	Pengeluaran Pembiayaan	-	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	499,061,244,236.00	510,752,912,773.62	542,717,300,536.06	576,927,866,820.11	612,162,583,940.12	648.645.714.502,12

Sumber : (data diolah) 2021

Tabel 3.35
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Tanah Datar

NO	URAIAN	Tahun 2021	PROYEKSI				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	499.061.244.236,00	510.752.912.773,62	542.717.300.536,06	576.927.866.820,11	612.162.583.940,12	648.645.714.502,12
2	Prioritas I	474.169.566.150,00	497.878.044.457,50	522.771.946.680,38	548.910.544.014,39	576.356.071.215,11	605.173.874.775,87
3	Prioritas II	24.891.678.086,00	12.874.868.316,12	19.945.353.855,69	28.017.322.805,71	35.806.512.725,01	43.471.839.726,25

Sumber : (data diolah) 2021

Berdasarkan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditetapkan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah dalam dua kelompok prioritas seperti yang terlihat pada tabel 3.27 yaitu:

Prioritas pertama dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Belanja wajib dialokasikan untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah diantaranya pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar juga telah mengalokasikan 8% untuk penanganan Covid 19 untuk vaksinasi dan pemberian insentif tenaga kesehatan. Belanja mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan wajib dialokasikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk keperluan yang dikeluarkan setiap bulannya dalam tahun anggaran berkenaan diantaranya belanja pegawai termasuk PPPK untuk gaji dan tunjangan dan belanja operasional kantor seperti listrik , air dan telepon.

Prioritas kedua dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah periode 2021-2026 yang merupakan program dan kegiatan unggulan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang lebih baik diantaranya membangun jaringan komunikasi, peningkatan kuota asuransi tani, ternak dan pupuk bersubsidi, menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja pertahun.

3.5 Kebijakan Keuangan Di Masa Mendatang

3.5.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

1. Penerimaan pajak daerah
2. Penerimaan retribusi daerah
3. Penerimaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

Kebijakan untuk tercapainya Pendapatan Asli Daerah tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

A. Pajak Daerah

1) Penggalian potensi dan peluang penerimaan pajak daerah
2) Pengoptimalisasian penerimaan Pajak Daerah melalui penerapan Online System
3) Pemutakhiran data wajib pajak
4) Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan pajak daerah
5) Penagihan piutang pajak
6) Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pajak daerah
7) Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib Pajak dan Pihak terkait lainnya.
8) Peningkatan penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelayanan pajak daerah.
9) Peningkatan pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan.
10) Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi terkait Pajak Daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Bupati).
11) Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengelola PAD.
12) Peningkatan koordinasi dan kelembagaan antar Pemerintahan DPRD,

OPD Penghasil, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Kepolisian, Kejaksaan dan Instansi Terkait Lainnya.

13) Peningkatan pemahaman masyarakat akan peraturan-peraturan pajak daerah.
14) Peningkatan penambahan jumlah wajib pajak sebagai upaya ekstensifikasi pajak.
15) Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana pajak daerah.
16) Peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah, non pemerintah.
17) Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Nagari dengan pengelolaan Pajak daerah.
18) Peningkatan layanan untuk lebih memperhatikan masyarakat pembayar pajak, serta memberikan kemudahan masyarakat dalam membayar pajak.
19) Penerapan standar pelayanan kepuasan publik dengan menggunakan standar ISO.
20) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.
21) Menyesuaikan NJOP berdasarkan zonasi untuk dasar pemungutan pajak.

B. Retribusi Daerah

1. Mengoptimalkan potensi pendapatan daerah dari sektor retribusi
2. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik
3. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan, yang dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
4. Menerapkan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis
5. Pemenuhan fasilitas, prasarana dan sarana retribusi daerah
6. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah
7. Pemutakhiran sistem administrasi pemungutan retribusi daerah
8. Pemberian reward dan punishment kepada OPD, ASN, Wajib retribusi
   dan Pihak terkait lainnya
9. Peningkatan dan Penguatan Pemerintah Kecamatan dan Nagari dengan pengelolaan retribusi daerah
10. Peningkatan sosialisasi, pengawasan, pemeriksaan dan pengendalian serta pelaporan

C. Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Peningkatan koordinasi dengan BUMD dan SKPD, terkait kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD.

D. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Peningkatan koordinasi dengan SKPD terkait serta pihak lainnya untuk mengoptimalan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

3.5.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada

pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/ kegiatan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, upaya tersebut antara lain adalah:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan proper budgeting melalui analisis cost benefit dan tingkat efektifitas setiap program/kegiatan serta melaksanakan prudent spending melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya;
3. Penyusunan belanja kecamatan diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan kecamatan yang menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
4. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak tenaga medis terutama untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, serta memperbaiki kualitas lingkungan dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
6. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan, penguatan struktur ekonomi berbasis nagari membangun', pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur kecamatan;
7. Dalam mendukung pengembangan aktifitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
8. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja transfer dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
9. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (fixed cost), insentif berbasis kinerja dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan (multi years)

Kebijakan untuk belanja juga meliputi hal-hal sebagai berikut :

a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Mengalokasikan belanja non pegawai seperti belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak, belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

3.5.3 Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan adalah :

1. Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA akan diupayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggaran secara konsisten.
2. Merintis pemanfaatan pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik ataupun program/kegiatan strategis lainnya.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup: pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan adalah :

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
2. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan pelayanan dan kemanfaatan umum bagi masyarakat.
3. Penyertaan modal BUMD dibarengi dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.
4. Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan dilihat dari kemampuan keuangan daerah Kabupaten Tanah Datar pada 2016-2022 dan proyeksi keuangan tahun 2021-2026, maka Pemerintah

Kabupaten Tanah Datar dapat dan perlu melakukan inovasi dalam bentuk intensifikasi dan ektensifikasi/diversifikasi BUMD dan PAD dari sektor hasil kekayaan dipisahkan.

5. Selanjutnya salah satu langkah untuk mendukung fase pemulihan ekonomi daerah, salah satu sumber pembiyaan yang dipertimbangkan adalah program pemerintah pusat terkait pemulihan ekonomi nasional (PEN). Program ini kedepan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kearah yang lebih positif

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan merupakan *"gap expectation"* antara kinerja pembangunan yang saat ini dicapai dengan apa yang direncanakan serta apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil pada saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan daerah yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Kajian isu-isu strategis merupakan kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal yang relevan dalam perencanaan pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan. Selanjutnya berdasarkan permasalahan utama dirumuskan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi pemenuhan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.

Isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai potensi kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah dan panjang. Dengan demikian rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanah Datar lima tahun mendatang.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Berdasarkan gambaran umum kondisi daerah dapat diketahui berbagai aspek pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang telah mengalami kemajuan dan keberhasilan selama lima tahun terakhir. Kemajuan dan keberhasilan yang telah dicapai tersebut dapat dijadikan modal yang kuat untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Tanah Datar di masa mendatang. Meskipun kemajuan dan keberhasilan telah banyak dicapai, Kabupaten Tanah Datar masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang harus ditangani melalui serangkaian kebijakan, program dan kegiatan secara berkelanjutan untuk masa lima tahun ke depan.

4.1.1.Permasalahan RPJPD

Penyusunan RPJMD mengacu permasalahan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kabupaten Tanah Datar menjadi satu rujukan penting dalam perumusan isu strategis dan kebijakan pembangunan. Suatu kebijakan pembangunan memuat prioritas pembangunan jangka menengah dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan pembangunan. Prioritas pembangunan RPJMD tersebut dijabarkan secara operasional sebagai agenda utama pembangunan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) selama lima tahun. Merujuk kepada hasil evaluasi kinerja sebagaimana diuraikan pada bab II sebelumnya tentang gambaran umum kondisi di Kabupaten Tanah Datar, terdapat berbagai hasil kinerja pembangunan yang telah memenuhi target capaian ataupun mengalami keberhasilan, dan juga masih terdapat pula beberapa permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi. Hal ini tentu saja sangat memerlukan penanganan dengan berbagai serangkaian kebijakan dan program yang berkelanjutan.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar yang tercantum dalam RPJPD sampai saat ini belum dapat diselesaikan secara optimal, hal tersebut disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Permasalahan tersebut diantaranya:

1) Kabupaten Tanah Datar yang mempunyai filosofi "*pusek jalo pumpunan ikan*" yang selama ini menjadi pedoman dalam kehidupan adat dan budaya, telah mulai menurun pengamalannya di tengah masyarakat karena belum adanya petunjuk teknis yang baku tentang filosofi adat Minangkabau. Ini merupakan tantangan yang harus dicarikan solusinya oleh Pemerintah Daerah.
2) Adanya situs-situs Kerajaan Minangkabau yang belum digali yang merupakan potensi dalam pengembangan pariwisata sejarah budaya.
3) Ketergantungan penduduk terhadap pangan beras yang relatif tinggi memberikan tekanan terhadap ketersediaan beras. Oleh karena itu perlu dikembangkan diversifikasi/keanekaragaman pangan dengan menggunakan ubi-ubian dan kacang-kacangan dalam rangka keseimbangan konsumsi pangan.
4) Sektor pertanian di Tanah Datar masih didominasi oleh usaha tani tanaman pangan yang menghendaki pengolahan tanah intensif sedangkan kondisi sumberdaya lahannya yang berombak dan bergelombang tidak mendukung hal itu.
5) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif ke fungsi lainnya.
6) Industri yang ada di Tanah Datar belum memiliki keterkaitan antara hulu dan hilir, sehingga nilai produk masih rendah.
7) Produk-produk unggulan Tanah Datar belum ada industri yang mengolahnya menjadi produk setengah jadi yang menjadi produk andalan daerah.
8) Masih belum optimalnya pengembangan dan pembinaan industri rumah tangga, kecil dan menengah dalam menggerakan perekonomian daerah.
9) Koperasi belum sebagai badan usaha yang terbuka dan menarik bagi anggota dan masyarakat sehingga belum mampu berpartisipasi dalam pengembangan investasi koperasi.
10) Objek wisata alam dan budaya yang begitu indah di Tanah Datar belum ditata dengan baik belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana objek wisata yang memadai sehingga belum menarik bagi para wisatawan untuk berkunjung dan tinggal lebih lama di Tanah Datar.
11) Objek wisata yang merupakan milik kaum, Nagari atau perseorangan merupakan kendala dalam pengembangan kepariwisataan di Tanah Datar.
12) Manajemen dan sumber daya pelaku kepariwisataan belum memadai
13) Permasalahan kualitas pendidikan di Tanah Datar adalah pencapaian kualitas hasil pendidikan antar sekolah dan lokasi belum merata.
14) Belum maksimalnya Pendidikan Karakter dan Budaya Bangsa terutama akhlak dan Budi Pekerti menyikapi perkembangan teknologi dan globalisasi.
15) Tantangan utama pelayanan kesehatan dasar adalah bagaimana meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Selain dari itu masih ditemukan wilayah yang relatif sulit untuk dijangkau dalam setiap bentuk pelayanan yang diberikan.
16) Tantangan utama pelayanan kesehatan lanjutan pada rumah sakit adalah belum lengkapnya sarana dan prasarana kesehatan dan tenaga spesialis
17) Belum meratanya sarana dan prasarana di setiap cabang olah raga baik olah raga prestasi maupun olah raga rekreasi.

18) Banyaknya kerawanan sosial yang melanda generasi muda akibat dari semakin derasnya pengaruh informasi, teknologi dan budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal yang ada.
19) Pengaruh globalisasi dan masuknya budaya asing berdampak terhadap tindakan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
20) Kondisi wilayah Tanah Datar yang rawan bencana alam seperti gempa bumi, banjir bandang/galodo dan longsor mengakibatkan rentannya kerusakan terhadap infrastruktur (jalan, jembatan, irigasi dan air bersih).
21) Topografi wilayah yang bergelombang dan berbukit, menyebabkan wilayah-wilayah yang berada di atas ketinggian mengalami kekurangan/kesulitan untuk mendapat sumber air, sehingga masih banyak terdapat daerah yang rawan air bersih.
22) Belum optimalnya tingkat layanan jaringan irigasi
23) Kebutuhan kuantitas rumah dengan lingkungan yang sehat akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Di samping kuantitas yang meningkat, perlu diperhatikan juga keamanannya terhadap bencana yang ada mengingat Tanah Datar termasuk wilayah rawan bencana terutama gempa bumi. Pengalaman gempa sebelumnya dapat dijadikan pelajaran pentingnya rumah yang aman bencana.
24) Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi
25) Belum berfungsinya IPLT yang dibangun dan menurunnya layanan sistem pembuangan air limbah
26) Meningkatnya pencemaran lingkungan akibat jumlah sampah yang meningkat karena manajemen TPA belum berfungsi. Sistem pengelolaan TPA di Kabupaten Tanah Datar masih secara open damping belum menggunakan *sanitary land fill* atau *control land fill.*
27) Kondisi kawasan perkotaan khususnya Batusangkar cukup memprihatinkan. Lahan yang minim dengan kegiatan yang tumpang tindih mengakibatkan kondisi pasar dan sekitarnya tidak tertata dengan baik.

Pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tanah Datar 2005-2025 pada RPJMD saat ini adalah periode keempat atau tahap akhir masa pelaksanaan RPJPD. Untuk tahap IV arah kebijakan RPJPD Kabupaten Tanah Datar menjadi acuan dalam penyusunan permasalahan lima tahun terakhir:

	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	**Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 periode RPJMD ke IV**
a.	Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berlandaskan filosofi Adat Basandi Syara'-Syara' Basandi Kitabullah	1. Terwujudnya masyarakat yang agamis 2. Terwujudnya tata kehidupan masyarakat yang beradat dan berbudaya 3. Terwujudnya sistem pengelolaan tanah ulayat dengan kepastian hukum 4. Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat pendidikan adat yang islami 5. Terwujudnya masyarakat berbudi luhur dan beraklak mulia 6. Terwujudnya masyarakat berkeadilan sosial secara kelembagaan 7. Terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis dalam suasana multikultur pembangunan
b.	Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintah yang baik	1. Memperkuat basis pengetahuan dan kriteria aparatur yang makin profesional 2. Meningkatnya kemandirian dan daya saing dalam skala lokal, daerah dan nasional guna memberikan kontribusi yang signifikan dalam

	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 periode RPJMD ke IV
		penguatan tata pemerintahan yang baik 3. Meningkatnya partisipasi dalam proses pembangunan, termasuk dalam pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan
c.	Mewujudkan sumberdaya insani yang berkualitas, amanah dan berdaya saing tinggi	1. Terselenggaranya pendidikan yang terakreditasi 2. Terwujudnya pelayanan yang prima, kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan, kecukupan tenaga dari segi kuantitas dan kualitas, serta tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan 3. Meningkatnya penerapan IPTEK yang menghasilkan perbaikan teknologi terhadap kegiatan yang telah ada di Kabupaten Tanah Datar 4. Terwujudnya kualitas hidup, peran perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga di berbagai bidang pembangunan 5. Terwujudnya budaya olah raga bagi masyarakat 6. Terwujudnya kualitas dan produktivitas pemuda
d.	Mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing	1. Terwujudnya usaha pertanian modern dan agrobisnis yang maju 2. Terwujudnya sektor industri berbasis Usaha Kecil Menengah (UKM) 3. Terwujudnya kehutanan yang bernilai ekonomi dan lestari 4. Terwujudnya kegiatan jasa (*service industries*) yang efesien 5. Terwujudnya koperasi sebagai wadah pengembangan ekonomi kerakyatan 6. Terwujudnya Tanah Datar sebagai tujuan wisata nasional dan internasional 7. Meningkatnya pemanfaatan potensi pertambangan dan energi
e.	Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan	1. Terciptanya kawasan strategis dalam pembangunan berdasarkan potensi sumberdaya alam dan ekosistem wilayah yang aman, nyaman produktif berkelanjutan 2. Terbangunnya kawasan agroekoteknologi yang berbasiskan pada potensi sumberdaya alam dan lingkungan 3. Meningkatnya peran dan fungsi serta tanggungjawab bersama dari setiap anggota masyarakat dan lahirnya inovasi-inovasi kreatif dari sektor/dinas terkait dalam pengelolaan SDA dan lingkungan 4. Terwujudnya jasa lingkungan yang berkualitas untuk kepentingan publik dan mengurangi dampak negatif dari isu *global warming*/emisi karbon menuju kehidupan dan lingkungan yang sehat 5. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan berdasarkan dimensi/nilai sosial budaya, ekonomi dan ekologis
f.	Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana	1. Terwujudnya sarana dan prasarana transportasi yang handal dan aman bencana 2. Terwujudnya kelancaran dan keamanan lalu lintas 3. Terpenuhinya kebutuhan sumberdaya air untuk lahan pertanian

	Arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah	Arah Kebijakan RPJPD Tahun 2005-2025 periode RPJMD ke IV
		4. Terwujudnya koordinasi kelembagaan dan ketatalaksanaan sumber daya air 5. Terpenuhinya kecukupan air bersih bagi masyarakat 6. Terpenuhinya kebutuhan telekomunikasi terutama di daerah yang belum ada jaringan 7. Terpenuhinya kebutuhan energi listrik 8. Terwujudnya kebutuhan sarana pemukiman yang sehat dan aman
g.	Mewujudkan pembangunan tata ruang dan pembangunan wilayah	1. Terwujudnya tata ruang yang harmonis 2. Terciptanya keterkaitan antara kawasan-kawasan strategis dan kawasan sekitarnya sehingga mampu menunjang pembangunan wilayah Kabupaten Tanah Datar 3. Tersusunnya perecanaan peningkatan kota Batusangkar menjadi PKW serta memulai implementasinya

4.1.2. Permasalahan Pembangunan (Aspek Fokus)

4.1.2.1 Aspek Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Masyarakat

a. Pendidikan

1) Masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah
2) Belum optimalnya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/ MI dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
3) Belum optimalnya pendistribusian guru
4) Belum optimalnya tenaga kependidikan
5) Belum optimalnya kegiatan di Pusat Kegiatan Belajar dan Mengajar (PKBM)
6) Masih banyak satuan pendidikan dasar yang belum memiliki perpustakaan
7) Masih banyak sekolah yang belum memiliki ruangan majelis guru
8) Kondisi mobiler siswa yang tidak layak pakai
9) Masih belum optimalnya keberadaan sarana ibadah
10) Masih kurangnya guru pada mata pelajaran tertentu
11) Masih kurangnya sarana dan prasarana Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
12) Kurangnya tenaga pamong belajar di PKBM
13) Masih rendahnya pelaksanaan PKB (Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan)
14) Masih kurangnya sanitasi di satuan pendidikan
15) Belum terpenuhi kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah

b. Kesehatan

1) Belum optimalnya pelayanan kegawatdaruratan
2) Masih rendahnya pelayanan Rumah Sakit terhadap pasien rujukan
3) Masih belum lengkapnya pelayanan pendukung dalam menunjang pelayanan masyarakat
4) Masih tingginya angka kematian ibu saat melahirkan
5) Masih tingginya angka kematian bayi
6) Masih belum optimalnya penerapan pola hidup bersih dan sehat

(PHBS)

7) Masih terdapatnya berita gizi buruk
8) Masih banyaknya orang dengan gangguan jiwa
9) Terdapatnya kasus stunting
10) Belum maksimalnya penanggulangan Covid-19

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Belum optimalnya pelayanan air minum di perkotaan, perdesaan dan daerah rawan air.
2) Belum optimalnya cakupan layanan air limbah perkotaan dan perdesaan.
3) Belum optimalnya RTRW sebagai acuan pembangunan di daerah.
4) Belum optimalnya kualitas dan kuantitas drainase.
5) Masih terjadinya alih fungsi lahan terutama pada lahan produktif untuk kegiatan non pertanian.

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

1) Belum optimalnya upaya pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak huni dan terjangkau.
2) Belum optimalnya penanganan kawasan permukiman kumuh.

4.1.2.2 Aspek Sosial

a. Ketenagakerjaan

1) Masih terdapat angka pengangguran di Kabupaten Tanah Datar
2) Kurangnya lapangan kerja di sektor formal dan informal di Kabupaten Tanah Datar
3) Masih rendahnya kualitas SDM angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan kompetensi pasar tenaga kerja
4) Pelayanan penempatan tenaga kerja dan informasi pasar kerja belum optimal
5) Masih rendahnya iklim usaha untuk Penumbuhan Wirausaha baru
6) Minimnya fasilitas, sarana dan prasarana Balai Latihan Kerja

e. Kependudukan

1) Data yang dilaporkan masyarakat tidak valid
2) Masih rendahnya masyarakat yang belum berakte nikah, berakte kelahiran dan berakte kematian.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2) Belum optimalnya peningkatan SDM aparatur LPM (DPC,DPD dan LPM nagari)
3) Belum Optimalnya pelaksanaan kelembagaan BumNag dan BumNag bersama
4) Peningkatan kelembagaan BKAN-UPK
5) Belum optimalnya sarana perkantoran pemerintah Nagari yang memadai
6) Belum optimalnya pengelolaan keuangan Nagari yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
7) Masih rendahnya peningkatan SDM aparatur nagari

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Belum meratanya cakupan pelayanan KB modern pada PUS ditingkat kecamatan

2) Belum meratanya cakupan penurunan PUS yang ingin ber KB tapi tidak terlayani pada tingkat kecamatan
3) Masih belum meratanya cakupan PUS yang istrinya dibawah 20 tahun

h. Urusan Sosial

1) Meningkatnya angka pengangguran
2) Masih ditemukannya pengangguran tersembunyi
3) Masih rendahnya penanggulangan kemiskinan terpadu
4) Masih tingginya masalah kekerasan pada anak/perempuan
5) Masih rendahnya keberadaan data yang komperehensif (aplikasi data)
6) Belum tersedianya rumah aman
7) Masih rendahnya perhatian terhadap penyandang disabilitas

i. Urusan Komunikasi dan Informatika

1) Belum adanya Peraturan daerah yang berkaitan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2) Belum adanya dokumen Rencana Induk Pengembangan TIK/SPBE
3) Masih terbatasnya jumlah SDM yang memiliki sertifikasi ahli di bidang TIK
4) Terbatasnya aplikasi yang dimiliki untuk mendukung layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik
5) Masih adanya nagari, puskesmas, dan sekolah yang belum memiliki jaringan internet
6) Belum memadainya ruang untuk Data Center/Ruang Server
7) Belum optimalnya penerapan E-*Government* yang terintegrasi.
8) Belum optimalnya upaya pengembangan *Smart City*.
9) Belum optimalnya fungsi media-media milik Pemerintah daerah untuk informasi bagi publik.
10) Belum memadainya sarana dan prasarana TIK

J. Urusan Persandian

1) Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan sebagai layanan persandian dalam komunikasi dan pengamanan informasi perangkat daerah
2) Belum optimalnya penerapan sistem manajemen keamanan informasi pada pemerintah daerah;
3) Belum meratanya kompetensi aparatur pemerintah daerah pengelola keamanan informasi;
4) Kurangnya kesadaran keamanan informasi ASN pemerintah daerah;
5) Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi.

K. Urusan Statistik

1) Belum tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi
2) Masih kurangnya jumlah dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan data statistik sektoral.
3) Masih rendahnya pemanfaatan data statistik sektoral dari Perangkat Daerah.
4) Belum adanya peraturan daerah tentang pengelolaan data dan rencana induk statistik sektoral
5) Masih kurangnya sarana dan prasarana TIK untuk mendukung pengelolaan statistik sektoral

L. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

1) Belum tersedianya sarana olahraga yang representatif sesuai standar nasional dan internasional;

2) Terbatasnya sarana dan prasana untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri.

M. Urusan Perpustakaan

1) Masih rendahnya minat baca dan literasi
2) Masih rendahnya kesadaran budaya tertib arsip
3) Belum optimalnya sarana prasarana pengelola arsip
4) Belum semua OPD memiliki SDM kearsipan
5) Masih rendahnya komitmen pimpinan OPD terhadap pengelolaan arsip

N. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Masih tingginya kasus narkoba/pekat
2) Belum optimalnya tentang wawasan kebangsaan dan bela Negara
3) Belum maksimalnya pembinaan anggota linmas dan pemanfaatan Poskamling Nagari dan Jorong
4) Kurangnya personil Satpol PP dan Damkar
5) Belum semua anggota Satpol PP mengikuti Latsar
6) Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
7) Masih kurangnya Posko Pemadam Kebakaran dalam Wilayah Manajemen Kebakaran.
8) Belum terbentuknya relawan kebakaran
9) Masih kurangnya SDM untuk mendukung kebijakan pegawai fungsional pada Satpol PP dan Damkar

4.1.2.3 Aspek Bidang Ekonomi dan Ketahanan Pangan

a. Pertanian

1) Masih rendahnya kesejahteraan petani
2) Masih terdapat area persawahan yang belum mempunyai jaringan irigasi
3) Cakupan petani yang memperoleh pupuk subsidi masih rendah
4) Rendahnya kualitas SDM petani untuk meningkatkan produksi dan mengatasi hama penyakit tanaman
5) Masih terbatasnya pemasaran hasil produksi pertanian
6) Sebagian besar petani memiliki lahan dalam skala kecil
7) Minimnya pemanfaatan teknologi dan inovasi di sektor pertanian
8) Belum adanya kajian tentang lahan marginal yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produksi komoditi pertanian
9) Belum optimalnya produksi sektor peternakan besar
10) Terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif ke fungsi lainnya

b. Ketahanan Pangan

1) Masih rendahnya pengawasan terhadap keamanan pangan.
2) Masih rendahnya pengetahuan dan keadaan masyarakat untuk menkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA).
3) Masih ditemui daerah rentan rawan pangan.
4) Belum stabilnya harga bahan pangan strategis.

c. Kelautan dan Perikanan

1) Pemasaran hasil produksi budidaya perikanan yang belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dan masih tergantung kepada daerah lain.
2) Sektor budidaya perikanan belum memiliki daya saing dibandingkan dengan kabupaten/kota lain.

3) Sektor budidaya perikanan belum mampu mensejahterakan pelaku usaha perikanan.
4) Masih rendahnya produktifitas usaha budidaya ikan.
5) Masih banyak lahan budidaya yang tidak dimanfaatkan.
6) Biaya pakan yang tinggi.
7) Belum optimalnya peningkatan nilai tambah hasil kelautan dan perikanan.

d. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

1) Belum optimalnya fungsi dan peran koperasi sebagai lembaga ekonomi masyarakat
2) Minimnya ruang lingkup dan jenis usaha yang dilaksanakan koperasi
3) Masih terbatasnya pemasaran produk UKM
4) Masih rendahnya kewirausahaan pelaku UKM
5) Belum optimalnya sinergitas kebijakan antar sektor dalam mendukung koperasi dan UKM
6) Rendahnya aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan usaha
7) Belum optimalnya pengembangan UKM yang berbasis ekonomi kreatif.
8) Kurangnya daya saing UKM dalam dalam menghadapi Pasar Global.

e. Perdagangan

1) Pengelolaan Pasar Nagari yang belum profesional
2) Pemasaran produk unggulan daerah yang masih terbatas
3) Masih rendahnya kualitas infrastruktur pasar nagari dan pasar di pusat kegiatan ekonomi daerah

f. Industri

1) Belum optimalnya kontribusi sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah
2) Belum adanya agro industri skala menengah dan besar untuk peningkatan nilai tambah produk pertanian
3) Belum optimalnya pemanfaatan sentra industri tenun sebagai pusat produksi kriya khas daerah
4) Masih rendahnya daya saing produk industri kecil dan menengah daerah untuk bersaing di pasar global.
5) Terbatasnya pemasaran produk Industri Kecil Menengah daerah.
6) Belum berkembangnya industri kerajinan dan cindera mata khas
7) Belum optimalnya pembinaan dan fasilitasi pengembangan industri kecil dan menengah
8) Tingginya ketergantungan IKM terhadap bahan baku yang berasal dari luar daerah

g. Kepariwisataan

1) Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata unggulan
2) Belum memadainya fasilitas pendukung kepariwisataan
3) Masih rendahnya daya saing destinasi pariwisata unggulan
4) Belum optimalnya kualitas sarana prasarana destinasi pariwisata
5) Belum melembaganya kelompok sadar wisata baik pada masyarakat lokal, dan pelaku kepariwisataan
6) Masih rendahnya pemahaman dan kapasitas masyarakat untuk mendukung kepariwisataan di setiap zona pengembangan wisata
7) Menurunnya jumlah wisatawan dan kontribusi PAD dari sektor pariwisata akibat pembatasan kegiatan masyarakat di tengah pandemi covid-19.
8) Masih rendahnya lama tinggal wisatawan
9) Terbatasnya promosi dan pelaksanaan event kepariwisataan

h. Penanaman Modal

1) Belum optimalnya pemetaan potensi penanaman modal daerah
2) Masih rendahnya kesiapan masyarakat terhadap penanaman modal
3) Kurang kondusifnya iklim penanaman modal di daerah

4.1.2.4 Aspek Infrastruktur Daerah

a. Perhubungan dan Transportasi

1) Kualitas Infrastruktur jalan dan jembatan belum memadai.
2) Belum memadainya sarana dan prasarana perhubungan

b. Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1) Belum memadainya Prarana Sarana Utilitas Umum (PSU) RSH / RST pada kawasan perumahan dan permukiman
2) Masih adanya kawasan kumuh.
3) Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni.

c. Bidang Penataan Ruang

1) Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang
2) Belum optimalnya pengelolaan Kawasan Danau Singkarak dan Kawasan Lembah Anai
3) Belum adanya batas definitif Kota Batusangkar, antar nagari dalam kecamatan, dan antar kecamatan dalam kabupaten, serta antar kota/kabupaten dalam provinsi
4) Masih adanya rencana rinci tata ruang kawasan strategis yang belum disusun.
5) Penurunan rasio Ruang Terbuka Hijau
6) Belum adanya perda rencana rinci tata ruang.
7) Belum optimalnya perwujudan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) bidang penataan ruang.

d. Bidang Lingkungan Hidup

1) Belum optimalnya penanganan/pengelolaan persampahan
2) Belum memadainya sarana dan prasarana persampahan
3) Masih banyaknya pencemaran lingkungan

e. Bidang Pertanahan

1) Masih tingginya intesitas konflik dan sengketa pertanahan
2) Masih banyaknya aset tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat
3) Masih adanya aset berupa tanah pemerintah daerah yang dikuasai pihak lain

4.1.2.5 Aspek Tata Kelola Pemerintahan

a. Keuangan

1) Kontribusi PAD terhadap penerimaan daerah belum optimal

b. Perencanaan

1) Belum optimalnya kualitas SDM perencana dan peneliti di perangkat daerah

c. Kepegawaian

1) Masih rendahnya pendidikan dan pelatihan Diklat dan Fungsional ASN

4.2. ISU STRATEGIS

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) membutuhkan kerangka analisis permasalahan dan isu-isu strategis yang didukung oleh kemampuan untuk menangkap setiap interaksi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi interaksi tersebut, antara lain situasi global, meliputi aspek-aspek yang terjadi melampaui batas-batas administrasi negara, situasi nasional dan situasi regional. Keterkaitan antar isu strategis dapat mendorong penguatan dan penerapan prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah berdasarkan data dan fakta-fakta yang ada. Karena itu penyusunan rencana jangka menengah daerah akan bergerak dari suatu realitas yang mencakup pembangunan di segala bidang secara lokal dengan memperhatikan perkembangan dan realitas lain di lingkungan sekitar sehingga mampu mengatasi berbagai masalah dan mencapai tujuan pembangunan.

4.2.1. Isu Strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) dicanangkan untuk melanjutkan konsep tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang belum tercapai dari Tahun 2000-2015. Tujuan MDGs yang belum tercapai tersebut antara lain:

a. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
b. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
c. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
d. Menurunkan angka kematian anak;
e. Meningkatkan kesehatan ibu;
f. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya;
g. Memastikan kelestarian lingkungan hidup;
h. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015- MDG's, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu berkurangnya sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, makanan dan energi dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum miskin.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan, 169 target dengan 220 indikator. Adapun tujuan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Tahun 2016-2030 antara lain :

1. Tanpa kemiskinan
2. Tanpa kelaparan
3. Kehidupan sehat dan sejahtera
4. Pendidikan berkualitas
5. Kesetaraan gender
6. Air bersih dan sanitasi layak
7. Menjamin akses energi
8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan layak
9. Infrastruktur, industri dan inovasi
10. Mengurangi kesenjangan
11. Kota dan permukiman berkelanjutan
12. Pola produksi dan konsumsi berkelanjutan
13. Penangangan perubahan iklim
14. Konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim
15. Pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat

16. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan

Berdasarkan 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat 16 Tujuan yang terkait dengan karakteristik daerah Kabupaten Tanah Datar. Tujuan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut, samudera dan maritim tidak ada dikarenakan Tanah Datar tidak memiliki wilayah laut.

Berkaitan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar berkomitmen menjalankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan mengadopsi isu strategis yang terbagi atas empat pilar antara lain:

1. Pilar ekonomi
   - Belum berkembangnya Nilai Tambah Hasil/Produk Pertanian
   - Rendahnya Daya Saing UMKM
   - Masih Tingginya Angka Pengangguran
   - Masih Rendahnya Kualitas Infrastruktur
   - Belum Optimalnya Peran Pariwisata dalam membangkitkan Perekonomian Masyarakat
2. Pilar lingkungan
   - Minimnya Penyediaan Sanitasi Layak
   - Rendahnya Kapasitas Pengelolaan Sampah
   - Belum Optimalnya Pengelolaan Limbah B3
   - Terjadinya Alih Fungsi Lahan
   - Masih Terdapatnya Lahan Kritis
3. Pilar sosial
   - Belum Terintegrasinya Data Kemiskinan
   - Masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan
4. Pilar hukum dan tata kelola
   - Degradasi kehidupan berbangsa dan bernegara
   - Masih banyaknya usaha/kegiatan yang belum memiliki izin

4.2.2. Isu Nasional

4.2.2.1. Lingkungan Nasional

a) Arahan RPJPN Tahun 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi tahapan yang sangat penting karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan perkapita Indonesia diperkirakan masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas *(upper-middle income country)* yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025 sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020-2024 yang merupakan amanat RPJPN 2005-2025 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan yang di dalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas.

Gambar 4.1
Empat pilar RPJMN IV Tahun 2020-2024

b) Arahan RPJMN Tahun 2020-2024

Sebagai konsekuensi dari tahapan terakhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Di dalam mewujudkan target tersebut ditetapkan tema pembangunan yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" dengan didukung dengan 7 Agenda Pembangunan.

RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target-target dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) beserta indikatornya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam 7 agenda pembangunan Indonesia ke depan, yaitu :

1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Di dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan isu strategis pembangunan wilayah yang difokuskan pada Pulau Sumatera, antara lain:

1. Masih tingginya ketimpangan pembangunan terutama wilayah Sumatera bagian barat, dan tingginya tingkat kemiskinan terutama pada wilayah Sumatera bagian utara;
2. Belum optimalnya pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam yang mencakup komoditas pertanian, perkebunan, perikanan, migas dan batubara;
3. Belum adanya *commodities trading house* yang terintegrasi, serta masih rendahnya perkembangan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan struktur dan fundamental perekonomian lokal;
4. Belum stabilnya harga komoditi karet dan sawit yang diikuti dengan turunnya kualitas produk, serta kurang kompetitifnya harga gas

untuk kegiatan industri sehingga menghambat laju produktivitas industri, terutama di Provinsi Sumatera Utara;

5. Belum terintegrasinya serta belum optimalnya pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dikarenakan permasalahan mendasar yaitu, lahan, perizinan, infrastruktur, dan pengelolaan kawasan sehingga belum terciptanya *multiplier effect* dari pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi tersebut;
6. Belum optimalnya integrasi konektivitas intrawilayah dan antar-wilayah baik darat, laut, dan udara dan belum optimalnya hub internasional sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan jasa;
7. Masih Rendahnya kualitas sumber daya manusia siap pakai yang diakibatkan belum optimalnya pelayanan pendidikan dan kesehatan terutama di daerah pedalaman, daerah tertinggal, dan pulau-pulau kecil terluar;
8. Belum optimalnya pengembangan potensi kawasan pariwisata berbasis ekonomi lokal;
9. Potensi bencana alam relatif tinggi khususnya di kawasan pantai barat Pulau Sumatera serta belum sepenuhnya diantisipasi dengan upaya mitigasi dan adaptasi yang komprehensif;
10. Degradasi lingkungan yang diakibatkan alih fungsi lahan menjadi perkebunan, pembukaan lahan hutan secara ilegal, serta pembakaran lahan gambut;
11. Masih terdapatnya praktik *illegal fishing*, *human trafficking* dan narkoba terutama pada daerah perbatasan, serta praktik penanaman, perdagangan, dan pemanfaatan tanaman ganja secara ilegal;
12. Pengelolaan dan kualitas belanja dana APBD sebagian daerah dan dana Otonomi Khusus Aceh dapat terus ditingkatkan.

Dinamika lingkungan strategis nasional yang perlu diperhatikan diantaranya:

a. MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

   Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, dan dalam menggunakan sumber daya tersebut untuk memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan yang berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

   Pembangunan ekonomi akan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, kelautan dan perikanan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut akan didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan.

b. MENGEMBANGKAN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESENJANGAN & MENJAMIN PEMERATAAN

Kondisi pembangunan kewilayahan saat ini memperlihatkan bahwa sumbangan Pulau Jawa dan Sumatera masih dominan dan tidak mengindikasikan pergeseran. Di tahun 2018, kontribusi ekonomi Pulau Jawa sebesar 58,29% dan Pulau Sumatera sebesar 21,53% terhadap PDB nasional. Ketimpangan antar wilayah pulau masih sangat tinggi sedangkan ketimpangan antarprovinsi di dalam wilayah pulau bervariasi, dimana yang paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali dan Kalimantan. Demikian pula ketimpangan antardesa kota dalam wilayah pulau paling tinggi adalah di Pulau Jawa-Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi. Tetapi, penting untuk menjadi catatan adalah tingkat ketimpangan antarwilayah yang rendah belum tentu merefleksikan keberhasilan kebijakan distribusi pembangunan. Namun demikian, tingkat ketimpangan yang rendah bisa jadi mencerminkan tingkat pembangunan yang rendah dan merata di seluruh wilayah, sepertinya halnya yang terjadi di wilayah Pulau Maluku. Mengatasi hal tersebut, pemindahan Ibu Kota Negara ke luar Jawa diharapkan dapat mengubah orientasi investor dari pulau Jawa ke luar Jawa.

c. MENINGKATKAN SDM BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

Struktur penduduk Indonesia ditandai dengan tingginya proporsi penduduk usia produktif. Pada tahun 2018, penduduk usia produktif di Indonesia mencapai 68,6 persen atau 181,3 juta jiwa dengan angka ketergantungan usia muda dan tua yang rendah, yaitu 45,7. Perubahan struktur penduduk ini akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bonus demografi (*demographic dividend*) yang dalam jangka menengah dan panjang akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menghantarkan Indonesia menjadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Bonus demografi ini akan diperoleh dengan prasyarat utama tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan Indonesia 2020-2024 ditujukan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan pembangunan manusia diarahkan pada pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, pemenuhan pelayanan dasar dan perlindungan sosial, peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan produktivitas dan daya saing angkatan kerja. Kebijakan pembangunan manusia tersebut dilakukan berdasarkan pendekatan siklus hidup, dan inklusif termasuk memperhatikan kebutuhan penduduk usia lanjut maupun penduduk penyandang disabilitas, dan pengelolaan SDM bertalenta.

d. REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

Indonesia sebagai negara adikuasa di bidang kebudayaan memiliki kekayaan budaya yang melimpah. Kekayaan budaya tersebut dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia. Selain itu melalui gerakan revolusi mental, nilai budaya dan kearifan lokal dapat memperkuat kohesi sosial, kerukunan, toleransi, gotong royong, dan kerja sama antarwarga sebagai syarat utama bagi keberhasilan pembangunan nasional. Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan harus pula meneguhkan Indonesia sebagai negara-bangsa majemuk, memiliki keragaman suku, adat-istiadat, budaya, bahasa, dan agama, yang membentuk satu kesatuan dalam keragaman: Bhinneka Tunggal Ika.

Maka setiap komponen bangsa harus senantiasa membangun harmoni dalam perbedaan dan keragaman, yang dilandasi oleh semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Kekuatan bangsa Indonesia terletak pada perbedaan dan keragaman, bukan pada persamaan dan keseragaman. Untuk memperkuat Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran sebagai negara bangsa yang majemuk harus ditanamkan sejak dini di dalam keluarga, diperkuat di dalam sistem pendidikan, dan terus dipupuk dan dirawat di dalam sistem sosial-kemasyarakatan.

Untuk itu dalam RPJMN IV Tahun 2020-2024, revolusi mental terus dilanjutkan secara lebih holistik dan integratif yang bertumpu pada: (1) revolusi mental dalam sistem pendidikan dengan menekankan nilai-nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti dalam pembelajaran; (2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan dengan pembudayaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas; dan (3) revolusi mental dalam sistem sosial dengan pembudayaan nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam institusi keluarga dan interaksi antarwarga. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan kerukunan; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter.

e. MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI & PELAYANAN DASAR

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilihan strategis dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Indonesia. Perhatian pemerintah di bidang infrastruktur pada beberapa tahun terakhir telah berdampak pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur di Indonesia. Namun demikian, daya saing infrastruktur Indonesia masih perlu terus ditingkatkan. *The Global Competitiveness Report* tahun 2018 menempatkan posisi daya saing infrastruktur Indonesia di posisi 71, masih tertinggal jika dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Beberapa hal yang masih memerlukan percepatan antara lain pembangunan infrastruktur penggerak ekonomi, pemerataan pelayanan dasar di seluruh Indonesia, dan pembangunan infrastruktur untuk menopang perkembangan berbagai kota seiring dengan urbanisasi di Indonesia. Untuk itu pada periode 2020-2024, pembangunan infrastruktur akan diprioritaskan pada tiga fokus utama, yaitu Infrastruktur untuk Pemerataan Pembangunan, Infrastruktur untuk Pembangunan Ekonomi, dan Infrastruktur untuk Pembangunan Perkotaan.

f. MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

Penurunan kualitas lingkungan hidup serta deplesi sumber daya alam berpotensi menghambat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini masih bertumpu pada sektor komoditas dan sumber daya alam. Selain itu, karakteristik Indonesia yang memiliki risiko bencana tinggi ditambah dengan adanya pengaruh perubahan iklim dapat menimbulkan kehilangan, kerugian, dan kerusakan yang lebih besar di masa mendatang apabila tidak diantisipasi dan ditangani dengan baik.

Memperhatikan kondisi tersebut, upaya membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim ditetapkan sebagai salah satu prioritas nasional di dalam RPJMN 2020-2024. Secara lebih spesifik, prioritas nasional tersebut diuraikan ke dalam tiga kelompok kebijakan, yakni: (1) meningkatkan kualitas lingkungan hidup;

(2) meningkatkan ketahanan bencana dan iklim; serta (3) menerapkan pendekatan pembangunan rendah karbon.

g. MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional .

Pembangunan Polhukhankam memperhatikan perkembangan yang terjadi di dalam dan luar negeri. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan tingkat reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman keamanan dan kedaulatan negara. Di tingkat global, isu yang perlu menjadi perhatian adalah depolarisasi gravitasi politik internasional, pergeseran arena pertarungan negara besar ke arena maritim, deglobalisasi dan populisme yang menyebabkan kebijakan unilateral beberapa negara, dan instabilitas di kawasan Timur Tengah. Pada RPJMN 2020-2024 terdapat lima arah kebijakan Pembangunan Polhukhankam, yaitu Konsolidasi Demokrasi, Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, Pemantapan Sistem Hukum Nasional, Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dan Pemantapan Stabilitas Keamanan Nasional.

4.2.2.2. Lingkungan Regional (Sumatera Barat)

Kondisi lingkungan regional pada dasarnya tidak dapat terpisahkan dari kondisi lingkungan nasional, sehingga kondisi regional memiliki kesamaan kasus dan masalah dengan kondisi nasional. Isu strategis dalam pembangunan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026 secara ringkas sebagai berikut:

a. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan ruas Payakumbuh-Lintau (Tanah Datar)
b. Peningkatan kualitas jalan yang menghubungkan Kota Sawahlunto-Kab. Tanah Datar (Padang Ganting) –Baso –Bukittinggi. Hal ini dikarenakan konsep pengembangan pariwisata antara Kota Sawahlunto dengan Kab. Tanah Datar dapat terintegrasi satu sama lain, yaitu wisata budaya (Pagaruyung) dan wisata sejarah tambang (Kota Sawahlunto).
c. Reaktivasi jalur kereta api Padang-Padang Pariaman-Padang Panjang-Ombilin (Tanah Datar)-Solok-Muara Kalaban (Sawahlunto)
d. Pembangunan jalan tol Padang – Batas Riau.

4.2.3. Isu Strategis Kabupaten Tanah Datar

Isu-isu strategis adalah merupakan sebuah kondisi/perkembangan/ peristiwa kondisi terkini dan kecenderungannya di masa depan dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan yang akan mempengaruhi pencapaian misi, program dan kegiatan sehingga harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pembangunan. Isu-isu strategis disajikan menurut fokus pembangunan.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan maka isu strategis dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, PUPRP, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Trantibumlinmas, Sosial)

   Dalam Peningkatan kualitas SDM dan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, PUPRP, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Trantibumlinmas, Sosial) terdapat sejumlah isu yang menjadi pembahasan utama yang merupakan hasil evaluasi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada Bidang Pendidikan terdapat beberapa isu yaitu belum tercapainya APM dan APK SD sederajat dan SMP Sederajat, belum tercapainya Rasio APM perempuan dan laki-laki, dan belum tercapainya rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 Tahun.

   Pada Bidang Kesehatan yang menjadi isu diantaranya belum tercapainya indikator terkait kesehatan balita seperti prevalensi stunting, angka kematian balita dan neonatal (AKBa dan AKN), dan Persentase capaian imunisasi lengkap pada bayi (sosial), belum tercapainya prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) pada pasangan usia subur, dan belum tercapainya indikator terkait pelayanan Kesehatan seperti layanan Kesehatan jiwa pada puskesmas.

   Isu pada Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah belum tercapainya akses terhadap sumber air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, belum tercapainya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, belum tercapainya target pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal, dan belum tercapainya akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Pada Bidang Sosial yang menjadi isu adalah belum tersedianya pendampingan psikososial korban bencana sosial.

   Selanjutnya yang menjadi isu pada bidang Trantibumlinmas diantaranya adalah masih tingginya kasus narkoba/pekat, masih belum optimalnya penyediaan sarana, prasarana dan SDM dalam bidang Trantibumlinmas.

2) Peningkatan pengamalan agama dan pelestarian adat istiadat serta pengembangan kebudayaan

   Kabupaten Tanah Datar yang mempunyai filosofi "*pusek jalo pumpunan ikan*" yang selama ini menjadi pedoman dalam kehidupan adat dan budaya, telah mulai menurun pengamalannya di tengah masyarakat karena belum adanya petunjuk teknis yang baku tentang filosofi adat Minangkabau. Hal ini merupakan isu yang penting dalam peningkatan pengamalan agama dan pelestarian adat istiadat serta pengembangan kebudayaan.

   Selanjutnya isu lain yang menjadi perhatian adalah masih adanyaa situs-situs Kerajaan Minangkabau yang belum digali yang merupakan potensi dalam pengembangan pariwisata sejarah budaya.

3) Peningkatan penanganan covid-19

   Pada tahun 2020 terjadi pandemi/wabah penyakit Covid-19 yang dapat digolongkan kepada kejadian bencana non alam/ kejadian kedaruratan kesehatan. Dalam upaya pencegahan penularan penyakit ini dilakukan kebijakan untuk pembatasan kegiatan sosial dan ekonomi. Selain itu berbagai upaya dilakukan untuk penanganan covid-19 tersebut. Beberapa isu penting dalam penanganan covid-19 ini diantaranya adalah sulitnya akses masyarakat terhadap fasilitas

kesehatan, pertambahan jumlah masyarakat yang terpapar covid-19 semakin meningkat setiap harinya, pertambahan jumlah masyarakat yang meninggal akibat covid-19, serta terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penanganan covid-19.

4) Pemulihan ekonomi daerah akibat dampak covid-19

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh daerah di Indonesia, termasuk Tanah Datar, telah terjangkit penyebaran pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Pandemi Covid-19 telah menimbulkan gangguan pada kehidupan manusia, menyebabkan terjadinya gejolak aktivitas ekonomi di seluruh daerah dan berakibat terjadinya resesi. Dampak yang dirasakan juga cukup besar dengan terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhambat aktivitas ekonomi khususnya pada sektor perdagangan dan pariwisata yang berdampak pada pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya menimbulkan koreksi yang cukup dalam terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.

5) Penurunan angka pengangguran dan penyediaan lapangan kerja

Beberapa isu dalam ketenagakerjaan antara lain terkait dengan tingginya tingkat pengangguran, penyediaan lapangan kerja yang terbatas, serta produktivitas tenaga kerja yang relatif masih rendah.

6) Peningkatan daya saing UMKM dan IKM daerah

Dalam Peningkatan daya saing UMKM dan IKM daerah terdapat beberapa isu penting yaitu, masih terbatasnya pemasaran produk UKM, masih rendahnya kewirausahaan pelaku UKM, belum optimalnya sinergitas kebijakan antar sektor dalam mendukung koperasi dan UKM, rendahnya aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan usaha, belum optimalnya pengembangan UKM yang berbasis ekonomi kreatif, serta kurangnya daya saing UKM dalam dalam menghadapi Pasar Global.

7) Peningkatan daya saing pariwisata unggulan daerah

Saat ini peran pariwisata di daerah belum optimal dalam membangkitkan perekonomian masyarakat. Hal lain yang juga menjadi isu adalah belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata unggulan, belum melembaganya kelompok sadar wisata baik pada masyarakat lokal, dan pelaku kepariwisataan, menurunnya jumlah wisatawan dan kontribusi PAD dari sektor pariwisata akibat pembatasan kegiatan masyarakat di tengah pandemi covid-19, masih rendahnya lama tinggal wisatawan, serta terbatasnya promosi dan pelaksanaan event kepariwisataan.

8) Peningkatan infrastruktur dan tata kelola kawasan strategis daerah

Isu penting dalam peningkatan infrastruktur dan tata kelola kawasan strategis daerah adalah kualitas infrastruktur jalan dan jembatan belum memadai, belum tercapainya akses terhadap sumber air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, belum tercapainya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, belum tercapainya target pembangunan infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal, belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang, belum optimalnya pengelolaan Kawasan Danau Singkarak dan Kawasan Lembah Anai,

belum adanya batas definitif Kota Batusangkar, antar nagari dalam kecamatan, dan antar kecamatan dalam kabupaten, serta antar kota/kabupaten dalam provinsi, serta masih adanya rencana rinci tata ruang kawasan strategis yang belum disusun.

9) Kebencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kabupaten Tanah Datar merupakan kawasan rentan terhadap bencana diantaranya gempa bumi, gerakan tanah dan letusan gunung api. Selanjutnya isu pengelolaan lingkungan hidup antara lain minimnya penyediaan sanitasi layak, rendahnya kapasitas pengelolaan sampah, belum optimalnya pengelolaan limbah B3, terjadinya alih fungsi lahan, serta masih terdapatnya lahan kritis.

10) Peningkatan penanaman modal daerah

Isu dalam peningkatan penanaman modal daerah diantaranya belum optimalnya pemetaan potensi penanaman modal daerah, masih rendahnya kesiapan masyarakat terhadap penanaman modal, serta masih kurang kondusifnya iklim penanaman modal di daerah.

11) Peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah komoditi pertanian yang bernilai ekonomi tinggi serta pengendalian lahan pertanian produktif ke fungsi lainnya.

Isu strategis dalam Peningkatan produksi, produktifitas dan nilai tambah komoditi pertanian yang bernilai ekonomi tinggi serta pengendalian lahan pertanian produktif ke fungsi lainnya diantaranya, belum berkembangnya nilai tambah hasil/produk pertanian, cakupan petani yang memperoleh pupuk subsidi masih rendah, rendahnya kualitas SDM petani untuk meningkatkan produksi dan mengatasi hama penyakit tanaman, masih terbatasnya pemasaran hasil produksi pertanian,minimnya pemanfaatan teknologi dan inovasi di sektor pertanian, belum adanya kajian tentang lahan marginal yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan produksi komoditi pertanian, serta terjadinya alih fungsi lahan pertanian produktif ke fungsi lainnya

12) Optimalisasi potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)

Optimalisasi potensi sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta Lain-lain PAD yang sah dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan.

13) Hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance*)

Beberapa isu terkait hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance*), diantaranya tuntutan publik yang semakin meningkat terhadap tata kelola yang baik dalam pelaksanaan manajerial pemerintahan, dan tata kelola pelayanan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah perlu melakukan reformasi birokrasi yang meliputi usaha pembenahan pada delapan area perubahan yaitu area manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan Sistem Manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

14) Peningkatan profesionalisme ASN

Beberapa isu terkait peningkatan profesionalisme ASN adalah belum optimalnya pemetaan, penilaian, serta pengembangan kompetensi dan kinerja ASN, belum optimalnya kinerja ASN dalam menangani tugas dan fungsi, serta masih belum optimalnya pengembangan kompetensi ASN yang berjenjang dan berkelanjutan.

15) Peningkatan pengelolaan asset daerah

Terkait peningkatan pengelolaan asset daerah, masih terdapat asset daerah yang belum tercatat secara legal formal.

BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 merupakan tahapan keempat dari keseluruhan tahapan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap ketiga, RPJMD tahap keempat ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui optimalisasi seluruh urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

5.1. Visi RPJPD

"Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau yang maju, sejahtera dan berkeadilan"

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Tanah Datar sebagai pusat Budaya Minangkabau adalah sebagai pusat rujukan, untuk keperluan pendidikan adat dan pengembangan kebudayaan Minangkabau secara umum, baik di sekitaran Provinsi Sumatera Barat, maupun dalam konteks internasional (*center of excellence)*. Hal ini sudah merupakan perjalanan sejarah, dimana Tanah Datar sebagai Luhak Nan Tuo, daerah yang secara etnografis sebagai yang dituakan.
b. Maju berarti suatu kondisi masyarakat yang merasakan kemajuan pendidikan, sehingga menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni pada masanya diiringi dengan kualitas iman dan taqwa.
c. Sejahtera berarti kemakmuran yang dirasakan oleh seluruh warga dengan terpenuhinya kebutuhan jasmaniah dan rohaniah (fisik, mental, spritual dan emosional) dalam berbagai aspek kehidupan sebagai individu dan anggota masyarakat.
d. Berkeadilan adalah suatu kondisi yang menunjukkan adanya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap individu, kelompok, dan golongan, serta dikawal oleh prinsip kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara konsisten dan konsekuen.

5.2 Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah

a. Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat budaya Minangkabau baik secara lokal, nasional, maupun internasional, melalui peningkatan pendidikan, pemahaman dan pengamalan ajaran agama, adat, dan budaya serta penguatan kelembagaan sosial budaya juga melakukan penggalian situs-situs sejarah budaya.
b. Mewujudkan kualitas sumberdaya manusia yang tinggi melalui peningkatan pemerataan, pelayanan, kualitas pendidikan dan pembinaan pemuda dan olahraga.
c. Mewujudkan masyarakat yang terdepan menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya pada masanya.
d. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial.
e. Mewujudkan masyarakat sejahtera melalui peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan serta mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran melalui: (1).Pengembangan kawasan strategis dengan pola kemitraan usaha dan

jaringan kerja serta revitalisasi sektor unggulan. (2).Meningkatkan aksesibilitas, kualitas sarana, dan prasarana, serta lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

f. Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan berkeadilan melalui Penyuluhan hukum dan Penegakan Peraturan Perundang-undangan yangberlaku.
g. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, melalui revitalisasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

5.3. RPJMD Kabupaten/Kota Tetangga

Dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar dipengaruhi oleh daerah tetangga maka perlu memperhatikan keselarasan dengan daerah Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Sijunjung dan Kabupaten Padang Pariaman

a. Kota Padang Panjang

Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 dengan Visi Kota Yang Maju, Lestari dan Islami. Dengan misi, 1).Mewujudkan Moralitas, Kemandirian, dan Daya Saing Masyarakat; 2).Mewujudkan Stabilitas dan Daya Saing Perekonomian; 3).Mewujudkan Lingkungan yang Asri dan Lestari; 4).Mewujudkan Daya Dukung dan Kualitas Pelayanan Prasarana dan Sarana; dan 5).Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Bersih.

b. Kabupaten Agam

Rancangan RPJMD Kabupaten Agam masih dalam proses pembahasan, rumusan Visi dalam rancangan RPJMD tersebut Mewujudkan Kabupaten Agam Maju, Masyarakat Sejahtera, Menuju Agam Mandiri, Berprestasi Yang Madani",. Dengan misi 1). Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, akuntabel dan melayani, 2). Membangun perekonomian masyarakat yang kokoh melalui optimalisasi sumberdaya daerah dan pengembangan pariwisata. 3). Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, keterpaduan tata ruang wilayah dan mitigasi bencana. 4). Membangun masyarakat yang mandiri, berdaya saing dan berkarakter. 5). Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK.6).

c. Kabupaten Padang Pariaman

Rancangan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman masih dalam proses pembahasan, rumusan Visi dalam rancangan RPJMD tersebut Padang Pariaman Berjaya. dengan misi 1). Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah Adat Bersandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban. 2).Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang. 3).Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat. 4).Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakan sektor pendidikan non formal. 5).Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.

6).Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayaan masyarakat. 7).Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

d. Kabupaten Sijunjung

RPJMD Kabupaten Sijunjung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung Tahun 2021-2026 dengan Visi "Kabupaten Sijunjung yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya menuju Masyarakat Madani", dengan Misi yaitu : 1)Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien dan responsive berbasis reformasi birokrasi, Misi 2) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah berbasis pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pariwisata, Misi 3) Meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sehat dan produktif berbasis teknologi dalam tatanan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah (ABS-SBK), Misi 4) Meningkatkan kualitas infrastruktur dan prasarana dasar serta pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan.

e. Kabupaten Lima Puluh Kota

RPJMD Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 dengan Visi Mewujdukan Lima Puluh Kota Yang Madani, Beradat dan Berbudaya Dalam Kerangka Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dengan Misi 1).Meningkatkan kualitas sumber daya mausia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan niai-nilai keagamaan, 2).Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan Ekonomi Lintas Sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional, 3).Meningkatkan potensi nagari dalam pembangunan daerah, 4).Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi, 5).Meningkatkan pembangunan insfrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan

5.4. RPJMD Kabupaten Tanah Datar

5.4.1. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Dengan kata lain visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar merupakan bentuk ungkapan kondisi yang ingin diwujudkan hingga tahun 2026.

Beberapa hal yang melatarbelakangi penetapan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar diantaranya adalah :

1. Merupakan visi yang diusung dalam kampanye Bupati dan wakil Bupati Tanah Datar saat menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
2. Adanya keinginan untuk menyelesaikan sejumlah permasalahan daerah yang belum terselesaikan pada periode RPJMD tahun 2016-2021, baik dari aspek kesejahteraan rakyat, daya saing maupun penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bermuara pada pelayanan publik.
3. Adanya keinginan untuk menyelesaikan isu strategis daerah yang terkait dengan isu nasional, Provinsi Sumatera Barat serta isu-isu kewilayahan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut maka pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 adalah: **"Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah".**

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dimaksud adalah:

Madani	:	Adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat demokratis serta maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nilai-nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah	:	adalah kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam.

VISI RPJMN 2020-2024	VISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2026	VISI KABUPATEN TANAH DATAR 2021-2026
Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan	Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

5.4. 2 Misi

Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka upaya pencapaian visi dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
2. Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan keenam misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama, yaitu Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya dalam mencapai masyarakat Tanah Datar yang Madani. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mewujudkan kehidupan agama dan budaya berdasarkan filosofi

adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya, dan kearifan lokal di tengah kehidupan masyarakat, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

2. Misi Kedua, yaitu Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM. Misi ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tergambar melalui peningkatan PDRB per kapita, penurunan angka pengangguran dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. Misi ini terkait dengan misi keempat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu mewujudkan usaha ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global. Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumber daya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.
3. Misi Ketiga, yaitu Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan berdaya saing terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mewujudkan sumber daya insani yang berkualitas, amanah, dan berdaya saing tinggi, misi ini diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.
4. Misi Keempat, yaitu Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan daerah. Tujuan yang ingin diwujudkan adalah peningkatan daya saing indeks daya saing pariwisata daerah. Misi ini terkait dengan misi ketiga Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu mewujudkan ekonomi produktif dan mampu bersaing di dunia global. Misi ini diarahkan salah satunya untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama, budaya dan wisata alam dan/ dengan memanfaatkan TIK / fasilitas akses internet untuk daerah wisata. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu menyusun formula rumusan strategi dan arah kebijakan dalam rangka pemulihan sektor pariwisata yang sangat terdampak pandemi covid-19.
5. Misi Kelima, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, penyelenggaran pemerintah, transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan koordinasi. Misi ini terkait dengan Misi Kedua Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Mewujudkan sistem hukum dan tata pemerintahan yang baik. Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
6. Misi Keenam, yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur dan kualitas lingkungan hidup. Misi ini terkait dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yaitu

Mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dengan pengelolaan SDA berkelanjutan, Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang wilayah.

NO	MISI RPJMN 2020-2024	MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2026	MISI RPJMD KABUPATEN TANAH DATAR 2021-2026
1.	Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
2.	Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing	Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.	Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM
		Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital.	Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM
		Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan	Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam
3.	Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
4.	Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan
5.	Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah	Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
6.	Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien
7.	Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adaik Basandi Syara', Syara'Basandi Kitabullah	Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya
8.	Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

NO	MISI RPJMN 2020-2024	MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT 2021-2026	MISI RPJMD KABUPATEN TANAH DATAR 2021-2026
9.	Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien

5.5 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran memiliki indikator yang dapat menggambarkan ketercapaian visi dan misi pada skala dampak/*impact*.

Visi dan misi yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran agar pencapaian masing-masing misi dapat terukur secara tahunan maupun lima tahunan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan konkuren pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Keselarasan hubungan antara misi, tujuan, sasaran serta indikator RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2021-2026 dapat dilihat dibawah ini:

1. Misi Pertama: Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya.

Tujuan dan Sasaran Misi Pertama

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatkan aktifitas pembangunan bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK	Meningkatkan aktivitas bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK	1. Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	1. Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda
			2. Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh Badan Amil Zakat
		2. Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif

2. Misi Kedua: Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM.

Tabel Tujuan dan Sasaran Misi Kedua

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM	1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita 2. Tingkat Pengangguran Terbuka 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi	1. Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1. Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB 2. Nilai Tukar Petani/ NTP
		2. Meningkatnya Daya Saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif	1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB 2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
		3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	1. Jumlah wirausaha baru

3. Misi Ketiga: Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tabel Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia berdaya saing	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	1. Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Umur harapan hidup 2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
		3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Angka Kemiskinan 2. Indek Pemberdayaan Gender (IDG) 3. Indek Pembangunan Gender (IPG)

4. Misi Keempat: Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.

Tabel Tujuan dan Sasaran Misi Keempat

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai Destinasi pariwisata yang unggul berbasis agama, budaya dan sumber daya alam	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (sektor akomodasi dan makan minum)	1. Peningkatan Daya Saing Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan
			2. Lama Tinggal Wisatawan

5. Misi Kelima: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.

Tabel Tujuan dan Sasaran Misi Kelima

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Indek reformasi birokrasi	1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Opini BPK atas laporan keuangan
			2. Nilai SAKIP
			3. Indeks Pengawasan Kearsipan
			4. Manajemen resiko level 3
		2. Meningkatnya birokrasi yang kafabel	1. Indeks SPBE
			2. Indeks Profesionalitas ASN
			3. Skor dan status kinerja pemerintah daerah
		3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

6. Misi Keenam: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Tabel Tujuan dan Sasaran Misi Keenam

Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
1. Terwujudnya infrastruktur berkualitas	1. Persentase Infrastruktur Berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	1. Persentase Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas
2. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Persentase Bencana yang ditangani	1. Meningkatkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
		2. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	1. Persentase Bencana yang ditangani

Tabel 5.1

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang berlandaskan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah

No	Misi	Tujuan/ Indikator	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi akhir 2026
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
1.	Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya	1. Meningkatkan aktifitas pembangunan bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK Indikator: - Meningkatkan aktifitas bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK	1. Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	1. Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
				2. Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh badan amil zakat	10.685.646.919	10.899.359.857	11.113.072.796	11.326.785.734	11.540.498.673	11.754.211.611	11.967.924.549
			2. Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandasrkan ABS-SBK	1. Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif	56,88%	61,59%	66,30%	71,01%	75,72%	80,43%	85,14%
2.	Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian,	1. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja yang berbasis	1. Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	1. Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	29,81%	29,96%	30,10%	30,13%	30,19%	30,22%	30,35%

No	Misi	Tujuan/ Indikator	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi akhir 2026
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
	industri dan UMKM.	pertanian, industri dan UMKM Indikator: - PDRB Per Kapita - Tingkat Penganggura n Terbuka - Laju Pertumbuha n Ekonomi		2. Nilai Tukar Petani/ NTP	-	<100	<100	=100	>100	>100	>100
			2. Meningkatnya Daya Saing UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif	1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	10,48	11,26%	11,33%	11,38%	11,40%	11,46%	11,51%
				2. Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	13,35	13,74%	13,79%	13,85%	13,95%	14,02%	14,08%
			3. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah wirausaha baru	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.	Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.	1. Meningkatka n kualitas sumber daya manusia yang daya saing Indikator: - Indeks Pembanguna n Manusia	1. Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama sekolah	8,61	8,70	8,80	8,90	9,00	9,10	9,20
			2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1. Umur harapan hidup	69,94	70,23	70,50	70,78	71,05	71,33	71,60
				2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	17,8	17,2	17,1	17	16,8	16,6	16,5
			3. Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	1. Angka Kemiskinan	4,40	4,44	4,32	4,19	4,06	3,93	3,79
				2. IDG	97,57	98,00	98,00	98,00	98,1	98,1	98,1
				3. IPG	98,79	98,82	98,82	98,90	98,90	98,91	98,92

No	Misi	Tujuan/ Indikator	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi akhir 2026
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
4.	Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.	1. Mewujudkan Kabupaten Tanah Datar sebagai destinasi pariwisata yang unggul berbasis agama, budaya dan sumber daya alam Indikator: - Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB (sektor akomodasi dan makan minum)	1. Peningkatan Daya Saing Pariwisata sebagai Sumber Pertumbuhan Ekonomi Potensial	1. Jumlah Kunjungan Wisatawan	845,780	669,069	769,976	861,253	990,441	1,188,529	1,485,661
				2. Lama Tinggal Wisatawan	1 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	3 hari	3 hari
5.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien.	1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien Indikator: - Indek Reformasi	1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	1. Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
				2. Indeks Pengawasan Kearsipan	70,29 (BB)	75 (BB)	80 (BB)	83 (B)	85 (A)	90 (A)	95 (AA)
				3. Manajemen resiko level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
				4. Nilai SAKIP	64,26	67	69	71	75	79	80
			2. Meningkatnya	1. Indeks SPBE	0,8	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5

No	Misi	Tujuan/ Indikator	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi akhir 2026
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		birokrasi	birokrasi yang kapabel	2. Indeks Profesionalitas ASN	71,06	73,00	75,00	77,00	79,00	81,00	83
				3. Skor dan status kinerja pemerintah daerah	3,00	3,05	3,25	3,50	3,75	3,100	3,125
			3. Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,39	88,39	89,39	90,39	91,39	92,39	92,39
6.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan	1. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas Indikator: - Persentase infrastruktur berkualitas	1. Meningkatnya Kualitas Infratruktur Wilayah	Persentase Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas	74,55	75,14	74,86	75,87	76,78	77,71	78,01
		2. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan Indikator: - Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1. Meningkatkan Pelestarian Fungsi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,59	67,61	68,01	68,41	68,81	69,21	69,61

No	Misi	Tujuan/ Indikator	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian				Kondisi akhir 2026
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
		- Persentase bencana yang ditangani	Lingkungan Hidup								
			2. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Persentase Bencana yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100

5.6. Program Unggulan

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 didukung dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Tahun 2021-2026 yaitu:

1. **Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun**

   Perkembangan ekonomi suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di wilayah tersebut. Beberapa permasalahan dalam ketenagakerjaan yang ditemui masyarakat antara lain terkait dengan tingginya tingkat pengangguran, penyediaan lapangan kerja yang terbatas, serta produktivitas tenaga kerja yang relatif masih rendah. Penyelesaian dari permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu barometer keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru sehingga tingkat pengangguran dapat berkurang.

   Dengan adanya program unggulan Menciptakan usahawan baru dan lapangan kerja per tahun kedepannya diharapkan akan terbuka lapangan kerja baru baik dengan pola pemberdayaan usahawan itu sendiri maupun mendatangkan investor untuk menghidupkan industri yang cocok dengan alam dan potensi Tanah Datar. Investor yang akan menanamkan investasinya di Tanah Datar diharapkan dapat membuka lapangan kerja baru dalam rangka mengurangi pengangguran dan juga menjaga kestabilan harga komoditi dari hulu sampai hilir di Kabupaten Tanah Datar.

2. **Mengefisienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah**

   Kinerja di sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Tanah Datar. Kinerja ini perlu peningkatan dari tahun ketahun. Salah satu yang mempengaruhi kinerja pertanian adalah biaya produksi, untuk menekan biaya produksi ini akan dilakukan efesiensi dalam pengelolaan alsintan, khususnya dalam proses pembajakan sawah. Dengan mengefesienkan biaya produksi pertanian melalui bantuan pembajakan sawah diharapkan biaya produksi yang akan dikeluarkan oleh petani tidak terlalu besar tetapi mendapatkan keuntungan yang meningkat.

3. **Meningkatkan kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi**

   Beberapa hal lain yang juga mempengaruhi pendapatan petani adalah terjadinya musibah baik berupa gagal panen maupun kematian ternak, selain itu kemudahan mendapatkan pupuk juga menjadi poin penting dalam usaha meningkatkan usaha pertanian. Dengan adanya pemberian kuota asuransi tani dan ternak diharapkan petani yang mengalami musibah gagal panen atau peternak yang hewan ternaknya mati akan dilakukan penggantian melalui mekanisme asuransi. Kemudian pemerintah daerah juga berkomitmen meningkatkan kuota kartu tani guna mendapatkan pupuk bersubsidi, bibit dan bantuan pertanian lainnya.Kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk memberikan perlindungan bagi petani/kelompok tani yang mengalami gagal panen akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan kejadian bencana alam banjir serta kekeringan dengan target 1.000 Ha.

4. **Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan perizinan pada wilayah yang jauh ibukota kabupaten**

   Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Pada era baru ini paradigma pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, kepada masyarakatnya sudah mulai bergeser. Dimana dulunya masyarakat harus hadir di tempat lokasi pelayanan yang diberikan pemerintah, harus berpindah dari satu pelayanan ke pelayanan berikutnya, harus mengantri, memakan waktu yang cukup lama, bahkan juga tenaga dan biaya yang tentunya tidak sedikit bila harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Hal tersebut sekarang sudah mulai di minimalisir dimana salah satu cara dan solusi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar agar masyarakat yang berada cukup jauh dari pusat pelayanan adalah dengan menghadirkan sebuah konsep yang dinamakan: "pelayanan publik Tanah Datar di ujung jari". "Tanah Datar di ujung jari"adalah sebuah program kerja yang didesain untuk mendekatkan pelayanan publik Kabupaten Tanah Datar kepada masyarakat diseluruh nagari baik pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan perizinan, sehingga masyarakat dapat menerima pelayanan yang diberikan pemerintah daerah atau dari kantor wali nagari dari rumah melalui telepon pintar *smart phone*.

5. **Meningkatkan kesejahteraan guru TPA dan Tahfiz di Tanah Datar**

   Dalam rangka mendukung kebijakan strategis menjadikan Kabupaten Tanah Datar sebagai Kabupaten Tahfiz telah dilaksanakan beberapa program dan kegiatan yang merupakan kelanjutan dari RPJMD periode sebelumnya. Salah satu program yang penting dan sangat mendukung keberhasilan kegiatan ini adalah peningkatan kesejahteraan guru TPA dan Tahfiz. Pelaksanaan dari kegiatan ini pemberian insentif sehingga guru TPA dan Tahfiz lebih fokus mengajar anak-anak didiknya menjadi hafiz dan hafizah selain itu hal yang sangat penting adalah peningkatan anggaran untuk operasional rumah tahfiz. Kedepan diharapkan akan lahir satu rumah satu tahfiz.

6. **Satu nagari satu *event* untuk menunjang ekonomi kreatif, pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga dan produk nagari**

   Perkembangan pariwisata masih sangat tergantung pada keberadaan Istano Basa Pagaruyung. yang sampai saat ini masih belum tergantikan posisinya sebagai ikon pariwisata di Kabupaten Tanah Datar, bahkan di Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian, bukan berarti pengembangan pariwisata hanya difokuskan pada Istano Basa Pagaruyung saja.

   Pada periode RPJMD ini pemerintah daerah berkomitmen untuk mengembangkan industri ekonomi kreatif dengan merancang event-event pariwisata dan olah raga berbasis kearifan lokal masing-masing nagari dan kecamatan. Dengan adanya event-event ini diharapkan akan memacu aktifnya sanggar-sanggar nagari, klub olah raga dan UMKM yang ada.

7. **Peningkatan biaya operasional KAN, LKAAM, Bundo Kanduang dan Organisasi Keagamaan**

   Kabupaten Tanah Datar adalah tempat asal usul orang Minangkabau atau dikenal sebagai Luhak Nan Tuo. Dengan demikian, upaya untuk melestarikan nilai-nilai adat dan budaya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk menjaga identitas sebagai orang Minangkabau. Masyarakat Kabupaten Tanah Datar secara tipikal adalah masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat dan budaya Minangkabau. Secara empiris kita dapat melihat dari tingkat kepatuhan masyarakat kepada para Ninik Mamak/Penghulu/Pemangku Adat yang masih sangat kuat. Hal ini juga ditopang oleh keberadaan lembaga-lembaga adat di lingkungan masyarakat, seperti Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) dan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Lembaga-lembaga ini mempunyai peran yang sangat penting untuk menjaga dan melestarikan adat dan budaya Minangkabau. Dalam rangka mendukung peran penting lembaga adat maka pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan biaya operasional untuk KAN, LKAAM dan Bundo Kanduang sehingga lebih fokus untuk mendidik anak kamanakan dalam memahami adat dan budaya minangkabau. Hal ini penting untuk mengukuhkan Kabupaten Tanah Datar sebagai pusat kebudayaan minangkabau

8. **Membangun jaringan telekomunikasi**

   Perkembangan dunia teknologi informasi yang sangat cepat telah mendorong kemudahan akses informasi dan komunikasi, bahkan hingga ke daerah yang dulunya tidak terjangkau sekalipun. Hal ini tampak dari perkembangan jumlah jaringan komunikasi (tower penyedia jasa komunikasi seluler) yang terus meningkat setiap tahun. Rasio wartel/warnet cenderung mengalami stagnan dalam 5 tahun terakhir. Kondisi geografis seringkali menjadi faktor utama minimnya sinyal yang ada di suatu tempat. Bahkan tidak jarang semakin sulit medan dan kondisi geografisnya, sinyal komunikasi hilang sama sekali. Contohnya saja, suatu tempat yang terpencil di tengah hutan atau di wilayah pegunungan. Sinyal akan sulit didapatkan karena tidak adanya sarana pendukung untuk menangkap sinyal yang ada seperti BTS dan kabel optik. Terlebih bagi daerah dengan kondisi geografis terjal, akan sulit untuk dibangun sebuah BTS mengingat sulitnya material yang dibawa menuju tempat tersebut. Dengan kondisi topografi Kabupaten Tanah Datar yang berbukit dan bergelombang tidak semua daerah dapat dijangkau oleh sinyal untuk mengatasi hal tersebut maka pemerintah daerah akan membangun sarana dan prasarana pendukung telekomunikasi guna mengatasi *blank spot* di daerah yang belum mempunyaiakses jaringan internet.

9. **Meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan tenaga honorer**

   ASN merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahaan. Salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah kesejahteraan dimana penyelenggaraan ASN diarahkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup pegawai ASN. bahwa ASN berhak memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko

pekerjaannya serta berhak memperoleh jaminan sosial untuk meningkatkan produktivitas dan menjamin kesejahteraan. Selain itu untuk meningkatkan pelayanan publik maka diperlukan profesionalisme ASN sesuai dengan bidang tugas, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan diperlukan diklat ataupun bimtek bagi ASN guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

10. Perbaikan irigasi

Irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Manfaat irigasi umumnya digunakan pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian secara luas termasuk di dalamnya kebutuhan, peternakan, dan perikanan. Walaupun demikian kebutuhan irigasi untuk tanaman padi masih mendominasi kebutuhan irigasi secara menyeluruh. Sektor pertanian di Kabupaten Tanah Datar merupakan sektor terbesar dalam penyumbang PDRB hampir 29%, artinya masyarakat Kabupaten Tanah Datar menggantungkan hidupnya disektor pertanian. Guna meningkatkan hasil pertanian perlu didukung dengan membangun jaringan irigasi yang baik untuk melayani lahan persawahan yang belum terjangkau oleh aliran air maupun lahan sawah tadah hujan sehingga pola tanam dapat lebih ditingkatkan, dengan demikian kesejahteraan petani akan meningkat.

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2021-2026 dengan efektif dan efisien. Strategi dapat digunakan sebagai sarana untuk transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi secara komprehensif. Perencanaan strategi tidak hanya mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga program yang mendukung dan menciptakan pelayanan kepada masyarakat termasuk upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi dijadikan salah satu rujukan dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focused management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

Untuk menunjang pencapaian target RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 diperlukan dukungan dari berbagai sektor diantaranya melalui kerjasama antara kabupaten/Kota tetangga. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Datar adalah melalui BUKAPALIPATAR. BUKAPALIPATAR merupakan kerjasama antara Kota Bukitinggi, Kabupaten Agam, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kota Padang Panjang dan Kabupaten Tanah Datar yang ditandai dengan penandatangan MoU kerjasama antara Kabupaten/Kota yang tergabung pada Tahun 2017.

Kawasan Bukapalipatar ini mempunyai potensi yang sangat besar untuk dikembangkan, terutama dilihat dari Luas dan Jumlah Penduduk, dimana luas kawasan 16,29% dari luas wilayah Sumatera Barat dan jumlah penduduk 28,93 % dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat. Enam kabupaten dan kota ini diharapkan dapat saling dukung untuk mewujudkan pembangunan terpadu kawasan. Pada tahap awal program pembangunan tersebut akan difokuskan pada infrastruktur yang saling tersambung dan menunjang antara masing-masing kabupaten dan kota. Selanjutnya, akan diteruskan pada program lain seperti pariwisata, pendidikan, dan kesehatan.

Berbagai potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Tanah Datar dapat dikembangkan melalui kerjasama antara daerah. Sektor pariwisata Kabupaten Tanah Datar merupakan Destinasi Pariwisata Provinsi dengan tema kawasan pengembangan Minangkabau Tempo Dulu *(Ancient Minangkabau Tourism)* berdasarkan Perda Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-

2025 Potensi lain yakni pengembangan Industri Tektil dan Produk tekstil (tenunan, bordiran, Sulaman, songket, Konveksi,/Garmen),). Sektor pertanian Kab. Tanah Datara memiliki potensi yang besar terutama untuk tanaman padi, jagung, ubi kayu, kentang, sayur cabe, dan buah-buah seperti jeruk dan manggis. Disamping itu sektor budidaya perikanan darat, juga memiliki potensi yang cukup besar di Kabupaten Tanah Datar.

Isu-isu yang terkait dengan pengembangan kawasan BUKAPALIPATAR antara lain terkait dengan pembangunan infrastruktur seperti, peningkatan kualitas jalan yang mnghubungkan Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Agam serta Kabupaten 50 Kota, rencana pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru, pengelolaan sampah, pengendalian banjir/genangan, pemenuhan kebutuhan air bersih, pengembangan sumberdaya manusia dan sinkronisasi regulasi dan kebijakan dalam kawasan BUKAPALIPATAR.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Misi 1: Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya

Fenomena kehidupan masyarakat dilihat dari aspek agama dan budaya yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Agama sebagai pedoman hidup manusia yang diciptakan oleh Tuhan dalam menjalani kehidupannya. Dalam kehidupan beradat dan berbudaya masyarakat kabupaten Tanah Datar telah mengenal "*adat basandi syara', syara' basandi kitabullah*" dalam tatanan bermasyarakat.

Strategi pembangunan daerah untuk mewujudkan misi satu antara lain penguatan lembaga TPA/MDTA dan rumah tahfiz, meningkatkan kapasitas badan amil zakat, penguatan pemahaman tentang adat salingka nagari, meningkatkan perlindungan pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan.

Misi 2 : Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis Pertanian, Industri dan UMKM

Strategi dalam mewujudkan misi dua antara lain mengembangkan komoditi unggulan daerah sektor pertanian, perikanan dan peternakan, penurunan biaya produksi tingkat petani melalui layanan jasa alsintan dan bajak gratis bagi petani keluarga miskin, pemberian asuransi tani, ternak dan pupuk bersubsidi, penetapan kawasan ekonomi strategis dan hilirisasi produk pertanian, perikanan dan peternakan serta perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LPPB).

Untuk pengembangan sektor pertanian, Kabupaten Tanah Datar bersinergi dengan prioritas Provinsi Sumatera Barat, diharapkan kebijakan alokasi 10% APBD Provinsi Sumatera Barat untuk sektor pertanian dapat diperoleh secara optimal oleh Kabupaten Tanah Datar.

Strategi dalam mewujudkan misi dua di sektor perdagangan dan UMKM adalah menciptakan wirausahawan pemula serta peningkatan jaringan pemasaran secara digital.

Kekuatan yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar dalam mewujudkan misi dua adalah potensi sumber daya alam berupa tanah yang subur dan iklim yang cocok untuk pengembangan sektor pertanian, kearifan lokal dan budaya serta kuantitas pelaku usaha pada Sektor UMKM dan IKM memiliki kecenderungan yang terus meningkat di Kabupaten Tanah Datar. Keberadaan Sentra Tenun di Kabupaten Tanah Datar dan Songket Pandai Sikek yang telah dikenal secara luas merupakan beberapa potensi disamping banyak potensi

lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

Beberapa kelemahan yang menjadi perhatian diantaranya adalah struktur ekonomi Kabupaten Tanah Datar masih bertumpu pada sektor pertanian. Namun produk hasil pertanian masih belum diikuti oleh hilirisasi produk yang belum memiliki nilai tambah bernilai ekonomis tinggi. Hal lain yang patut diwaspadai adalah rendahnya daya saing UMKM dan Koperasi serta masih minimnya pelaku usaha yang bergerak dalam ekonomi kreatif, belum terbangunnya pusat-pusat ekonomi kreatif dan rendahnya Inovasi dan kewirausahaan masyarakat. Ekonomi kreatif diyakini akan menjadi penyokong kekuatan ekonomi nasional ditengah resesi ekonomi yang terjadi.

Digitalisasi dalam segala aspek kehidupan merupakan peluang yang bisa dimanfaatkan dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Melalui digitalisasi, pemasaran, promosi produk pertanian dan UMKM serta potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar bisa dilakukan secara massif dan diharapkan memberikan efek positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rendahnya akses petani dan pelaku UMKM pada lembaga keuangan disinyalir menjadi salah satu penyebab dalam pengembangan skala usaha akibat keterbatasan modal. Hal ini secara signifikan juga berpengaruh pada daya saing produk pertanian dan UMKM yang saat ini dihadapkan persaingan sesuai mekanisme pasar bebas. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah tambahan angkatan kerja setiap tahunnya belum disertai dengan penambahan ketersediaan lapangan kerja baru sehingga menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang belum terserap baik di sektor formal maupun informal. Strategi yang akan digunakan dalam mengatasi permasalahan ini adalah melalui penciptaan 1.000 wirausaha baru, hal ini sejalan dengan program unggulan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Misi 3: Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Strategi dalam mewujudkan misi tiga antara lain Peningkatan akses layanan pendidikan, peningkatan akses layanan kesehatan sesuai standar, peningkatan kinerja tenaga penyuluh Keluarga Berencana (KB) dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Jorong (PPKBJ) dan Sub PPKBJ dalam penyuluhan program bagi keluarga dan meningkatkan peran serta fungsi pengarustamaan gender (PUG).

Kekuatan yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar dalam mewujudkan misi tiga adalah sarana prasarana dan sumber daya manusia bidang pendidikan dan bidang kesehatan sudah cukup memadai, untuk dapat membantu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Misi 4 : Pembangunan Pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam.

Strategi Untuk mewujudkan Misi 4 antara lain adalah melengkapi dan memperbaiki amenitas dan aksesbilitas destinasi wisata, meningkatkan even wisata, meningkatkan promosi dan branding pariwisata daerah, memperkuat manajemen dan kelembagaan pariwisata, mendorong kolaborasi Bumnag dan Pokdarwis dalam pengelolaan desa wisata, penyusunan regulasi pengelolaan destinasi wisata daerah, mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata, mengembangkan *mass tourism*, pengembangan

konsep pariwisata geopark, peningkatan SDM pelaku wisata, pengembangan konsep agrowisata, penguatan nilai-nilai kearifan lokal sebagai daya tarik wisata budaya, optimalisasi penyelenggaran event pariwisata daerah, meningkatkan kualitas investasi dan iklim usaha yang kondusif, pemetaan potensi penanaman modal disektor pariwisata, meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penanaman modal, meningkatkan promosi penanaman modal sektor pariwisata.

Kekuatan yang dimiliki Kabupaten Tanah Datar dalam mewujudkan misi empat berupa kekayaan adat istiadat dan dikenal sebagai pusat budaya Minangkabau serta ditunjang oleh keindahan alamnya.

Pembangunan pariwisata diharapkan sebagai sumber ekonomi potensial yang akan memberi dampak berkembangnya sektor-sektor lainnya seperti akomodasi dan perhotelan, UMKM, agro industri, penyerapan tenaga kerja dan berbagai sektor lainnya. Pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan memperhatikan ketahanan budaya, kelestarian alam dan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan serta melindungi tenaga kerja lokal.

Arah kebijakan bidang pariwisata adalah meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, meningkatkan lama tinggal wisatawan, dan Deregulasi investasi dalam membangun image lembaga perizinan usaha yang ramah dan kemudahan berinvestasi.

Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien

Strategi dalam mewujudkan misi lima antara lain penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntasi pemerintah, meningkatkan kelembagaan perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi, penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, meningkatan kapasitas APIP, meningkatan pengelolaan dan pelayanan kearsipan, meningkatkan pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi, meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil, meningkatkan wawasan kebangsaan dan meningkatkan pelayanan publik.

Kekuatan Kabupaten Tanah Datar dalam misi ini adalah sudah mulai terbangunnya semangat aparat sipil negara (ASN) untuk menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima yang makin berkualitas, serta sudah ada institusi yang menerapkan zona integritas. Namun, masih ditemukan kelemahan karena penerapan insentif dan disinsentif belum dilaksanakan di setiap institusi pemrintah sehingga semangat ASN juga belum stabil untuk selalu memperjuangkan tata kelola yang bersih dan pelayanan publik yang prima di setiap lini.

Misi 6 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Strategi dalam mewujudkan misi enam antara lain berupa penyediaan infrastruktur wilayah yang berkualitas, meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan meningkatkan kapasitas penanganan kebencanaan.

Kekuatan Kabupaten Tanah Datar dalam misi ini adalah ketersediaan akses jalan sudah mencakup seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar

walaupun kualitasnya belum memadai. Infrastruktur wilayah merupakan suatu kebutuhan wajib untuk mendukung aksesibilitas setiap kegiatan sektoral masyarakat. Peningkatan infrastruktur wilayah menjadi penting untuk ditingkatkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang meliputi lingkungan pusat maupun lingkungan perdesaan.

Kelestarian lingkungan hidup juga tidak luput dari perhatian pemerintah untuk dijaga selama melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah tentu berdasarkan kajian lingkungannya. Selain itu pemanfaatan ruang yang sesuai disertai adanya kesigapan pemerintah dalam menanggulangi bencana tidak dapat dipisahkan dalam merencanakan dan menerapkan strategi maupun arah kebijakan.

Peningkatan infrastruktur wilayah dimaksudkan untuk memperkecil kesenjangan pertumbuhan dan ketimpangan wilayah dengan memperhatikan aspek kondisi fisik lingkungan, pemanfaatan ruang dan daerah rawan bencana dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan dan finanasial Kabupaten Tanah Datar. Strategi dan arah kebijakan Kabupaten Tanah Datar yang meluputi Peningkatan infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup yang berkelanjutan dirumuskan dengan mempertimbangkan banyak sektor demi mencapai tujuan daerah.

Berdasarkan pada identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ditemukan dalam upaya mewujudkan misi Kabupaten Tanah Datar maka disusunlah strategi pembangunan daerah seperti Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 - 2026

MISI		SASARAN		STRATEGI	
MISI 1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya					
Tujuan 1	Meningkatkan aktifitas pembangunan bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK	Sasaran 1.1	Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat	Strategi 1.1.1	Penguatan kelembagaan TPA/MDTA dan rumah tahfidz
				Strategi 1.1.2	Peningkatan kuantitas dan kualitas guru tahfidz
				Strategi 1.1.3	Pendidikan tahfidz di sekolah
				Strategi 1.1.4	Meningkatkan kapasitas badan amil zakat
				Strategi 1.1.5	Meningkatkan peran masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan
				Strategi 1.1.6	Meningkatkan akftifitas kegiatan kelompok keagamaan
		Sasaran 1.2	Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berlandaskan ABS-SBK	Strategi 1.2.1	Penguatan Pemahaman tentang adat salingka nagari
				Strategi 1.2.2	Penguatan pemahaman suatu produk hukum adat
				Strategi 1.2.3	Meningkatkan perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan
				Strategi 1.2.4	Meningkatkan pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan
				Strategi 1.2.5	Meningkatkan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
				Strategi 1.2.6	Meningkatkan pembinaan SDM dan lembaga kebudayaan
				Strategi 1.2.7	Meningkatkan kapasitas tata kelola lembaga budaya
				Strategi 1.2.8	Meningkatkan pembinaan SDM dan lembaga adat
				Strategi 1.2.9	Meningkatkan kapasitas tata kelola lembaga adat

MISI		SASARAN		STRATEGI	
MISI 2 Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis Pertanian, Industri dan UMKM					
Tujuan 1	Meningkatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industry dan UMKM	Sasaran 2.1	Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	Strategi 2.1.1	Pengembangan komoditi pertanian bernilai ekonomi tinggi
				Strategi 2.1.2	Bantuan bajak gratis bagi petani KK Miskin
				Strategi 2.1.3	Peningkatan jasa layanan brigade alat dan mesin pertanian (alsintan)
				Strategi 2.1.4	Meningkatkan Kualitas jaringan irigasi pertanian
				Strategi 2.1.5	Mendorong petani untuk tergabung dalam kelompok tani dalam rangka meningkatkan kuota pupuk bersubsisdi
				Strategi 2.1.6	Peningkatan usaha perikanan budidaya dan tangkap antara lain lele, nila, gurame, mas, bilih
				Strategi 2.1.7	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
				Strategi 2.1.8	Meningkatkan SDM Petani dan Penyuluh
				Strategi 2.1.9	Meningkatkan SDM petugas dan pelaku usaha perikanan
				Strategi 2.1.10	Pemanfaatan lahan marginal dalam rangka ekstensifikasi pertanian
				Strategi 2.1.11	Pengembangan varietas unggul lokal
				Strategi 2.1.12	Budidaya padi salibu, jarwo
				Strategi 2.1.13	Pengendalian hama terpadu
				Strategi 2.1.14	Pengendalian hama dan penyakit ikan
				Strategi 2.1.15	Pemanfaatan lahan terbatas dengan budidaya ikan sistem bioflop dan terpal
				Strategi 2.1.16	Fasilitasi Realisasi Agro Industri Daerah
				Strategi 2.1.17	Digitalisasi pemasaran produk pertanian
				Strategi 2.1.18	Pengembangan kerja sama pemasaran produk pertanian

MISI		SASARAN		STRATEGI	
				Strategi 2.1.19	Pengembangan Toko Tani Indonesia Center (TTIC)
				Strategi 2.1.20	Peningkatan penggunaan pupuk organik
				Strategi 2.1.21	Perlindungan LP2B
				Strategi 2.1.22	Asuransi usaha ternak sapi/kerbau dan asuransi usaha tanaman pangan
				Strategi 2.1.23	Meningkatkan efisiensi produksi
				Strategi 2.1.24	Pengembangan pasca panen dan pengolahan komoditi pertanian
				Strategi 2.1.25	Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
				Strategi 2.1.26	Transformasi sektor pertanian sebagai salah satu penggerak perekonomian berdasarkan potensi keunggulan lokal, kewilayahan komoditi dan menjadikan daerah yang memiliki komoditi tertentu untuk menjadi pilot projek transformasi bidang pertanian
				Strategi 2.1.27	Penguatan peranan perusahaan daerah (Perusda) sebagai lembaga pemasaran produk pertanian
				Strategi 2.1.28	Pemberdayaan dan peningkatan pengembangan pangan lokal
				Strategi 2.1.29	Peningkatan pengelolaan panen, pasca panen komoditi pangan pokok dalam rangka peningkatan cadangan pangan daerah.
		Sasaran 2.2	Meningkatnya daya saing UMKM, Koperasi dan ekonomi kreatif	Strategi 2.2.1	Pengembangan Kerjasama Pemasaran Produk UMKM dengan Potential Buyers
				Strategi 2.2.2	Digitalisasi dalam perluasan pasar sektor industri dan perdagangan
				Strategi 2.2.3	Melakukan kerja sama BumNag dan Perusda dalam pemasaran Produk UMKM
				Strategi 2.2.4	Fasilitasi akses keuangan bagi UMKM dan petani (Koperasi, Bank Wakaf Mikro, Lembaga Keuangan Mikro, Agen Laku Pandai dan lain-lain

MISI		SASARAN		STRATEGI	
				Strategi 2.2.5	Peningkatan Mutu dan Kapasitas Produk UMKM melalui pengembangan inovasi dan mutu produk UMKM sektor industri dan perdagangan
				Strategi 2.2.6	Peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM disektor unggulan (Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan)
				Strategi 2.2.7	Mengembangkan UMKM sector industry dan perdagangan berbasis potensi daerah
				Strategi 2.2.8	Peningkatan daya saing produk melalui peningkatan kualitas SDM, peralatan produksi, standarisasi produk, dan pemasaran
				Strategi 2.2.9	Peningkatan SDM pengelola koperasi
				Strategi 2.2.10	Meningkatkan usaha kemitraan
				Strategi 2.2.11	Modernisasi Koperasi berbasis digitalisasi
		Sasaran 2.3	Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Strategi 2.3.1	Penguatan pelayanan perizinan penanaman modal
				Strategi 2.3.2	Penyusunan kajian rencana umum penanaman modal daerah
				Strategi 2.3.3	Penyelenggaraan kegiatan promosi peluang investasi daerah
				Strategi 2.3.4	Meningkatkan kualitas iklim penanaman modal yang kondusif
				Strategi 2.3.5	Diregulasi penanaman modal untuk penyederhanaan birokrasi
				Strategi 2.3.6	Dibentuknya PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu)
				Strategi 2.3.7	Peningkatan kompetensi dan produktifitas tenaga kerja
				Strategi 2.3.8	Optimalisasi perluasan kesempatan kerja disektor formal dan informal
				Strategi 2.3.9	Penguatan peran BLK dalam peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kerja
				Strategi 2.3.10	Fasilitasi penumbuhan wirausaha disektor unggulan (Pertanian, Pariwisata, Industri dan Perdagangan)
				Strategi 2.3.11	Meningkatkan kualitas perencanaan tenaga kerja

MISI		SASARAN		STRATEGI	
				Strategi 2.3.12	Meningkatkan tingkat pendidikan angkatan kerja dengan mendorong lulusan SMA melanjutkan ke perguruan tinggi
MISI 3 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing					
Tujuan 1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing	Sasaran 3.1	Meningkatnya mutu pendidikan	Strategi 3.1.1	Peningkatan mutu layanan pendidikan
				Strategi 3.1.2	Peningkatan akses layanan pendidikan
				Strategi 3.1.3	Peningkatan penerapan kebijakan merdeka belajar
				Strategi 3.1.4	Peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
				Strategi 3.1.5	Peningkatan jumlah koleksi judul buku perpustakaan
				Strategi 3.1.6	Peningkatan jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat
				Strategi 3.1.7	Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga yang representatif
				Strategi 3.1.8	Meningkatkan prestasi dan daya saing olahraga
				Strategi 3.1.9	Meningkatkan pelaksanaan olahraga budaya
				Strategi 3.1.10	Meningkatkan peran serta dan daya saing pemuda
				Strategi 3.1.11	Meningkatkan program keterampilan kemandirian dan kewirausaahan pemuda
		Sasaran 2.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Strategi 3.2.1	Peningkatan akses layanan sesuai standar
				Strategi 3.2.2	Meningkatkan promosi kesehatan pada semua program
				Strategi 3.2.3	Penguatan pemahaman delapan fungsi keluarga
				Strategi 3.2.4	Penurunan Angka Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita
				Strategi 3.2.5	penguatan sinergitas kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk
				Strategi 3.2.6	Penguatan kapasitas fasilitas kesehatan (faskes) dan jaringan

MISI		SASARAN		STRATEGI	
				Strategi 3.2.7	Peningkatan kualitas dan ketahanan remaja dalam kehidupan keluarga
				Strategi 3.2.8	Peningkatan kinerja tenaga penyuluh KB dan pemberdayaan masyarakat melalui penggerakan kader PPKBJ dan sub PPKBJ dalam penyuluhan program bagi keluarga
				Strategi 3.2.9	Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar bidang yang ada di RSUD
				Strategi 3.2.10	Mengoptimalkan segala sumber daya yang tersedia
				Strategi 3.2.11	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan tingkat rujukan
		Sasaran 3.3	Meningkatkan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Strategi 3.3.1	Meningkatkan sinergitas dan integrasi program penanggulangan kemiskinan
				Strategi 3.3.2	Meningkatkan potensi sumber kesejahteraan sosial dan kelembagaan sosial dalam pelayanan
				Strategi 3.3.3	Meningkatkan pelaku ekonomi perempuan
				Strategi 3.3.4	Meningkatkan peran perempuan di partai politik
				Strategi 3.3.5	Meningkatkan advokasi terhadap perempuan dan anak
				Strategi 3.3.6	Meningkatkan peran dan fungsi Pengarusutamaan Gender (PUG)
MISI 4.Pembangunan Pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam					
Tujuan 1	Mewujudkan Kab. Tanah Datar sebagai Destinasi pariwisata yang unggul berbasis agama, budaya dan sumber daya alam	Sasaran 4.1	Peningkatan daya saing Pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial	Strategi 4.1.1	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Objek Wisata unggulan daerah
				Strategi 4.1.2	Optimalisasi Penyelenggaran Event Pariwisata Daerah melalui program satu nagari satu even

MISI		SASARAN		STRATEGI	
				Strategi 4.1.3	Meningkatkan promosi dan Branding Pariwisata daerah
				Strategi 4.1.4	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah
				Strategi 4.1.5	Mendorong Kolaborasi BUMNag dan Pokdarwis dalam pengelolaan Desa Wisata
				Strategi 4.1.6	Memperkuat menajemen dan kelembagaan pariwisata
				Strategi 4.1.7	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Pariwisata melalui KPBU/Sumber pembiayaan daerah lainnya
				Strategi 4.1.8	Penyusunan regulasi pengelolaan destinasi wisata daerah
				Strategi 4.1.9	Mengembangkan mass tourism
				Strategi 4.1.10	Peningkatan SDM Pelaku Wisata
				Strategi 4.1.11	Pengembangan konsep agrowisata
				Strategi 4.1.12	Meningkatkan kualitas investasi dan iklim usaha yang kondusif
				Strategi 4.1.13	Pemetaan potensi penanaman modal disektor pariwisata
				Strategi 4.1.14	Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam penanaman modal
				Strategi 4.1.15	Meningkatkan promosi penanaman modal sektor pariwisata
				Strategi 4.1.16	Menyiapkan tenaga ahli bidang pariwisata pada OPD terkait yang dapat memperbaiki cara berfikir untuk membangun pariwisata
				Strategi 4.1.17	Memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha pariwisata untuk sertifikasi CHSE (Kebersihan, Keselamatan, Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan) dalam rangka memberikan jaminan kepada wisatawan
				Strategi 4.1.18	Mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
				Strategi 4.1.19	Melengkapi dan memperbaiki amenitas dan aksesbilitas Destinasi wisata

MISI		SASARAN		STRATEGI	
				Strategi 4.1.20	Pengembangan konsep pariwisata geopark di Tanah Datar
				Strategi 4.1.21	Pengembangan Konsep hutan kayu budaya sebagai pelestarian alam yang mendukung pariwisata daerah
				Strategi 4.1.22	Penguatan literasi budaya minangkabau
				Strategi 4.1.23	Penguatan nilai-nilai kearifan lokal sebagai daya tarik wisata budaya
				Strategi 4.1.24	Pengembangan Paket Wisata di Daerah oleh Pokdarwis
				Strategi 4.1.25	Penguatan peran lembaga adat dan budaya dalam pengembangan pariwisata
MISI 5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien					
Tujuan 1	Meningkatkan Tata Kelole Pemeritah yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Sasaran 5.1	Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Strategi 5.1.1	Penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah
				Strategi 5.1.2	Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan
				Strategi 5.1.3	Peningkatan tata kelola keuangan dan asset
				Strategi 5.1.4	Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah
				Strategi 5.1.5	Kerjasama dengan instansi lain
				Strategi 5.1.6	Pengembangan sistem informasi pengelolaan pendapatan
				Strategi 5.1.7	Peningkatan pengelolaan dan pelayanan kearsipan
				Strategi 5.1.8	Meningkatkan kelembagaan perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi
				Strategi 5.1.9	Peningkatan kesadaran dan kompetensi APIP untuk memiliki kapabilitas berkelas dunia
		Sasaran 5.2	Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Strategi 5.2.1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
				Strategi 5.2.2	Mengembangkan inovasi dan hasil kelitbangan daerah

MISI		SASARAN		STRATEGI	
				Strategi 5.2.3	Meningkatnya penerapan sistem informasi perencanaan pelaksanaan dan pelaporan pemerintah daerah
				Strategi 5.2.4	Penerapan sistem pemerintah berbasis elektronik
		Sasaran 5.3	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Strategi 5.3.1	Meningkatkan pelayanan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
				Strategi 5.3.2	Meningkatkan fasilitas alat penunjang pelayanan publik
				Strategi 5.3.3	Meningkatkan pembinaan administrasi kependudukan kepada petugas registrasi nagari
				Strategi 5.3.4	Meningkatkan pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi
				Strategi 5.3.5	Meningkatan pelayanan pembuatan rekomendasi penelitian dan rekomendasi izin keramaian
				Strategi 5.3.6	Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertical
				Strategi 5.3.7	Meningkatkan koordinasi dengan instansi OPD terkait
				Strategi 5.3.8	Meningkatkan nilai-nilai ideologi dan pancasila
				Strategi 5.3.9	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pemilu dan pilkada
				Strategi 5.3.10	Meningkatnya kesadaran ormas terhadap legalitas ormas
				Strategi 5.3.11	Melaksanakan kebijakan penegakan Perda dan Perkada penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
				Strategi 5.3.12	Meningkatnya penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
				Strategi 5.3.13	Meningkatkan koordinasi peningkatan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait

MISI		SASARAN		STRATEGI	
				Strategi 5.3.14	Meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukumatas pelaksanaan Perda dan Perkada
				Strategi 5.3.15	Meningkatkan pelayanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
				Strategi 5.3.16	Layanan Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
				Strategi 5.3.17	Layanan pemberdayaan masyarakat
				Strategi 5.3.18	Menindaklanjuti seluruh pengaduaan masyarakat yang berindentitas jelas
				Strategi 5.3.19	Meningkatkan kualitas produk hukum
				Strategi 5.3.20	Penataan sistem, norma mekanisme dan prosedur pelayanan publik
				Strategi 5.3.21	Meningkatkan kualitas dan kuantitas barang dan jasa
				Strategi 5.3.22	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pengadaan barang dan jasa
MISI 6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan					
Tujuan 1	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas	Sasaran 6.1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah	Strategi 6.1.1	Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan
				Strategi 6.1.2	Meningkatkan prasarana lalu lintas
				Strategi 6.1.3	Meningkatkan sarana dan prasaran gedung pemerintah
				Strategi 6.1.4	Meningkatkan kualitas jaringan irigasi
				Strategi 6.1.5	Meningkatkan pengembangan struktur ruang
				Strategi 6.1.6	Meningkatkan kualitas hunian perumahan
				Strategi 6.1.7	Meningkatkan kualitas data dan informasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
				Strategi 6.1.8	Menurunkan persentase luasan permukiman kumuh
				Strategi 6.1.9	Meningkatkan cakupan pelayanan air minum
				Strategi 6.1.10	Meningkatkan rumah yang bersanitasi layak

MISI		SASARAN		STRATEGI	
Tujuan 2	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Sasaran 6.2	Meningkatkan pelestarian fungsi lingkungan hidup	Strategi 6.2.1	Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
				Strategi 6.2.2	Meningkatkan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
				Strategi 6.2.3	Meningkatkan pengelolaan sampah
				Strategi 6.2.4	Memberikan penghargaan di bidang lingkungan hidup
				Strategi 6.2.5	Memfasilitasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal terkait dengan PPLH
				Strategi 6.2.6	Menyusun perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup
				Strategi 6.2.7	Meningkatkan Pembinaan dan Pengendalian B3 dan Limbah B3
				Strategi 6.2.8	Meningkatkan SDM bidang lingkungan hidup
		Sasaran 6.3	Meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Strategi 6.3.1	Meningkatkan kapasitas penanganan kebencanaan
				Strategi 6.3.2	Menyediakan informasi, sarana prasarana dan SDM penanggulangan bencana

6.2. Kebijakan Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

6.2.1. Wilayah Pengembangan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar

Wilayah Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah agraris dengan potensi utama adalah Sektor pertanian dan perkebunan dengan komoditi utama antara lain padi, pisang, manggis, durian, ubi jalar, bawang, cabe, karet, kakao, kasiavera, kopi, jagung, sapi, perikanan darat. Pengembangan Ekonomi Kabupaten Tanah Datar tidak hanya difokuskan pada potensi utama, namun juga potensi lain seperti wisata alam yang besar seperti kawasan danau Singkarak, Lembah Anai, Aua Sarumpun, Panorama Puncak Pato dan beberapa potensi wisata alam lainnya yang dapat dijadikan sebagai pusat pertumbuhan/pusat pengembangan industri kepariwisataan (baik alam , buatan, dan minat khusus) yang lokasinya tersebar di 14 kecamatan.

Selain Potensi alam tersebut, sebagian wilayah di Kabupaten Tanah Datar juga memilik beberapa Potensi untuk dikembangkan yakni :

- Industri kerajinan Sentra Industri Tenun,
- Industri Olahan makanan/kuliner, Pasar Van der Capellen sebagai pasar Kuliner),
- Peternakan unggas (ayam petelur dan pedaging).

Pengembangan Potensi-potensi di Kabupaten Tanah Datar tersebut telah sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memposisikan Kabupaten Tanah Datar berada pada koridor Ekonomi Gerbang Timur Provinsi Sumatera Barat yang merupakan pendukung kota Padang sebagai pusat pertumbuhan utama.

Untuk pengembangan potensi pertanian di Kabupaten Tanah Datar juga didukung melalui SK Gubernur Nomor 521-849/2019 Tanggal 13 November tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi dimana Kabupaten Tanah Datar ditetapkan sebagai sentra Padi, jagung, pisang, manggis, durian, ubi jalar, bawang merah, cabe, kakao, kopi, karet.

6.2.2 Pengembangan Kawasan Budidaya

a. Kawasan Sentra Produksi (KSP) Pertanian dan Perikanan Budidaya

Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian di Kabupaten Tanah Datar difokuskan untuk mengoptimalkan produktivitas dan peningkatan daya saing produk hasil pertanian dan pemasaran, ini ditujukan agar dapat memberikan kontribusi besar dalam rangka pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komoditi utama yang akan menjadi fokus dalam Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian di Kabupaten Tanah Datar antara lain :

- Tanaman Pangan dan Hortikultura : Padi, jagung, ubi jalar, jeruk, pisang, manggis, sayuran, kentang, bawang merah, tomat, cabe, tanaman hias (bunga), durian.
- Perkebunan : Karet, Kakao, Kopi, Tebu
- Peternakan : Sapi, unggas, kambing
- Perikanan budidaya : Ikan Mas, nila, lele, gurame
- Pengembangan Tanah Datar sebagai kawasan integrasi ternak sapi dan tanaman perkebunan (kakao)

Lokasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi di Kabupaten Tanah Datar tidak ditetapkan secara khusus karena kondisi eksisting di lapangan terdapat

kecamatan yang memiliki lebih dari satu potensi untuk dilakukan pengembangan. Seperti misalnya Kecamatan X Koto yang tidak hanya memiliki potensi Tanaman Pangan dan Hortikultura tapi juga memiliki potensi peternakan untuk dikembangkan.

b. Kawasan Agribisnis

Pengembangan kawasan agribisnis bertujuan untuk membangun keterkaitan dari hulu sampai hilir yang bertujuan untuk mencapai multiplier efek secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara pengembangan terpadu yang mencakup usaha pertanian, mengembangkan industri pengolahan, fasilitasi pemasaran dan penyediaan jasa penunjang yang mencakup infrastruktur,sarana transportasi, akses permodalan dan fasilitasi penggunaan teknologi.

Komoditi yang mempunyai potensi untuk dikembangkan dalam kawasan agribisnis di Kabupaten Tanah Datar antara lain Daging yang bisa dikembangkan di Kecamatan Lima Kaum sayuran dataran tinggi di Kecamatan X Koto, Kecamaatan Salimpaung, dan kakao di beberapa Kecamatan lainnya di Kabupaten Tanah Datar.

c. Kawasan Sentra Industri

Rencana pengembangan kawasan sentra industri di Kabupaten Tanah Datar berlokasi di Kecamatan X Koto dan Kecamatan Lintau Buo dengan Produk utamanya adalah Tenun khas daerah. Namun tidak menutup kemungkinan pengembangan sentra industi tidak hanya diwilayah tersebut tapi juga di beberapa kecamatan lainnya dengan mengembangkan sentra industri pengolahan kakao, industri pengolahan makanan, industri pengolahan kulit, Industri Pengolahan Tekstil dan Produk Tekstil. Hal ini telah sejalan dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 – 2038, dimana Kabupaten Tanah Datar ditetapkan sebagai sentra industri pengolahan makanan dan industri pengolahan kulit, industri pengolahan tekstil.

d. Kawasan Pariwisata

Sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025, Kabupaten Tanah Datar merupakan bagian dari Destinasi Pariwisata Provinsi dengan tema utama sebagai kawasan pengembangan Minangkabau Tempo dulu (*Ancient Minangkabau Tourism*). Dalam Rencana Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 tersebut, Kabupaten Tanah Datar juga menjadi bagian dari Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), meliputi : Kawasan heritage Istano Basa Pagaruyung – Nagari Tuo Pariangan – PDIKM dan sekitarnya, serta Kawasan pariwisata alam dan geowisata Singkarak – Pulau Belibis – Danau Kembar dan sekitarnya;

Sejalan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 tersebut, Kabupaten Tanah Datar akan menjadikan pariwisata sebagai sektor penggerak perekonomian selain sektor utama pertanian. Pengembangan Kawasan Pariwisata di Kabupaten Tanah Datar tidak hanya akan berfokus pada pengembangan Destinasi Wisata Alam, namun juga akan mengkombinasikannya dengan mengeksplorasi dan pengembangan wisata yang berbasis adat istiadat, budaya, kearifan lokal dan berbagai keragaman atraksi kesenian yang dimiliki untuk menambah daya tarik wisata di daerah ini.

6.3. Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 - 2026 dirumuskan berdasarkan pertimbangan untuk pencapaian target indikator sasaran yang ditetapkan pada setiap misi dan strategi yang dijalankan.

Dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan daerah, khususnya mengenai fokus atau tema pembangunan tahunan dalam satu priode RPJMD perlu memperhatikan beberapa faktor diantaranya pencapaian indikator sasaran yang termuat dalam tiap misi. Hal ini sebagai dasar untuk menentukan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai target indikator sasaran pada setiap misi sehingga semakin jelas tahapan dan ukuran target yang akan dicapai setiap tahunnya.

Selanjutnya arah kebijakan pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2021-2026 yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, pembangunan kota, janji politik, serta pertimbangan strategis lainnya yang dinilai penting. Hasil perumusan arah kebijakan yang menjadi prioritas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.2
Arah Kebijakan
Kabupaten Tanah Datar

Arah Kebijakan					
	Tahun-1	**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
Misi 1 Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya					
1	Optimalisasi peran TPA/MDTA dan rumah tahfidz	Optimalisasi peran TPA/MDTA dan rumah tahfidz	Optimalisasi peran TPA/MDTA dan rumah tahfidz	Optimalisasi peran TPA/MDTA dan rumah tahfidz	Optimalisasi peran TPA/MDTA dan rumah tahfidz
2	Pembinaan lembaga amil zakat secara profesional	Pembinaan lembaga amil zakat secara professional	Peningkatan lembaga amil zakat secara professional	Peningkatan lembaga amil zakat secara profesional	Peningkatan lembaga amil zakat secara profesional
3	Peningkatan sinergisitas dalam pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat secara profesional	Peningkatan sinergisitas dalam pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat secara profesional	Peningkatan sinergisitas dalam pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat secara profesional	Peningkatan sinergisitas dalam pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat secara profesional	Peningkatan sinergisitas dalam pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat secara profesional
4	Peningkatan jumlah Muzakki pada BAZNAS	Peningkatan jumlah Muzakki pada BAZNAS	Peningkatan jumlah Muzakki pada BAZNAS	Peningkatan jumlah Muzakki pada BAZNAS	Peningkatan jumlah Muzakki pada BAZNAS
5	Penguatan peran dan fungsi pengurus dan Imam Masjid Binaan Pemda	Penguatan peran dan fungsi pengurus dan Imam Masjid Binaan Pemda	Peningkatan peran dan fungsi pengurus dan Imam Masjid Binaan Pemda	Peningkatan peran dan fungsi pengurus dan Imam Masjid Binaan Pemda	Peningkatan peran dan fungsi pengurus dan Imam Masjid Binaan Pemda

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
6	Perencanaan pembangunan masjid yang representative	Pelaksanaan Pembangunan masjid yang representative	Pelaksanaan Pembangunan masjid yang representative	Pemeliharaan Pembangunan masjid yang representative	Pemeliharaan masjid yang representative
7	Penguatan peran dan fungsi lembaga agama	Penguatan peran dan fungsi lembaga agama	Penguatan peran dan fungsi lembaga agama	Penguatan peran dan fungsi lembaga agama	Penguatan peran dan fungsi lembaga agama
8	Peningkatan pembinaa kegiatan keagamaan, dai, alim ulama	Peningkatan pembinaan kegiatan keagamaan, dai, alim ulama	Peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dai, alim ulama	Peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dai, alim ulama	Peningkatan fasilitasi kegiatan keagamaan, dai, alim ulama
9	Meningkatkan Pembinaan kapasitas peran dan fungsi pemangku adat di nigari	Meningkatkan Pembinaan kapasitas peran dan fungsi pemangku adat di nagari	Meningkatkan kapasitas peran dan fungsi pemangku adat di nagari	Meningkatkan kapasitas peran dan fungsi pemangku adat di nagari	Meningkatkan kapasitas peran dan fungsi pemangku adat di nagari
10	Peningkatan perlindungan OPK	Peningkatan OPK yang diselamatkan	Peningkatan OPK yang dipublikasikan	Peningkatan OPK yang disebarluaskan	Peningkatan OPK yang disebarluaskan
11	Peningkatan pengembangan OPK	Peningkatan OPK yang dikaji	Peningkatan OPK yang dikaji	Peningkatan OPK yang dikayakan	Peningkatan OPK yang dikayakan
12	Peningkatan pemanfaatan OPK	Peningkatan pemanfaatan OPK	Peningkatan Pemanfataan OPK untuk kesejahteraan masyarakat	Peningkatan Pemanfataan OPK untuk kesejahteraan masyarakat	Peningkatan Pemanfataan OPK untuk kesejahteraan masyarakat

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
13	Penataan kompetensi SDM lembaga kebudayaan	Pembinaan kompetensi SDM lembaga kebudayaan	Pembinaan kompetensi SDM lembaga kebudayaan	Peningkatan kompetensi SDM lembaga kebudayaan	Peningkatan kompetensi SDM lembaga kebudayaan
14	Satu nagari satu balairung	Satu nagari satu balairung	Satu nagari satu balairung	Satu nagari satu balairung	Satu nagari satu balairung
15	Pembinaan peran dan fungsi pengelola dan lembaga kebudayaan	Pembinaan peran dan fungsi pengelola dan lembaga kebudayaan	Peningkatan peran dan fungsi pengelola dan lembaga kebudayaan	Peningkatan peran dan fungsi pengelola dan lembaga kebudayaan	Peningkatan peran dan fungsi pengelola dan lembaga kebudayaan
16	Penataan sarana prasarana lembaga kebudayaan	Penataan sarana prasarana lembaga kebudayaan	Peningkatan sarana prasarana lembaga kebudayaan	Peningkatan sarana prasarana lembaga kebudayaan	Pemeliharaan sarana prasarana lembaga kebudayaan
17	Penerapan pakaian daerah bagi ASN dan lembaga lainnya	Penerapan pakaian daerah bagi ASN dan lembaga lainnya	Penerapan pakaian daerah bagi ASN dan lembaga lainnya	Penerapan pakaian daerah bagi ASN dan lembaga lainnya	Penerapan pakaian daerah bagi ASN dan lembaga lainnya
18	Penyusunan buku panduan adat dan kebudayaan	Penyusunan buku panduan adat dan kebudayaan	Pemanfaatan buku panduan adat dan kebudayaan	Pemanfataan buku panduan adat dan kebudayaan	Pemiliharaan buku panduan adat dan kebudayaan
Misi 2 : Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis Pertanian, Industri dan UMKM					
1	Optimalisasi Penerapan teknologi di bidang pertanian dan perikanan	Optimalisasi Penerapan teknologi di bidang pertanian dan perikanan	Optimalisasi Penerapan teknologi di bidang pertanian dan perikanan	Optimalisasi Penerapan teknologi di bidang pertanian dan perikanan	Optimalisasi Penerapan teknologi di bidang pertanian dan perikanan

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
2	Fasilitasi asuransi tani dan ternak untuk mengatasi resiko pertanian dan perikanan	Fasilitasi asuransi tani dan ternak untuk mengatasi resiko pertanian dan perikanan	Fasilitasi asuransi tani dan ternak untuk mengatasi resiko pertanian dan perikanan	Fasilitasi asuransi tani dan ternak untuk mengatasi resiko pertanian dan perikanan	Fasilitasi asuransi tani dan ternak untuk mengatasi resiko pertanian dan perikanan
3	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian dan perikanan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian dan perikanan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian dan perikanan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian dan perikanan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pertanian dan perikanan
4	Optimalisasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Optimalisasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Optimalisasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Optimalisasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan	Optimalisasi perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan
5	Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan	Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan	Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan	Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan	Peningkatan nilai tambah hasil pertanian dan perikanan
6	Pengembangan jaringan kerjasama pemasaran produk UMKM dan pertanian serta perikanan	Pengembangan jaringan kerjasama pemasaran produk UMKM dan pertanian serta perikanan	Peningkatan transaksi perdagangan dalam dan luar negeri	Peningkatan transaksi perdagangan dalam dan luar negeri	Peningkatan transaksi perdagangan dalam dan luar negeri
7	Peningkatan daya saing dan pembinaan koperasi dan UMKM	Peningkatan daya saing dan pembinaan koperasi dan UMKM	Peningkatan daya saing dan pembinaan koperasi dan UMKM	Peningkatan daya saing dan pembinaan koperasi dan UMKM	Peningkatan daya saing dan pembinaan koperasi dan UMKM

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
8	Perluasan akses keuangan formal bagi UMKM dan masyarakat	Perluasan akses keuangan formal bagi UMKM dan masyarakat	Perluasan akses keuangan formal bagi UMKM dan masyarakat	Perluasan akses keuangan formal bagi UMKM dan masyarakat	Perluasan akses keuangan formal bagi UMKM dan masyarakat
9	Pengembangan kawasan ekonomi pertanian, parwisata, industry perdagangan dan jasa	Pengembangan kawasan ekonomi pertanian, parwisata, industry perdagangan dan jasa	Pengembangan kawasan ekonomi pertanian, parwisata, industry perdagangan dan jasa	Pengembangan kawasan ekonomi pertanian, parwisata, industry perdagangan dan jasa	Pengembangan kawasan ekonomi pertanian, parwisata, industry perdagangan dan jasa
10	Diregulasi investasi dalam membangun image lembaga perizinan usaha yang ramah dan kemudahan berinvestasi	Diregulasi investasi dalam membangun image lembaga perizinan usaha yang ramah dan kemudahan berinvestasi	Fasilitasi perizinan usaha yang ramah dan kemudahan berinvestasi	Fasilitasi perizinan usaha yang ramah dan kemudahan berinvestasi	Fasilitasi perizinan usaha yang ramah dan kemudahan berinvestasi
11	Peningkatan kompetensi dan produkstifitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan produkstifitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan produkstifitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan produkstifitas tenaga kerja	Peningkatan kompetensi dan produkstifitas tenaga kerja
12	Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui perluasan informasi pasar	Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui perluasan informasi pasar	Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui perluasan informasi pasar	Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui perluasan informasi pasar	Fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui perluasan informasi pasar
Misi 3 Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing					

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
1	Pemenuhan target penerapan SPM pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan	Pemenuhan target penerapan SPM pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan	Pemenuhan target penerapan SPM pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan	Pemenuhan target penerapan SPM pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan	Pemenuhan target penerapan SPM pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan
2	Peningkatan sarana dan prasana pendidikan	Peningkatan sarana dan prasana pendidikan	Peningkatan sarana dan prasana pendidikan	Peningkatan sarana dan prasana pendidikan	Peningkatan sarana dan prasana pendidikan
3	Penerapan Penilaian asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Penerapan Penilaian asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Peningkatan Penilaian asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Peningkatan Penilaian asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum	Peningkatan Penilaian asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
4	Penerapan Penilaian asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Penerapan Penilaian asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Peningkatan Penilaian asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Peningkatan Penilaian asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum	Peningkatan Penilaian asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
5	Pengembangan kurikulum muatan lokal.	Pengembangan kurikulum muatan lokal.	Pengembangan kurikulum muatan lokal.	Pengembangan kurikulum muatan lokal.	Pengembangan kurikulum muatan lokal.
6	Penguatan pendidikan karakter	Penguatan pendidikan karakter	Penguatan pendidikan karakter	Penguatan pendidikan karakter	Penguatan pendidikan karakter
7	Pelaksanaan asesmen kompetensi minimum (AKM)	Pelaksanaan asesmen kompetensi minimum (AKM)	Pelaksanaan asesmen kompetensi minimum (AKM)	Pelaksanaan asesmen kompetensi minimum (AKM)	Pelaksanaan asesmen kompetensi minimum (AKM)

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
8	Penataan dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap jenjang pendidikan	Penataan dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap jenjang pendidikan	Penataan dan pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap jenjang pendidikan	Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap jenjang pendidikan	Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pada setiap jenjang pendidikan
9	Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan	Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan
10	Peningkatan anggaran untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan	Peningkatan anggaran untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan	Peningkatan anggaran untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan	Peningkatan anggaran untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan	Peningkatan anggaran untuk meningkatkan kualitas mutu pendidikan
11	Bantuan pendidikan bagi anak-anak yang melanjutkan jenjang pendidikan	Bantuan pendidikan bagi anak-anak yang melanjutkan jenjang pendidikan	Bantuan pendidikan bagi anak-anak yang melanjutkan jenjang pendidikan	Bantuan pendidikan bagi anak-anak yang melanjutkan jenjang pendidikan	Bantuan pendidikan bagi anak-anak yang melanjutkan jenjang pendidikan
12	Pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana yang sudah ada	Pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana yang sudah ada	Pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana yang sudah ada	Pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana yang sudah ada	Pemeliharaan dan pemanfaatan sarana prasarana yang sudah ada
13	Peningkatkan jumlah sarana dan prasarana olahraga yang representatif	Peningkatkan jumlah sarana dan prasarana olahraga yang representatif	Pemeliharaan jumlah sarana dan prasarana olahraga yang representative	Pemeliharaan jumlah sarana dan prasarana olahraga yang representatif	Pemeliharaan jumlah sarana dan prasarana olahraga yang representatif

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
14	Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dalam peningkatan prestasi olahraga	Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dalam peningkatan prestasi olahraga	Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dalam peningkatan prestasi olahraga	Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dalam peningkatan prestasi olahraga	Memaksimalkan sumber daya manusia yang ada dalam peningkatan prestasi olahraga
15	Penataan event olahraga budaya ditengah masyarakat	Peningkatan event olahraga budaya ditengah masyarakat	Pembinaan event olahraga budaya ditengah masyarakat	Pembinaan event olahraga budaya ditengah masyarakat	Pembinaan event olahraga budaya ditengah masyarakat
16	Penataan organisasi olahraga budaya	Pembinaan organisasi olahraga budaya	Pembinaan organisasi olahraga budaya	Pengembangan organisasi olahraga budaya	Pengembangan organisasi olahraga budaya
17	Penataan potensi dan peran pemuda melalui kreatifitas kepemimpinan dan kepeloporan	Pembinaan potensi dan peran pemuda melalui kreatifitas kepemimpinan dan kepeloporan	Pembinaan potensi dan peran pemuda melalui kreatifitas kepemimpinan dan kepeloporan	Peningkatan potensi dan peran pemuda melalui kreatifitas kepemimpinan dan kepeloporan	Peningkatan potensi dan peran pemuda melalui kreatifitas kepemimpinan dan kepeloporan
18	Penyusunan program kepemudaan berwawasan kebangasaan	Pembinaan kepemudaan berwawasan kebangasaan	Pembinaan kepemudaan berwawasan kebangasaan	Peningkatan kepemudaan berwawasan kebangasaan	Peningkatan kepemudaan berwawasan kebangasaan
19	Pengembangan kualitas SDM wirausaha muda	Pengembangan kualitas SDM wirausaha muda	Pengembangan kualitas SDM wirausaha muda	Pengembangan kualitas SDM wirausaha muda	Pengembangan kualitas SDM wirausaha muda
20	Peningkatan kreatifitas dan inovasi pemuda	Peningkatan kreatifitas dan inovasi pemuda	Peningkatan kreatifitas dan inovasi pemuda	Peningkatan kreatifitas dan inovasi pemuda	Peningkatan kreatifitas dan inovasi pemuda

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
21	Peningkatan jumlah pelatihan pemuda	Peningkatan jumlah pelatihan pemuda	Peningkatan jumlah pelatihan pemuda	Peningkatan jumlah pelatihan pemuda	Peningkatan jumlah pelatihan pemuda
22	Pembinaan kepada generasi muda dan kafilah yang berprestasi	Pembinaan kepada generasi muda dan kafilah yang berprestasi	Peningkatan generasi muda dan kafilah yang berprestasi	Peningkatan generasi muda dan kafilah yang berprestasi	Peningkatan generasi muda dan kafilah yang berprestasi
23	Penataan sarana dan prasarana perpustakaan	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan	Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan	Pemeliharaan sarana dan prasarana perpustakaan
24	Penataan koleksi buku bacaan	Peningkatan koleksi buku bacaan	Peningkatan koleksi buku bacaan	Pemeliharaan koleksi buku bacaan	Pemeliharaan koleksi buku bacaan
25	Peningkatan kualitas SDM Pengelola Perpustakaan	Peningkatan kualitas SDM Pengelola Perpustakaan	Peningkatan kualitas SDM Pengelola Perpustakaan	Peningkatan kualitas SDM Pengelola Perpustakaan	Peningkatan kualitas SDM Pengelola Perpustakaan
26	Peningkatan promosi perpustakaan	Peningkatan promosi perpustakaan	Peningkatan promosi perpustakaan	Peningkatan promosi perpustakaan	Peningkatan promosi perpustakaan
27	Pelayanan kesehatan Ibu, anak dan lansia sesuai standar	Pelayanan kesehatan Ibu, anak dan lansia sesuai standar	Pelayanan kesehatan Ibu, anak dan lansia sesuai standar	Pelayanan kesehatan Ibu, anak dan lansia sesuai standar	Pelayanan kesehatan Ibu, anak dan lansia sesuai standar
28	Peningkatan sistem kewaspadaan gizi dan stunting	Peningkatan sistem kewaspadaan gizi dan stunting	Peningkatan sistem kewaspadaan gizi dan stunting	Peningkatan sistem kewaspadaan gizi dan stunting	Peningkatan sistem kewaspadaan gizi dan stunting

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
29	Peningkatan pelayanan penyakit menular	Peningkatan pelayanan penyakit menular	Peningkatan pelayanan penyakit menular	Peningkatan pelayanan penyakit menular	Peningkatan pelayanan penyakit menular
30	Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular	Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular	Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular	Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular	Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular
31	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
32	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat
33	Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
34	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan
35	Pemenuhan dan Pemerataan SDM kesehatan	Pemenuhan dan Pemerataan SDM kesehatan	Peningkatan dan Pemerataan SDM kesehatan	Peningkatan dan Pemerataan SDM kesehatan	Peningkatan dan Pemerataan SDM kesehatan
36	Pelaksanaan pelatihan bagi calon pengantin dan calon ibu	Pelaksanaan pelatihan bagi calon pengantin dan calon ibu	Pelaksanaan pelatihan bagi calon pengantin dan calon ibu	Pelaksanaan pelatihan bagi calon pengantin dan calon ibu	Pelaksanaan pelatihan bagi calon pengantin dan calon ibu

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
37	Meningkatkan kerjasama daerah	Meningkatkan kerjasama daerah	Meningkatkan kerjasama daerah	Meningkatkan kerjasama daerah	Meningkatkan kerjasama daerah
38	Melakukan Penyuluhan kepada kelompok-kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL)	Melakukan Penyuluhan kepada kelompok-kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL)	Pembinaan kepada kelompok- kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL)	Pembinaan kepada kelompok- kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL)	Melakukan Pengendalian kepada kelompok- kelompok kegiatan (BKB,BKR,BKL)
39	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk	Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk	Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk	Penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan pengendalian penduduk
40	Pengendalian sarana dan prasarana pelayanan KB di fasilitas kesehatan	Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan KB di fasilitas kesehatan	Memfasilitasi sarana dan prasarana pelayanan KB di fasilitas kesehatan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan KB di fasilitas kesehatan	Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan KB di fasilitas kesehatan
41	Pembentukan Kelompok PIK R jalur pendidikan dan jalur masyarakat	Pembinaan Kelompok PIK R jalur pendidikan dan jalur masyarakat	Pembinaan Kelompok PIK R jalur pendidikan dan jalur masyarakat	Fasilitasi Kelompok PIK R jalur pendidikan dan jalur masyarakat	Fasilitasi Kelompok PIK R jalur pendidikan dan jalur masyarakat
42	Melakukan Pendataan terhadap penyuluh keluarga berencana (PKB) dan kader PPKBJ dan sub PPKBJ	Melakukan Sosialisasi terhadap penyuluh keluarga berencana (PKB) dan kader PPKBJ dan sub PPKBJ	Melakukan Sosialisasi terhadap penyuluh keluarga berencana (PKB) dan kader PPKBJ dan sub PPKBJ	Melakukan pembinaan terhadap penyuluh keluarga berencana (PKB) dan kader PPKBJ dan sub PPKBJ	Melakukan pembinaan terhadap penyuluh keluarga berencana (PKB) dan kader PPKBJ dan sub PPKBJ

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
43	Peningkatan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Peningkatan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Peningkatan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Peningkatan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Peningkatan kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan
44	Meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan	Meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan
45	Kabupaten layak anak	Kabupaten layak anak	Kabupaten layak anak	Kabupaten layak anak	Kabupaten layak anak
46	Pemenuhan Hak perempuan dan anak	Pemenuhan Hak perempuan dan anak	Pemenuhan Hak perempuan dan anak	Pemenuhan Hak perempuan dan anak	Pemenuhan Hak perempuan dan anak
47	Meningkatan peran serta gender dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan	Meningkatan peran serta gender dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan	Meningkatan peran serta gender dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan	Meningkatan peran serta gender dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan	Meningkatan peran serta gender dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan
48	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan
MISI 4. Pembangunan Pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam					

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
1	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata daerah yang berdaya saing	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata daerah yang berdaya saing	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata daerah yang berdaya saing	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata daerah yang berdaya saing	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata daerah yang berdaya saing
2	Penguatan Regulasi dan kelembagaan pariwisata daerah	Penguatan Regulasi dan kelembagaan pariwisata daerah	Pembinaan kelembagaan pariwisata daerah yang profesional	Pembinaan kelembagaan pariwisata daerah yang profesional	Pembinaan kelembagaan pariwisata daerah yang profesional
3	Promosi dan branding pariwisata daerah yang handal	Promosi dan branding pariwisata daerah yang handal	Promosi dan branding pariwisata daerah yang handal	Promosi dan branding pariwisata daerah yang handal	Promosi dan branding pariwisata daerah yang handal
4	Pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan sebagai model pembangunan pariwisata daerah	Pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan sebagai model pembangunan pariwisata daerah	Pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan sebagai model pembangunan pariwisata daerah	Pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan sebagai model pembangunan pariwisata daerah	Pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan sebagai model pembangunan pariwisata daerah
5	Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang berdaya saing melalui penanaman modal dan pembiyaan daerah	Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang berdaya saing melalui penanaman modal dan pembiyaan daerah	Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang berdaya saing melalui penanaman modal dan pembiyaan daerah	Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang berdaya saing melalui penanaman modal dan pembiyaan daerah	Pembangunan Infrastruktur Pariwisata yang berdaya saing melalui penanaman modal dan pembiyaan daerah
Misi 5 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien					
1	Melaksanakan rekonsiliasi secara periodik dengan entitas akuntansi	Melaksanakan rekonsiliasi secara periodik dengan entitas akuntansi	Melaksanakan rekonsiliasi secara periodik dengan entitas akuntansi	Melaksanakan rekonsiliasi secara periodik dengan entitas akuntansi	Melaksanakan rekonsiliasi secara periodik dengan entitas akuntansi

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
2	BIMTEK pengelola keuangan	BIMTEK pengelola keuangan	BIMTEK pengelola keuangan	BIMTEK pengelola keuangan	BIMTEK pengelola keuangan
3	Menyusun regulasi tentang tata kelola keuangan dan aset daerah	Menyusun regulasi tentang tata kelola keuangan dan aset daerah	Menyusun regulasi tentang tata kelola keuangan dan aset daerah	Menyusun regulasi tentang tata kelola keuangan dan aset daerah	Menyusun regulasi tentang tata kelola keuangan dan aset daerah
4	Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah
5	Optimalisasi pendapatan asli daerah	Optimalisasi pendapatan asli daerah	Optimalisasi pendapatan asli daerah	Optimalisasi pendapatan asli daerah	Optimalisasi pendapatan asli daerah
6	Validasi data pajak dan retribusi	Validasi data pajak dan retribusi	Validasi data pajak dan retribusi	Validasi data pajak dan retribusi	Validasi data pajak dan retribusi
7	Menyusun regulasi pengelolaan pendapatan daerah	Menyusun regulasi pengelolaan pendapatan daerah	Menyusun regulasi pengelolaan pendapatan daerah	Menyusun regulasi pengelolaan pendapatan daerah	Menyusun regulasi pengelolaan pendapatan daerah
8	Peningkatkan sarana dan prasarana kearsipan	Peningkatkan sarana dan prasarana kearsipan	Peningkatkan sarana dan prasarana kearsipan	Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan	Pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan
9	Peningkatkan pembinaan dan pengawasan kearsipan	Peningkatkan pembinaan dan pengawasan kearsipan	Peningkatkan pembinaan dan pengawasan kearsipan	Peningkatkan pembinaan dan pengawasan kearsipan	Peningkatkan pembinaan dan pengawasan kearsipan

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
10	Meningkatkan Pelindungan dan penyelamatan arsip	Meningkatkan Pelindungan dan penyelanan arsip	Meningkatkan Pelindungan dan penyelanan arsip	Meningkatkan Pelindungan dan penyelanan arsip	Meningkatkan Pelindungan dan penyelanan arsip
11	Melakukan evaluasi kelembagaan agar tepat ukuran dan tepat fungsi	Melakukan evaluasi kelembagaan agar tepat ukuran dan tepat fungsi	Melakukan evaluasi kelembagaan agar tepat ukuran dan tepat fungsi	Melakukan evaluasi kelembagaan agar tepat ukuran dan tepat fungsi	Melakukan evaluasi kelembagaan agar tepat ukuran dan tepat fungsi
12	Melaksanakan penilian kinerja dan penerapan reward dan punishment	Melaksanakan penilian kinerja dan penerapan reward dan punishment	Melaksanakan penilian kinerja dan penerapan reward dan punishment	Melaksanakan penilian kinerja dan penerapan reward dan punishment	Melaksanakan penilian kinerja dan penerapan reward dan punishment
13	Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja	Penyelarasan kebijakan perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja
14	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan administrasi kependudukan
15	Peningkatan fungsi pelayanan publik yang prima	Peningkatan fungsi pelayanan publik yang prima	Peningkatan fungsi pelayanan publik yang prima	Peningkatan fungsi pelayanan publik yang prima	Peningkatan fungsi pelayanan publik yang prima
16	Penguatan Implementasi manajemen ASN	Penguatan Implementasi manajemen ASN	Penguatan Implementasi manajemen ASN	Penguatan Implementasi manajemen ASN	Penguatan Implementasi manajemen ASN

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
17	Penguatan sistem aplikasi kepegawaian	Penguatan sistem aplikasi kepegawaian	Penguatan sistem aplikasi kepegawaian	Penguatan sistem aplikasi kepegawaian	Penguatan sistem aplikasi kepegawaian
18	Meningkatkan mutu pengawasan	Meningkatkan mutu pengawasan	Meningkatkan mutu pengawasan	Meningkatkan mutu pengawasan	Meningkatkan mutu pengawasan
19	Meningkatkan partisipasi publik dalam penurunan angka korupsi	Meningkatkan partisipasi publik dalam penurunan angka korupsi	Meningkatkan partisipasi publik dalam penurunan angka korupsi	Meningkatkan partisipasi publik dalam penurunan angka korupsi	Meningkatkan partisipasi publik dalam penurunan angka korupsi
20	Meningkatkan penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi	Meningkatkan penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi	Meningkatkan penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi	Meningkatkan penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi	Meningkatkan penerapan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah terintegrasi
21	Meningkatkan penerapan sistem inovasi daerah (SIDa)	Meningkatkan penerapan sistem inovasi daerah (SIDa)	Meningkatkan penerapan sistem inovasi daerah (SIDa)	Meningkatkan penerapan sistem inovasi daerah (SIDa)	Meningkatkan penerapan sistem inovasi daerah (SIDa)
22	Peningkatan kapasitas penyusunan dan pembahasan produk hukum	Peningkatan kapasitas penyusunan dan pembahasan produk hukum	Peningkatan kapasitas penyusunan dan pembahasan produk hukum	Peningkatan kapasitas penyusunan dan pembahasan produk hukum	Peningkatan kapasitas penyusunan dan pembahasan produk hukum
23	Penguatan tata kelola, layanan, teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung sistem	Penguatan tata kelola, layanan, teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik	Penguatan tata kelola, layanan, teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik	Penguatan tata kelola, layanan, teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik	Penguatan tata kelola, layanan, teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
	pemerintahan berbasis elektronik				
24	Peningkatan sistem administrasi pembuatan administrasi penelitian dan rekomendasi izin keramaian	Peningkatan sistem administrasi pembuatan administrasi penelitian dan rekomendasi izin keramaian	Peningkatan sistem administrasi pembuatan administrasi penelitian dan rekomendasi izin keramaian	Peningkatan sistem administrasi pembuatan administrasi penelitian dan rekomendasi izin keramaian	Peningkatan sistem administrasi pembuatan administrasi penelitian dan rekomendasi izin keramaian
25	Pembentukan tim penanganan konflik	Pembinaan tim penanganan konflik	Terwujudnya tim penanganan konflik	Terwujudnya tim penanganan konflik	Terwujudnya tim penanganan konflik
26	Pembentukan gugus tugas gerakan nasional revolusi mental	Pembinaan gugus tugas gerakan nasional revolusi mental	Terwujudnya gugus tugas gerakan nasional revolusi mental	Pelaksanaan gugus tugas gerakan nasional revolusi mental	Pelaksanaan gugus tugas gerakan nasional revolusi mental
27	Peningkatan nilai karakter bangsa dan wawasan kebangsaan	Peningkatan nilai karakter bangsa dan wawasan kebangsaan	Peningkatan nilai karakter bangsa dan wawasan kebangsaan	Peningkatan nilai karakter bangsa dan wawasan kebangsaan	Peningkatan nilai karakter bangsa dan wawasan kebangsaan
28	Pembinaan terhadap Penyuluh pemilu dan pilkada	Pelaksanaan Penyuluhan pemilu dan pilkada	Terwujudnya penyuluhan pemilu dan pilkada		
29	Melakukan pembinaan terhadap partai politik	Melakukan pembinaan terhadap partai politik	Melakukan pembinaan terhadap partai politik	Melakukan pembinaan terhadap partai politik	Melakukan pembinaan terhadap partai politik

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
30	Melakukan pembinaan terhadap ormas	Melakukan pembinaan terhadap ormas	Melakukan pembinaan terhadap ormas	Melakukan pembinaan terhadap ormas	Melakukan pembinaan terhadap ormas
31	Sosialiasai terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Pembinaan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Pembinaan warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
32	Sosialisasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada	Pembinaan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada	Pembinaan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada	Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada	Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang di duga melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada
33	Melakukan Sosialisasi penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan perkada	Melakukan Pembinaan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan perkada	Melakukan Pembinaan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan perkada	Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan perkada	Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran Perda dan perkada

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
34	Melakukan Sosialisasi penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat meliputi: deteksidan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan , penertiban dan unjuk rasa	Melakukan Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat meliputi: deteksidan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan , penertiban dan unjuk rasa	Melakukan Pembinaan penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat meliputi: deteksidan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan , penertiban dan unjuk rasa	Melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat meliputi: deteksidan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan , penertiban dan unjuk rasa	Melakukan penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman masyarakat meliputi: deteksidan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan, pengawalan , penertiban dan unjuk rasa
35	melakukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pembinaan masyarakat	melakukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pembinaan masyarakat	melakukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pembinaan masyarakat	melakukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pembinaan masyarakat	melakukan penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui pembinaan masyarakat
36	Melengkapi sarana dan prasarana operasional Satpol PP	Melengkapi sarana dan prasarana operasional Satpol PP	Melengkapi sarana dan prasarana operasional Satpol PP	Melengkapi sarana dan prasarana operasional Satpol PP	Melengkapi sarana dan prasarana operasional Satpol PP
37	Melakukan pembinaan teknis operasional terhadap SDM Satpol PP	Melakukan pembinaan teknis operasional terhadap SDM Satpol PP	Melakukan pembinaan teknis operasional terhadap SDM Satpol PP	Melakukan pembinaan teknis operasional terhadap SDM Satpol PP	Melakukan pembinaan teknis operasional terhadap SDM Satpol PP
38	Koordinasi demgan camat, instansi terkait serta Satpol PP Provinsi dalam penegakan Perda dan	Koordinasi demgan camat, instansi terkait serta Satpol PP Provinsi dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan	Koordinasi demgan camat, instansi terkait serta Satpol PP Provinsi dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan	Koordinasi demgan camat, instansi terkait serta Satpol PP Provinsi dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan	Koordinasi demgan camat, instansi terkait serta Satpol PP Provinsi dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
	Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan kententraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat	ketertiban umum dan kententraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat	ketertiban umum dan kententraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat	ketertiban umum dan kententraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat	kententraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat
39	Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada	Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada	Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada	Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada	Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, dan badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan Perkada
40	Melengkapi sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Melengkapi sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Melengkapi sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
41	Pembangunan Posko	Pembangunan Posko	Pembangunan Posko	Pemeliharaan Posko	Pemeliharaan Posko
42	Pendidikan dan Pelatihan petugas pemadam kebakaran	Pendidikan dan Pelatihan petugas pemadam kebakaran	Pendidikan dan Pelatihan petugas pemadam kebakaran	Pendidikan dan Pelatihan petugas pemadam kebakaran	Pendidikan dan Pelatihan petugas pemadam kebakaran
43	Melengkapi sarana dan prasarana pendukung rescue	Melengkapi sarana dan prasarana pendukung rescue	Melengkapi sarana dan prasarana pendukung rescue	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung rescue	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung rescue

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
44	Pendidikan dan Pelatihan petugas rescue	Pendidikan dan Pelatihan petugas rescue	Pendidikan dan Pelatihan petugas rescue	Pendidikan dan Pelatihan petugas rescue	Pendidikan dan Pelatihan petugas rescue
45	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran
46	Pelatihan dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran
47	Sosialisasi sistem ketahanan kebakaran lingkungan	Pembinaan sistem ketahanan kebakaran lingkungan	Pembentukan sistem ketahanan kebakaran lingkungan	Pembentukan sistem ketahanan kebakaran lingkungan	Pembentukan sistem ketahanan kebakaran lingkungan
48	Peningkatan kualitas pelaporan cara efektif dan efisien	Peningkatan kualitas pelaporan cara efektif dan efisien	Peningkatan kualitas pelaporan cara efektif dan efisien	Peningkatan kualitas pelaporan cara efektif dan efisien	Peningkatan kualitas pelaporan cara efektif dan efisien
49	Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik	Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik	Peningkatan kualitas manajemen pelayanan public	Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik	Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik
50	Peningkatan kapasitas SDM yang ada pada bagian barang dan jasa	Peningkatan kapasitas SDM yang ada pada bagian barang dan jasa	Peningkatan kapasitas SDM yang ada pada bagian barang dan jasa	Peningkatan kapasitas SDM yang ada pada bagian barang dan jasa	Peningkatan kapasitas SDM yang ada pada bagian barang dan jasa
51	Meningkatkan sarana dan prasarana barang dan jasa	Meningkatkan sarana dan prasarana barang dan jasa	Meningkatkan sarana dan prasarana barang dan jasa	Meningkatkan sarana dan prasarana barang dan jasa	Meningkatkan sarana dan prasarana barang dan jasa

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
MISI 6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan					
1	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan	Peningkatan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
2	Peningkatan Prasarana Lalu lintas	Peningkatan Prasarana Lalu lintas	Peningkatan Prasarana Lalu lintas	Peningkatan Prasarana Lalu lintas	Peningkatan Prasarana Lalu lintas
3	Peningkatan sarana dan prasarana gedung pemerintah	Peningkatan sarana dan prasarana gedung pemerintah	Peningkatan sarana dan prasarana gedung pemerintah	Peningkatan sarana dan prasarana gedung pemerintah	Peningkatan sarana dan prasarana gedung pemerintah
4	Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi	Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi	Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi	Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi	Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi
5	Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Minum	Pengembangan dan Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Air Minum
6	Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Limbah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Air Limbah

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
7	Peningkatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RTRW	Peningkatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RTRW	Peningkatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RTRW	Peningkatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RTRW	Peningkatan Pemanfaatan Ruang Sesuai dengan RTRW
8	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur	Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Infrastruktur
9	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk yang terdampak Bencana dan terkena relokasi program	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk yang terdampak Bencana dan terkena relokasi program	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk yang terdampak Bencana dan terkena relokasi program	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk yang terdampak Bencana dan terkena relokasi program	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni untuk yang terdampak Bencana dan terkena relokasi program
10	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Kumuh dan di luar Kawasan Kumuh	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Kumuh dan di luar Kawasan Kumuh	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Kumuh dan di luar Kawasan Kumuh	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Kumuh dan di luar Kawasan Kumuh	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni pada Kawasan Kumuh dan di luar Kawasan Kumuh
11	Peningkatan PSU untuk menunjang fungsi hunian	Peningkatan PSU untuk menunjang fungsi hunian	Peningkatan PSU untuk menunjang fungsi hunian	Peningkatan PSU untuk menunjang fungsi hunian	Peningkatan PSU untuk menunjang fungsi hunian
12	Fasilitasi pembangunan dan pengembangan perumahan	Fasilitasi pembangunan dan pengembangan perumahan	Fasilitasi pembangunan dan pengembangan perumahan	Fasilitasi pembangunan dan pengembangan perumahan	Fasilitasi pembangunan dan pengembangan perumahan

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
13	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Peningkatan koordinasi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman
14	Penyiapan regulasi terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Penyiapan regulasi terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Penyiapan regulasi terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Penyiapan regulasi terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	Penyiapan regulasi terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman
15	Peningkatan Ketesediaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Permukiman	Peningkatan Ketesediaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Permukiman	Peningkatan Ketesediaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Permukiman	Peningkatan Ketesediaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Permukiman	Peningkatan Ketesediaan Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Permukiman
16	Penurunan luasan Kawasan Kumuh	Penurunan luasan Kawasan Kumuh	Penurunan luasan Kawasan Kumuh	Penurunan luasan Kawasan Kumuh	Penurunan luasan Kawasan Kumuh
17	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
18	Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kritis	Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kritis	Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kritis	Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kritis	Mengoptimalkan pemanfaatan lahan kritis
19	Peningkatan usaha kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan	Peningkatan usaha kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan	Peningkatan usaha kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan	Peningkatan usaha kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan	Peningkatan usaha kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
20	Peningkatan pengawasan terhadap usaha kegiatan yang telah memiliki izin/persetujuan lingkungan	Peningkatan pengawasan terhadap usaha kegiatan yang telah memiliki izin/persetujuan lingkungan	Peningkatan pengawasan terhadap usaha kegiatan yang telah memiliki izin/persetujuan lingkungan	Peningkatan pengawasan terhadap usaha kegiatan yang telah memiliki izin/persetujuan lingkungan	Peningkatan pengawasan terhadap usaha kegiatan yang telah memiliki izin/persetujuan lingkungan
21	Penyelesaian pengaduan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Penyelesaian pengaduan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Penyelesaian pengaduan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Penyelesaian pengaduan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Penyelesaian pengaduan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
22	Peningkatan pembinaan kelompok peduli lingkungan	Peningkatan pembinaan kelompok peduli lingkungan	Peningkatan pembinaan kelompok peduli lingkungan	Peningkatan pembinaan kelompok peduli lingkungan	Peningkatan pembinaan kelompok peduli lingkungan
23	Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Peningkatan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
24	Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah	Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah	Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah	Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah	Penyusunan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah
25	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana persampahan	Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana persampahan

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
26	Peningkatan Penanganan Sampah	Peningkatan Penanganan Sampah	Peningkatan Penanganan Sampah	Peningkatan Penanganan Sampah	Peningkatan Penanganan Sampah
27	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
28	Pembinaan dan penilaian kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pembinaan dan penilaian kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pembinaan dan penilaian kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pembinaan dan penilaian kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup	Pembinaan dan penilaian kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup
29	Peningkatan koordinasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal terkait dengan PPLH	Peningkatan koordinasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal terkait dengan PPLH	Peningkatan koordinasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal terkait dengan PPLH	Peningkatan koordinasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal terkait dengan PPLH	Peningkatan koordinasi keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan kearifan lokal terkait dengan PPLH
30	Penyusunan kebijakan dan strategi perencanaan dan perlindungan lingkungan hidup	Penyusunan kebijakan dan strategi perencanaan dan perlindungan lingkungan hidup	Penyusunan kebijakan dan strategi perencanaan dan perlindungan lingkungan hidup	Penyusunan kebijakan dan strategi perencanaan dan perlindungan lingkungan hidup	Penyusunan kebijakan dan strategi perencanaan dan perlindungan lingkungan hidup
31	Peningkatan koordinasi Pembinaan dan Pengendalian B3 dan Limbah B3	Peningkatan koordinasi Pembinaan dan Pengendalian B3 dan Limbah B3	Peningkatan koordinasi Pembinaan dan Pengendalian B3 dan Limbah B3	Peningkatan koordinasi Pembinaan dan Pengendalian B3 dan Limbah B3	Peningkatan koordinasi Pembinaan dan Pengendalian B3 dan Limbah B3

Arah Kebijakan					
Tahun-1		**Tahun-2**	**Tahun-3**	**Tahun-4**	**Tahun-5**
32	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup	Peningkatan pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup
33	Penyediaan informasi rawan bencana	Penyediaan informasi rawan bencana	Penyediaan informasi rawan bencana	Penyediaan informasi rawan bencana	Penyediaan informasi rawan bencana
34	Penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana	Penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana	Penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana	Penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana	Penyediaan sarana prasarana penanggulangan bencana

6.4 Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Porgram pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih sesuai dengan table di bawah ini.

Tabel 6.3 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Misi1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya																	
	Tujuan **1. Meningkatkan aktifitas pembangunan bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK**	Meningkatkan aktifitas pembangunan bidang keagamaan, adat dan kebudayaan sesuai nilai-nilai ABS-SBK																
	Sasaran **1. Meningkatnya pembangunan keagamaan masyarakat**	- Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda																
		- Jumlah Peningkatan nilai zakat yang diterima oleh badan amil zakat																
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	18.453.098.612	100%	13.726.434.494	100%	13.726.434.494	100%	13.726.434.494	100%	13.726.434.494	100%	13.726.434.494	100%	87.085.271.082	SETDA
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	100%	100%	1.282.398.775	100%	1.127.908.081	100%	1.127.908.081	100%	1.127.908.081	100%	1.127.908.081	100%	1.127.908.081	100%	6.921.939.181	SETDA
	2. Meningkatnya ketahanan adat dan budaya berdasarkan ABS-SBK	- Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif																

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar seni yang aktif		28	299.999.595	19	256.177.695	19	256.177.695	19	256.177.695	19	256.177.695	19	256.177.695	123	1.580.888.070	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah sejarah lokal yang digali		5	49.999.950	5	49.999.950	5	49.999.950	5	49.999.950	5	49.999.950	5	49.999.950	35	299.999.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dipublikasikan		20	101.037.000	20	101.037.000	20	101.037.000	20	101.037.000	20	101.037.000	20	101.037.000	120	606.222.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah museum yang dikelola		5	620.000.000	5	620.000.000	5	620.000.000	5	620.000.000	5	620.000.000	5	620.000.000	30	3.720.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	Misi 2 : Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis Pertanian, Industri dan UMKM																	
	Tujuan : Meningatkan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM	PDRB Per Kapita																
		Tingkat Pengangguran terbuka																
		Laju pertumbuhan ekonomi																
	Sasaran : Menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor utama penggerak perekonomian	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB																

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Nilai Tukar Petani																
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%	100%	4.365.299.250	100%	12.153.616.000	100%	12.200.000.000	100%	12.250.000.000	100%	12.300.000.000	100%	12.350.000.000	100%	65.618.915.250	DINAS PERTANIAN
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Fungsi Prasarana Pertanian	100%	100%	5.357.687.750	100%	5.734.100.000	100%	5.800.000.000	100%	5.850.000.000	100%	5.900.000.000	100%	5.950.000.000	100%	34.591.787.750	DINAS PERTANIAN
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Menular Ternak	100%	100%	582.099.315	100%	1.095.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000	100%	6.377.099.315	DINAS PERTANIAN
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	100%	1.274.999.700	100%	1.116.384.000	100%	1.120.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000	100%	7.111.383.700	DINAS PERTANIAN
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian	-	100%	49.999.850	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	399.999.850	DINAS PERTANIAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya SDM para penyuluh pertanian dan para petani	100%	100%	1.610.551.620	100%	1.676.353.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	100%	10.086.904.620	DINAS PERTANIAN
	Sasaran : Meningkatnya Daya Saing UMKM, Koperasi dan Ekonomi Kreatif	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB																
		Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB																
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Cakupan pengelolaan dan pengembangan energi baru terbarukan		100%	22.999.950	100%	25.300.000	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	598.299.950	
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri				3.633.323.150		4.433.941.000		4.250.000.000		4.300.000.000		4.350.000.000		4.400.000.000	-	25.367.264.150	DINAS KOPERINDAG
		Pengembangan IKM pada Sentra IKM Potensial	110	15		15		15		15		15		15		260		DINAS KOPERINDAG
		Peningkatan Produk IKM yang bersertifikat	1	1		2		3		3		3		3		15		DINAS KOPERINDAG
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Peningkatan Produk IKM yang bersertifikat	21 Produk	2 halal; 2 hki; 10 kemasan	49.999.650	15 hki; 10 halal; 20 kemasan	100.000.000	15 hki; 10 halal; 20 kemasan	250.000.000	15 hki; 10 halal; 20 kemasan	300.000.000	15 hki; 10 halal; 20 kemasan	350.000.000	42 hki; 82 halal; 90 kemasan	600.000.000	42 hki; 82 halal; 90 kemasan	1.649.999.650	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah IKM yang terdaftar dalam SINAS	1	-	-		-	10 ikm	75.000.000	15 ikm	100.000.000	20 ikm	125.000.000	50 ikm	150.000.000	100 ikm	450.000.000	DINAS KOPERINDAG
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	100%		-	100%	2.201.000.000	100%	2.210.000.000	100%	2.210.000.000	100%	2.210.000.000	100%	2.210.000.000	100%	11.041.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	-	100%	359.949.875	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	3.509.949.875	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	100%	100%	99.999.800	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	1.099.999.800	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Masyarakat	100%	100%	22.499.925	0%	22.500.000	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	224.999.925	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.650,27 ton	100%	946.099.690	100%	1.077.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.300.000.000	100%	6.873.099.690	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Pengolahan dan Produktivitas serta Pemasaran Perikanan	100%	100%	74.999.750	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	100%	1.309.999.750	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Koperasi yang difasilitasi untuk penerbitan izin						20	75.000.000	20	100.000.000	20	150.000.000	80	200.000.000	80	525.000.000	DINAS KOPERINDAG
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan pengawasan terhadap KSP/USP Koperasi				20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	85	100.000.000	85	500.000.000	DINAS KOPERINDAG
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Koperasi Simpan Pinjam yang dinilai tingkat kesehatannya						60	100.000.000	70	125.000.000	80	150.000.000	80	175.000.000	80	550.000.000	DINAS KOPERINDAG
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian																	DINAS KOPERINDAG
		Konversi kelembagaan Koperasi ke Pola Syari'ah	15	15	50.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	75	100.000.000	75	550.000.000	DINAS KOPERINDAG

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Peningkatan SDM Pengelola Koperasi	22	15	50.000.000	15	202.000.000	15	250.000.000	15	300.000.000	15	350.000.000	75	400.000.000	75	1.552.000.000	DINAS KOPERINDAG
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perkoperasian	Penerapan Koperasi Modern dan berbasis digital	7	3	175.300.000	5	178.800.000	5	250.000.000	5	275.000.000	5	300.000.000	5	325.000.000	5	1.504.100.000	DINAS KOPERINDAG
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah Wirausaha Baru yang dibina		300	305.304.000	1000	4.660.304.000	1000	4.250.000.000	1000	4.250.000.000	1000	4.250.000.000	1000	4.250.000.000	5300	21.965.608.000	DINAS KOPERINDAG
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Usaha Mikro yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah		30	723.099.646	30	1.265.000.000	30	420.000.000	30	470.000.000	30	520.000.000	30	520.000.000	180	3.918.099.646	DINAS KOPERINDAG
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pasar Layak	120	1	1.125.995.875	1	919.834.000	1	1.100.000.000	1	1.200.000.000	1	1.300.000.000	1	1.400.000.000	6	7.045.829.875	DINAS KOPERINDAG

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pemantauan Fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya					204.959.000	156 Kali	300.000.000	156 Kali	350.000.000	156 Kali	400.000.000	156 Kali	450.000.000	156 Kali	1.704.959.000	DINAS KOPERINDAG
		Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka			-		-	2 Pasar	-	2 Pasar	-	2 Pasar	-	2 Pasar	-	2 Pasar	-	DINAS KOPERINDAG
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Fasilitasi Ekspor Produk Unggulan Daerah		1 keg sosialisasi	25.000.000	1 keg sosialisasi	60.000.000	1 keg sosialisasi	55.000.000	1 keg sosialisasi	55.000.000	1 keg sosialisasi	55.000.000	1 keg sosialisasi	55.000.000	6 keg sosialisasi	305.000.000	DINAS KOPERINDAG
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen																	DINAS KOPERINDAG
		Fasilitasi pelaksanaan standarisasi dan perlindungan konsumen pada unit metrologi			-	1 gedung metrologi, peralatan standar, kendaraan operasional	-	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	350.000.000	1 kegiatan	400.000.000	1 kegiatan	450.000.000	6 kegiatan	1.500.000.000	DINAS KOPERINDAG
		Peningkatan jumlah akurasi alat ukur UTTP Melalui tera dan tera ulang		250	74.999.775	750	100.000.000	800	125.000.000	900	150.000.000	1100	175.000.000	4050	200.000.000	4050	824.999.775	DINAS KOPERINDAG
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri																	DINAS KOPERINDAG

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Daerah melalui pameran dan pasar lelang		9	279.299.925	5 kali pameran dalam dan luar daerah ,6 kali pasar lelang	500.000.000	5 kali pameran dalam dan luar daerah ,6 kali pasar lelang	550.000.000	5 kali pameran dalam dan luar daerah ,6 kali pasar lelang	600.000.000	5 kali pameran dalam dan luar daerah ,6 kali pasar lelang	650.000.000	5 kali pameran dalam dan luar daerah ,6 kali pasar lelang	700.000.000	5 kali pameran dalam dan luar daerah ,6 kali pasar lelang	3.279.299.925	DINAS KOPERINDAG
		Fasilitasi Pemasaran Produk dan komoditi UMKM berbasis digital			-	1 website	-	1 website	75.000.000	1 website	100.000.000	1 website	125.000.000	1 website	100.000.000	1 website	400.000.000	DINAS KOPERINDAG
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang kondusif	100%	100%	259.999.600	100%	286.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	2.245.999.600	PMPTSP & NAKER
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan upaya peningkatan realisasi investasi di daerah	100%	100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	1.815.000.000	PMPTSP & NAKER
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	100%	100%	218.097.675	100%	439.000.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	750.000.000	100%	3.357.097.675	PMPTSP & NAKER
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	100%	100%	366.121.775	100%	413.300.000	100%	500.000.000	100%	575.000.000	100%	675.000.000	100%	700.000.000	100%	3.229.421.775	PMPTSP & NAKER

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase cakupan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan yang disusun	100%	100%	29.249.775	100%	425.000.000	100%	450.000.000	100%	475.000.000	100%	500.000.000	100%	525.000.000	100%	2.404.249.775	PMPTSP & NAKER
	Sasaran : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja	Jumlah wirausaha baru																
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Cakupan Ketersediaan Database dan Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja Daerah	100%	100%	74.999.925	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	1.174.999.925	PMPTSP & NAKER
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Persentase (%) Pencari kerja yang Kompeten	4,05%	4,05%	458.689.500	4,05%	3.515.000.000	4,05%	3.600.000.000	4,05%	3.650.000.000	4,05%	3.750.000.000	4,05%	3.466.689.000	4,05%	18.440.378.500	PMPTSP & NAKER
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penurunan angka pengangguran	4,21%	4,21%	74.397.800	4,21%	310.115.150	4,21%	437.000.000	4,21%	437.000.000	4,21%	437.000.000	4,21%	437.000.000	4,21%	2.132.512.950	PMPTSP & NAKER
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Cakupan pembinaan dan pengawasan hubungan industrial perusahaan dan pekerja	100%	100%	31.999.900	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	891.999.900	PMPTSP & NAKER
Misi 3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing																		

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Tujuan **1. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing**	Indeks pembangunan manusia																
	Sasaran **1. Meningkatnya mutu pendidikan**	Rata-rata lama sekolah																
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mencapai peningkatan mutu standar nasional pendidikan		80%	70.053.296.340	85%	67.599.278.465	90%	67.599.278.465	90%	67.599.278.465	95%	67.599.278.465	95%	67.599.278.465	95%	408.049.688.665	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal		65%	199.981.075	0,98	197.806.075	1	197.806.075	1	197.806.075	1	197.806.075	1	197.806.075	1	1.189.011.450	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04	Program Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang layak		83%	9.494.999.700	83%	9.427.449.700	85%	9.427.449.700	85%	9.427.449.700	90%	9.427.449.700	90%	9.427.449.700	90%	56.632.248.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi naskah kuno			-		-	25%	50.000.000	60%	60.000.000	80%	70.000.000	100%	180.000.000	100%	360.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Daya Saing Keolahragaan		100%	2.028.199.875	100%	2.810.408.000	100%	8.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.750.000.000	100%	17.588.607.875	Dinas Parpora
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Kepramukaan		100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	650.000.000	100%	750.000.000	100%	900.000.000	100%	1.000.000.000	100%	4.300.000.000	Dinas Parpora
	Sasaran **2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat**	Umur harapan hidup																
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita																
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu		100%	72.651.599.810	100%	88.114.070.725	100%	88.114.070.725	100%	88.114.070.725	100%	88.114.070.725	100%	88.114.070.725	100%	513.221.953.435	DINAS KESEHATAN
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten		75%	1.379.710.802	80%	881.321.986	90%	881.321.986	90%	881.321.986	100%	881.321.986	100%	881.321.986	100%	5.786.320.732	DINAS KESEHATAN
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman		85%	773.071.525	90%	773.071.525	100%	732.091.275	100%	732.091.275	100%	732.091.275	100%	732.091.275	100%	4.474.508.150	DINAS KESEHATAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan masyarakat yang berdaya dibidang kesehatan		75%	1.139.604.475	77%	1.455.079.350	80%	1.455.079.350	82%	1.455.079.350	85%	1.455.079.350	88%	1.455.079.350	90%	8.415.001.225	DINAS KESEHATAN
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BLUD)	Cakupan administrasi kantor yang ditata dan layanan BLUD		100%	54.000.000.000	100%	90.428.425.681	100%	90.428.425.681	100%	90.428.425.681	100%	90.428.425.681	100%	90.428.425.681	100%	506.142.128.405	RSUD
1.03.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentrase kualitas pelayanan publik	100%	100%	25.000.000.000	100%	49.414.679.766	100%	49.414.679.766	100%	49.414.679.766	100%	49.414.679.766	100%	49.414.679.766	100%	272.073.398.830	RSUD
1.03.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tingkat kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100%	100%	1.243.597.240	100%	3.832.166.920	100%	3.832.166.920	100%	3.832.166.920	100%	3.832.166.920	100%	3.832.166.920	100%	20.404.431.840	RSUD
	Sasaran **3. Meningkatnya kesejahteraan keluarga, pemberdayaan , perempuan dan perlindungan anak**	Angka Kemiskinan																
		IDG																
		IPG																

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.06.02	Program pemberdayaan sosial	Tingkat partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		80%	320.209.400	85%	232.603.737	90%	232.603.737	95%	232.603.737	100%	232.603.737	100%	232.603.737	100%	1.483.228.085	DINAS SOSIAL & PPA
1.06.04	Program rehabilitasi sosial	Persentase terlayaninya dan terbedayakannya PMKS di Kabupaten Tanah Datar		92%	2.109.977.825	95%	1.847.140.037	97%	1.847.140.037	100%	1.847.140.037	100%	1.847.140.037	100%	1.847.140.037	100%	11.345.678.010	DINAS SOSIAL & PPA
1.06.05	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase pelayanan dan jaminan sosial bagi PMKS		82%	1.737.298.600	85%	1.686.520.487	90%	1.686.520.487	95%	1.686.520.487	100%	1.686.520.487	100%	1.686.520.487	100%	10.169.901.035	DINAS SOSIAL & PPA
1.06.06	Program penanganan bencana	Persentase penangganan bencana yang ditangani		100%	1.283.180.000	100%	315.277.345	100%	315.277.345	100%	315.277.345	100%	315.277.345	100%	315.277.345	100%	2.859.566.725	DINAS SOSIAL & PPA
1.06.07	Program pengelolaan taman makam pahlawan	TMP yang dipelihara secara periodik		2 Tmp	99.954.825	2 Tmp	96.716.119	2 Tmp	96.716.119	2 Tmp	96.716.119	2 Tmp	96.716.119	2 Tmp	96.716.119	2 Tmp	583.535.420	DINAS SOSIAL & PPA
1.08.02	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Wawasan perempuan bidang ekonomi		5%	446.831.650	7%	325.581.696	10%	325.581.696	12%	325.581.696	15%	325.581.696	20%	325.581.696	20%	2.074.740.130	DINAS SOSIAL & PPA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Wawasan perempuan bidang politik		14 Kec	-	14 Kec	-	14 Kec	-	14 Kec	-	14 Kec	-	14 Kec	-	14 Kec	-	DINAS SOSIAL & PPA
		Wawasan perempuan bidang hukum		14 Kec	-	14 Kec	-	14 Kec	-	14 Kec	-	14 Kec	-	14 Kec	-	14 Kec	-	DINAS SOSIAL & PPA
1.08.02	Program perlindungan perempuan	Meningkatnya wawasan dan kesadaran terkait kekerasan terhadap perempuan		8 Nagari	442.653.550	10 Nagari	127.490.537	12 Nagari	127.490.537	15 Nagari	127.490.537	15 Nagari	127.490.537	10 Nagari	127.490.537	10 Nagari	1.080.106.235	DINAS SOSIAL & PPA
1.08.05	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Jumlah profil gender dan profil anak		2 Dok	39.344.900	2 Dok	24.387.425	2 Dok	24.387.425	2 Dok	24.387.425	2 Dok	24.387.425	2 Dok	24.387.425	2 Dok	161.282.025	DINAS SOSIAL & PPA
1.08.06	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Tingkat pemenuhan hak anak		1 Kec	34.769.450	1 Kec	21.014.776	1 Kec	21.014.776	2 Kec	21.014.776	2 Kec	21.014.776	2 Kec	21.014.776	2 Kec	139.843.330	DINAS SOSIAL & PPA
1.08.07	Program perlindungan khusus anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak		0.22%	410.000.000	0.20%	441.756.575	0.18%	441.756.575	0.15%	441.756.575	0.13%	441.756.575	0.10%	441.756.575	0.10%	2.618.782.875	DINAS SOSIAL & PPA
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan penataan desa			-	100%	65.000.000	100%	170.000.000	100%	210.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	970.000.000	DINAS PMDPKB
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah nagari yang melakukan kerjasama		100%	78.500.000	100%	58.875.000	100%	58.875.000	100%	58.875.000	100%	58.875.000	100%	58.875.000	100%	372.875.000	DINAS PMDPKB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.13.04	Program Administrasi Pemerintah Desa	Persentase pelayanan administrasi pemerintahan desa		100%	3.670.289.125	100%	3.543.422.494	100%	3.543.422.494	100%	3.543.422.494	100%	3.543.422.494	100%	3.543.422.494	100%	21.387.401.595	DINAS PMDPKB
2.13.013	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pelayanan kelembagaan masyarakat desa		0%	-	100%	947.291.429	100%	947.291.429	100%	947.291.429	100%	947.291.429	100%	947.291.429	100%	4.736.457.145	DINAS PMDPKB
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pasangan usia subur tidak ingin anak lagi (unmeet ned) tidak terlayani KB		100%	4.373.196.675	100%	5.154.896.550	100%	5.154.896.550	100%	5.154.896.550	100%	5.154.896.550	100%	5.154.896.550	100%	30.147.679.425	DINAS PMDPKB
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keaktifan poktan		100%	922.199.675	100%	149.345.356	100%	149.345.356	100%	149.345.356	100%	149.345.356	100%	149.345.356	100%	1.668.926.455	DINAS PMDPKB
	Misi 4 : Pembangunan Pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam																	
	Tujuan : Mewujudkan Kab. Tanah Datar sebagai Destinasi pariwisata yang unggul berbasis agama, budaya dan sumber daya alam	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (sektor akomodasi dan makan minum)																
	Sasaran : Peningkatan daya saing pariwisata sebagai sumber pertumbuhan ekonomi potensial	Jumlah kunjungan wisatawan																
		Lama tinggal wisatawan																

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkat nya Daya Tarik Objek wisata unggualn		100%	18.150.357.000	100%	19.038.099.000	100%	19.500.000.000	100%	19.500.000.000	100%	19.500.000.000	100%	19.500.000.000	100%	115.188.456.000	Dinas Parpora
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kab.Tanah Datar		100%	950.000.000	100%	2.900.853.000	100%	2.500.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.500.000.000	100%	15.850.853.000	Dinas Parpora
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual			-	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	850.000.000	Dinas Parpora
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		100%	375.000.000	100%	630.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	4.105.000.000	Dinas Parpora
	Misi 5.Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien																	
	Tujuan **1.Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif dan Efisien**	Indeks reformasi birokrasi																

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Sasaran 1 : Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Opini BPK atas laporan keuangan																
		Indek pengawasan kearsipan																
		Manajemen resiko level 3																
		Nilai SAKIP																
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah		WTP	175.682.740.569	WTP	161.221.614.068	WTP	167.348.035.403	WTP	173.891.343.587	WTP	180.725.273.390	WTP	187.863.921.689	WTP	1.046.732.928.705	BKD
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah		100%	1.195.447.800	100%	1.360.000.000	100%	1.411.680.000	100%	1.466.876.688	100%	1.524.524.942	100%	1.584.743.677	100%	8.543.273.107	BKD
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah Kab.Tanah Datar		100%	1.256.356.300	100%	4.246.210.600	100%	4.407.566.603	100%	4.579.902.457	100%	4.759.892.624	100%	4.947.908.382	100%	24.197.836.965	BKD
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik		100%	35.569.075	100%	30.631.000	100%	35.631.000	100%	35.631.000	100%	35.631.000	100%	35.631.000	100%	208.724.075	KECAMATAN X KOTO
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari		100%	18.743.500	100%	16.840.000	100%	21.840.000	100%	21.840.000	100%	21.840.000	100%	21.840.000	100%	122.943.500	KECAMATAN X KOTO

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum		100%	37.884.600	100%	26.185.000	100%	31.185.000	100%	31.185.000	100%	31.185.000	100%	31.185.000	100%	188.809.600	KECAMATAN X KOTO
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		100%	59.470.700	100%	100.617.000	100%	105.617.000	100%	105.617.000	100%	105.617.000	100%	105.617.000	100%	582.555.700	KECAMATAN X KOTO
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		100%	53.475.200	100%	50.886.000	100%	55.886.000	100%	55.886.000	100%	55.886.000	100%	55.886.000	100%	327.905.200	KECAMATAN X KOTO
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik		100%	55.957.500	100%	49.100.000	100%	54.100.000	100%	54.100.000	100%	54.100.000	100%	54.100.000	100%	321.457.500	KECAMATAN BATIPUH
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari		100%	11.490.800	100%	9.100.000	100%	14.100.000	100%	14.100.000	100%	14.100.000	100%	14.100.000	100%	76.990.800	KECAMATAN BATIPUH
7.01.04	Program koordinasi ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum		100%	20.381.900	100%	21.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	145.381.900	KECAMATAN BATIPUH
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		100%	69.638.550	100%	107.000.000	100%	112.000.000	100%	112.000.000	100%	112.000.000	100%	112.000.000	100%	624.638.550	KECAMATAN BATIPUH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		100%	78.371.575	100%	84.367.000	100%	89.367.000	100%	89.367.000	100%	89.367.000	100%	89.367.000	100%	520.206.575	KECAMATAN BATIPUH
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik		100%	40.599.525	100%	34.000.000	100%	39.000.000	100%	39.000.000	100%	39.000.000	100%	39.000.000	100%	230.599.525	KECAMATAN RAMBATAN
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari		100%	13.999.650	100%	12.500.000	100%	17.500.000	100%	17.500.000	100%	17.500.000	100%	17.500.000	100%	96.499.650	KECAMATAN RAMBATAN
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum		100%	19.999.850	100%	27.100.000	100%	32.100.000	100%	32.100.000	100%	32.100.000	100%	32.100.000	100%	175.499.850	KECAMATAN RAMBATAN
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		100%	87.999.425	100%	121.123.000	100%	126.123.000	100%	126.123.000	100%	126.123.000	100%	126.123.000	100%	713.614.425	KECAMATAN RAMBATAN
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		100%	48.999.375	100%	51.000.000	100%	56.000.000	100%	56.000.000	100%	56.000.000	100%	56.000.000	100%	323.999.375	KECAMATAN RAMBATAN
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik		100%	81.399.450	100%	71.555.000	100%	76.555.000	100%	76.555.000	100%	76.555.000	100%	76.555.000	100%	459.174.450	KECAMATAN LIMA KAUM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari		100%	16.749.750	100%	12.700.000	100%	17.700.000	100%	17.700.000	100%	17.700.000	100%	17.700.000	100%	100.249.750	KECAMATAN LIMA KAUM
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum		100%	14.270.000	100%	21.300.000	100%	26.300.000	100%	26.300.000	100%	26.300.000	100%	26.300.000	100%	140.770.000	KECAMATAN LIMA KAUM
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		100%	104.808.475	100%	141.800.000	100%	146.800.000	100%	146.800.000	100%	146.800.000	100%	146.800.000	100%	833.808.475	KECAMATAN LIMA KAUM
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		100%	49.439.150	100%	48.000.000	100%	53.000.000	100%	53.000.000	100%	53.000.000	100%	53.000.000	100%	309.439.150	KECAMATAN LIMA KAUM
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik		100%	37.999.700	100%	32.000.000	100%	37.000.000	100%	37.000.000	100%	37.000.000	100%	37.000.000	100%	217.999.700	KECAMATAN TANJUNG EMAS
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari		100%	17.999.950	100%	14.600.000	100%	19.600.000	100%	19.600.000	100%	19.600.000	100%	19.600.000	100%	110.999.950	KECAMATAN TANJUNG EMAS
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum		100%	24.999.850	100%	26.600.000	100%	31.600.000	100%	31.600.000	100%	31.600.000	100%	31.600.000	100%	177.999.850	KECAMATAN TANJUNG EMAS

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		100%	69.994.975	100%	912.150.000	100%	119.000.000	100%	119.000.000	100%	119.000.000	100%	119.000.000	100%	1.458.144.975	KECAMATAN TANJUNG EMAS
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		100%	89.099.650	100%	80.300.000	100%	85.300.000	100%	85.300.000	100%	85.300.000	100%	85.300.000	100%	510.599.650	KECAMATAN TANJUNG EMAS
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik		100%	66.400.000	100%	60.200.000	100%	65.200.000	100%	65.200.000	100%	65.200.000	100%	65.200.000	100%	387.400.000	KECAMATAN LINTAU BUO
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari		100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	68.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum		100%	8.700.000	100%	17.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	113.700.000	KECAMATAN LINTAU BUO
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		100%	185.587.600	100%	155.400.000	100%	160.400.000	100%	160.400.000	100%	160.400.000	100%	160.400.000	100%	982.587.600	KECAMATAN LINTAU BUO
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		100%	43.953.300	100%	45.100.000	100%	50.100.000	100%	50.100.000	100%	50.100.000	100%	50.100.000	100%	289.453.300	KECAMATAN LINTAU BUO

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik		100%	33.599.875	100%	25.400.000	100%	30.400.000	100%	30.400.000	100%	30.400.000	100%	30.400.000	100%	180.599.875	KECAMATAN SUNGAYANG
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari		100%	14.000.000	100%	8.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	74.000.000	KECAMATAN SUNGAYANG
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum		100%	10.029.925	100%	20.100.000	100%	25.100.000	100%	25.100.000	100%	25.100.000	100%	25.100.000	100%	130.529.925	KECAMATAN SUNGAYANG
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		100%	94.499.925	100%	123.005.000	100%	128.005.000	100%	128.005.000	100%	128.005.000	100%	128.005.000	100%	729.524.925	KECAMATAN SUNGAYANG
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		100%	71.179.750	100%	63.300.000	100%	68.300.000	100%	68.300.000	100%	68.300.000	100%	68.300.000	100%	407.679.750	KECAMATAN SUNGAYANG
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik		100%	59.376.100	100%	51.600.000	100%	56.600.000	100%	56.600.000	100%	56.600.000	100%	56.600.000	100%	337.376.100	KECAMATAN PARIANGAN
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari		100%	16.976.200	100%	14.200.000	100%	19.200.000	100%	19.200.000	100%	19.200.000	100%	19.200.000	100%	107.976.200	KECAMATAN PARIANGAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum		100%	19.934.400	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	189.934.400	KECAMATAN PARIANGAN
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		100%	100.609.100	100%	128.200.000	100%	133.200.000	100%	133.200.000	100%	133.200.000	100%	133.200.000	100%	761.609.100	KECAMATAN PARIANGAN
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		100%	57.992.275	100%	62.000.000	100%	67.000.000	100%	67.000.000	100%	67.000.000	100%	67.000.000	100%	387.992.275	KECAMATAN PARIANGAN
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik		100%	468.000.000	100%	45.100.000	100%	50.100.000	100%	50.100.000	100%	50.100.000	100%	50.100.000	100%	713.500.000	KECAMATAN SUNGAI TARAB
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari		100%	14.000.000	100%	11.600.000	100%	16.600.000	100%	16.600.000	100%	16.600.000	100%	16.600.000	100%	92.000.000	KECAMATAN SUNGAI TARAB
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum		100%	12.000.000	100%	31.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	187.000.000	KECAMATAN SUNGAI TARAB
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		100%	172.345.575	100%	159.000.000	100%	164.000.000	100%	164.000.000	100%	164.000.000	100%	164.000.000	100%	987.345.575	KECAMATAN SUNGAI TARAB

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		100%	51.500.000	100%	39.600.000	100%	44.600.000	100%	44.600.000	100%	44.600.000	100%	44.600.000	100%	269.500.000	KECAMATAN SUNGAI TARAB
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik		100%	56.000.000	100%	50.900.000	100%	55.900.000	100%	55.900.000	100%	55.900.000	100%	55.900.000	100%	330.500.000	KECAMATAN SALIMPAUNG
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari		100%	15.500.000	100%	14.500.000	100%	19.500.000	100%	19.500.000	100%	19.500.000	100%	19.500.000	100%	108.000.000	KECAMATAN SALIMPAUNG
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum		100%	17.300.775	100%	23.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	152.300.775	KECAMATAN SALIMPAUNG
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		100%	62.198.925	100%	104.153.000	100%	109.153.000	100%	109.153.000	100%	109.153.000	100%	109.153.000	100%	602.963.925	KECAMATAN SALIMPAUNG
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		100%	46.989.375	100%	42.000.000	100%	47.000.000	100%	47.000.000	100%	47.000.000	100%	47.000.000	100%	276.989.375	KECAMATAN SALIMPAUNG
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik		100%	38.448.400	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	208.448.400	KECAMATAN PADANG GANTING

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari		100%	11.494.500	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	81.494.500	KECAMATAN PADANG GANTING
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum		100%	14.993.500	100%	20.200.000	100%	25.200.000	100%	25.200.000	100%	25.200.000	100%	25.200.000	100%	135.993.500	KECAMATAN PADANG GANTING
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		100%	82.458.200	100%	111.800.000	100%	116.800.000	100%	116.800.000	100%	116.800.000	100%	116.800.000	100%	661.458.200	KECAMATAN PADANG GANTING
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		100%	44.982.700	100%	37.500.000	100%	42.500.000	100%	42.500.000	100%	42.500.000	100%	42.500.000	100%	252.482.700	KECAMATAN PADANG GANTING
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik		100%	43.195.125	100%	39.000.000	100%	44.000.000	100%	44.000.000	100%	44.000.000	100%	44.000.000	100%	258.195.125	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari		100%	18.499.525	100%	13.100.000	100%	18.100.000	100%	18.100.000	100%	18.100.000	100%	18.100.000	100%	103.999.525	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
7.01.04	Program koordinasi ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum		100%	8.517.400	100%	15.300.000	100%	20.300.000	100%	20.300.000	100%	20.300.000	100%	20.300.000	100%	105.017.400	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		100%	86.513.600	100%	105.900.000	100%	110.900.000	100%	110.900.000	100%	110.900.000	100%	110.900.000	100%	636.013.600	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		100%	90.487.925	100%	69.000.000	100%	74.000.000	100%	74.000.000	100%	74.000.000	100%	74.000.000	100%	455.487.925	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik		100%	42.254.500	100%	37.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	247.254.500	KECAMATAN TANJUNG BARU
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari		100%	11.499.875	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	81.499.875	KECAMATAN TANJUNG BARU
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum		100%	26.534.950	100%	23.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	161.534.950	KECAMATAN TANJUNG BARU
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		100%	96.962.100	100%	132.000.000	100%	137.000.000	100%	137.000.000	100%	137.000.000	100%	137.000.000	100%	776.962.100	KECAMATAN TANJUNG BARU
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		100%	40.349.700	100%	33.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	225.349.700	KECAMATAN TANJUNG BARU

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik		100%	30.698.325	100%	26.500.000	100%	31.500.000	100%	31.500.000	100%	31.500.000	100%	31.500.000	100%	183.198.325	KECAMATAN BATIPUH SELATAN
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari		100%	11.599.850	100%	12.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100%	91.599.850	KECAMATAN BATIPUH SELATAN
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum		100%	38.999.925	100%	38.000.000	100%	43.000.000	100%	43.000.000	100%	43.000.000	100%	43.000.000	100%	248.999.925	KECAMATAN BATIPUH SELATAN
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum		100%	66.999.750	100%	99.000.000	100%	104.000.000	100%	104.000.000	100%	104.000.000	100%	104.000.000	100%	581.999.750	KECAMATAN BATIPUH SELATAN
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa		100%	70.499.375	100%	68.500.000	100%	73.500.000	100%	73.500.000	100%	73.500.000	100%	73.500.000	100%	432.999.375	KECAMATAN BATIPUH SELATAN
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Ranperda yang dibahas sehingga menjadi Perda dan terlaksananya Koordinasi, Konsultasi dan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD		100%	28.372.789.675	100%	38.936.070.870	100%	38.936.070.870	100%	38.936.070.870	100%	38.936.070.870	100%	38.936.070.870	100%	223.053.144.025	SETWAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.24.02	Program Pengelolaan Kearsipan	Persentase instansi pemerinyah (OPD/Nagari) dan swasta diKabupaten Tanah Datar yang menerapkan penyelenggaraan arsip secara baku		100%	159.999.650	80%	175.000.000	85%	211.000.000	90%	250.000.000	95%	275.000.000	100%	320.000.000	100%	1.390.999.650	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pengelolaan arsip secara baku		100%	29.997.750	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	929.997.750	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik						75%	60.000.000	85%	70.000.000	90%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	295.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Program kinerja daerah tergadap perencanaan Pembangunan Daerah		100%	844.998.900	100%	678.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	4.322.998.900	BAPERLITBANG
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kosistensi antar dokumen perencanaan bidang PPM, bidang Perekonomian dan SDA dan bidang infrastruktur dan kewilayahan		100%	824.800.875	100%	715.000.000	100%	715.000.000	100%	715.000.000	100%	650.000.000	100%	650.000.000	100%	4.269.800.875	BAPERLITBANG
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan manajemen ASN		100%	3.796.109.825	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	100%	21.296.109.825	BKPSDM

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk		100%	224.971.000	100%	415.000.000	100%	415.000.000	100%	415.000.000	100%	415.000.000	100%	415.000.000	100%	2.299.971.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil		100%	169.998.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	994.998.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.04	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Cakupan kualitas dan kuantitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan		100%	89.999.600	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	414.999.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan		100%	44.988.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	269.988.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan		100%	159.999.917	100%	104.453.617	100%	104.453.617	100%	104.453.617	100%	104.453.617	100%	104.453.617	100%	682.268.002	KESBANGPOL
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku		100%	868.612.533	100%	847.458.045	100%	847.458.045	100%	12.682.212.766	100%	847.458.045	100%	847.458.045	100%	16.940.657.479	KESBANGPOL

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku		100%	14.999.725	100%	3.153.600	100%	3.153.600	100%	3.153.600	100%	3.153.600	100%	3.153.600	100%	30.767.725	KESBANGPOL
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan penyakit masyarakat		100%	116.801.775	100%	99.596.200	100%	99.596.200	100%	99.596.200	100%	99.596.200	100%	99.596.200	100%	614.782.775	KESBANGPOL
	Sasaran 2 : Meningkatnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE																
		Indek profesionalitas ASN																
		Skor dan status kinerja pemerintah daerah																
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah pengawasan internal, pengawasan tertentu serta monitoring dan pembinaan yang dilaksanakan		310 obrik	1.316.391.175	320 obrik	1.736.187.900	330 obrik	1.736.187.900	340 obrik	1.736.187.900	300 obrik	1.736.187.900	360 obrik	1.736.187.900	360 obrik	9.997.330.675	INSPEKTORAT
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan serta asistensi terkait kebijakan reformasi birokrasi, penegakan integritas yang dilaksanakan, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3		9 Kegiatan	523.468.050	9 Kegiatan	220.468.450	9 Kegiatan	220.468.450	9 Kegiatan	220.468.450	9 Kegiatan	220.468.450	9 Kegiatan	220.468.450	9 Kegiatan	1.625.810.300	INSPEKTORAT
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah		100%	1.853.745.850	100%	2.070.800.000	100%	2.223.430.000	100%	2.445.773.000	100%	3.690.350.300	100%	5.959.385.330	100%	18.243.484.480	DINAS KOMINFO

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya Aplikasi Informatika		100%	1.590.000.000	100%	2.006.800.000	100%	2.264.480.000	100%	2.490.928.000	100%	3.240.020.800	100%	5.014.022.880	100%	16.606.251.680	DINAS KOMINFO
	Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat																
1.05.02	Program Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah, penyelengaraam trantibum dan fungsi linmas		90%	1.181.106.450	92%	1.096.519.425	94%	1.096.519.425	96%	1.096.519.425	95%	1.096.519.425	97%	1.096.519.425	97%	6.663.703.575	SATPOL PP DAMKAR
1.05.04	Program Pencegahan Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan pelayanan , pemadaman dan penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dalam wilayah managemen kebakaran sesuai dengan waktu tanggap respon time		90%	2.021.493.975	90%	2.255.233.975	90%	2.255.233.975	90%	2.255.233.975	90%	2.255.233.975	90%	2.255.233.975	90%	13.297.663.850	SATPOL PP DAMKAR
	Misi 6 Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan																	
	Tujuan 1. Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas	Persentase Infrastruktur yang berkualitas																
	Sasaran : Meningkatnya kualitas infrastruktur wilayah	Persentase Infrastruktur wilayah yang berkualitas																

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Areal Irigasi Dalam Kondisi Baik		58,89%	18.964.502.778	61,88%	18.787.500.000	64,88%	30.000.000.000	67,87%	30.000.000.000	70,86%	45.000.000.000	73,85%	45.000.000.000	73,85%	187.752.002.778	DINAS PUPRP
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Pelayanan Air Minum		80%	8.507.609.600	82%	12.892.609.600	83%	7.000.000.000	85%	7.500.000.000	86%	15.000.000.000	86%	18.500.000.000	86%	69.400.219.200	DINAS PUPRP
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak		80%	2.495.274.000	84%	4.086.274.000	89%	7.000.000.000	93%	7.600.000.000	96%	13.100.000.000	100%	18.540.000.000	100%	52.821.548.000	DINAS PUPRP
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Terlaksananya program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase		77%	474.981.521	79%	1.640.000.000	80%	7.230.000.000	81%	7.550.000.000	83%	7.860.000.000	84%	8.000.000.000	84%	32.754.981.521	DINAS PUPRP
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Terlaksananya Program pengembangan permukiman		48%	736.493.402	50%	200.000.000	53%	800.000.000	55%	865.000.000	58%	2.000.000.000	60%	4.000.000.000	60%	8.601.493.402	DINAS PUPRP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Terlaksananya penataan bangunan gedung		100%	3.432.994.709	100%	4.330.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	660.000.000	100%	10.072.994.709	DINAS PUPRP
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya		100%	99.981.300	100%	100.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	2.000.000.000	100%	7.500.000.000	100%	10.799.981.300	DINAS PUPRP
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Layak		77%	40.850.785.935	79%	60.000.000.000	80%	61.000.000.000	81%	64.662.909.000	83%	78.662.909.000	84%	84.662.909.000	84%	389.839.512.935	DINAS PUPRP
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Terlaksananya pengembangan jasa konstruksi			-	10 Badan Usaha	225.000.000	20 Badan Usaha	250.000.000	30 Badan Usaha	500.000.000	40 Badan Usaha	600.000.000	50 Badan Usaha	650.000.000	150 Badan Usaha	2.225.000.000	DINAS PUPRP
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang		95%	289.999.250	95%	1.340.000.000	95%	2.900.000.000	95%	5.600.000.000	95%	5.850.000.000	95%	6.250.000.000	95%	22.229.999.250	DINAS PUPRP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen /Laporan Hasil Inventarisasi, penyelesaian dan mediasi konflik pertanahan		100%	49.999.575	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	749.999.575	DINAS PUPRP
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah Fasilitasi Pengadaan Tanah Pada OPD, Jumlah penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah			-		-	100%	150.000.000	100%	185.000.000	100%	200.000.000	100%	3.935.000.000	100%	4.470.000.000	DINAS PUPRP
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Jumlah Fasilitasi penetapan redistribusi tanah, penetapan ganti kerugian tanah kelebihan masimum dan absentee serta koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah			-	100%	114.517.644	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	714.517.644	DINAS PUPRP
2.10.07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Jumlah fasilitasi penetapan tanah ulayat			-		-	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	DINAS PUPRP
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong			-		-	100%	225.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	325.000.000	100%	1.075.000.000	DINAS PUPRP
2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Jumlah dan fasilitasi peneribitan izin membuka tanah, jumlah fasilitasi koordinasi dan singkronisasi izin membuka tanah Sertifikat Tanah Aset Pemda Yang Diterbitkan		100%	570.000.000	100%	569.300.000	100%	700.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.750.000.000	100%	6.339.300.000	DINAS PUPRP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal			-		-	100%	150.000.000	100%	170.000.000	100%	185.000.000	100%	200.000.000	100%	705.000.000	DINAS PUPRP
	Tujuan 2 : Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas lingkungan hidup																
	Sasaran : 1. Meningkatkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup																
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terdampak bencana alam dan yang terkena relokasi program		100%	-	100%	350.000.000	100%	402.500.000	100%	462.875.000	100%	532.306.250	100%	612.152.188	100%	2.359.833.438	DINAS PERKIM LH
		Penyediaan data tekait perumahan dilokasi rawan bencana	1 Dokumen		24.999.925	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	624.999.925	DINAS PERKIM LH
		Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan		2 dokumen	29.999.800	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	172.500.000	2 dokumen	198.375.000	2 dokumen	228.131.250	2 dokumen	262.350.938	12 dokumen	1.041.356.988	DINAS PERKIM LH
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan Kumuh		95%	-	80%	250.000.000	75%	1.075.500.000	70%	1.108.800.000	65%	1.010.400.000	60%	1.010.400.000	60%	4.455.100.000	DINAS PERKIM LH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (dibawah 10 ha Kawasan Kumuh)			-	4%	3.534.500.000	6%	500.000.000	6%	500.000.000	7%	500.000.000	8%	500.000.000	8%	5.534.500.000	DINAS PERKIM LH
		Jumlah regulasi/kebijakan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman			-	2 dokumen	300.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	115.000.000	2 dokumen	132.250.000	2 dokumen	152.087.500	2 dokumen	799.337.500	DINAS PERKIM LH
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (diluar kawasan kumuh diabwah 10 ha)		91%	253.536.100	91%	2.760.000.000	92%	400.000.000	92%	450.000.000	92%	500.000.000	93%	550.000.000	93%	4.913.536.100	DINAS PERKIM LH
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Jumlah PSU yang dibangun untuk menunjang fungsi hunian		1 paket	30.000.000	1 paket	833.491.785	1 paket	600.000.000	1 paket	700.000.000	1 paket	800.000.000	1 paket	900.000.000	6 paket	3.863.491.785	DINAS PERKIM LH
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan		39,70%	1.695.334.575	40%	2.960.334.725	41%	3.034.443.500	42%	3.337.887.850	43%	4.500.000.000	1 tahun	7.000.000.000	0,00%	22.528.000.650	DINAS PERHUBUNGAN

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		1 Dokumen	122.084.650	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000		-		-		-	3 Dokumen	222.084.650	DINAS PERKIM LH
		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten/Kota		1 Dokumen	150.000.000	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen	300.000.000	-	-	3 Dokumen	450.000.000	DINAS PERKIM LH
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Uji Kualitas Air	0,52	55,79%	40.000.000	55,89%	50.000.000	55,99%	60.000.000	56,09%	70.000.000	56,19%	80.000.000	56,29%	90.000.000	56,29%	390.000.000	DINAS PERKIM LH
		Hasil Uji Kualitas Udara	89,84%	85,57%	-	85,67%	-	85,77%	-	85,87%	-	85,97%	-	86,07%	-	86,07%	-	DINAS PERKIM LH
		Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	53,23%	54,69%	0,00	56,15%	0,00	57,61%	0,00	59,07%	0,00	60,53%	0,00	61,99%	0,00	61,99%	-	DINAS PERKIM LH
		Jumlah Kelompok Proklim yang di bina	4	2	24.999.925	4	100.000.000	7	175.000.000	7	175.000.000	7	175.000.000	7	175.000.000	34	824.999.925	DINAS PERKIM LH
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis	-		-	3	75.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	195.000.000	DINAS PERKIM LH
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang di Tata.	90,00%	80,00%	662.399.895	81,00%	771.506.230	82,00%	750.000.000	83,00%	800.000.000	84,00%	850.000.000	85,00%	900.000.000	85,00%	4.733.906.125	DINAS PERKIM LH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		Jumlah kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)			-		-	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	100.000.000	DINAS PERKIM LH
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah usaha atau kegiatan yang dibina dan diverifikasi lapangan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara libah B3			-	8	75.000.000	9	50.000.000	10	50.000.000	11	50.000.000	11	50.000.000	11	275.000.000	DINAS PERKIM LH
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha / kegiatan yang taat tehadap izin lingkungan / persetujuan lingkungan	46,67%	0,5	114.999.725	0,5	200.000.000	0,5	120.000.000	0,5	120.000.000	0,5	120.000.000	0,5	120.000.000	0,5	794.999.725	DINAS PERKIM LH
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA			-	1 Kelompok	50.000.000	1 Kelompok	50.000.000	1 Kelompok	50.000.000	1 Kelompok	50.000.000	1 Kelompok	50.000.000	5 Kelompok	250.000.000	DINAS PERKIM LH
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat					-	1 Kali	25.000.000	2 Kali	50.000.000	2 Kali	50.000.000	2 Kali	50.000.000	7 Kali	175.000.000	DINAS PERKIM LH
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada	Ada	180.748.800	Ada	230.748.800	Ada	280.748.800	Ada	330.748.800	Ada	380.748.800	Ada	430.748.800	Ada	1.834.492.800	DINAS PERKIM LH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.11.10	Program Penanganan Penyadaran Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti			-	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	150.000.000	DINAS PERKIM LH
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani		0,53	3.423.490.785	0,54	3.460.666.510	0,55	4.770.480.000	0,56	5.247.528.000	0,57	6.772.280.800	0,58	11.349.508.880	0,58	35.023.954.975	DINAS PERKIM LH
		Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	16,55%	17,00%	19.999.975	18,00%	100.000.000	19,00%	50.000.000	20,00%	50.000.000	21,00%	50.000.000	22,00%	50.000.000	22,00%	319.999.975	DINAS PERKIM LH
		Operasional TPA	74,00%	0,7402	100.000.000	0,7404	480.000.000	0,7406	250.000.000	0,7409	250.000.000	0,7412	250.000.000	0,7414	250.000.000	0,7414	1.580.000.000	DINAS PERKIM LH
		%Cakupan area pelayanan	28,00%	33,00%	24.800.000	38,00%	50.000.000	44,00%	3.376.000.000	49,00%	3.376.000.000	54,00%	3.713.600.000	60,00%	4.084.960.000	60,00%	14.625.360.000	DINAS PERKIM LH
		Pengembangan regulasi pengelolaan sampah		1	13.087.400	1	50.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	6	143.087.400	DINAS PERKIM LH

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/impact/ Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Sasaran : 2. Meningkatkan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana	Persentase bencana yang ditangani																
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana yang ditangani	100%	100%	746.695.150	100%	2.031.600.000	100%	2.234.760.000	100%	2.458.236.000	100%	2.704.059.600	100%	2.974.465.560	100%	13.149.816.310	BPBD

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah secara konsisten untuk melaksanakan amanat Perundang-undangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang urusan wajib pelayanan dasar yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.

Demikian juga peraturan yang sifatnya mandatory sebagaimana tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa alokasi Urusan Pendidikan minimal 20 % dari belanja daerah, dan berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan bahwa Urusan Kesehatan minimal 10 % dari belanja daerah. Selain itu belanja daerah juga dialokasikan berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perencanaan kinerja program, korelasi antara aspek strategis dan operasional menjadi tuntutan yang tidak dapat diabaikan. Aspek strategis dituangkan dalam tujuan dan sasaran daerah, pada aspek operasional kinerja diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Program dikategorikan strategis atau prioritas jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026, sedangkan program yang tidak terkait langsung dikategorikan sebagai program pendukung (*supporting*). Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif dan target kinerja terukur yang kemudian dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah. Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan belanja Perangkat Daerah berdasarkan target kinerja yang akan diwujudkan serta dengan mempertimbangkan persentase total belanja pada pengeluaran setiap Perangkat Daerah beberapa tahun sebelumnya. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis.

Pola pengeluaran per Perangkat Daerah untuk 5 tahun kedepan harus bisa menyesuaikan dengan Proyeksi Kapasitas Rill Keuangan Daerah yang sudah diperhitungkan untuk kebutuhan selama 5 tahun. Kerangka pendanaan pembangunan daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada Tabel 7.1 dan Indikasi Program Prioritas Sesuai Kebutuhan Pendanaan disajikan Pada Tabel 7.2

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2021 - 2026 (Dalam Rp.)

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2	**BELANJA**	**1,348,802,297,000.00**	**1,381,265,911,000.00**	**1,435,133,410,000.00**	**1,491,951,106,000.00**	**1,550,527,618,000.00**	**1,605.485.382,000.00**
2.1	**BELANJA OPERASI**	**1,076,210,254,000.00**	**1,039,714,357,000.00**	**1,056,556,041,000.00**	**1,073,781,211,000.00**	**1,091,408,705,000.00**	1,109,458,953,000.00
2.1.1	Belanja Pegawai	656,827,524,000.00	666,679,937,000.00	676,680,136,000.00	686,830,338,000.00	697,132,793,000.00	707,589,785,000.00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	400,211,157,000.00	353,463,268,570.00	358,765,218,000.00	364,146,696,000.00	369,608,896,000.00	375,153,029,000.00
2.1.3	Belanja Hibah	13,995,783,000.00	15,395,361,000.00	16,934,897,000.00	18,628,387,000.00	20,491,226,000.00	22,540,349,000.00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	5,175,790,000.00	4,175,790,000.00	4,175,790,000.00	4,175,790,000.00	4,175,790,000.00	4,175,790,000.00
2.2	**BELANJA MODAL**	**170,030,885,000.00**	**238,574,320,000.00**	**272,805,056,000.00**	**309,478,532,000.00**	**347,377,281,000.00**	**379,207,877,000.00**
2.2.1	Belanja Modal Tanah	835,845,000.00	1,779,598,000.00	3,788,942,000.00	8,067,036,000.00	17,175,526,000.00	36,568,412,000.00
2.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27,860,108,090.00	29,810,316,000.00	31,897,038,000.00	34,129,831,000.00	36,518,919,000.00	39,075,243,000.00
2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	73,281,855,215.00	78,521,508,000.00	84,135,796,000.00	90,151,505,000.00	96,597,338,000.00	103,504,048,000.00
2.2.4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	64,965,322,088.00	125,066,368,000.00	149,247,097,000.00	173,020,359,000.00	192,564,717,000.00	195,087,315,000.70
2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3,087,754,700.00	3,396,530,000.00	3,736,183,000.00	4,109,801,000.00	4,520,781,100.00	4,972,859,000.00

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
2.2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	-	-	-	-	-	-
2.2.7	Belanja Modal BLUD	-	-	-	-		-
2.3	**BELANJA TAK TERDUGA**	**9,455,971,000.00**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**	**10,000,000,000.00**
					-	-	
3	**BELANJA TRANSFER**	**93,105,187,000.00**	**92,977,234,000.00**	**95,772,313,000.00**	**98,691,363,000.00**	**101,741,632,000.00**	**106,818,552,000.00**
3.1	Belanja Bagi Hasil	3,521,254,000.00	3,635,437,000.00	3,996,619,000.00	4,396,342,000.00	4,838,856,000.00	5,070,637,000.00
3.2	Belanja Bantuan Keuangan	89,583,933,000.00	89,341,797,000.00	91,775,694,000.00	94,295,021,000.00	96,902,776,000.00	101,747,914,000.00
	Surplus (defisit)	**(48,448,732,000.00)**	**(43,128,454,000.00)**	**(44,918,198,000.00)**	**(47,370,407,000.00)**	**(49,168,810,000.00)**	**(44,801,998,000.50)**

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar

Tabel 7.2

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Tanah Datar

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**687.179.587.355**		**804.185.252.325**		**903.158.979.275**		**913.899.188.326**		**924.583.295.458**		**981.067.297.145**		**1.003.804.109.636**		**5.530.698.122.164**	
1,01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			**434.198.588.118**		**448.218.791.873**		**436.595.582.639**		**436.595.582.639**		**436.595.582.639**		**436.595.582.639**		**436.595.582.639**		**2.631.196.705.068**	
1.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan adminsitrasi kantor yang ditata	100%	356.993.275.636	100%	368.470.514.758	100%	359.371.048.399	100%	359.371.048.399	100%	359.371.048.399	100%	359.371.048.399	100%	359.371.048.399	100%	2.165.325.756.753	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang mencapai peningkatan mutu standar nasional pendidikan	80%	67.511.190.057	80%	70.053.296.340	85%	67.599.278.465	90%	67.599.278.465	90%	67.599.278.465	95%	67.599.278.465	95%	67.599.278.465	95%	408.049.688.665	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum nasional dan muatan lokal	65%	179.981.075	65%	199.981.075	97,50%	197.806.075	100%	197.806.075	100%	197.806.075	100%	197.806.075	100%	197.806.075	100%	1.189.011.450	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.01.04	Program Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang layak	80%	9.514.141.350	82,50%	9.494.999.700	82,50%	9.427.449.700	85%	9.427.449.700	85%	9.427.449.700	90%	9.427.449.700	90%	9.427.449.700	90%	56.632.248.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1,02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			**169.849.060.021**		**232.033.035.692**		**314.072.702.313**		**314.031.722.063**		**314.031.722.063**		**314.031.722.063**		**314.031.722.063**		**1.802.232.626.257**	
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	71.845.451.840	100%	75.845.451.840	100%	79.173.886.360	100%	79.173.886.360	100%	79.173.886.360	100%	79.173.886.360	100%	79.173.886.360	100%	471.714.883.640	DINAS KESEHATAN
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (BLUD)	Cakupan administrasi kantor yang ditata dan layanan BLUD		96.084.003.706	100%	54.000.000.000	100%	90.428.425.681	100%	90.428.425.681	100%	90.428.425.681	100%	90.428.425.681	100%	90.428.425.681	100%	506.142.128.405	RSUD
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pelayanan kesehatan masyarakat yang bermutu	100%	30.000.000	100%	72.651.599.810	100%	88.114.070.725	100%	88.114.070.725	100%	88.114.070.725	100%	88.114.070.725	100%	88.114.070.725	100%	513.221.953.435	DINAS KESEHATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten	70%	160.000.000	75%	1.379.710.802	80%	881.321.986	90%	881.321.986	90%	881.321.986	100%	881.321.986	100%	881.321.986	100%	5.786.320.732	DINAS KESEHATAN
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan sediaan farmasi, alat kesehatan, makanan dan minuman	80%	620.000.000	85%	773.071.525	90%	773.071.525	100%	732.091.275	100%	732.091.275	100%	732.091.275	100%	732.091.275	100%	4.474.508.150	DINAS KESEHATAN
1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan masyarakat yang berdaya dibidang kesehatan	70%	1.109.604.475	75%	1.139.604.475	77%	1.455.079.350	80%	1.455.079.350	82%	1.455.079.350	85%	1.455.079.350	88%	1.455.079.350	90%	8.415.001.225	DINAS KESEHATAN
1.03.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentrase kualitas pelayanan publik	100%		100%	25.000.000.000	100%	49.414.679.766	100%	49.414.679.766	100%	49.414.679.766	100%	49.414.679.766	100%	49.414.679.766	100%	272.073.398.830	RSUD
1.03.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tingkat kapasitas sumber daya manusia kesehatan	100%		100%	1.243.597.240	100%	3.832.166.920	100%	3.832.166.920	100%	3.832.166.920	100%	3.832.166.920	100%	3.832.166.920	100%	20.404.431.840	RSUD
1,03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**			**56.457.178.749**		**96.274.493.575**		**115.680.089.944**		**130.360.000.000**		**139.517.909.000**		**191.962.909.000**		**214.362.909.000**		**888.158.310.519**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	12.995.653.400	100%	20.421.871.080	100%	12.078.706.344	100%	13.180.000.000	100%	14.090.000.000	100%	21.290.000.000	100%	20.600.000.000	100%	101.660.577.424	DINAS PUPRP
1.03.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase Luas Areal Irigasi Dalam Kondisi Baik	56,06%	15.188.537.825	58,89%	18.964.502.778	61,88%	18.787.500.000	64,88%	30.000.000.000	67,87%	30.000.000.000	70,86%	45.000.000.000	73,85%	45.000.000.000	73,85%	187.752.002.778	DINAS PUPRP
1.03.03	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Pelayanan Air Minum	79,00%	1.097.594.697	80,00%	8.507.609.600	81,50%	12.892.609.600	83,00%	7.000.000.000	84,50%	7.500.000.000	86,00%	15.000.000.000	86,00%	18.500.000.000	86,00%	69.400.219.200	DINAS PUPRP
1.03.05	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk dengan akses sanitasi layak	75,14%	1.088.085.000	80,30%	2.495.274.000	84,15%	4.086.274.000	88,60%	7.000.000.000	92,50%	7.600.000.000	96,30%	13.100.000.000	100,00%	18.540.000.000	100,00%	52.821.548.000	DINAS PUPRP
1.03.06	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Terlaksananya program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase	76,67%	300.000.000	77,40%	474.981.521	78,73%	1.640.000.000	80,06%	7.230.000.000	81,39%	7.550.000.000	82,72%	7.860.000.000	84,05%	8.000.000.000	84,05%	32.754.981.521	DINAS PUPRP
1.03.07	Program Pengembangan Permukiman	Terlaksananya Program pengembangan permukiman	45,00%	2.801.767.079	47,50%	736.493.402	50,00%	200.000.000	52,50%	800.000.000	55,00%	865.000.000	57,50%	2.000.000.000	60,00%	4.000.000.000	60,00%	8.601.493.402	DINAS PUPRP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03.08	Program Penataan Bangunan Gedung	Terlaksananya penataan bangunan gedung			100%	3.432.994.709	100%	4.330.000.000	100%	500.000.000	100%	550.000.000	100%	600.000.000	100%	660.000.000	100%	10.072.994.709	DINAS PUPRP
1.03.09	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Terlaksananya penataan bangunan dan lingkungannya			100%	99.981.300	100%	100.000.000	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	2.000.000.000	100%	7.500.000.000	100%	10.799.981.300	DINAS PUPRP
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Layak	76,67%	22.509.534.748	77,40%	40.850.785.935	78,73%	60.000.000.000	80,06%	61.000.000.000	81,39%	64.662.909.000	82,72%	78.662.909.000	84,05%	84.662.909.000	84,05%	389.839.512.935	DINAS PUPRP
1.03.11	Program Pengembangan Jasa Kontruksi	Terlaksananya pengembangan jasa konstruksi	100,00%	16.040.000		-	10 Badan Usaha	225.000.000	20 Badan Usaha	250.000.000	30 Badan Usaha	500.000.000	40 Badan Usaha	600.000.000	50 Badan Usaha	650.000.000	150 Badan Usaha	2.225.000.000	DINAS PUPRP
1.03.12	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya penyelenggaraan penataan ruang	95%	459.966.000	95%	289.999.250	95%	1.340.000.000	95%	2.900.000.000	95%	5.600.000.000	95%	5.850.000.000	95%	6.250.000.000	95%	22.229.999.250	DINAS PUPRP
1,04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**			**2.503.841.600**		**5.323.050.185**		**14.257.055.680**		**9.817.470.285**		**10.748.717.313**		**11.628.121.544**		**12.694.528.075**		**64.468.943.081**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.04.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	608.872.600	100%	4.984.514.360	100%	5.879.063.895	100%	6.466.970.285	100%	7.113.667.313	100%	7.825.034.044	100%	8.607.537.449	100%	40.876.787.345	DINAS PERKIM LH
1.04.02	Program Pengembangan Perumahan	Fasilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang terdampak bencana alam dan yang terkena relokasi program	100%	-	100%	-	100%	350.000.000	100%	402.500.000	100%	462.875.000	100%	532.306.250	100%	612.152.188	100%	2.359.833.438	DINAS PERKIM LH
		Penyediaan data tekait perumahan dilokasi rawan bencana	1 Dokumen	31.099.000		24.999.925	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	624.999.925	DINAS PERKIM LH
		Rekomendasi Teknis Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang diterbitkan	1 Dokumen	36.057.000	2 dokumen	29.999.800	2 dokumen	150.000.000	2 dokumen	172.500.000	2 dokumen	198.375.000	2 dokumen	228.131.250	2 dokumen	262.350.938	12 dokumen	1.041.356.988	DINAS PERKIM LH
1.04.03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan Kumuh	95,20%	3.233.000	95,20%	-	80,00%	250.000.000	75,00%	1.075.500.000	70,00%	1.108.800.000	65,00%	1.010.400.000	60,00%	1.010.400.000	60,00%	4.455.100.000	DINAS PERKIM LH
		Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni (dibawah 10 ha Kawasan Kumuh)					4,48%	3.534.500.000	5,55%	500.000.000	6,25%	500.000.000	6,95%	500.000.000	7,65%	500.000.000	7,65%	5.534.500.000	DINAS PERKIM LH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Jumlah regulasi/kebijakan terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	1 Dokumen	15.060.000			2 dokumen	300.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	115.000.000	2 dokumen	132.250.000	2 dokumen	152.087.500	2 dokumen	799.337.500	DINAS PERKIM LH
1.04.04	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (diluar kawasan kumuh diabwah 10 ha)	97,34%	1.809.520.000	91,09%	253.536.100	91,29%	2.760.000.000	91,55%	400.000.000	91,85%	450.000.000	92,20%	500.000.000	92,56%	550.000.000	92,56%	4.913.536.100	DINAS PERKIM LH
1.04.05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Jumlah PSU yang dibangun untuk menunjang fungsi hunian			1 paket	30.000.000	1 paket	833.491.785	1 paket	600.000.000	1 paket	700.000.000	1 paket	800.000.000	1 paket	900.000.000	6 paket	3.863.491.785	DINAS PERKIM LH
1,05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**			**17.898.309.200**		**12.569.315.850**		**14.256.561.364**		**14.797.426.004**		**15.392.377.108**		**18.551.974.564**		**17.822.380.524**		**93.390.035.414**	
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	437.603.100	100%	2.706.636.000	100%	3.377.046.400	100%	3.714.751.040	100%	4.086.226.144	100%	5.000.000.000	100%	6.000.000.000	100%	24.884.659.584	BPBD
1.05.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata		5.613.384.275	100%	5.913.384.275,00	100%	5.496.161.564,00	100%	5.496.161.564,00	100%	5.496.161.564,00	100%	7.496.161.564,00	100%	5.496.161.564,00	100%	35.394.192.095	SATPOL PP DAMKAR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.05.02	Program Peningkatan Kententraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah, penyelengaraam trantibum dan fungsi linmas		681.106.450	90%	1.181.106.450	92%	1.096.519.425	94%	1.096.519.425	96%	1.096.519.425	95%	1.096.519.425	97%	1.096.519.425	97%	6.663.703.575	SATPOL PP DAMKAR
1.05.03	Program Penanggulangan Bencana	Persentase bencana yang ditangani	100%	9.644.721.400	100%	746.695.150	100%	2.031.600.000	100%	2.234.760.000	100%	2.458.236.000	100%	2.704.059.600	100%	2.974.465.560	100%	13.149.816.310	BPBD
1.05.04	Program Pencegahan Penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Cakupan pelayanan , pemadaman dan penanganan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran dalam wilayah managemen kebakaran sesuai dengan waktu tanggap respon time		1.521.493.975	90%	2.021.493.975	90%	2.255.233.975	90%	2.255.233.975	90%	2.255.233.975	90%	2.255.233.975	90%	2.255.233.975	90%	13.297.663.850	SATPOL PP DAMKAR
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**			**6.272.609.667**		**9.766.565.150**		**8.296.987.335**		**8.296.987.335**		**8.296.987.335**		**8.296.987.335**		**8.296.987.335**		**51.251.501.825**	
1.06.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	3.915.944.500	100%	4.215.944.500	100%	4.118.729.610	100%	4.118.729.610	100%	4.118.729.610	100%	4.118.729.610	100%	4.118.729.610	100%	24.809.592.550	DINAS SOSIAL & PPA
1.06.02	Program pemberdayaan sosial	Tingkat partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75%	300.000.000	80%	320.209.400	85%	232.603.737	90%	232.603.737	95%	232.603.737	100%	232.603.737	100%	232.603.737	100%	1.483.228.085	DINAS SOSIAL & PPA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.06.04	Program rehabilitasi sosial	Persentase terlayaninya dan terbedayakannya PMKS di Kabupaten Tanah Datar	90%	1.166.140.171	92%	2.109.977.825	95%	1.847.140.037	97%	1.847.140.037	100%	1.847.140.037	100%	1.847.140.037	100%	1.847.140.037	100%	11.345.678.010	DINAS SOSIAL & PPA
1.06.05	Program perlindungan dan jaminan sosial	Persentase pelayanan dan jaminan sosial bagi PMKS	80%	37.390.171	82%	1.737.298.600	85%	1.686.520.487	90%	1.686.520.487	95%	1.686.520.487	100%	1.686.520.487	100%	1.686.520.487	100%	10.169.901.035	DINAS SOSIAL & PPA
1.06.06	Program penanganan bencana	Persentase penangganan bencana yang ditangani	100%	783.180.000	100%	1.283.180.000	100%	315.277.345	100%	315.277.345	100%	315.277.345	100%	315.277.345	100%	315.277.345	100%	2.859.566.725	DINAS SOSIAL & PPA
1.06.07	Program pengelolaan taman makam pahlawan	TMP yang dipelihara secara periodik	2 Tmp	69.954.825	2 Tmp	99.954.825	2 Tmp	96.716.119	2 Tmp	96.716.119	2 Tmp	96.716.119	2 Tmp	96.716.119	2 Tmp	96.716.119	2 Tmp	583.535.420	DINAS SOSIAL & PPA
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**					**66.836.257.470**		**95.504.229.131**		**115.223.734.528**		**115.147.012.252**		**127.211.359.502**		**149.638.414.816**		**669.561.007.700**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			-		**640.087.125**		**4.145.115.150**		**4.412.000.000**		**4.512.000.000**		**4.607.000.000**		**4.323.689.000**		**22.639.891.275**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.07.02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Cakupan Ketersediaan Database dan Rencana Pengelolaan Tenaga Kerja Daerah	100%		100%	74.999.925	100%	200.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	225.000.000	100%	1.174.999.925	PMPTSP & NAKER
2.07.03	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peningkatan Persentase (%) Pencari kerja yang Kompeten	4,05%		4,05%	458.689.500	4,05%	3.515.000.000	4,05%	3.600.000.000	4,05%	3.650.000.000	4,05%	3.750.000.000	4,05%	3.466.689.000	4,05%	18.440.378.500	PMPTSP & NAKER
2.07.04	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase penurunan angka pengangguran	4,21%		4,21%	74.397.800	4,21%	310.115.150	4,21%	437.000.000	4,21%	437.000.000	4,21%	437.000.000	4,21%	437.000.000	4,21%	2.132.512.950	PMPTSP & NAKER
2.07.05	Program Hubungan Industrial	Cakupan pembinaan dan pengawasan hubungan industrial perusahaan dan pekerja	100%		100%	31.999.900	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	195.000.000	100%	195.000.000	100%	891.999.900	PMPTSP & NAKER
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**			**1.279.599.550**		**1.373.599.550**		**940.231.009**		**940.231.009**		**940.231.009**		**940.231.009**		**940.231.009**		**6.074.754.595**	
1.08.02	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	Wawasan perempuan bidang ekonomi	5%	426.831.650	5%	446.831.650	7%	325.581.696	10%	325.581.696	12%	325.581.696	15%	325.581.696	20%	325.581.696	20%	2.074.740.130	DINAS SOSIAL & PPA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Wawasan perempuan bidang politik	14 Kec		14 Kec		14 Kec		14 Kec		14 Kec		14 Kec		14 Kec		14 Kec		DINAS SOSIAL & PPA
		Wawasan perempuan bidang hukum	14 Kec		14 Kec		14 Kec		14 Kec		14 Kec		14 Kec		14 Kec		14 Kec		DINAS SOSIAL & PPA
1.08.02	Program perlindungan perempuan	Meningkatnya wawasan dan kesadaran terkait kekerasan terhadap perempuan	5 Nagari	392.653.550	8 Nagari	442.653.550	10 Nagari	127.490.537	12 Nagari	127.490.537	15 Nagari	127.490.537	15 Nagari	127.490.537	10 Nagari	127.490.537	10 Nagari	1.080.106.235	DINAS SOSIAL & PPA
1.08.05	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	Jumlah profil gender dan profil anak	2 Dok	37.344.900	2 Dok	39.344.900	2 Dok	24.387.425	2 Dok	24.387.425	2 Dok	24.387.425	2 Dok	24.387.425	2 Dok	24.387.425	2 Dok	161.282.025	DINAS SOSIAL & PPA
1.08.06	Program pemenuhan hak anak (PHA)	Tingkat pemenuhan hak anak	5 Kec	32.769.450	1 Kec	34.769.450	1 Kec	21.014.776	1 Kec	21.014.776	2 Kec	21.014.776	2 Kec	21.014.776	2 Kec	21.014.776	2 Kec	139.843.330	DINAS SOSIAL & PPA
1.08.07	Program perlindungan khusus anak	Prevalensi kekerasan terhadap anak	0.25%	390.000.000	0.22%	410.000.000	0.20%	441.756.575	0.18%	441.756.575	0.15%	441.756.575	0.13%	441.756.575	0.10%	441.756.575	0.10%	2.618.782.875	DINAS SOSIAL & PPA
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**			**-**		**4.603.312.535**		**6.938.804.200**		**7.240.000.000**		**7.350.000.000**		**7.460.000.000**		**7.520.000.000**		**41.112.116.735**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%		100%	4.120.862.935	100%	4.115.304.200	100%	4.250.000.000	100%	4.250.000.000	100%	4.250.000.000	100%	4.250.000.000	100%	25.236.167.135	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.02	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	100%			-	100%	2.201.000.000	100%	2.210.000.000	100%	2.210.000.000	100%	2.210.000.000	100%	2.210.000.000	100%	11.041.000.000	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	100%		100%	359.949.875	100%	500.000.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	3.509.949.875	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	100%		100%	99.999.800	100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	300.000.000	100%	1.099.999.800	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Masyarakat	100%		100%	22.499.925	0%	22.500.000	100%	30.000.000	100%	40.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	224.999.925	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			**37.796.241.044**		**60.219.258.260**		**83.480.078.772**		**102.631.503.519**		**102.344.781.243**		**114.204.128.493**		**136.854.494.807**		**599.734.245.095**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**			**349.828.400**		**619.999.575**		**833.817.644**		**1.825.000.000**		**2.455.000.000**		**2.810.000.000**		**6.860.000.000**		**15.403.817.219**	
2.10.02	Program Pengelolaan Izin Lokasi	Tersedianya izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					100%	100.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	750.000.000	DINAS PUPRP
2.10.04	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen /Laporan Hasil Inventarisasi, penyelesaian dan mediasi konflik pertanahan	1 Dokumen	45.852.900	100%	49.999.575	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000	100%	175.000.000	100%	749.999.575	DINAS PUPRP
2.10.05	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Jumlah Fasilitasi Pengadaan Tanah Pada OPD, Jumlah penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah						-	100%	150.000.000	100%	185.000.000	100%	200.000.000	100%	3.935.000.000	100%	4.470.000.000	DINAS PUPRP
2.10.06	Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	Jumlah Fasilitasi penetapan redistribusi tanah, penetapan ganti kerugian tanah kelebihan masimum dan absentee serta koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah					100%	114.517.644	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	714.517.644	DINAS PUPRP
2.10.07	Program Penetapan Tanah Ulayat	Jumlah fasilitasi penetapan tanah ulayat							100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	150.000.000	100%	600.000.000	DINAS PUPRP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.10.08	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong							100%	225.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	325.000.000	100%	1.075.000.000	DINAS PUPRP
2.10.09	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Jumlah dan fasilitasi peneribitan izin membuka tanah, jumlah fasilitasi koordinasi dan singkronisasi izin membuka tanah Sertifikat Tanah Aset Pemda Yang Diterbitkan	350 persil	303.975.500	100%	570.000.000	100%	569.300.000	100%	700.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.750.000.000	100%	6.339.300.000	DINAS PUPRP
2.10.10	Program Penatagunaan Tanah	Persentase penyusunan sistem informasi pertanahan yang handal							100%	150.000.000	100%	170.000.000	100%	185.000.000	100%	200.000.000	100%	705.000.000	DINAS PUPRP
2,11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**			**4.223.514.145**		**4.876.611.155**		**5.772.921.540**		**10.112.228.800**		**10.674.276.800**		**12.946.629.600**		**17.705.217.680**		**62.087.885.575**	
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota			1 Dokumen	122.084.650	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000							3 Dokumen	222.084.650	DINAS PERKIM LH
		Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat Kabupaten/Kota			1 Dokumen	150.000.000							2 Dokumen	300.000.000			3 Dokumen	450.000.000	DINAS PERKIM LH
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau	Hasil Uji Kualitas Air	52,00%	.000	55,79%	.000	55,89%	.000	55,99%	.000	56,09%	.000	56,19%	.000	56,29%	.000	56,29%	.000	DINAS PERKIM LH
		Hasil Uji Kualitas Udara	89,84%	.000	85,57%	.000	85,67%	.000	85,77%	.000	85,87%	.000	85,97%	.000	86,07%	.000	86,07%	.000	DINAS PERKIM LH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	Kerusakan Lingkungan Hidup	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	53,23%	25.860	54,69%	40.000	56,15%	50.000	57,61%	60.000	59,07%	70.000	60,53%	80.000	61,99%	90.000	61,99%	390.000	DINAS PERKIM LH
		Jumlah Kelompok Proklim yang di bina	4	25.472.845	2	24.999.925	4	100.000.000	7	175.000.000	7	175.000.000	7	175.000.000	7	175.000.000	34	824.999.925	DINAS PERKIM LH
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lahan kritis				-	3	75.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	30.000.000	3	195.000.000	DINAS PERKIM LH
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang di Tata.	90,00%	667.752.500	80%	662.399.895	81%	771.506.230	82%	750.000.000	83%	800.000.000	84%	850.000.000	85%	900.000.000	85%	4.733.906.125	DINAS PERKIM LH
		Jumlah kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)							1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	25.000.000	4 Dokumen	100.000.000	DINAS PERKIM LH
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah usaha atau kegiatan yang dibina dan diverifikasi lapangan dalam pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara libah B3		-		-	8	75.000.000	9	50.000.000	10	50.000.000	11	50.000.000	11	50.000.000	11	275.000.000	DINAS PERKIM LH
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase usaha / kegiatan yang taat tehadap izin lingkungan / persetujuan lingkungan	46,67%	47.224.000	50,00%	114.999.725	50,00%	200.000.000	50,00%	120.000.000	50,00%	120.000.000	50,00%	120.000.000	50,00%	120.000.000	50,00%	794.999.725	DINAS PERKIM LH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan Pplh	Terfasilitasi pendampingan pengakuan MHA					1 Kelompok	50.000.000	1 Kelompok	50.000.000	1 Kelompok	50.000.000	1 Kelompok	50.000.000	1 Kelompok	50.000.000	5 Kelompok	250.000.000	DINAS PERKIM LH
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat							1 Kali	25.000.000	2 Kali	50.000.000	2 Kali	50.000.000	2 Kali	50.000.000	7 Kali	175.000.000	DINAS PERKIM LH
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup	Ada	130.748.800	Ada	180.748.800	Ada	230.748.800	Ada	280.748.800	Ada	330.748.800	Ada	380.748.800	Ada	430.748.800	Ada	1.834.492.800	DINAS PERKIM LH
2.11.10	Program Penanganan Penyadaran Lingkungan Hidup	Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti		-		-	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	30.000.000	100%	150.000.000	DINAS PERKIM LH
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani	51,98%	3.246.921.000	53,00%	3.423.490.785	54,00%	3.460.666.510	55,00%	4.770.480.000	56,00%	5.247.528.000	57,00%	6.772.280.800	58,00%	11.349.508.880	58,00%	35.023.954.975	DINAS PERKIM LH
		Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	16,55%	7.230.000	17,00%	19.999.975	18,00%	100.000.000	19,00%	50.000.000	20,00%	50.000.000	21,00%	50.000.000	22,00%	50.000.000	22,00%	319.999.975	DINAS PERKIM LH
		Operasional TPA	74,00%	69.935.000	74,02%	100.000.000	74,04%	480.000.000	74,06%	250.000.000	74,09%	250.000.000	74,12%	250.000.000	74,14%	250.000.000	74,14%	1.580.000.000	DINAS PERKIM LH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		%Cakupan area pelayanan	28,00%	2.370.000	33,00%	24.800.000	38,00%	50.000.000	44,00%	3.376.000.000	49,00%	3.376.000.000	54,00%	3.713.600.000	60,00%	4.084.960.000	60,00%	14.625.360.000	DINAS PERKIM LH
		Pengembangan regulasi pengelolaan sampah			1	13.087.400	1	50.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	6	143.087.400	DINAS PERKIM LH
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**			**5.049.465.730**		**5.792.465.730**		**6.020.000.000**		**6.020.000.000**		**6.020.000.000**		**6.020.000.000**		**6.020.000.000**		**35.892.465.730**	
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi perkantoran yang ditata		4.662.509.130	100%	5.262.509.130	100%	5.330.000.000	100%	5.330.000.000	100%	5.330.000.000	100%	5.330.000.000	100%	5.330.000.000	100%	31.912.509.130	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk		194.971.000	100%	224.971.000	100%	415.000.000	100%	415.000.000	100%	415.000.000	100%	415.000.000	100%	415.000.000	100%	2.299.971.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil		89.998.000	100%	169.998.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	165.000.000	100%	994.998.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.12.04	Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Cakupan kualitas dan kuantitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan		74.999.600	100%	89.999.600	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	65.000.000	100%	414.999.600	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan		26.988.000	100%	44.988.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	269.988.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**			**8.704.132.755**		**10.034.132.755**		**8.445.361.230**		**8.550.361.230**		**8.590.361.230**		**8.630.361.230**		**8.655.361.230**		**52.905.938.905**	
2.13.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi perkantoran yang ditata	100%	5.985.343.630	100%	6.285.343.630	100%	3.830.772.307	100%	3.830.772.307	100%	3.830.772.307	100%	3.830.772.307	100%	3.830.772.307	100%	25.439.205.165	DINAS PMDPKB
2.13.02	Program Penataan Desa	Persentase peningkatan penataan desa					100%	65.000.000	100%	170.000.000,00	100%	210.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	970.000.000	DINAS PMDPKB
2.13.03	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah nagari yang melakukan kerjasama	100%	48.500.000	100%	78.500.000	100%	58.875.000	100%	58.875.000	100%	58.875.000	100%	58.875.000	100%	58.875.000	100%	372.875.000	DINAS PMDPKB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.13.04	Program Administrasi Pemerintah Desa	Persentase pelayanan administrasi pemerintahan desa	100%	2.670.289.125	100%	3.670.289.125	100%	3.543.422.494	100%	3.543.422.494	100%	3.543.422.494	100%	3.543.422.494	100%	3.543.422.494	100%	21.387.401.595	DINAS PMDPKB
2.13.013	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pelayanan kelembagaan masyarakat desa					100%	947.291.429	100%	947.291.429	100%	947.291.429	100%	947.291.429	100%	947.291.429	100%	4.736.457.145	DINAS PMDPKB
2,14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**			**3.535.396.300**		**5.405.396.300**		**5.338.891.868**		**5.338.891.868**		**5.338.891.868**		**5.338.891.868**		**5.338.891.868**		**32.099.855.640**	
2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Persentase peningkatan pemberdayaan dan pelayanan kelembagaan masyarakat desa	100%	79.999.950	100%	109.999.950	100%	34.649.962	100%	34.649.962	100%	34.649.962	100%	34.649.962	100%	34.649.962	100%	283.249.760	DINAS PMDPKB
2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Pasangan usia subur tidak ingin anak lagi (unmeet ned) tidak terlayani KB	100%	2.573.196.675	100%	4.373.196.675	100%	5.154.896.550	100%	5.154.896.550	100%	5.154.896.550	100%	5.154.896.550	100%	5.154.896.550	100%	30.147.679.425	DINAS PMDPKB
2.14.04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase keaktifan poktan	100%	882.199.675	100%	922.199.675	100%	149.345.356	100%	149.345.356	100%	149.345.356	100%	149.345.356	100%	149.345.356	100%	1.668.926.455	DINAS PMDPKB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2,15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**			**8.989.777.624**		**6.610.389.750**		**19.163.008.520**		**22.432.818.685**		**24.676.100.554**		**27.900.000.000**		**32.740.000.000**		**133.522.317.509**	
2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100,00%	2.840.316.062	100,00%	4.915.055.175	100,00%	16.202.673.795	100,00%	19.398.375.185	100,00%	21.338.212.704	100,00%	23.400.000.000	100,00%	25.740.000.000	100,00%	110.994.316.859	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perhubungan	39,70	6.149.461.562	39,70%	1.695.334.575	40%	2.960.334.725	41%	3.034.443.500	42%	3.337.887.850	43%	4.500.000.000	1 tahun	7.000.000.000		22.528.000.650	DINAS PERHUBUNGAN
2,16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**			**2.788.241.450**		**7.204.080.400**		**8.059.115.900**		**8.967.552.103**		**9.864.307.314**		**12.350.738.045**		**16.935.811.849**		**63.381.605.611**	
2.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100,00%	574.289.600	100,00%	3.760.334.550	100,00%	3.981.515.900	100,00%	4.479.642.103	100,00%	4.927.606.314	100,00%	5.420.366.945	100,00%	5.962.403.639	100,00%	28.531.869.451	DINAS KOMINFO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.16.02	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	100,00%	506.583.600	100,00%	1.853.745.850	100,00%	2.070.800.000	100,00%	2.223.430.000	100,00%	2.445.773.000	100,00%	3.690.350.300	100,00%	5.959.385.330	100,00%	18.243.484.480	DINAS KOMINFO
2.16.03	Program Aplikasi Informatika	Terlaksananya Aplikasi Informatika	100,00%	1.707.368.250	100,00%	1.590.000.000	100,00%	2.006.800.000	100,00%	2.264.480.000	100,00%	2.490.928.000	100,00%	3.240.020.800	100,00%	5.014.022.880	100,00%	16.606.251.680	DINAS KOMINFO
2,17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**			-		**5.516.728.700**		**11.599.552.925**		**10.995.000.000**		**10.870.000.000**		**11.120.000.000**		**11.320.000.000**		**61.421.281.625**	
2.17.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%		100%	4.213.025.054	100%	5.093.448.925	100%	5.450.000.000	100%	5.150.000.000	100%	5.200.000.000	100%	5.250.000.000	100%	30.356.473.979	DINAS KOPERINDAG
2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Koperasi yang difasilitasi untuk penerbitan izin	6					-	20	75.000.000	20	100.000.000	20	150.000.000	80	200.000.000	80	525.000.000	DINAS KOPERINDAG
2.17.03	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan pengawasan terhadap KSP/USP Koperasi				-	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	20	100.000.000	85	100.000.000	85	500.000.000	DINAS KOPERINDAG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Koperasi Simpan Pinjam yang dinilai tingkat kesehatannya	10			-		-	60	100.000.000	70	125.000.000	80	150.000.000	80	175.000.000	80	550.000.000	DINAS KOPERINDAG
2.17.05	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian																		DINAS KOPERINDAG
		Konversi kelembagaan Koperasi ke Pola Syari'ah	15		15	50.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	15	100.000.000	75	100.000.000	75	550.000.000	DINAS KOPERINDAG
		Peningkatan SDM Pengelola Koperasi	22		15	50.000.000	15	202.000.000	15	250.000.000	15	300.000.000	15	350.000.000	75	400.000.000	75	1.552.000.000	DINAS KOPERINDAG
2.17.06	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Perkoperasian	Penerapan Koperasi Modern dan berbasis digital	7		3	175.300.000	5	178.800.000	5	250.000.000	5	275.000.000	5	300.000.000	5	325.000.000	5	1.504.100.000	DINAS KOPERINDAG
2.17.07	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah Wirausaha Baru yang dibina	120		300	305.304.000	1000	4.660.304.000	1000	4.250.000.000	1000	4.250.000.000	1000	4.250.000.000	1000	4.250.000.000	5300	21.965.608.000	DINAS KOPERINDAG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.17.08	Program Pengembangan UMKM	Usaha Mikro yang difasilitasi kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah	0		30	723.099.646	30	1.265.000.000	30	420.000.000	30	470.000.000	30	520.000.000	30	520.000.000	180	3.918.099.646	DINAS KOPERINDAG
2,18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**			-		**5.479.854.325**		**7.106.786.500**		**8.100.000.000**		**8.250.000.000**		**8.575.000.000**		**8.825.000.000**		**46.336.640.825**	
2.18.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%		100%	4.456.385.500	100%	5.378.486.500	100%	5.900.000.000	100%	5.800.000.000	100%	5.850.000.000	100%	5.900.000.000	100%	33.284.872.000	PMPTSP & NAKER
2.18.02	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan Iklim Penanaman Modal yang kondusif	100%		100%	259.999.600	100%	286.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	500.000.000	100%	2.245.999.600	PMPTSP & NAKER
2.18.03	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan upaya peningkatan realisasi investasi di daerah	100%		100%	150.000.000	100%	165.000.000	100%	300.000.000	100%	350.000.000	100%	400.000.000	100%	450.000.000	100%	1.815.000.000	PMPTSP & NAKER
2.18.04	Program Pelayanan Penanaman Modal	Cakupan penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	100%		100%	218.097.675	100%	439.000.000	100%	600.000.000	100%	650.000.000	100%	700.000.000	100%	750.000.000	100%	3.357.097.675	PMPTSP & NAKER

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.18.05	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan	100%		100%	366.121.775	100%	413.300.000	100%	500.000.000	100%	575.000.000	100%	675.000.000	100%	700.000.000	100%	3.229.421.775	PMPTSP & NAKER
2.18.06	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase cakupan data dan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan yang disusun	100%		100%	29.249.775	100%	425.000.000	100%	450.000.000	100%	475.000.000	100%	500.000.000	100%	525.000.000	100%	2.404.249.775	PMPTSP & NAKER
2,19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**			-		**3.338.199.700**		**5.015.408.000**		**10.419.790.000**		**4.088.988.789**		**4.311.261.048**		**4.736.755.860**		**31.910.403.397**	
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan Daya Saing Kepemudaan			100%	809.999.825	100%	1.705.000.000	100%	1.769.790.000	100%	1.838.988.789	100%	1.911.261.048	100%	1.986.755.860	100%	10.021.795.522	Dinas Parpora
2.19.03	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Peningkatan Daya Saing Keolahragaan			100%	2.028.199.875	100%	2.810.408.000	100%	8.000.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.500.000.000	100%	1.750.000.000	100%	17.588.607.875	Dinas Parpora
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Peningkatan Kapasitas Kepramukaan			100%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	650.000.000	100%	750.000.000	100%	900.000.000	100%	1.000.000.000	100%	4.300.000.000	Dinas Parpora

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**			**39.555.000**		**59.999.800**		**102.000.000**		**435.000.000**		**535.000.000**		**635.000.000**		**735.000.000**		**2.501.999.800**	
2.20.02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terselenggaranya Statistik Sektoral	100,00%	39.555.000	100,00%	59.999.800	100,00%	102.000.000	100,00%	435.000.000	100,00%	535.000.000	100,00%	635.000.000	100,00%	735.000.000	100,00%	2.501.999.800	DINAS KOMINFO
2,21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**			**25.622.425**		**64.999.900**		**65.000.000**		**120.000.000**		**170.000.000**		**220.000.000**		**270.000.000**		**909.999.900**	
2.21.02	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Terselenggaranya Persandian Untuk Pengamanan Informasi	100,00%	25.622.425	100,00%	64.999.900	100,00%	65.000.000	100,00%	120.000.000	100,00%	170.000.000	100,00%	220.000.000	100,00%	270.000.000	100,00%	909.999.900	DINAS KOMINFO
2,22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**			**1.015.341.340**		**1.071.036.545**		**2.127.214.645**		**1.977.214.645**		**1.577.214.645**		**1.677.214.645**		**1.777.214.645**		**10.207.109.770**	
2.22.02	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah OPK yang dikelola	0	0	0	0	2	1.100.000.000	2	950.000.000	2	550.000.000	2	650.000.000	2	750.000.000	6	4.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.22.03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jumlah sanggar seni yang aktif		157.177.000	28	299.999.595	19	256.177.695	19	256.177.695	19	256.177.695	19	256.177.695	19	256.177.695	123	1.580.888.070	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04	Program Pembinaan Sejarah	Jumlah sejarah lokal yang digali		113.087.240	5	49.999.950	5	49.999.950	5	49.999.950	5	49.999.950	5	49.999.950	5	49.999.950	35	299.999.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dipublikasikan		-	20	101.037.000	20	101.037.000	20	101.037.000	20	101.037.000	20	101.037.000	20	101.037.000	120	606.222.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.06	Program Pengelolaan Permuseuman	Jumlah museum yang dikelola		745.077.100	5	620.000.000	5	620.000.000	5	620.000.000	5	620.000.000	5	620.000.000	5	620.000.000	30	3.720.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2,23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**			**89.399.525**		**209.399.525**		**710.000.000**		**760.000.000**		**770.000.000**		**780.000.000**		**890.000.000**		**4.119.399.525**	
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase jumlah kunjungan perpustakaan		89.399.525	25%	209.399.525	40%	710.000.000	55%	710.000.000	65%	710.000.000	80%	710.000.000	100%	710.000.000	100%	3.759.399.525	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.23.03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase koleksi naskah kuno							25%	50.000.000	60%	60.000.000	80%	70.000.000	100%	180.000.000	100%	360.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2,24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**			**2.985.966.350**		**3.935.964.100**		**3.121.000.000**		**6.577.646.188**		**8.464.640.044**		**10.889.032.057**		**14.045.241.675**		**47.033.524.064**	
2.24.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata		2.845.966.700	100%	3.745.966.700	100%	2.766.000.000	100%	6.126.646.188	100%	7.964.640.044	100%	10.354.032.057	100%	13.460.241.675	100%	44.417.526.664	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.24.02	Program Pengelolaan Kearsipan	Persentase instansi pemerinyah (OPD/Nagari) dan swasta diKabupaten Tanah Datar yang menerapkan penyelenggaraan arsip secara baku		139.999.650	100%	159.999.650	80%	175.000.000	85%	211.000.000	90%	250.000.000	95%	275.000.000	100%	320.000.000	100%	1.390.999.650	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Pengelolaan arsip secara baku			100%	29.997.750	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	929.997.750	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN
2.24.04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik				0		0	75%	60.000.000	85%	70.000.000	90%	80.000.000	100%	85.000.000	100%	295.000.000	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**			'		**57.509.193.440**		**74.264.175.076**		**75.992.000.000**		**77.704.000.000**		**78.982.200.000**		**80.870.048.000**		**445.321.616.516**	
3,25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**1.190.299.265**		**1.447.000.000**		**1.510.000.000**		**1.700.000.000**		**1.825.000.000**		**1.950.000.000**		**9.622.299.265**	
3.25.03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya) (ton)	12.209,29		12.153,31	169.199.825	12.560,51	170.000.000	12.687,27	200.000.000	12.807,20	250.000.000	12.933,69	300.000.000	13.052,11	350.000.000	13.052,11	1.439.199.825	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pengelolaan Perikanan Budidaya	100%		100%	946.099.690	100%	1.077.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000	100%	1.300.000.000	100%	6.873.099.690	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3.25.06	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Meningkatnya Pengolahan dan Produktivitas serta Pemasaran Perikanan	100%		100%	74.999.750	100%	200.000.000	100%	210.000.000	100%	250.000.000	100%	275.000.000	100%	300.000.000	100%	1.309.999.750	DINAS PANGAN DAN PERIKANAN
3,26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**					**25.062.313.900**		**29.192.046.200**		**29.850.000.000**		**30.680.000.000**		**31.121.200.000**		**31.974.048.000**		**177.879.608.100**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.26.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan administrasi kantor yang ditata			100%	5.586.956.900	100%	6.573.094.200	100%	7.000.000.000	100%	7.280.000.000	100%	7.571.200.000	100%	7.874.048.000	100%	41.885.299.100	Dinas Parpora
3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkat nya Daya Tarik Objek wisata unggualn			100%	18.150.357.000	100%	19.038.099.000	100%	19.500.000.000	100%	19.500.000.000	100%	19.500.000.000	100%	19.500.000.000	100%	115.188.456.000	Dinas Parpora
3.26.03	Program Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ke Kab.Tanah Datar			100%	950.000.000	100%	2.900.853.000	100%	2.500.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.500.000.000	100%	15.850.853.000	Dinas Parpora
3.26.04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Peningkatan Kapasitas Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				-	100%	50.000.000	100%	150.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	250.000.000	100%	850.000.000	Dinas Parpora
3.26.05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			100%	375.000.000	100%	630.000.000	100%	700.000.000	100%	700.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	4.105.000.000	Dinas Parpora
3,27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**			**-**		**26.044.961.950**		**37.211.094.876**		**37.380.000.000**		**37.620.000.000**		**37.880.000.000**		**38.190.000.000**		**214.326.056.826**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.27.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%		100%	12.804.324.465	100%	15.385.641.876	100%	15.400.000.000	100%	15.450.000.000	100%	15.500.000.000	100%	15.600.000.000	100%	90.139.966.341	DINAS PERTANIAN
3.27.02	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	100%		100%	4.365.299.250	100%	12.153.616.000	100%	12.200.000.000	100%	12.250.000.000	100%	12.300.000.000	100%	12.350.000.000	100%	65.618.915.250	DINAS PERTANIAN
3.27.03	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Peningkatan Fungsi Prasarana Pertanian	100%		100%	5.357.687.750	100%	5.734.100.000	100%	5.800.000.000	100%	5.850.000.000	100%	5.900.000.000	100%	5.950.000.000	100%	34.591.787.750	DINAS PERTANIAN
3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kasus Penyakit Menular Ternak	100%		100%	582.099.315	100%	1.095.000.000	100%	1.100.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000	100%	6.377.099.315	DINAS PERTANIAN
3.27.05	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Pengendalian Penanggulangan Bencana Pertanian	-		100%	1.274.999.700	100%	1.116.384.000	100%	1.120.000.000	100%	1.150.000.000	100%	1.200.000.000	100%	1.250.000.000	-	7.111.383.700	DINAS PERTANIAN
3.27.06	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perizinan Usaha Pertanian	100%		100%	49.999.850	100%	50.000.000	100%	60.000.000	100%	70.000.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	399.999.850	DINAS PERTANIAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya SDM para penyuluh pertanian dan para petani	-		100%	1.610.551.620	100%	1.676.353.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	100%	1.700.000.000	-	10.086.904.620	DINAS PERTANIAN
3,29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**			-		**22.999.950**		**25.300.000**		**100.000.000**		**125.000.000**		**150.000.000**		**175.000.000**		**598.299.950**	
3.29.05	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Cakupan pengelolaan dan pengembangan energi baru terbarukan	1		100%	22.999.950	100%	25.300.000	100%	100.000.000	100%	125.000.000	100%	150.000.000	100%	175.000.000		598.299.950	PMPTSP & NAKER
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**			-		**1.505.295.575**		**1.854.793.000**		**2.577.000.000**		**2.879.000.000**		**3.181.000.000**		**3.431.000.000**		**15.428.088.575**	
3.30.02	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Peningkatan Jumlah Pedagang Informal menjadi Formal	120		0	-	10	70.000.000	20	72.000.000	30	74.000.000	40	76.000.000	40	76.000.000	140	368.000.000	DINAS KOPERINDAG
3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Cakupan Pasar Layak			1	1.125.995.875	1	919.834.000	1	1.100.000.000	1	1.200.000.000	1	1.300.000.000	1	1.400.000.000	6	7.045.829.875	DINAS KOPERINDAG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.30.04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Pemantauan Fluktuasi harga kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya	-			-		204.959.000	156 Kali	300.000.000	156 Kali	350.000.000	156 Kali	400.000.000	156 Kali	450.000.000	156 Kali	1.704.959.000	DINAS KOPERINDAG
		Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka							2 Pasar		2 Pasar		2 Pasar		2 Pasar		2 Pasar	-	DINAS KOPERINDAG
3.30.05	Program Pengembangan Ekspor	Fasilitasi Ekspor Produk Unggulan Daerah			1 keg sosialisasi	25.000.000	1 keg sosialisasi	60.000.000	1 keg sosialisasi	55.000.000	1 keg sosialisasi	55.000.000	1 keg sosialisasi	55.000.000	1 keg sosialisasi	55.000.000	6 keg sosialisasi	305.000.000	DINAS KOPERINDAG
3.30.06	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen			-		-		-		-		-		-		-		-	DINAS KOPERINDAG
		Fasilitasi pelaksanaan standarisasi dan perlindungan konsumen pada unit metrologi					1 gedung metrologi, peralatan standar, kendaraan operasional	0	1 kegiatan	300.000.000	1 kegiatan	350.000.000	1 kegiatan	400.000.000	1 kegiatan	450.000.000	6 kegiatan	1.500.000.000	DINAS KOPERINDAG
		Peningkatan jumlah akurasi alat ukur UTTP Melalui tera dan tera ulang	250		250	74.999.775	750	100.000.000	800	125.000.000	900	150.000.000	1100	175.000.000	4050	200.000.000	4050	824.999.775	DINAS KOPERINDAG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.30.07	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri																		DINAS KOPERINDAG
		Fasilitasi Promosi Produk Unggulan Daerah melalui pameran dan pasar lelang	0		9	279.299.925	5 kali pameran dalam dan luar daerah ,6 kali pasar lelang	500.000.000	5 kali pameran dalam dan luar daerah ,6 kali pasar lelang	550.000.000	5 kali pameran dalam dan luar daerah ,6 kali pasar lelang	600.000.000	5 kali pameran dalam dan luar daerah ,6 kali pasar lelang	650.000.000	5 kali pameran dalam dan luar daerah ,6 kali pasar lelang	700.000.000	5 kali pameran dalam dan luar daerah ,6 kali pasar lelang	3.279.299.925	DINAS KOPERINDAG
		Fasilitasi Pemasaran Produk dan komoditi UMKM berbasis digital	0		0	-	1 website	-	1 website	75.000.000	1 website	100.000.000	1 website	125.000.000	1 website	100.000.000	1 website	400.000.000	DINAS KOPERINDAG
3,31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**			-		**3.683.322.800**		**4.533.941.000**		**4.575.000.000**		**4.700.000.000**		**4.825.000.000**		**5.150.000.000**		**27.467.263.800**	
3.31.02	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri					3.633.323.150		4.433.941.000		4.250.000.000		4.300.000.000		4.350.000.000		4.400.000.000		25.367.264.150	DINAS KOPERINDAG
		Pengembangan IKM Sentra Tenun	110		15		15		15		15		15		15		260		DINAS KOPERINDAG
		Pengembangan IKM pada Sentra IKM Potensial	1		1		2		3		3		3		3		15		DINAS KOPERINDAG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Peningkatan Produk IKM yang bersertifikat	21 Produk		2 halal; 2 hki; 10 kemasan	49.999.650	15 hki; 10 halal; 20 kemasan	100.000.000	15 hki; 10 halal; 20 kemasan	250.000.000	15 hki; 10 halal; 20 kemasan	300.000.000	15 hki; 10 halal; 20 kemasan	350.000.000	42 hki; 82 halal; 90 kemasan	600.000.000	42 hki; 82 halal; 90 kemasan	1.649.999.650	DINAS KOPERINDAG
3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah IKM yang terdaftar dalam SINAS	1	-	-	-		-	10 ikm	75.000.000	15 ikm	100.000.000	20 ikm	125.000.000	50 ikm	150.000.000	100 ikm	450.000.000	DINAS KOPERINDAG
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**			**116.172.109.631**		**107.086.814.357**		**94.250.948.504**		**94.250.948.504**		**94.250.948.504**		**94.250.948.504**		**94.250.948.504**		**578.341.556.878**	
	SETDA			**64.736.734.136**		**51.651.438.862**		**42.858.834.760**		**42.858.834.760**		**42.858.834.760**		**42.858.834.760**		**42.858.834.760**		**265.945.612.663**	
4.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	10.864.521.644	100%	31.915.941.475	100%	28.004.492.185	100%	28.004.492.185	100%	28.004.492.185	100%	28.004.492.185	100%	28.004.492.185	100%	171.938.402.400	SETDA
4.01.02	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Presentase terlaksananya kegiatan pelayanan kesejahteraan dan wawasan kebangsaan	100%	52.789.813.717	100%	18.453.098.612	100%	13.726.434.494	100%	13.726.434.494	100%	13.726.434.494	100%	13.726.434.494	100%	13.726.434.494	100%	87.085.271.082	SETDA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4.01.03	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Cakupan Data Evaluasi tentang Kebijakan Perekonomian Daerah, Administrasi Pembangunan dan prinsip pengadaan sesuai dengan peraturan yang berlaku	100%	1.082.398.775	100%	1.282.398.775	100%	1.127.908.081,25	100%	1.127.908.081,25	100%	1.127.908.081,25	100%	1.127.908.081,25	100%	1.127.908.081,25	100%	6.921.939.181	SETDA
	SEKRETARIAT DPRD					**55.435.375.495**		**51.392.113.744**		**51.392.113.744**		**51.392.113.744**		**51.392.113.744**		**51.392.113.744**		**312.395.944.215**	
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata		25.062.585.820	100%	27.062.585.820	100%	12.456.042.874	100%	12.456.042.874	100%	12.456.042.874	100%	12.456.042.874	100%	12.456.042.874	100%	89.342.800.190	SETWAN
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Ranperda yang dibahas sehingga menjadi Perda dan terlaksananya Koordinasi, Konsultasi dan pengawasan Pimpinan dan Anggota DPRD		26.372.789.675	100%	28.372.789.675	100%	38.936.070.870	100%	38.936.070.870	100%	38.936.070.870	100%	38.936.070.870	100%	38.936.070.870	100%	223.053.144.025	SETWAN
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**			**35.542.559.244**		**248.461.660.258**		**212.534.130.912**		**219.555.142.076**		**226.699.918.782**		**234.125.380.425**		**242.017.824.662**		**1.383.394.057.116**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5,01	**PERENCANAAN**			**5.127.724.679**		**5.567.724.679**		**5.597.460.574**		**5.919.460.574**		**5.919.460.574**		**5.854.460.574**		**5.854.460.574**		**34.713.027.549**	
5.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	3.397.924.904,00	100%	3.897.924.904,00	100%	4.204.460.574,00	100%	4.504.460.574,00	100%	4.504.460.574,00	100%	4.504.460.574,00	100%	4.504.460.574,00	100%	26.120.227.774	BAPERLITBANG
5.01.02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Program kinerja daerah tergadap perencanaan Pembangunan Daerah	100%	804.998.900,00	100%	844.998.900,00	100%	678.000.000,00	100%	700.000.000,00	100%	700.000.000,00	100%	700.000.000,00	100%	700.000.000,00	100%	4.322.998.900	BAPERLITBANG
5.01.03	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kosistensi antar dokumen perencanaan bidang PPM, bidang Perekonomian dan SDA dan bidang infrastruktur dan kewilayahan	100%	924.800.875,00	100%	824.800.875,00	100%	715.000.000,00	100%	715.000.000,00	100%	715.000.000,00	100%	650.000.000,00	100%	650.000.000,00	100%	4.269.800.875	BAPERLITBANG
5,02	**KEUANGAN**			**-**		**207.057.255.719**		**175.816.670.338**		**182.515.681.502**		**189.660.458.208**		**197.120.919.851**		**205.013.364.088**		**1.157.184.349.707**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata			100%	28.922.711.050	100%	8.988.845.670	100%	9.348.399.497	100%	9.722.335.477	100%	10.111.228.896	100%	10.616.790.341	100%	77.710.310.930	BKD
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	WTP		WTP	175.682.740.569	WTP	161.221.614.068	WTP	167.348.035.403	WTP	173.891.343.587	WTP	180.725.273.390	WTP	187.863.921.689	WTP	1.046.732.928.705	BKD
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tertib Administrasi Barang Milik Daerah			100%	1.195.447.800	100%	1.360.000.000	100%	1.411.680.000	100%	1.466.876.688	100%	1.524.524.942	100%	1.584.743.677	100%	8.543.273.107	BKD
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian penerimaan Pendapatan Daerah Kab.Tanah Datar			100%	1.256.356.300	100%	4.246.210.600	100%	4.407.566.603	100%	4.579.902.457	100%	4.759.892.624	100%	4.947.908.382	100%	24.197.836.965	BKD
5,03	**KEPEGAWAIAN**			**30.344.834.815**		**35.761.680.110**		**31.000.000.000**		**31.000.000.000**		**31.000.000.000**		**31.000.000.000**		**31.000.000.000**		**190.761.680.110**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	25.965.570.285	100%	31.965.570.285	100%	27.500.000.000	100%	27.500.000.000	100%	27.500.000.000	100%	27.500.000.000	100%	27.500.000.000	100%	169.465.570.285	BKPSDM
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan manajemen ASN	71,06	4.379.264.530	100%	3.796.109.825	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	100%	3.500.000.000	100%	21.296.109.825	BKPSDM
5,04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**			-		-		-		-		-		-		-		-	BKPSDM
5.04.02	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia																		
5,05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**			**69.999.750**		**74.999.750**		**120.000.000**		**120.000.000**		**120.000.000**		**150.000.000**		**150.000.000**		**734.999.750**	
5.05.02	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Kebijakan Inovasi yang diterapkan	1 Kebijakan Inovasi	69.999.750	1	74.999.750	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	6	734.999.750	BAPERLITBANG
6	**UNSUR PENGAWAS**			**10.707.430.068**		**11.907.430.068**		**7.097.133.050**		**7.097.133.050**		**7.097.133.050**		**7.097.133.050**		**7.097.133.050**		**47.393.095.318**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**			**10.707.430.068**		**11.907.430.068**		**7.097.133.050**		**7.097.133.050**		**7.097.133.050**		**7.097.133.050**		**7.097.133.050**		**47.393.095.318**	
6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata		9.067.570.843		10.067.570.843		5.140.476.700		5.140.476.700		5.140.476.700		5.140.476.700		5.140.476.700		35.769.954.343	INSPEKTORAT
6.01.02	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Jumlah pengawasan internal, pengawasan tertentu serta monitoring dan pembinaan yang dilaksanakan		1.216.391.175	310 obrik	1.316.391.175	320 obrik	1.736.187.900	330 obrik	1.736.187.900	340 obrik	1.736.187.900	300 obrik	1.736.187.900	360 obrik	1.736.187.900	360 obrik	9.997.330.675	INSPEKTORAT
6.01.03	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah pendampingan serta asistensi terkait kebijakan reformasi birokrasi, penegakan integritas yang dilaksanakan, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan peningkatan kapabilitas APIP menuju level 3		423.468.050	9 Kegiatan	523.468.050	9 Kegiatan	220.468.450	9 Kegiatan	220.468.450	9 Kegiatan	220.468.450	9 Kegiatan	220.468.450	9 Kegiatan	220.468.450	9 Kegiatan	1.625.810.300	INSPEKTORAT
7	**KEWILAYAHAN**			**26.205.458.876**		**26.782.791.566**		**26.073.069.000**		**25.624.919.000**		**32.124.919.000**		**24.878.194.000**		**24.878.194.000**		**160.362.086.566**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01	**KECAMATAN**			**26.205.458.876**		**26.782.791.566**		**26.073.069.000**		**25.624.919.000**		**32.124.919.000**		**24.878.194.000**		**24.878.194.000**		**160.362.086.566**	
	KECAMATAN X KOTO					**2.149.566.450**		**2.010.159.000**		**2.035.159.000**		**7.035.159.000**		**2.035.159.000**		**2.035.159.000**		**17.300.361.450**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	1.744.423.375	100%	1.944.423.375	100%	1.785.000.000	100%	1.785.000.000	100%	6.785.000.000	100%	1.785.000.000	100%	1.785.000.000	100%	15.869.423.375	KECAMATAN X KOTO
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	57.000.000	100%	35.569.075	100%	30.631.000	100%	35.631.000	100%	35.631.000	100%	35.631.000	100%	35.631.000	100%	208.724.075	KECAMATAN X KOTO
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	100%	20.000.000	100%	18.743.500	100%	16.840.000	100%	21.840.000	100%	21.840.000	100%	21.840.000	100%	21.840.000	100%	122.943.500	KECAMATAN X KOTO
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	100%	100.000.000	100%	37.884.600	100%	26.185.000	100%	31.185.000	100%	31.185.000	100%	31.185.000	100%	31.185.000	100%	188.809.600	KECAMATAN X KOTO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	145.000.000	100%	59.470.700	100%	100.617.000	100%	105.617.000	100%	105.617.000	100%	105.617.000	100%	105.617.000	100%	582.555.700	KECAMATAN X KOTO
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	100%	100.500.000	100%	53.475.200	100%	50.886.000	100%	55.886.000	100%	55.886.000	100%	55.886.000	100%	55.886.000	100%	327.905.200	KECAMATAN X KOTO
	KECAMATAN BATIPUH					**1.899.183.440**		**1.797.737.000**		**1.822.737.000**		**1.822.737.000**		**1.822.737.000**		**1.822.737.000**		**10.987.868.440**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	1.463.343.115	100%	1.663.343.115	100%	1.527.170.000	100%	1.527.170.000	100%	1.527.170.000	100%	1.527.170.000	100%	1.527.170.000	100%	9.299.193.115	KECAMATAN BATIPUH
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	26.000.000	100%	55.957.500	100%	49.100.000	100%	54.100.000	100%	54.100.000	100%	54.100.000	100%	54.100.000	100%	321.457.500	KECAMATAN BATIPUH
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	100%	15.000.000	100%	11.490.800	100%	9.100.000	100%	14.100.000	100%	14.100.000	100%	14.100.000	100%	14.100.000	100%	76.990.800	KECAMATAN BATIPUH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.04	Program koordinasi ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	100%	30.000.000	100%	20.381.900	100%	21.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	26.000.000	100%	145.381.900	KECAMATAN BATIPUH
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	106.000.000	100%	69.638.550	100%	107.000.000	100%	112.000.000	100%	112.000.000	100%	112.000.000	100%	112.000.000	100%	624.638.550	KECAMATAN BATIPUH
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	100%	103.000.000	100%	78.371.575	100%	84.367.000	100%	89.367.000	100%	89.367.000	100%	89.367.000	100%	89.367.000	100%	520.206.575	KECAMATAN BATIPUH
	KECAMATAN RAMBATAN			**1.642.770.475**		**1.908.146.900**		**1.804.341.000**		**1.829.341.000**		**1.829.341.000**		**1.829.341.000**		**1.829.341.000**		**11.029.851.900**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	1.496.549.075	100%	1.696.549.075	100%	1.558.618.000	100%	1.558.618.000	100%	1.558.618.000	100%	1.558.618.000	100%	1.558.618.000	100%	9.489.639.075	KECAMATAN RAMBATAN
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	43.860.000	100%	40.599.525	100%	34.000.000	100%	39.000.000	100%	39.000.000	100%	39.000.000	100%	39.000.000	100%	230.599.525	KECAMATAN RAMBATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	100%	12.425.400	100%	13.999.650	100%	12.500.000	100%	17.500.000	100%	17.500.000	100%	17.500.000	100%	17.500.000	100%	96.499.650	KECAMATAN RAMBATAN
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	100%	7.231.000	100%	19.999.850	100%	27.100.000	100%	32.100.000	100%	32.100.000	100%	32.100.000	100%	32.100.000	100%	175.499.850	KECAMATAN RAMBATAN
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	13.764.000	100%	87.999.425	100%	121.123.000	100%	126.123.000	100%	126.123.000	100%	126.123.000	100%	126.123.000	100%	713.614.425	KECAMATAN RAMBATAN
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	100%	68.941.000	100%	48.999.375	100%	51.000.000	100%	56.000.000	100%	56.000.000	100%	56.000.000	100%	56.000.000	100%	323.999.375	KECAMATAN RAMBATAN
	KECAMATAN LIMA KAUM			**1.950.974.075**		**1.995.068.600**		**1.887.855.000**		**1.912.855.000**		**1.912.855.000**		**1.912.855.000**		**1.912.855.000**		**11.534.343.600**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	1.528.401.775	100%	1.728.401.775	100%	1.592.500.000	100%	1.592.500.000	100%	1.592.500.000	100%	1.592.500.000	100%	1.592.500.000	100%	9.690.901.775	KECAMATAN LIMA KAUM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	76.355.000	100%	81.399.450	100%	71.555.000	100%	76.555.000	100%	76.555.000	100%	76.555.000	100%	76.555.000	100%	459.174.450	KECAMATAN LIMA KAUM
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	100%	20.900.000	100%	16.749.750	100%	12.700.000	100%	17.700.000	100%	17.700.000	100%	17.700.000	100%	17.700.000	100%	100.249.750	KECAMATAN LIMA KAUM
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	100%	28.609.250	100%	14.270.000	100%	21.300.000	100%	26.300.000	100%	26.300.000	100%	26.300.000	100%	26.300.000	100%	140.770.000	KECAMATAN LIMA KAUM
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	213.330.000	100%	104.808.475	100%	141.800.000	100%	146.800.000	100%	146.800.000	100%	146.800.000	100%	146.800.000	100%	833.808.475	KECAMATAN LIMA KAUM
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	100%	83.378.050	100%	49.439.150	100%	48.000.000	100%	53.000.000	100%	53.000.000	100%	53.000.000	100%	53.000.000	100%	309.439.150	KECAMATAN LIMA KAUM
	KECAMATAN TANJUNG EMAS			**2.996.903.125**		**1.696.277.650**		**2.400.771.000**		**1.627.621.000**		**1.627.621.000**		**1.627.621.000**		**1.627.621.000**		**10.607.532.650**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	1.256.183.525	100%	1.456.183.525	100%	1.335.121.000	100%	1.335.121.000	100%	1.335.121.000	100%	1.335.121.000	100%	1.335.121.000	100%	8.131.788.525	KECAMATAN TANJUNG EMAS
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	42.978.600	100%	37.999.700	100%	32.000.000	100%	37.000.000	100%	37.000.000	100%	37.000.000	100%	37.000.000	100%	217.999.700	KECAMATAN TANJUNG EMAS
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	100%	20.000.000	100%	17.999.950	100%	14.600.000	100%	19.600.000	100%	19.600.000	100%	19.600.000	100%	19.600.000	100%	110.999.950	KECAMATAN TANJUNG EMAS
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	100%	222.241.000	100%	24.999.850	100%	26.600.000	100%	31.600.000	100%	31.600.000	100%	31.600.000	100%	31.600.000	100%	177.999.850	KECAMATAN TANJUNG EMAS
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	1.355.000.000	100%	69.994.975	100%	912.150.000	100%	119.000.000	100%	119.000.000	100%	119.000.000	100%	119.000.000	100%	1.458.144.975	KECAMATAN TANJUNG EMAS
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	100%	100.500.000	100%	89.099.650	100%	80.300.000	100%	85.300.000	100%	85.300.000	100%	85.300.000	100%	85.300.000	100%	510.599.650	KECAMATAN TANJUNG EMAS

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	KECAMATAN LINTAU BUO			**1.939.561.500**		**2.077.281.400**		**1.903.123.000**		**1.928.123.000**		**1.928.123.000**		**1.928.123.000**		**1.928.123.000**		**11.692.896.400**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	1.564.640.500	100%	1.764.640.500	100%	1.617.423.000	100%	1.617.423.000	100%	1.617.423.000	100%	1.617.423.000	100%	1.617.423.000	100%	9.851.755.500	KECAMATAN LINTAU BUO
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	43.921.000	100%	66.400.000	100%	60.200.000	100%	65.200.000	100%	65.200.000	100%	65.200.000	100%	65.200.000	100%	387.400.000	KECAMATAN LINTAU BUO
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	100%	17.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	68.000.000	KECAMATAN LINTAU BUO
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	100%	11.250.000	100%	8.700.000	100%	17.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	22.000.000	100%	113.700.000	KECAMATAN LINTAU BUO
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	216.750.000	100%	185.587.600	100%	155.400.000	100%	160.400.000	100%	160.400.000	100%	160.400.000	100%	160.400.000	100%	982.587.600	KECAMATAN LINTAU BUO

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	100%	86.000.000	100%	43.953.300	100%	45.100.000	100%	50.100.000	100%	50.100.000	100%	50.100.000	100%	50.100.000	100%	289.453.300	KECAMATAN LINTAU BUO
	KECAMATAN SUNGAYANG			**1.590.173.125**		**1.620.711.400**		**1.519.205.000**		**1.544.205.000**		**1.544.205.000**		**1.544.205.000**		**1.544.205.000**		**9.316.736.400**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	1.197.401.925	100%	1.397.401.925	100%	1.279.400.000	100%	1.279.400.000	100%	1.279.400.000	100%	1.279.400.000	100%	1.279.400.000	100%	7.794.401.925	KECAMATAN SUNGAYANG
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	55.740.000	100%	33.599.875	100%	25.400.000	100%	30.400.000	100%	30.400.000	100%	30.400.000	100%	30.400.000	100%	180.599.875	KECAMATAN SUNGAYANG
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	100%	19.000.000	100%	14.000.000	100%	8.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	13.000.000	100%	74.000.000	KECAMATAN SUNGAYANG
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	100%	12.910.000	100%	10.029.925	100%	20.100.000	100%	25.100.000	100%	25.100.000	100%	25.100.000	100%	25.100.000	100%	130.529.925	KECAMATAN SUNGAYANG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	206.991.200	100%	94.499.925	100%	123.005.000	100%	128.005.000	100%	128.005.000	100%	128.005.000	100%	128.005.000	100%	729.524.925	KECAMATAN SUNGAYANG
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	100%	98.130.000	100%	71.179.750	100%	63.300.000	100%	68.300.000	100%	68.300.000	100%	68.300.000	100%	68.300.000	100%	407.679.750	KECAMATAN SUNGAYANG
	KECAMATAN PARIANGAN			**1.944.706.675**		**2.034.314.750**		**2.662.725.000**		**2.687.725.000**		**4.187.725.000**		**1.941.000.000**		**1.941.000.000**		**15.454.489.750**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	1.579.426.675	100%	1.779.426.675	100%	2.376.725.000	100%	2.376.725.000	100%	3.876.725.000	100%	1.630.000.000	100%	1.630.000.000	100%	13.669.601.675	KECAMATAN PARIANGAN
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	46.780.000	100%	59.376.100	100%	51.600.000	100%	56.600.000	100%	56.600.000	100%	56.600.000	100%	56.600.000	100%	337.376.100	KECAMATAN PARIANGAN
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	100%	17.000.000	100%	16.976.200	100%	14.200.000	100%	19.200.000	100%	19.200.000	100%	19.200.000	100%	19.200.000	100%	107.976.200	KECAMATAN PARIANGAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	100%	12.396.000	100%	19.934.400	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	189.934.400	KECAMATAN PARIANGAN
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	212.104.000	100%	100.609.100	100%	128.200.000	100%	133.200.000	100%	133.200.000	100%	133.200.000	100%	133.200.000	100%	761.609.100	KECAMATAN PARIANGAN
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	100%	77.000.000	100%	57.992.275	100%	62.000.000	100%	67.000.000	100%	67.000.000	100%	67.000.000	100%	67.000.000	100%	387.992.275	KECAMATAN PARIANGAN
	KECAMATAN SUNGAI TARAB			**2.047.313.975**		**2.558.764.550**		**1.872.300.000**		**1.897.300.000**		**1.897.300.000**		**1.897.300.000**		**1.897.300.000**		**12.020.264.550**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	1.640.918.975	100%	1.840.918.975	100%	1.586.000.000	100%	1.586.000.000	100%	1.586.000.000	100%	1.586.000.000	100%	1.586.000.000	100%	9.770.918.975	KECAMATAN SUNGAI TARAB
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	69.822.500	100%	468.000.000	100%	45.100.000	100%	50.100.000	100%	50.100.000	100%	50.100.000	100%	50.100.000	100%	713.500.000	KECAMATAN SUNGAI TARAB
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	100%	15.590.000	100%	14.000.000	100%	11.600.000	100%	16.600.000	100%	16.600.000	100%	16.600.000	100%	16.600.000	100%	92.000.000	KECAMATAN SUNGAI TARAB

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	100%	11.870.000	100%	12.000.000	100%	31.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	36.000.000	100%	187.000.000	KECAMATAN SUNGAI TARAB
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	239.414.500	100%	172.345.575	100%	159.000.000	100%	164.000.000	100%	164.000.000	100%	164.000.000	100%	164.000.000	100%	987.345.575	KECAMATAN SUNGAI TARAB
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	100%	69.698.000	100%	51.500.000	100%	39.600.000	100%	44.600.000	100%	44.600.000	100%	44.600.000	100%	44.600.000	100%	269.500.000	KECAMATAN SUNGAI TARAB
	KECAMATAN SALIMPAUNG			**1.949.718.400**		**1.950.382.475**		**1.741.553.000**		**1.766.553.000**		**1.766.553.000**		**1.766.553.000**		**1.766.553.000**		**10.758.147.475**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	1.552.393.400	100%	1.752.393.400	100%	1.507.000.000	100%	1.507.000.000	100%	1.507.000.000	100%	1.507.000.000	100%	1.507.000.000	100%	9.287.393.400	KECAMATAN SALIMPAUNG
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	28.625.000	100%	56.000.000	100%	50.900.000	100%	55.900.000	100%	55.900.000	100%	55.900.000	100%	55.900.000	100%	330.500.000	KECAMATAN SALIMPAUNG

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	100%	18.000.000	100%	15.500.000	100%	14.500.000	100%	19.500.000	100%	19.500.000	100%	19.500.000	100%	19.500.000	100%	108.000.000	KECAMATAN SALIMPAUNG
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	100%	19.120.800	100%	17.300.775	100%	23.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	152.300.775	KECAMATAN SALIMPAUNG
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	239.879.200	100%	62.198.925	100%	104.153.000	100%	109.153.000	100%	109.153.000	100%	109.153.000	100%	109.153.000	100%	602.963.925	KECAMATAN SALIMPAUNG
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	100%	91.700.000	100%	46.989.375	100%	42.000.000	100%	47.000.000	100%	47.000.000	100%	47.000.000	100%	47.000.000	100%	276.989.375	KECAMATAN SALIMPAUNG
	KECAMATAN PADANG GANTING			**1.579.931.150**		**1.675.477.650**		**1.586.000.000**		**1.611.000.000**		**1.611.000.000**		**1.611.000.000**		**1.611.000.000**		**9.705.477.650**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	1.283.100.350	100%	1.483.100.350	100%	1.376.500.000	100%	1.376.500.000	100%	1.376.500.000	100%	1.376.500.000	100%	1.376.500.000	100%	8.365.600.350	KECAMATAN PADANG GANTING

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	49.554.400	100%	38.448.400	100%	30.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	35.000.000	100%	208.448.400	KECAMATAN PADANG GANTING
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	100%	17.500.000	100%	11.494.500	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	81.494.500	KECAMATAN PADANG GANTING
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	100%	23.883.000	100%	14.993.500	100%	20.200.000	100%	25.200.000	100%	25.200.000	100%	25.200.000	100%	25.200.000	100%	135.993.500	KECAMATAN PADANG GANTING
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	123.655.900	100%	82.458.200	100%	111.800.000	100%	116.800.000	100%	116.800.000	100%	116.800.000	100%	116.800.000	100%	661.458.200	KECAMATAN PADANG GANTING
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	100%	82.237.500	100%	44.982.700	100%	37.500.000	100%	42.500.000	100%	42.500.000	100%	42.500.000	100%	42.500.000	100%	252.482.700	KECAMATAN PADANG GANTING
	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA			**1.712.324.630**		**1.629.745.801**		**1.530.300.000**		**1.555.300.000**		**1.555.300.000**		**1.555.300.000**		**1.555.300.000**		**9.381.245.801**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	1.283.100.350	100%	1.382.532.226	100%	1.288.000.000	100%	1.288.000.000	100%	1.288.000.000	100%	1.288.000.000	100%	1.288.000.000	100%	7.822.532.226	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	73.500.000	100%	43.195.125	100%	39.000.000	100%	44.000.000	100%	44.000.000	100%	44.000.000	100%	44.000.000	100%	258.195.125	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	100%	22.000.000	100%	18.499.525	100%	13.100.000	100%	18.100.000	100%	18.100.000	100%	18.100.000	100%	18.100.000	100%	103.999.525	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
7.01.04	Program koordinasi ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	100%	8.532.500	100%	8.517.400	100%	15.300.000	100%	20.300.000	100%	20.300.000	100%	20.300.000	100%	20.300.000	100%	105.017.400	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	227.191.780	100%	86.513.600	100%	105.900.000	100%	110.900.000	100%	110.900.000	100%	110.900.000	100%	110.900.000	100%	636.013.600	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	100%	98.000.000	100%	90.487.925	100%	69.000.000	100%	74.000.000	100%	74.000.000	100%	74.000.000	100%	74.000.000	100%	455.487.925	KECAMATAN LINTAU BUO UTARA
	KECAMATAN TANJUNG BARU					**1.700.777.850**		**1.595.000.000**		**1.620.000.000**		**1.620.000.000**		**1.620.000.000**		**1.620.000.000**		**9.775.777.850**	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	1.283.176.725	100%	1.483.176.725	100%	1.360.000.000	100%	1.360.000.000	100%	1.360.000.000	100%	1.360.000.000	100%	1.360.000.000	100%	8.283.176.725	KECAMATAN TANJUNG BARU
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	120.230.000	100%	42.254.500	100%	37.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	42.000.000	100%	247.254.500	KECAMATAN TANJUNG BARU
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	100%	15.000.000	100%	11.499.875	100%	10.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	81.499.875	KECAMATAN TANJUNG BARU
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	100%	32.086.000	100%	26.534.950	100%	23.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	28.000.000	100%	161.534.950	KECAMATAN TANJUNG BARU
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	191.087.000	100%	96.962.100	100%	132.000.000	100%	137.000.000	100%	137.000.000	100%	137.000.000	100%	137.000.000	100%	776.962.100	KECAMATAN TANJUNG BARU
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	100%	18.000.000	100%	40.349.700	100%	33.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	38.000.000	100%	225.349.700	KECAMATAN TANJUNG BARU

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
	KECAMATAN BATIPUH SELATAN			**1.703.735.531**		**1.887.092.650**		**1.762.000.000**		**1.787.000.000**		**1.787.000.000**		**1.787.000.000**		**1.787.000.000**		**10.797.092.650**	
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	1.468.295.425	100%	1.668.295.425	100%	1.518.000.000	100%	1.518.000.000	100%	1.518.000.000	100%	1.518.000.000	100%	1.518.000.000	100%	9.258.295.425	KECAMATAN BATIPUH SELATAN
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan tata kelola pemerintahan yang baik	100%	36.200.000	100%	30.698.325	100%	26.500.000	100%	31.500.000	100%	31.500.000	100%	31.500.000	100%	31.500.000	100%	183.198.325	KECAMATAN BATIPUH SELATAN
7.01.03	Program Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase kinerja penyelenggaraan Pemerintahan nagari	100%	14.106.706	100%	11.599.850	100%	12.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100%	17.000.000	100%	91.599.850	KECAMATAN BATIPUH SELATAN
7.01.04	Program koordinasi dan ketentramaan dan ketertiban umum	Persentase ketentraman dan ketertiban umum	100%	13.058.000	100%	38.999.925	100%	38.000.000	100%	43.000.000	100%	43.000.000	100%	43.000.000	100%	43.000.000	100%	248.999.925	KECAMATAN BATIPUH SELATAN
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum	100%	90.475.800	100%	66.999.750	100%	99.000.000	100%	104.000.000	100%	104.000.000	100%	104.000.000	100%	104.000.000	100%	581.999.750	KECAMATAN BATIPUH SELATAN

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.06	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan pembinaan dan pengawasan pemeritah desa	100%	81.599.600	100%	70.499.375	100%	68.500.000	100%	73.500.000	100%	73.500.000	100%	73.500.000	100%	73.500.000	100%	432.999.375	KECAMATAN BATIPUH SELATAN
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**			**2.825.191.470**		**3.246.191.470**		**3.009.124.232**		**3.009.124.232**		**14.843.878.953**		**3.009.124.232**		**3.009.124.232**		**30.126.567.351**	
8,01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**					**3.246.191.470**		**3.009.124.232**		**3.009.124.232**		**14.843.878.953**		**3.009.124.232**		**3.009.124.232**		**30.126.567.351**	
8.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan administrasi kantor yang ditata	100%	1.238.777.870	100%	1.338.777.870	100%	1.223.428.320	100%	1.223.428.320	100%	1.223.428.320	100%	1.223.428.320	100%	1.223.428.320	100%	7.455.919.470	KESBANGPOL
8.01.02	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase kesadaran masyarakat terhadap wawasan kebangsaan	100%	109.999.917	100%	159.999.917	100%	104.453.617	100%	104.453.617	100%	104.453.617	100%	104.453.617	100%	104.453.617	100%	682.268.002	KESBANGPOL
8.01.03	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku	100%	818.612.533	100%	868.612.533	100%	847.458.045	100%	847.458.045	100%	12.682.212.766	100%	847.458.045	100%	847.458.045	100%	16.940.657.479	KESBANGPOL

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		OPD Penanggung Jawab
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
8.01.04	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan yang berlaku	100%	7.999.725	100%	14.999.725	100%	3.153.600	100%	3.153.600	100%	3.153.600	100%	3.153.600	100%	3.153.600	100%	30.767.725	KESBANGPOL
8.01.05	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase kesadaran masyarakat terhadap bahaya narkoba dan penyakit masyarakat	100%	102.801.775	100%	116.801.775	100%	99.596.200	100%	99.596.200	100%	99.596.200	100%	99.596.200	100%	99.596.200	100%	614.782.775	KESBANGPOL
8.01.06	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase keamanan dan kenyamanan lingkungan	100%	546.999.650	100%	746.999.650	100%	731.034.450	100%	731.034.450	100%	731.034.450	100%	731.034.450	100%	731.034.450	100%	4.402.171.900	KESBANGPOL
	JUMLAH			**917.708.177.238**		**1.326.015.590.954**		**1.415.891.789.180**		**1.454.652.189.716**		**1.492.451.106.000**		**1.550.621.636.859**		**1.605.565.796.901**		**8.845.198.109.610**	

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari program/kegiatan yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Tujuan penetapan IKU yaitu untuk :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dalam penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berpedoman kepada indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Periode 2021-2026 tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun kedepan menurut tujuan dan sasaran pada setiap Misi yang disajikan dalam Tabel 8.1:

Tabel 8.1
Indikator Kinerja Utama Pembangunan Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Misi I : Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya							
1.	Jumlah hafiz/hafizah yang diwisuda	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
2.	Jumlah peningkatan nilai zakat yang diterima oleh badan amil zakat	10.685.646.919	10.899.359.857	11.113.072.796	11.326.785.734	11.540.498.673	11.754.211.611	11.967.924.549
3.	Persentase peningkatan lembaga adat dan budaya yang aktif	56,88%	61,59%	66,30%	71,01%	75,72%	80,43%	85,14%
	Misi II : Meningkatkan ekonomi masyarakat Kabupaten Tanah Datar dan perluasan lapangan kerja yang berbasis pertanian, industri dan UMKM							
1.	PDRB Per Kapita (ADHB)	35,05	38,18	40,26	42,46	45,33	47,69	50,69
2.	Angka Pengangguran	4,79	4,68	4,63	4,54	4,45	4,34	4,22
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	-1,13	1,44	2,42	4	4,29	4,38	4,57
4.	Kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap PDRB	29,81	29,96%	30,10%	30,13%	30,19%	30,22%	30,35%
5.	Nilai Tukar Petani/ NTP	-	<100	<100	=100	>100	>100	>100
6.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	10,48	11,26%	11,33%	11,38%	11,40%	11,46%	11,51%
7.	Kontribusi Sektor perdagangan terhadap PDRB	13,35	13,74%	13,79%	13,85%	13,95%	14,02%	14,08%
8.	Jumlah wirausahawan baru	-	-	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	Misi III :Meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.							
1.	Indeks Pembangunan Manusia	72,33	73,03	73,72	74,45	75,19	75,95	76,59

No	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
2.	Rata-rata lama sekolah	8,61	8,70	8,80	8,90	9,00	9,10	9,20
3.	Umur harapan hidup	69,94	70,23	70,50	70,78	71,05	71,33	71,60
4.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	17,8	17,2	17,1	17	16,8	16,6	16,5
5.	Angka Kemiskinan	4,40	4,44	4,32	4,19	4,06	3,93	3,79
6.	IDG	97,57	98,00	98,00	98,00	98,1	98,1	98,1
7.	IPG	98,79	98,82	98,82	98,90	98,90	98,91	98,92
	Misi IV : Pembangunan pariwisata berkelanjutan yang berbasis adat, budaya dan sumberdaya alam							
1.	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,71	0,80	0,80	0,95	1,10	1,25	1,40
2.	Jumlah Kunjungan Wisatawan	845,780	669,069	769,976	861,253	990,441	1,188,529	1,485,661
3.	Lama Tinggal Wisatawan	1 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	3 hari	3 hari
	Misi V : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien							
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	62,32	65,6	68,88	71,16	74,44	77,5	81,00
2.	Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	Indeks Pengawasan Kearsipan	70,29 (BB)	75 (BB)	80 (BB)	83 (B)	85 (A)	90 (A)	95 (AA)
4.	Manajemen resiko level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
5.	Nilai SAKIP	64,26	67	69	71	75	79	80
6.	Indeks SPBE	0,8	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
7.	Indeks profesionalitas ASN	71,06	73,00	75,00	77,00	79,00	81,00	83
8.	Skor dan status kinerja pemerintah daerah	3,00	3,05	3,25	3,50	3,75	3,100	3,125
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,39	88,39	89,39	90,39	91,39	92,39	92,39

No	Indikator	Kondisi Awal		Target Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Misi VI: Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkelanjutan							
1.	Persentase Infrastruktur Wilayah yang Berkualitas	74,55	75,14	74,86	75,87	76,78	77,71	78,01
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	67,59	67,61	68,01	68,41	68,81	69,21	69,61
3.	Persentase Bencana yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Daerah Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan *(outcome)* atau kompositnya *(impact)*. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian Indikator Kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode Tahun 2021-2026 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Selanjutnya indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi sosial. Aspek Pelayanan Umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Tanah Datar tersebut secara rinci disajikan pada Tabel 8.2.

Tabel 8-2
Indikator Kinerja Daerah Sebagai Indikator Sasaran Pembangunan
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 (Permendagri No 18/2020)

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun)		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A.	**INDIKATOR KINERJA MAKRO**									
1.	Pertumbuhan PDRB/LPE	-1,13	1,44	2,42	4,00	4,29	4,38	4,58	4,58	BPS
2.	PDRB menurut lapangan usaha ADHB	13.027.340,94	13.510.987,72	14.065.422,34	14.864.043,97	15.747.713,51	16.694.780,37	17.726.747,01	17.726.747,01	BPS
3.	Indeks Gini	0,273	0,270	0,268	0,263	0,258	0,252	0,244	0,244	BPS
4.	Persentase penduduk di atas garis kemiskinan	95,60	95,56	95,68	95,81	95,94	96,07	96,21	96,21	BPS
5.	Indeks Pembangunan Manusia	72,33	73,03	73,72	74,45	75,19	75,95	76,59	76,59	BPS
6.	Angka rata-rata lama sekolah	8,61	8,72	8,84	8,95	9,06	9,18	9,29	9,29	BPS
7.	Angka/Usia harapan hidup	69,94	70,23	70,50	70,78	71,05	71,33	71,60	71,60	BPS
8.	Harapan Lama Sekolah	14,33	14,68	14,93	15,18	15,44	15,69	15,94	15,94	BPS
9.	Pengeluaran per kapita (ribu)	10.588	10.718	10.769	10.958	11.188	11.435	11.703	11.703	BPS
B.	**INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH**									
I.	**LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR**									
1	**Urusan Pendidikan**									
a.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	75,20	100	100	100	100	100	100	100	Dikbud

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun)		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
b.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100	100	100	100	100	100	100	100	Dikbud
c.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	97,70	100	100	100	100	100	100	100	Dikbud
d.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100	100	100	100	100	100	100	100	Dikbud
2	**Urusan Kesehatan**									
a.	Rasio daya tampung RS Rujukan	0,08	1	1	1	1	1	1	1	Dinkes
b.	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
c.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
d.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
e.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
f.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
g.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
h.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
i.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun)		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
j.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
k.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
l.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
m.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
n.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinkes
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**									
a.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	56,06	58,89	61,88	64,88	67,87	70,86	73,85	73,85	PUPRP
b.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	72,23	75	80	85	90	95	100	100	PUPRP
c.	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	75,14	76,64	77,98	80,08	82,28	84,58	86,38	86,38	PUPRP
d.	Tingkat kemantapan jalan kabupaten	76,67	77,40	78,73	80,06	81,39	82,72	84,05	84,05	PUPRP
4.	**Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman**									
a.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	80	80	80	80	80	80	80	Perkim LH
b.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	98,58	91,19	38,06	39,09	40,00	41,00	42,00	42,00	Perkim LH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun)		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
c.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	0,78	0,42	0,44	0,46	0,49	0,51	0,54	0,54	Perkim LH
5.	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**									
a.	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP Damkar
b.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	71,43	85	90	90	90	95	100	100	Satpol PP Damkar
c.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
d.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
e.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	BPBD
f.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	91,04	90	90	95	95	95	100	100	Satpol PP Damkar
6	**Sosial**									
a.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos P3A
b.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada	100	100	100	100	100	100	100	100	Dinsos P3A

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun)		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten									
II.	**LAYANAN URUSAN WAJIB NON DASAR**									
1.	**Urusan Ketenagakerjaan**									
a.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	61,22	62,54	63	64,5	65	66,2	67	67	PMPTSP Naker
b.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,01	0,21	0,25	0,27	0,3	0,32	0,35	0,35	PMPTSP Naker
c.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3743,809	4304,619	4305,179	4865,989	5426,799	5987,609	6548,419	6548,419	PMPTSP Naker
d.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	2,97	4,46	5,95	6,01	7,44	8,9	9,3	9,3	PMPTSP Naker
e.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	9,14	10	10,5	11	11,5	12	12,5	12,5	PMPTSP Naker
2.	**Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**									
a.	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	14,15%	15%	15%	15%	15,15%	15,15%	15,15%	15,15%	Dinsos P3A
b.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinsos P3A

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun)		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
c.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0079%	0.0080%	0.0081%	0.0083%	0.0085%	0.0085%	0.0085%	0.0085%	Dinsos P3A
3.	**Urusan Pangan**									
a.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	464,45	442,83	442,83	442,83	442,83	442,83	442,83	442,83	Pangan Perikanan
4.	**Urusan Pertanahan**									
a.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100	100	100	100	100	100	100	100	PUPRP
5.	**Urusan Lingkungan Hidup**									
a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten									
	- Air	52,00	55,79	55,89	55,99	56,09	56,19	56,29	56,29	Perkim LH
	- Udara	89,84	85,57	85,67	85,77	85,87	85,97	86,97	86,97	Perkim LH
	- Tutupan lahan	53,23	54,69	56,15	57,61	59,07	60,53	61,99	61,99	Perkim LH
b.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten	52,86	54,00	56,00	58,00	60,00	62,00	62,00	62,00	Perkim LH
c.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	46,67	47,83	48,94	50	50,98	51,92	51,92	51,92	Perkim LH

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun)		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6.	**Urusan Pemberdayaan masyarakat dan desa**									
a.	Persentase pengentasan desa tertinggal	10	17	24	32	39	46	53	53	PMD PPKB
b.	Persentase peningkatan status desa mandiri	13,32	22,72	32	42,72	52	61,3	70,72	70,72	PMD PPKB
7.	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**									
a.	Perekaman KTP Elektronik	95,13	100	100	100	100	100	100	100	Dukcapil
b.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	23,84	30	40	50	60	80	100	100	Dukcapil
c.	Kepemilikan akta kelahiran	94,29	100	100	100	100	100	100	100	Dukcapil
d.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	5	16	25	30	38	38	38	38	Dukcapil
8.	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**									
a.	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,62	2,57	2,53	2,5	2,48	2,46	2,44	2,44	PMD PPKB
b.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	70,73	70,69	70,74	70,79	70,84	70,89	70,94	70,94	PMD PPKB
c.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	14,63	14,63	13,88	13,13	12,38	11,63	10,88	10,88	PMD PPKB
9.	**Urusan Perhubungan**									
a.	Rasio konektivitas Kabupaten	61,11	61,11	61,11	66,66	66,66	72,22	77,77	77,77	Dishub

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun)		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
b.	V/C Ratio di jalan Kabupaten	13,72	14,17	14,73	15,32	15,93	16,57	17,23	17,23	Dishub
10.	**Urusan Komunikasi**									
a.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	70	70	75	80	85	87	90	90	Kominfo
b.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	30	50	55	60	70	75	80	80	Kominfo
c.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	94,6	Kominfo
11.	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**									
a.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	51,11	51,33	51,54	51,75	51,98	52,28	52,65	52,65	Koperindag
b.	Meningkatnya Usaha kecil yang menjadi wirasausaha	0.312	0.416	0.52	0.624	0.728	0.833	0.937	0.937	Koperindag
12.	**Urusan Penanaman Modal**									
a.	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	10,93	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50	PMPTSP Naker
13.	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**									
a.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	0,04	0,05	0,06	0,07	0,09	0,10	0,12	0,12	Parpora
b.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	1,70	1,72	1,75	1,80	1,85	1,91	1,99	1,99	Parpora

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun)		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
c.	Peningkatan prestasi olahraga	0	12 % 5 cabor	61% 24 cabor	25% 10 cabor	76% 30 cabor	38% 15 cabor	82% 32 cabor	82% 32 cabor	Parpora
14.	**Urusan Statistik**									
a.	Presentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	Kominfo
b.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	Kominfo
15.	**Urusan Persandian**									
a.	Tingkat keamanan informasi pemerintah kabupaten	20,00	30	40	50	60	70	80	80	Kominfo
16.	**Urusan Kebudayaan**									
a.	Terlestarikannya Cagar Budaya	26,06	26,06	33,1	40,14	47,18	54,22	58,27	58,27	Dikbud
17.	**Urusan Perpustakaan**									
a.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (nilai)	n/a	8,98%	9,00%	10%	11%	12%	13%	13%	Perpustakaan dan Kearsipan
18.	**Urusan Kearsipan**									
a.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	27,5%	28,5%	30%	32%	35%	37,5%	40%	40%	Perpustakaan dan Kearsipan
b.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap	3,28%	4,5%	5%	7,5%	10%	12%	15%	15%	Perpustakaan dan Kearsipan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun)		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat									
III.	**Urusan Layanan Pilihan**									
1.	**Urusan Kelautan Perikanan**									
a.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten di (sumber data: one data KKP)	12.209. 29 ton	12.153,31 ton	12.560,51 ton	12.687,27 ton	12.807, 20 ton	12.933, 69 ton	13.052, 11 ton	13.052,11 ton	Pangan Perikanan
2.	**Urusan Pariwisata**									
a.	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	-0,77	0,99%	2,00%	2,00%	2,00%	1,99%	2,00%	2,00%	Parpora
b.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	-0,44	5,00%	8,00%	13,00%	17,99%	23,00%	27,99%	27,99%	Parpora
c.	Tingkat hunian akomodasi	44,29	1 malam	1 malam	2 malam	2 malam	2 malam	2 malam	2 malam	Parpora
d.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	0,71	0,80%	0,80%	0,95%	1,10%	1,25%	1,40%	1,40%	Parpora
e.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	2.638.475.000	2.770.399.000	3.047.439.000	3.504.554.000	4.205.465.000	5.236.832.000	6.833.881.000	6.833.881.000	Parpora
3.	**Urusan Pertanian**									
a.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,70	5,70	5,71	5,73	5,74	5,75	5,77	5,77	Pertanian

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun)		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
b.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	10,2	10,2	10,3	10,4	10,5	10,6	10,7	10,7	Pertanian
4.	**Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**									
a.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kabupaten	100	0	0	25	50	75	100	100	Koperindag
5.	**Urusan Perdagangan**									
a.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	1,06	5	10	12	17	20	25	25	Koperindag
b.	Persentase kinerja realisasi pupuk	30,13	31	31	32	33	34	35	35	Koperindag
c.	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	4,70	3,35	10,06	10,7	12,07	14,76	16,1	16,1	Koperindag
6.	**Urusan Perindustrian**									
a.	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	5,03	0,02	1,2	1,18	1,17	1,16	1,15	1,15	Koperindag
b.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	32,50	50	60	65	70	75	80	80	Koperindag
c.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	60	6	6	6	6	6	6	6	Koperindag
IV.	**Fungsi Penunjang**									
1.	**Perencanaan dan Keuangan**									

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun)		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
a.	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	31,42	33,89	36,56	39,43	42,53	45,88	49,49	49,49	BKD
b.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	3,24	Inspektorat
c.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
d.	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BKD
2.	**Pengadaan**									
a.	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	65	68	80	100	120	130	140	140	Bagian PBJ Setda
b.	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	31,53	28,83	32	34	36	38	40	40	Bagian PBJ Setda
3.	**Kepegawaian**									
a.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	7,01	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,50	8,50	BKPSDM
b.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,06	0,08	0,10	0,12	0,14	0,16	0,18	0,18	BKPSDM
c.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	4,68	5,00	5,25	5,50	5,75	6,00	6,15	6,15	BKPSDM
3.	**Manajemen Keuangan**									
a.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-99,07	-98,29	-97,51	-96,74	-95,98	-95,22	-94,47	-94,47	BKD
b.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-99,01	-100,54	-102,11	-103,69	-105,30	-106,94	-108,60	-108,60	BKD
c.	Assets management	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	BKD
d.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja	4,76	4,42	4,10	3,81	3,5	3,28	3,05	3,05	BKD

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (Tahun)		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Sumber Data
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	dalam APBD tahun sebelumnya									
3.	**Transparansi dan Partisipasi Publik**									
a.	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	84,48	82,75	83,44	84,48	84,48	84,48	84,48	84,48	Kominfo

BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan penjabaran periode terakhir RJPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2005-2025 sebagai upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta melaksanakan program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar 2021-2026 maka ditetapkanlah kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

a. RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 merupakan perencanaan pembangunan lima tahunan di Kabupaten Tanah Datar yang akan dijabarkan menjadi rencana pembangunan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
b. RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Renstra yang mengatur perencanaan pembangunan lima tahunan Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).
c. RPJMD harus benar-benar diperhatikan, dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di berbagai aspek, karena setiap ketidaksesuaian baik yang menyangkut kebijakan maupun pelaksanaannya dapat dinyatakan sebagai ketidakpatuhan bahkan pelanggaran.
d. Dalam pelaksanaan program/kegiatan selain menggunakan anggaran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dapat pula menggunakan anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, skema kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *corporate social responsibility* (CSR), hibah/bantuan dalam dan luar negeri, serta swadaya masyarakat dan/atau sumber-sumber lain yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
e. Apabila terjadi perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah maka struktur/kelembagaan baru tersebut harus menyesuaikan antara Urusan Pemerintahan yang diampunya dengan Urusan Pemerintahan yang tercantum dalam RPJMD ini dan harus melalui perubahan Renstra.
f. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan program/kegiatan dalam Renstra/Renja serta konsistensinya dengan RPJMD dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
g. RPJMD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026 dimungkinkan diubah apabila hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan; hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan terjadi perubahan yang mendasar seperti terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional.

Dipindai dengan CamScanner

Dalam rangka menjamin pelaksanaan RPJMD diperlukan penjabaran secara teknis dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disusun dan ditetapkan dengan periodesasi 2021-2026. Untuk pelaksanaan tahunan dilakukan 5 (lima) tahapan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah secara berkesinambungan.

BUPATI TANAH DATAR

ttd.

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. TANAH DATAR, √

VORRY RAHMAD, SH
NIP.19820626 200501 1 008

Dipindai dengan CamScanner